



Muhammad Wahyuddin Abdullah

AKUNTANSI SYARIAH

Isu, Konsep, dan Refleksi

Muhammad Wahyuddin Abdullah

Akuntansi Syariah

Isu, Konsep, dan Refleksi

Hak Cipta Dilindungi Undang Undang :
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau
seluruh isi buku ini ke dalam bentuk apapun tanpa izin
tertulis dari penerbit.

All Rights Reserved

AKUNTANSI SYARIAH

Isu, Konsep, dan Refleksi

Penulis:

Muhammad Wahyuddin Abdullah

Editor:

Tiara Insani Arsyad

Layout:

Mutmainnah

Cetakan Pertama Tahun 2020
x + 269 halaman, 15.5 cm x 23 cm
ISBN: 978-623-226-157-0



Pusaka AlMaida

Jalan Tun Abdul Razak 1, Pao-Pao Permai, G5/18 Gowa

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji bagi Allâh Rabbul Alamin atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Shalawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw beserta keluarga, sahabat, dan para pengikut-pengikut ajarannya. Buku ini berjudul Akuntansi Syariah Isu, Konsep, dan Refleksi merupakan kilasan ideal yang dibutuhkan dalam menjawab persoalan akuntansi yang selama ini terkucilkan. Keluasan dan kekinian pemahaman atas akuntansi berbasis syariah akan memberikan nilai tambah kesyariahan atau kemaslahatan dan semakin mendekatkan manusia (pelaku bisnis) kepada Allah swt.

Akuntansi konvensional semakin menyisahkan celah-celah ketidakrelevansiannya dalam menjelaskan fenomena perakuntansian di tengah-tengah masyarakat. Banyak hal yang dipandang tidak sesuai lagi dengan kebutuhan praktik akuntansi dan bisnis di mana akuntansi itu dipraktikkan. Masyarakat *stakeholder* yang memahami ajaran keislaman atau syariat Islam, menganggap bahwa praktik-praktik akuntansi yang dilahirkan dari konsep-konsep akuntansi ‘konvensional’ tidak memberikan nilai tambah dalam bentuk kemaslahatan, hanya berorientasi pada profit, atau materi saja.

Tidak bisa dipungkiri, perjalanan pengembangan akuntansi ‘mainstream’ berawal dari peradaban barat. Namun, kajian sejarah akuntansi syariah membantah bahwa jauh sebelum Luca Pacioli tahun 1494M, peradaban Islam telah memberikan kontribusi yang besar dalam perakuntansian. Penggunaan angka arab mempunyai andil dalam perkembangan ilmu akuntansi. Teknik tata buku berpasangan di Eropa tahun 1135M menunjukkan dominasi pengaruh pencatatan pembukuan arab. Dengan demikian, peradaban Arab memberikan kontribusi yang besar bagi

pengembangan akuntansi, termasuk metode pencatatan akuntansi.

Terputusnya pengembangan akuntansi yang berbasis keislaman tersebut, membuka ruang bagi akuntansi yang berparadigma 'lain' memasukkan 'doktrin atau ideologi' tertentu, untuk mencapai misi kebesarannya, yaitu '*capitalism*'. Akuntansi berkembang membawa faktor lingkungan (sosial, budaya, politik, dan hukum), dan akan mempengaruhi lingkungannya di mana akuntansi itu dipraktikkan. Hal inilah yang membuat dan memunculkan permasalahan akuntansi yang tidak mampu terselesaikan dengan baik, karena akuntansi konvensional memaksakan doktrinnya pada lingkungan yang sudah kuat peradaban keislamannya.

Secara implisit, dan tentunya secara alamiah, praktik-praktik akuntansi Islam di tengah-tengah masyarakat telah terwarisi secara turun temurun, bahkan dipraktikkan secara tradisi, tidak menghiraukan regulasi 'kekinian'. Uniknya lagi, praktik-praktik itu tidak mampu dijelaskan dengan konsep atau teori-teori tertentu. Dengan demikian, buku ini memberikan secuil pemahaman tentang praktik-praktik akuntansi yang didasarkan pada konsep keislaman. Praktik-praktik akuntansi itu sudah berlangsung lama di pelosok masyarakat, menjadi isu untuk dimainstreamkan, dan membutuhkan konvensi untuk diregulasikan.

Kajian buku ini juga tidak lepas dari perspektif kritik pelaksanaan akuntansi syariah pada entitas tertentu, yang sudah melabelkan kesyariahan regulasinya. Buku ini banyak merujuk dari berbagai referensi primer atau artikel ilmiah dan dibingkai dengan konsep-konsep keislaman, seperti *Syariah Enterprise Theory*, *maqasid syariah*, masalah, amanah, keadilan, kebenaran, kepatuhan, dan nilai spiritual lainnya, sehingga mempunyai kekuatan membangun akuntansi syariah yang komprehensif. Kondisi yang dinarasikan atau ramuan *logical reasoning* dalam bahasan buku ini, merupakan refleksi atas realitas saat ini.

Buku ini lahir dari buah pikir dan perdebatan-perdebatan kecil mahasiswa yang mengikuti perkuliahan mata kuliah seminar akuntansi dan metodologi penelitian pada Program Studi Akuntansi UIN Alauddin. Pikiran konstruktif untuk menembus tameng kokohnya akuntansi 'mainstream' tidaklah gampang, membutuhkan perenungan yang tidak hanya melibatkan akal rasionalitas, tetapi membutuhkan hasil kerja intuitif. Terima kasih kepada mahasiswa-mahasiswa yang telah berkontribusi, yang tidak disebutkan satu persatu dalam pengantar ini. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu merealisasikan buku ini. Buku ini jauh dari ideal dan kesempurnaannya, saran-saran konstruktif senantiasa dibutuhkan untuk menyempurnakannya.

Makassar, 19 April 2020

Penulis,

Muhammad Wahyuddin Abdullah

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
1. AKUNTANSI WAKAF: MENCAPAI KEMASLAHATAN UMAT.....	1
A. Pendahuluan	1
B. Syariah <i>Enterprise Theory</i>	3
C. Konsep Wakaf	4
D. <i>Maqhasid Syariah</i>	7
E. Akuntansi Wakaf.....	9
F. Pengelolaan dan Pengaturan Akuntansi Wakaf Berdasarkan Syariat Islam	11
G. Akuntansi Wakaf dalam Mencapai Kemaslahatan Umat.....	13
H. Simpulan.....	15
Daftar Pustaka.....	17
2. KETIDAKHALALAN MARK UP MURABAHAH	21
A. Pendahuluan	21
B. Syariah <i>Enterprise Theory</i>	24
C. Konsep Murabahah	25
D. <i>Murabahah</i> Sebagai Produk Pembiayaan Bank Syariah	27
E. Pembiayaan <i>Murabahah</i> dalam Perbankan Syariah	28
F. Halal Haramnya Penambahan <i>Mark Up Murabahah</i> Ditinjau dari Aspek Syariah.....	31
G. Simpulan.....	33
Daftar Pustaka.....	35
3. PRINSIP KEADILAN DALAM BAGI HASIL MUDHARABAH	41
A. Pendahuluan	41
B. Syariah <i>Enterprise Theory</i>	43
C. Teori Bagi Hasil	44
D. Konsep Keadilan dan <i>Maslahah</i>	45
E. Konsep <i>Mudharabah</i>	48

F. Nilai Keadilan dalam Sistem Bagi Hasil <i>Mudharabah</i>	51
G. Sistem Bagi Hasil dalam Mewujudkan Kemaslahatan Umat.....	54
H. Simpulan.....	55
Daftar Pustaka	57
4. AKTUALISASI SHARIAH COMPLIANCE PADA PRAKTIK MUDHARABAH.....	61
A. Pendahulun	61
B. Konsep <i>Shariah Compliance</i>	64
C. Akuntansi <i>Mudharabah</i>	65
D. Bagi Hasil.....	67
E. Intensi Akuntan Menerapkan <i>Shariah Compliance</i> sebagai Instrumen PertanggungJawaban.....	69
F. Penyajian Praktik Akuntansi pada Akad <i>Mudharabah</i>	71
G. Simpulan.....	73
Daftar Pustaka	75
5. REORIENTASI ARAH DISTRIBUSI ZAKAT	79
A. Pendahuluan	79
B. <i>Syariah Enterprise Theory</i>	82
C. <i>Maqashid Syariah</i>	83
D. Zakat	84
E. Pendistribusian Zakat	85
F. Distribusi Zakat dalam Mempersempit Jurang Ketimpangan.....	89
G. Distribusi Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat	90
H. Simpulan.....	92
Daftar Pustaka	94
6. AKUNTANSI ZAKAT : PERSPEKTIF METAFORA AMANAH.....	99
A. Pendahuluan	99
B. <i>Syariah Enterprise Theory</i>	102
C. Konsep Metafora Amanah	103
D. Zakat, Infaq, dan Sedekah	104
E. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas pada Badan Amil Zakat	105

F. Cerminan Amanah Sebagai Spiritual Pengelolaan Zakat	107
G. Organisasi Pengelola Zakat	109
H. Simpulan	109
Daftar Pustaka	111
7. INTERNALISASI <i>FINTech</i> SYARIAH DALAM MEWUJUDKAN KEMASLAHATAN UMAT.....	113
A. Pendahuluan	113
B. <i>Syariah Enterprise Theory</i>	116
C. Konsep <i>Maslahah</i>	117
D. <i>Fintech</i> Syariah	118
E. Nilai-Nilai Keadilan dalam Penerapan <i>Fintech</i> Syariah	121
F. <i>Fintech</i> Syariah dalam Mewujudkan Kemaslahatan Umat.....	122
G. Simpulan	123
Daftar Pustaka	125
8. SISI PENYAJIAN WAJAR DALAM LAPORAN KEUANGAN: PERSPEKTIF SYARIAH.....	129
A. Pendahuluan	129
B. Konsep Kebenaran	132
C. Akuntansi Syariah	133
D. Makna Wajar dalam Laporan Keuangan yang terdapat pada PSAK 101.....	136
E. Makna Benar dalam Laporan Keuangan yang terdapat pada Surah al-Baqarah Ayat 282	137
F. Makna Wajar dan Benar dalam Laporan Keuangan	138
G. Simpulan.....	140
Daftar Pustaka.....	143
9. INTERNALISASI NILAI RELIGIUS DALAM KINERJA AKUNTAN	147
A. Pendahuluan	147
B. <i>Syariah Enterprise Theory</i>	150
C. Konsep Nilai Religius	151
D. Kualitas Laporan Keuangan	152
E. Audit Syariah	154
F. Lembaga Keuangan Syariah	156

G.	Religiusitas pada Kinerja Akuntan dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan	157
H.	Simpulan.....	159
	Daftar Pustaka.....	161
10.	SHOULD ISLAMIC ACCOUNTING STANDARD FOLLOW TO IFRS	167
A.	Pendahuluan	167
B.	IFRS (<i>International Financial Reporting Standard</i>)	171
C.	<i>Islamic Accounting standards</i>	175
D.	Konvergensi Akuntansi Syariah terhadap IFRS	177
E.	Pendekatan Nilai-Nilai Keislaman dalam Konvergensi IFRS	184
F.	Implementasi di Indonesia dan Negara Islam Lainnya	188
G.	Simpulan	193
	Daftar Pustaka	195
11.	PENGUKURAN KINERJA KEUANGAN BERBASIS MSI	199
A.	Pendahuluan	199
B.	<i>Shariah Enterprise Theory</i>	201
C.	Konsep <i>Maqashid Syariah</i>	202
D.	Pengukuran Kinerja Keuangan Berbasis <i>Maqasid al-Shari'ah</i>	205
E.	Simpulan.....	210
	Daftar Pustaka.....	212
12.	TAX AMNESTY MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK: PERSPEKTIF SYARIAH.....	215
A.	Pendahuluan	215
B.	<i>Shari'ah Enterprise Theory</i>	217
C.	Konsep Keadilan dan Kepatuhan	219
D.	Teori Perilaku.....	221
E.	Pajak dan <i>Tax Amnesty</i>	223
F.	Hubungan Perilaku <i>Tax Amnesty</i> dengan Penerimaan Pajak	225
G.	Konsep Kepatuhan dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak	226
H.	Teori Keadilan pada <i>Tax Amnesty</i>	228

I. Simpulan.....	229
Daftar Pustaka.....	231
13. SISTEM ICG DAN SHARIAH COMPLIANCE DALAM MENCEGAH FRAUD	235
A. Pendahuluan	235
B. <i>Syariah Enterprise Theory</i>	239
C. Kepatuhan Syariah (<i>Shariah Compliance Theory</i>).....	241
D. Konsep <i>Islamic Corporate Governance</i>	242
E. <i>Fraud</i> (Kecurangan)	244
F. <i>Islamic Shariah Governanced dan Shariah Compliance dalam Mencegah Fraud</i>	245
G. Simpulan.....	247
Daftar Pustaka.....	249
14. SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS) DALAM BINGKAI MAQASHID AL-SYARIAH.....	253
A. Pendahuluan	253
B. <i>Maqashid Al-Syariah dan Masalahah</i> (Kemaslahatan)	255
C. <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs)	258
D. Interkoneksi Tiga Pilar Utama SDGs	260
E. Membangun SDGs dengan Penguatan <i>Maqashid Al-Syariah</i>	262
F. <i>Maqashid Al-Syariah</i> sebagai Jembatan Tiga Pilar Utama SDGs	263
G. Simpulan.....	265
Daftar Pustaka.....	266
RIWAYAT HIDUP PENULIS	269

AKUNTANSI WAKAF: MENCAPAI KEMASLAHATAN UMAT

A. Pendahuluan

Islam sebagai agama *rahmatan lil alamin* memiliki ajaran yang sangat lengkap dan komprehensif. Islam telah memiliki konsep dan solusi, salah satunya mengenai masalah sosial ekonomi yang akan dialami oleh manusia (Hidayat, 2018). Islam sebagai agama yang sempurna berpedoman kepada al-Qur'an dan hadis yang telah memberikan manfaat yang nyata kepada umat yaitu dalam hal ibadah. Kesempurnaan Islam dapat dilihat ketika kita berbicara mengenai hubungan antara Allah dan makhluk-Nya serta hubungan antara makhluk Allah sehingga tidak terjadi kesenjangan sosial antara yang satu dengan yang lainnya. Universalitas Islam menuntut terealisasinya syariat secara *holisme*. Artinya bahwa Islam memiliki pandangan yang luas, menyeluruh, utuh dalam satu kesatuan. Pada dasarnya syariat Islam telah menawarkan beberapa instrumen alternatif dalam pemberdayaan sosial ekonomi seperti zakat, infaq, sedekah, dan wakaf (Lestari, 2017; Wulandari dkk., 2019). Zakat dan wakaf merupakan instrumen ekonomi Islam yang perlu dikembangkan dalam membiayai kepentingan umat, terutama dalam pengembangan sosial ekonomi (Munir, 2013).

Menurut Nurhidayati dkk. (2019) wakaf adalah salah satu instrumen dalam Islam yang sangat potensial untuk dijadikan strategi pengentasan kemiskinan dan kesenjangan sosial. Wakaf dilihat dari proses pembentukan hukumnya ternyata mengandung dimensi sosial yang sangat diprioritaskan. Dari sudut inilah kiranya diperlukan reinterpretasi masyarakat muslim terkait konsep wakaf (Muhtar, 2015). Jika wakaf dikelola dengan baik, maka wakaf akan berperan besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial sebuah negara.

Menurut Huda dkk. (2014) wakaf berperan dalam pembangunan ekonomi secara langsung. Wakaf telah menjadi salah satu alternatif pendistribusian kekayaan guna mencapai pembangunan ekonomi. Hal tersebut karena wakaf memainkan peranan penting untuk menyediakan sarana pendidikan, kesehatan, sarana ibadah, serta fasilitas umum lainnya. Huda dkk. (2014) menjelaskan bahwa masih banyak masalah-masalah yang dihadapi dalam pengelolaan tanah-tanah wakaf secara produktif. Disamping itu, pengetahuan dan pemahaman nazhir terhadap peraturan perwakafan masih kurang. Dengan kondisi seperti ini, tanah-tanah wakaf agak sulit untuk dikelola secara produktif sesuai dengan ketentuan hukum Islam maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena para nazhir kurang profesional dan kesulitan dana untuk biaya pengelolaannya. Padahal, harta benda wakaf jika dikelola dan dikembangkan secara produktif dapat diperuntukkan sebagai salah satu alternatif untuk membantu menanggulangi kemiskinan.

Menurut Mulyasari (2017) model sistem akuntansi wakaf berguna mengembangkan sistem akuntansi pertanggungjawaban harta wakaf dengan melihat dari aspek organisasi maupun pencatatan laporan akuntansi. Secara umum PSAK 112 mengatur tentang perlakuan akuntansi atas transaksi wakaf yang dilakukan baik oleh nazhir maupun wakif yang berbentuk organisasi dan badan hukum. PSAK 112 dapat juga diterapkan oleh nazhir perorangan. Pengelolaan dan pengembangan wakaf merupakan suatu entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan tersendiri dan tidak dikonsolidasikan ke laporan keuangan organisasi atau badan hukum dari nazhir. Laporan keuangan entitas wakaf tidak mengkonsolidasi laporan keuangan entitas anaknya. Laporan keuangan entitas wakaf yang lengkap meliputi laporan posisi keuangan, laporan rincian aset wakaf, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Dasar pengakuan aset wakaf adalah akta ikrar wakaf, dimana wasiat wakaf dan janji wakaf belum memenuhi kriteria pengakuan aset wakaf. Wakaf temporer merupakan *liabilitas* yang wajib dikembalikan ke wakif masa mendatang. Dasar pengakuan atas penyaluran manfaat wakaf adalah diterimanya manfaat wakaf tersebut oleh *mauquf alaih*. Sementara dasar imbalan nazhir adalah hasil neto pengelolaan dan pengembangan aset akaf yang

telah direalisasi dalam bentuk kas (*cash basis*). Pengukuran aset wakaf yang diterima dari wakif adalah nilai nominal untuk kas dan nilai wakaf untuk aset non kas. Wakif mengakui penyerahan aset wakaf sebagai beban dalam laba rugi, kecuali wakaf temporer yang tetap dicatat sebagai aset wakif dan disajikan sebagai aset yang dibatasi penggunaannya. Pencatatan akuntansi sangat perlu dilakukan karena sebagai informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan atas wakaf, sehingga dapat dijadikan sumber pemanfaatan wakaf yang berperan dalam penciptaan kesejahteraan umat yang kemudian dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh pemangku kepentingan atas wakaf yang dikelolanya. Profesionalisme dalam pengelolaan harta wakaf memberikan rasa aman bagi wakif juga kepada nazhir dalam mengelola harta wakaf (Mulyasari, 2017). Untuk selanjutnya perlu adanya undang-undang dan pedoman yang lebih jelas dalam sistem pertanggungjawaban harta wakaf. Hal ini penting dilakukan karena potensi harta wakaf yang cukup signifikan untuk kesejahteraan umat. Namun, jika dilihat dilapangan hanya sedikit yang benar-benar peduli dalam mengurus aset-aset wakaf dan mengelola harta yang diwakafkan oleh wakif. Pada bab ini akan dibahas mengenai sistem akuntansi wakaf yang dikelola sesuai dengan *maqhasid* syariah demi mencapai kemaslahatan umat.

B. *Syariah Enterprise Theory*

Syariah Enterprise Theory merupakan pengembangan dari teori *enterprise* yang mengadopsi nilai-nilai Islam agar dapat mewujudkan teori yang bersifat humanis dan transedental. Teori ini mengakui pertanggungjawaban terhadap *stakeholder* dan pemilik perusahaan. Menurut Pramono (2013) konsep teori *enterprise* menunjukkan bahwa kekuasaan ekonomi berada pada beberapa tangan (*stakeholder*) tidak hanya terpaku pada satu tangan. Oleh karena itu, teori *enterprise* direkomendasikan untuk suatu sistem ekonomi yang mendasarkan diri pada nilai-nilai syariah mengingat syariah melarang beredarnya kekayaan hanya di kalangan tertentu saja. *Syariah enterprise theory* memberi bentuk pertanggungjawaban baik secara vertikal maupun horizontal. Pertanggungjawaban secara vertikal yaitu kepada Allah yang merupakan pertanggungjawaban yang paling utama karena pada

teori ini menjelaskan bahwa aksioma terpenting yang harus mendasari dalam setiap penetapan konsepnya adalah Allah sebagai pencipta (Pramono, 2013). Kemudian pertanggungjawaban secara horizontal yaitu kepada manusia, lingkungan dan alam. Sebagai bentuk pertanggungjawaban secara horizontal yaitu kepada sesama manusia, konsep *syariah enterprise theory* ini menyajikan laporan nilai tambah yang berguna untuk memberikan informasi kepada para *stakeholder* mengenai kepada siapa nilai tambah yang diperoleh telah didistribusikan.

Syariah enterprise Theory ini menjelaskan bahwa kesejahteraan tidak hanya diperuntukkan oleh pemilik modal. Dengan demikian, pemilik modal maupun pengelola modal harus saling menjaga amanah dengan mengingat bahwa segala tindakan akan diminta pertanggung jawabannya. Menurut Hafid (2018) *syariah enterprise theory* ini dibangun berdasarkan metafora amanah dan metafora zakat yang lebih menghendaki keseimbangan antara sifat egoistik dan altruistik. *Syariah enterprise theory* memiliki cakupan akuntabilitas yang luas, akuntabilitas yang dimaksud adalah akuntabilitas kepada Tuhan, manusia dan alam semesta. Bentuk akuntabilitas ini berfungsi sebagai tali pengikat agar akuntansi syariah selalu terhubung dengan nilai-nilai yang dapat membangkitkan kesadaran ketuhanan. Konsep penting dalam *syariah enterprise theory* adalah Allah sebagai pencipta dan pemilik tunggal dari seluruh sumber daya yang ada di dunia ini. Oleh karena itu, yang berlaku dalam *syariah enterprise theory* adalah Allah sebagai sumber amanah utama karena Allah pemilik yang tunggal dan mutlak (Nurfajri, 2019).

C. Konsep Wakaf

Istilah wakaf menurut Zarqa (1947:13) pada awalnya dinamai *sadaqah*, habas dan habisan, kemudian nama wakaf lah yang menjadi mashur. Hingga saat ini, *ahbas* masih dipakai di negara Maghrib. Istilah wakaf secara bahasa berasal dari *waqafa*, *al-wuquf* yang berarti lawan kata *al-julus*. *Wakafa al-ard* artinya habasaha. Kalimat *waqafaha al-dar* artinya ia menahan rumahnya untuk di jalan Allah. Bentuk *fa'ilnya* wakif. Wakif menurut istilah *fuqaha'* adalah orang yang mewakafkan hartanya di jalan Allah (Hilmi, 2012). Dalam perjalanannya, wakaf terus berkembang dan akan selalu berkembang mengikuti perkembangan zaman dengan

berbagai inovasi-inovasi yang relevan. Wakaf sangat penting bagi kehidupan sosial, ekonomi, kebudayaan dan keagamaan (Kasanah, 2019). Oleh karena itu, Islam meletakkan amalan wakaf sebagai salah satu macam ibadah yang amat menggembirakan. Sejarah peradaban Islam mencatat bahwa wakaf pertama kali dilakukan oleh Rasulullah saw ketika membangun mesjid Quba di Madinah. Wakaf kedua adalah masjid Dar al-Hijra di Madinah yang dibangun Rasulullah saw. Namun, menurut versi yang berbeda, wakaf pertama adalah wakaf yang dilakukan oleh Rasulullah saw setelah mengambil alih kepemilikan tujuh buah kebun milik seorang Mukhairaiq (orang Yahudi yang terbunuh ketika perang uhud dan berpihak kepada Muslim). Peristiwa Wakaf ini kemudian diikuti oleh Umar bin Khattab serta sahabat-sahabat yang lain seperti Abu Bakar, Usman, Ali dan lainnya. Pada periode Abbasiyah, harta wakaf dan hasil-hasilnya tidak ditampung di Baitul Maal, namun dikelola oleh seorang Qadi yang selalu diawasi. Pada periode Abbasiyah tersebut kemudian dibentuk Baitul Maal khusus untuk pengelolaan wakaf (Suganda, 2014).

Pada tahun 1922 telah terdapat wakaf di Indonesia yang berasal dari Islam, yaitu di Aceh, Gayo, Tapanuli, Jambi, Palembang, Bengkulu, Minahasa, Gorontalo, Lombok, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Nama dan benda yang diwakafkan berbeda-beda, misalnya di Aceh disebut *wakeuh*, di Gayo disebut *wokos*, di Payakumbuh disebut *Ibah*. Di Indonesia sendiri, wakaf telah diterima menjadi hukum adat bangsa Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya benda wakaf, baik wakaf benda bergerak maupun benda tidak bergerak (Suganda, 2014). Perhatian pemerintah terhadap wakaf begitu serius dengan diterbitkannya Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf dan PP No. 42 tahun 2006 tentang pelaksanaannya. Selain dari perwakafan yang berasal dari Islam, terdapat pula perwakafan yang berasal dari hukum adat, misalnya di daerah Cibeo Banten terdapat tanah semacam tanah wakaf yang disebut Huma Serang yang digunakan untuk kepentingan umum dan untuk tempat upacara keagamaan. Dalam hal wakaf tunai, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 11 Mei 2002 telah menetapkan fatwa tentang wakaf tunai dan membolehkan pelaksanaannya (Suganda, 2014). Seiring berjalannya waktu,

wakaf telah mengalami perubahan paradigma terutama dalam hal pengelolaan wakaf yang ditujukan sebagai instrumen dalam upaya menyejahterakan masyarakat Muslim (Kasdi, 2015). Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan dalam pengelolaan wakaf ini menggunakan pendekatan bisnis dan manajemen (wakaf produktif).

Pada era reformasi pemerintah Indonesia menaruh perhatian khusus mengenai wakaf. Dalam hukum positif, wakaf diatur dalam Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, pasal 1 dikemukakan bahwa: *"wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/ atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/ atau kesejahteraan umum menurut syariah"*. Sedangkan pada pasal 5 diuraikan fungsi wakaf, yaitu sebagai salah satu sarana untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum (Said & Amiruddin, 2019). Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan UU No. 41 tahun 2004. Pada UU No. 41 tahun 2004 pasal 47, pemerintah mengatur tentang keberadaan Badan Wakaf Indonesia (BWI) serta kedudukan dan tugasnya (Nurhidayani dkk., 2017). Badan Wakaf Indonesia adalah lembaga khusus yang mengelola dana wakaf secara nasional. BWI memiliki tugas untuk mengembangkan perwakafan secara nasional, dimana lembaga pengelola wakaf harus memiliki akuntabilitas yang baik (Budiman, 2011). Perkembangan wakaf saat ini dapat dilihat dengan banyaknya wakaf dalam kehidupan masyarakat Islam, seperti banyaknya mesjid atau tempat ibadah, perguruan Islam dan lembaga-lembaga keagamaan Islam yang berdiri di tanah wakaf (Munir, 2015).

Pengelolaan wakaf di Indonesia masih bersifat statis dan belum bernilai ekonomis dan produktif, karena pemanfaatan wakaf masih sebatas hal-hal yang bersifat fisik seperti gedung, tanah atau benda yang tahan lama. Wakaf tidak hanya bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial, tetapi juga memiliki potensi ekonomi yang sangat tinggi (Afandi, 2014). Namun demikian, dengan potensi wakaf yang cukup besar, tidak semua potensi wakaf dapat terealisasi dengan baik karena

lembaga pengelola wakaf tidak mampu mengumpulkan potensi wakaf tersebut (Yuliafitri & Rivaldi, 2017). Sangat disayangkan karena betapa besarnya potensi wakaf di Indonesia yang belum terealisasi. Hal ini menunjukkan bahwa belum optimalnya lembaga pengelola wakaf dalam menghimpun wakaf tunai di Indonesia. Adapun masalah yang menjadi penyebab lembaga pengelola wakaf belum optimal menghimpun potensi wakaf adalah masih sedikit wakaf yang dikelola secara profesional dan produktif. Menurut data Kementerian Agama RI tahun 2010, hampir 95% aset wakaf belum dimanfaatkan secara optimal sehingga peran sosial ekonomi wakaf belum maksimal. *Good Governance* yang masih lemah menyebabkan kepercayaan masyarakat berkurang pada nazhir atau lembaga pengelola wakaf, sehingga wakaf perlu ditingkatkan kemanfaatannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Akuntansi syariah menekankan kepada nilai-nilai Islami yang diatur dalam bagian muamalah dan konsep-konsep yang telah diatur dalam al-Qur'an sebagai sumber utamanya. Prinsip umum akuntansi syariah sendiri terdiri dari prinsip pertanggungjawaban, prinsip keadilan, dan prinsip kebenaran yang selalu melekat dalam sistem akuntansi syariah (Handayani & Sahroni, 2019). Secara praktis, akuntansi syariah suatu proses akuntansi untuk transaksi-transaksi syariah seperti murabahah, musyarakah, mudharabah dan lainnya. Syariah Islam juga memberikan kebaikan, kesejahteraan, dan kemaslahatan kepada seluruh umat manusia (Muhammad dkk., 2015).

D. *Maqashid* Syariah

Maqashid Syariah di definisikan sebagai tujuan dari adanya hukum Islam adalah untuk kebaikan dan kesejahteraan (masalah) umat manusia di dunia dan akhirat. Menurut Thohari (2013) *Maqashid* syariah memiliki arti tujuan-tujuan syariah yang digunakan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Pengertian dari *al-maqashid al-syariah* adalah tujuan-tujuan dan rahasia-rahasia yang diletakkan Allah swt dan terkandung dalam setiap hukum untuk keperluan pemenuhan manfaat umat. Menurut Muchlis & Sukirman (2016) hukum Islam atau biasa disebut syariah Islam memiliki tiga sasaran yang ingin dicapai yaitu penyucian jiwa, penegakan keadilan dalam masyarakat, dan perwujudan kemaslahatan manusia. Penyucian

jiwa mengandung pengertian agar manusia mampu berperan sebagai sumber kebaikan bagi masyarakat dan lingkungannya dengan salah satunya menunaikan ibadah zakat, sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an bahwa zakat berfungsi untuk membersihkan harta manusia. Kedua adalah menegakkan keadilan dalam masyarakat, keadilan disini meliputi segala bidang kehidupan manusia, termasuk keadilan dari sisi hukum, sisi ekonomi dan sisi persaksian. Sasaran yang terakhir adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia (Asmarani & Kusumaningtias, 2019).

Maqashid syariah penting untuk diimplementasikan agar dapat menjadi pengawal bagi setiap transaksi ekonomi dan keuangan agar bisa mengikuti perkembangan zaman namun sekaligus tidak lepas dari prinsip dasar syariat. Tanpa *maqashid* syariah, maka semua pemahaman mengenai ekonomi syariah, keuangan, dan perbankan syariah akan sempit dan kaku serta kehilangan substansi syariahnya (Yumni, 2016). Menurut Asmarani & Kusumaningtias (2019) ulama fikih memiliki kesepakatan bahwa *maqashid* syariah menjadi pokok utama dalam berijtihad sebagai solusi terkait problematika kehidupan ekonomi dan keuangan yang terus berkembang. *Maqashid* syariah yaitu tujuan dan hikmah yang dimaksudkan oleh Allah dalam setiap hukum dari keseluruhan hukumnya. Inti dari *maqashid* syariah adalah sebuah kemaslahatan. Menurut Imam al-Syatibi, lima aspek kehidupan dalam pokok *maqashid* syariah adalah terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kelima, memelihara harta benda dengan yang disyariatkan oleh hukum Islam. *Maqashid* syariah berfungsi untuk melakukan dua hal penting, yaitu *tahsil*, yakni mengamankan manfaat dan *ibqa*, yaitu mencegah kerusakan atau cedera seperti yang diarahkan oleh pemberi hukum. *Maslahah* disisi lain adalah perangkat hukum yang digunakan dalam teori hukum Islam untuk mempromosikan kepentingan publik dan mencegah kejahatan sosial atau korupsi (Muchlis & Sukirman, 2016).

Syariah Islam menginginkan manusia mencapai dan memelihara kesehateraanannya. Menurut Imam Syatibi, *maslahah* adalah sifat atau kemampuan barang atau jasa yang mendukung elemen-elemen dan tujuan dari kehidupan manusia dimuka bumi ini (Khasanah, 2010). Menurut Qorib (2016) *maslahah* yaitu

mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan. Prinsip kemaslahatan esensinya merupakan segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan kolektif. Kemaslahatan yang diakui harus memenuhi dua unsur yakni kepatuhan syariah (halal) serta bermanfaat dan membawa kebaikan dalam semua aspek (Ardiansyah, 2014).

Maslahah dapat dikategorikan berdasarkan kualitas dan kepentingan kemaslahatan, kandungan kemaslahatan, berubah atau tidaknya kemaslahatan, dan keberadaan *maslahah*. Dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan, ulama ushul fiqh membaginya menjadi tiga *dhawabih* (tingkatan) yaitu *maslahah dururiyah*, *maslahah hajiyah* dan *maslahah tahsiniah*. Dilihat dari segi kandungan *maslahah*, para ulama ushul fiqh membaginya menjadi *maslahah ammah* dan *maslahah khassah*. Jika dilihat dari segi berubah atau tidaknya *maslahah*, dibagi menjadi dua yaitu *maslahah sabita* dan *maslahah mutaqayyirah*. Sedangkan dilihat dari segi keberadaan *maslahah* menurut syara' *maslahah* dibagi menjadi *maslahah mu'tabarah*, *maslahah mulghah* dan *maslahah mursalah* (Qorib, 2016).

E. Akuntansi Wakaf

Menurut Mulyasari (2017) model sistem akuntansi wakaf berguna mengembangkan sistem akuntansi pertanggungjawaban harta wakaf dengan melihat dari aspek organisasi maupun pencatatan laporan akuntansi. Secara umum PSAK 112 mengatur tentang perlakuan akuntansi atas transaksi wakaf yang dilakukan baik oleh nazhir maupun wakif yang berbentuk organisasi dan badan hukum. PSAK 112 dapat juga diterapkan oleh nazhir perorangan. Pengelolaan dan pengembangan wakaf merupakan suatu entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan tersendiri dan tidak dikonsolidasikan ke laporan keuangan organisasi atau badan hukum dari nazhir. Laporan keuangan entitas wakaf tidak mengkonsolidasi laporan keuangan entitas anaknya. Laporan keuangan entitas wakaf yang lengkap meliputi laporan posisi keuangan, laporan rincian aset wakaf, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Pada era reformasi pemerintah Indonesia menaruh perhatian khusus mengenai wakaf. Dalam hukum positif, wakaf

diatur dalam Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, pasal 1 dikemukakan bahwa: *"wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/ atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/ atau kesejahteraan umum menurut syariah"*. Sedangkan pada pasal 5 diuraikan fungsi wakaf, yaitu sebagai salah satu sarana untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum (Said & Amiruddin, 2019). Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan UU No. 41 tahun 2004. Pada UU No. 41 tahun 2004 pasal 47, pemerintah mengatur tentang keberadaan Badan Wakaf Indonesia (BWI) serta kedudukan dan tugasnya (Nurhidayani dkk., 2017). Badan Wakaf Indonesia adalah lembaga khusus yang mengelola dana wakaf secara nasional. BWI memiliki tugas untuk mengembangkan perwakafan secara nasional, dimana lembaga pengelola wakaf harus memiliki akuntabilitas yang baik (Budiman, 2011). Perkembangan wakaf saat ini dapat dilihat dengan banyaknya wakaf dalam kehidupan masyarakat Islam, seperti banyaknya mesjid atau tempat ibadah, perguruan Islam dan lembaga-lembaga keagamaan Islam yang berdiri di tanah wakaf (Munir, 2015).

Dasar pengakuan aset wakaf adalah akta ikrar wakaf, dimana wasiat wakaf dan janji wakaf belum memenuhi kriteria pengakuan aset wakaf. Wakaf temporer merupakan liabilitas yang wajib dikembalikan ke wakif masa mendatang. Dasar pengakuan atas penyaluran manfaat wakaf adalah diterimanya manfaat wakaf tersebut oleh *mauquf alaih*. Sementara dasar imbalan nazhir adalah hasil neto pengelolaan dan pengembangan aset akaf yang telah direalisasi dalam bentuk kas (*cash* basis). Pengukuran aset wakaf yang diterima dari wakif adalah nilai nominal untuk kas dan nilai wakaf untuk aset non kas. Wakif mengakui penyerahan aset wakaf sebagai beban dalam laba rugi, kecuali wakaf temporer yang tetap dicatat sebagai aset wakif dan disajikan sebagai aset yang dibatasi penggunaannya. Pencatatan akuntansi sangat perlu dilakukan karena sebagai informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan atas wakaf, sehingga dapat dijadikan sumber pemanfaatan wakaf yang berperan dalam penciptaan

kesejahteraan umat yang kemudian dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh pemangku kepentingan atas wakaf yang dikelolanya. Profesionalisme dalam pengelolaan harta wakaf memberikan rasa aman bagi wakif juga kepada nazhir dalam mengelola harta wakaf (Mulyasari, 2017). Untuk selanjutnya perlu adanya undang-undang dan pedoman yang lebih jelas dalam sistem pertanggungjawaban harta wakaf. Hal ini penting dilakukan karena potensi harta wakaf yang cukup signifikan untuk kesejahteraan umat.

F. Pengelolaan dan Pengaturan Akuntansi Wakaf berdasarkan Syariat Islam

Islam memiliki pandangan yang jelas mengenai harta. Harta yang dikelola secara benar akan membawa manusia kepada kebaikan. Namun, menyalahgunakan harta untuk perkara maksiat dan kerusakan akan memberikan dampak yang buruk kepada pemilik harta. Mewakafkan harta yang telah Allah swt karuniakan adalah suatu usaha yang mulia, dimana Allah merahasiakan kebesarannya dibalik harta yang diwakafkan. Allah ingin mendidik manusia untuk berkongsi nikmat yang diperoleh. Harta hanyalah washilah bagi mendapat keridhaan Allah dan meraih cinta-Nya. Jelas sekali bahwa pelaksanaan wakaf ini, bukan semata-mata untuk mendapatkan pahala, tetapi mempunyai *maqashid* yang besar untuk kepentingan individu, masyarakat dan umat Islam seluruhnya. Pembangunan yang seimbang dalam bidang ekonomi merupakan sebagian daripada keadilan sosial yaitu pelaksanaannya terdiri dari struktur-struktur dalam masyarakat yang saling melengkapi antara satu sama lain (Muhamad dkk., 2015). Dengan keadilan ekonomi, setiap individu akan mendapatkan haknya sesuai dengan sumbangan masing-masing kepada masyarakat. Setiap individu juga harus dibebaskan dari eksploitasi individu lainnya. Islam dengan tegas melarang seorang Muslim merugikan orang lain. Melalui ibadah wakaf, pembangunan ekonomi dapat dibangun tanpa wujud eksploitasi. Secara tidak langsung, wakaf melindungi hak-hak individu dalam masyarakat, serta meningkatkan kesejahteraan umum (Muhamad dkk., 2015).

Islam menganggap manusia sebagai satu keluarga. Oleh sebab itu, semua anggota keluarga mempunyai derajat yang sama

disisi Allah swt. Allah swt tidak membedakan yang kaya dan yang miskin, juga tidak membedakan antara yang hitam dan putih. Secara sosial, nilai yang membedakan seseorang dengan yang lain adalah ketakwaan, ketulusan hati, kemampuan dan muamalahnya dengan manusia. Menurut Muhamad dkk. (2015) hubungan sosial masyarakat Islam membedakan sistem hubungan interaksi, tolong menolong, gotong royong yang membangun dalam seluruh faktor kehidupan. Ketidaksamaan pendapatan dan kekayaan yang ada dalam masyarakat merupakan satu realiti yang harus diterima. Wakaf merupakan suatu alternatif untuk mengekalkan kepemilikan harta agar tetap menjadi hak milik orang Islam. Siapa yang mewakafkan hartanya di jalan Allah swt, maka akan mendapatkan ganjaran yang besar di dunia dan akhirat.

Paradigma wakaf dalam perkembangannya telah mengalami perubahan yang signifikan dengan digulirkan regulasi-regulasi pemerintah tentang wakaf. Menurut Mulyasari (2017) sebelum undang-undang Nomor 41 tahun 2004, objek wakaf hanya sebatas benda tidak bergerak berupa tanah. Peruntukan wakaf juga hanya untuk kepentingan-kepentingan sarana ibadah dan pendidikan seperti, masjid, musholla, madrasah dan lain-lain. Undang-undang 41 tahun 2004 memberikan wacana lebih luas mengenai objek wakaf, tidak hanya berupa benda tidak bergerak berupa tanah melainkan juga benda bergerak lainnya seperti uang, emas, buku-buku, sertifikat, deposito, saham dan lain-lain. Tujuan adanya harta benda wakaf juga diarahkan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat miskin khusus umat Islam (Mulyasari, 2017). Untuk menjaga agar harta wakaf mendapat pengawasan jangka dengan baik, kepada nazhir dapat diberikan imbalan yang ditetapkan dengan jangka waktu tertentu atau mengambil sebagian dari hasil harta wakaf yang dikelolanya. Untuk memudahkan pengawasan diperlukan adanya administrasi yang tertib baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi dan pusat. Pengawasan dan bimbingan perwakafan tanah dilakukan oleh unit-unit organisasi Departemen Agama, secara hierarki sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Agama tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama, yang tertuang pada Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 pasal 14 (Mulyasari, 2017).

Wakaf di Indonesia saat ini diatur dalam undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang perwakafan. Undang-undang ini selain menyempurnakan peraturan perwakafan yang telah ada, juga mengatur masalah-masalah baru, seperti pengelolaan harta benda wakaf harus secara produktif dan peruntukannya dirinci secara jelas, diantaranya untuk membantu fakir miskin, pembentukan badan wakaf Indonesia, pengaturan wakaf uang, dan materi-materi lainnya yang dibutuhkan sesuai perkembangan kontemporer (Huda dkk., 2014). Walaupun Peraturan Pemerintah telah dilengkapi dengan beberapa peraturan pelaksanaannya, termasuk kompilasi hukum Islam, tetapi dalam pelaksanaannya masih terjadi pelanggaran. Beberapa agenda yang perlu difokuskan untuk menyelesaikan beberapa persoalan wakaf adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat yang baik dan benar tentang hukum wakaf, baik dari segi rukun dan syarat wakaf dan tujuan disyariatkannya wakaf. Kedua, perlu dilakukan sosialisasi undang-undang wakaf kepada masyarakat. Ketiga, penyediaan sumber daya manusia nazhir yang profesional sekaligus sebagai pekerja khusus yang disertai tugas untuk mengelola institusi wakaf yang mendapat imbalan dari pekerjaannya itu. Agenda yang difokuskan dalam menyelesaikan persoalan wakaf menunjukkan perlu adanya akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf. Pengelolaan wakaf tidak hanya dari unsur pemerintah, tapi juga dari masyarakat. Lembaga pengelola wakaf yang ada saat ini lebih banyak yang dikelola oleh masyarakat bukan pemerintah (Huda dkk., 2014). Lembaga pengelola wakaf yang dikelola masyarakat adalah lembaga yang berwujud *Non Government Organization* (NGO). Lembaga *Non Government Organization* (NGO) memiliki banyak kelemahan terkait akuntabilitas, karena minimnya penyampaian informasi kepada masyarakat.

G. Akuntansi Wakaf dalam Mencapai Kemaslahatan Umat

Wakaf adalah salah satu instrumen dalam Islam yang sangat potensial untuk dijadikan strategi pengentasan kemiskinan dan kesenjangan nasional. Jika wakaf dikelola dengan baik, maka wakaf akan berperan besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial sebuah negara. Menurut Huda dkk.(2014) wakaf berperan dalam pembangunan ekonomi secara

langsung. Wakaf telah menjadi salah satu alternatif pendistribusian kekayaan guna mencapai pembangunan ekonomi. Hal tersebut karena wakaf memainkan peranan penting untuk menyediakan sarana pendidikan, kesehatan, sarana ibadah, serta fasilitas umum lainnya. Huda dkk. (2014) menjelaskan bahwa masih banyak masalah-masalah yang dihadapi dalam pengelolaan tanah-tanah wakaf secara produktif. Disamping itu, pengetahuan dan pemahaman nazhir terhadap peraturan perwakafan masih kurang. Dengan kondisi seperti ini, tanah-tanah wakaf agak sulit untuk dikelola secara produktif sesuai dengan ketentuan hukum Islam maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena para nazhir kurang profesional dan kesulitan dana untuk biaya pengelolaannya. Padahal, harta benda wakaf jika dikelola dan dikembangkan secara produktif, maka dapat diperuntukkan sebagai salah satu alternatif untuk membantu menanggulangi kemiskinan.

Akuntansi syariah menekankan kepada nilai-nilai Islami yang diatur dalam bagian muamalah dan konsep-konsep yang telah diatur dalam al-Qur'an sebagai sumber utamanya. Prinsip umum akuntansi syariah sendiri terdiri dari prinsip pertanggungjawaban, prinsip keadilan, dan prinsip kebenaran yang selalu melekat dalam sistem akuntansi syariah (Handayani & Sahroni, 2019). Secara praktis, akuntansi syariah suatu proses akuntansi untuk transaksi-transaksi syariah seperti *murabahah*, *musyarakah*, *mudharabah* dan lainnya. Syariah Islam juga memberikan kebaikan, kesejahteraan, dan kemaslahatan kepada seluruh umat manusia (Muhammad dkk., 2015). Menurut Mulyasari (2017) model sistem akuntansi wakaf berguna mengembangkan sistem akuntansi pertanggungjawaban harta wakaf dengan melihat dari aspek organisasi maupun pencatatan laporan akuntansi. Secara umum PSAK 112 mengatur tentang perlakuan akuntansi atas transaksi wakaf yang dilakukan baik oleh nazhir maupun wakif yang berbentuk organisasi dan badan hukum. PSAK 112 dapat juga diterapkan oleh nazhir perorangan. Pengelolaan dan pengembangan wakaf merupakan suatu entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan tersendiri dan tidak dikonsolidasikan ke laporan keuangan organisasi atau badan hukum dari nazhir. Laporan keuangan entitas wakaf tidak mengkonsolidasi laporan keuangan entitas anaknya. Laporan

keuangan entitas wakaf yang lengkap meliputi laporan posisi keuangan, laporan rincian aset wakaf, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Dasar pengakuan aset wakaf adalah akta ikrar wakaf, dimana wasiat wakaf dan janji wakaf belum memenuhi kriteria pengakuan aset wakaf. Wakaf temporer merupakan liabilitas yang wajib dikembalikan ke wakif masa mendatang. Dasar pengakuan atas penyaluran manfaat wakaf adalah diterimanya manfaat wakaf tersebut oleh mauquf alaih. Sementara dasar imbalan nazhir adalah hasil neto pengelolaan dan pengembangan aset akaf yang telah direalisasi dalam bentuk kas (*cash* basis). Pengukuran aset wakaf yang diterima dari wakif adalah nilai nominal untuk kas dan nilai wakar untuk aset non kas. Wakif mengakui penyerahan aset wakaf sebagai beban dalam laba rugi, kecuali wakaf temporer yang tetap dicatat sebagai aset wakif dan disajikan sebagai aset yang dibatasi penggunaannya. Pencatatan akuntansi sangat perlu dilakukan karena sebagai informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan atas wakaf, sehingga dapat dijadikan sumber pemanfaatan wakaf yang berperan dalam penciptaan kesejahteraan umat yang kemudian dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh pemangku kepentingan atas wakaf yang dikelolanya. Profesionalisme dalam pengelolaan harta wakaf memberikan rasa aman bagi wakif juga kepada nazhir dalam mengelola harta wakaf (Mulyasari, 2017).

H. Simpulan

Pengelolaan dan pengaturan akuntansi wakaf dijelaskan dalam PSAK 112 tentang perlakuan akuntansi atas transaksi wakaf yang dilakukan baik oleh nazhir maupun wakif yang berbentuk organisasi dan badan hukum. PSAK 112 juga diterapkan oleh nazhir perorangan dimana pengelolaan dan pengembangan wakaf merupakan suatu entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan tersendiri dan tidak dikonsolidasikan ke laporan keuangan organisasi atau badan hukum dari nazhir. Laporan keuangan entitas wakaf tidak mengkonsolidasi laporan keuangan entitas anaknya. Laporan keuangan entitas wakaf yang lengkap meliputi laporan posisi keuangan, laporan rincian aset wakaf, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Dasar pengakuan aset wakaf adalah akta ikrar wakaf,

dimana wasiat wakaf dan janji wakaf belum memenuhi kriteria pengakuan aset wakaf. Wakaf temporer merupakan liabilitas yang wajib dikembalikan ke wakif masa mendatang. Dasar pengakuan atas penyaluran manfaat wakaf adalah diterimanya manfaat wakaf tersebut oleh *mauquf alaih*. Sementara dasar imbalan nazhir adalah hasil neto pengelolaan dan pengembangan aset wakaf yang telah direalisasi dalam bentuk kas (*cash basis*).

Pengukuran aset wakaf yang diterima dari wakif adalah nilai nominal untuk kas dan nilai wakaf untuk aset non kas. Wakif mengakui penyerahan aset wakaf sebagai beban dalam laba rugi, kecuali wakaf temporer yang tetap dicatat sebagai aset wakif dan disajikan sebagai aset yang dibatasi penggunaannya. Pencatatan akuntansi sangat perlu dilakukan karena sebagai informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan atas wakaf, sehingga dapat dijadikan sumber pemanfaatan wakaf yang berperan dalam penciptaan kesejahteraan umat yang kemudian dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh pemangku kepentingan atas wakaf yang dikelolanya. Profesionalisme dalam pengelolaan harta wakaf memberikan rasa aman bagi wakif juga kepada nazhir dalam mengelola harta wakaf. Hal ini penting dilakukan karena potensi harta wakaf yang cukup signifikan untuk kesejahteraan umat.

Daftar Pustaka

- Afandi, M. 2014. Revitalisasi Manajemen Wakaf Produktif di Indonesia. *Et-Tijarie*, 1(1): 74-90.
- Ardiansyah, M. 2014. Bayang-bayang Teori Keagenan pada Produk Pembiayaan Perbankan Syariah. *Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 14(2) : 21-269.
- Asmarani, M & R. Kusumaningtias. 2019. Akuntabilitas Lembaga Amil Zakat dalam Perspektif Maqashid Syariah: Studi pada Yayasan Dana Sosial Al-Falah Surabaya. *Jurnal Akuntansi UNESA*, 8(1): 1-11.
- Budiman, A. A. 2011. Akuntabilitas Lembaga Pengelola Wakaf. *Walisongo*, 19(1): 75-102.
- Hafid, W. R., J. Majid dan M. S. S. Juardi. 2018. Penerapan Prinsip Profit Sharing dan Revenue Sharing Program Tabungan Mudharabah dan Deposito Mudharabah (Studi pada PT. Bank Muamalat Kantor Cabang Makassar). *Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah*, 2(1): 65-81.
- Handayani, D & A. Sahroni. 2019. Pengembangan Sumber Daya Manusia Islami: Model Pembelajaran Akuntansi Syariah di Perguruan Tinggi Islam. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 7(2): 121-141.
- Hidayat, R. 2018. Konsep Wakaf yang Efektif dalam Membangun Bangsa. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 7(2): 107-118.
- Hilmi, H. 2012. Dinamika Pengelolaan Wakaf Uang: Studi Sosio-Legal Perilaku Pengelolaan Wakaf Uang Pasca Pemberlakuan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. *Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 12(2): 123-143.
- Huda, N., D. Anggraini., N. Rini., Hudori., dan Y. Mardoni . 2014. Akuntabilitas sebagai Sebuah Solusi Pengelolaan Wakaf. *Jurnal Multiparadigma*, 5(3): 345-510.

- Kasanah, N. 2019. Wakaf Uang dalam Tinjauan Hukum, Potensi, dan Tata Kelola. *Jurnal Muslim Heritage*, 4 (1): 85-96.
- Kasdi, A. 2015. Reinterpretasi Konsep Wakaf menuju Pengembangan Wakaf Produktif. *ZISWAF*, 2(1): 158-175.
- Khasanah, U. 2010. Sistem Bagi Hasil dalam Syariat Islam. *Jurnal Syariah dan Hukum*, 1(2) : 120-132.
- Kristianto, D. 2010. Implikasi Akuntansi Syariah dan Asuransi Syariah dalam Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi*, 7(1): 61-68.
- Lestari, A. I. 2017. Revitalisasi Wakaf untuk Kemaslahatan Umat. *Jurnal Zakat Dan Wakaf (ZISWAF)*, 4(1): 55-72.
- Muchlis, S & A. S. Sukirman. 2016. Implementasi Maqashid Syariah dalam *Corporate Social Responsibility* di PT Bank Muamalat Indonesia. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 7(1): 1- 155.
- Muhamad, N. H. N., M. A. Jaafar., M. Abdullah., N. A. Nizaludin., M. M. Salleh, & M. M. M. Zin. 2015. Konsep Maqasid Syariah dalam Pengurusan Wakaf. *International Journal Of Islamic And Civilizational Studies*, 2(3): 01-09.
- Muhtar, A. 2015. Potensi Wakaf menjadi Lembaga Keuangan Publik. *As-Syari'ah*, 17(1): 9-18.
- Munir, Z. A. 2013. Revitalisasi Manajemen Wakaf sebagai Penggerak Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Syariah dan Hukum*, 5(2): 162-171.
- Munir, A.S. 2015. Optimalisasi Pemberdayaan Wakaf secara Produktif. *Jurnal Ummul Qura*, 6(2): 94-109.
- Mulyasari, W. 2017. Sistem Akuntansi Wakaf sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Harta Wakaf ke Publik. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 10(1): 16-28.
- Nisa, F., M. Bayuni & N. Eprianti. 2019. Efektivitas Pelayanan Penghimpunan Dana Wakaf terhadap Kepuasan Donatur di Sinergi Foundation Menggunakan Metode DEA (*Effectiveness Of Services Gathering Fund Waqf To The*

Satisfaction Of Donors In Synergy Foundation Using Dea Method). *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 5(2): 641-648.

- Nurfajri, F. dan T. Priyanto. 2019. Pengaruh Murabahah, Musyarakah, Mudharabah, dan Ijarah terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal MONEX*, 8(2) : 1-18.
- Nurhidayani., M. Yasin & Busaini . 2017. Pengelolaan dan Pemanfaatan Wakaf Tanah dan Bangunan. *Jurnal Kajian Ekonomi Islam* ,2(2): 163-175.
- Nurhidayati, S. S., S. L. Sulistiani & Y. R. Hidayat. 2019. Efektivitas Strategi Fundraising Wakaf Melalui Uang Berbasis Online di Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid (*Effectiveness Of Waqf Fundraising Strategies Through Online Money In Daarut Tauhiid Waqf Institutions*). *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 5(2): 624-629.
- Pramono, N. H. 2013. Optimalisasi Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil pada Bank Syariah di Indonesia. *Accounting Analysis Journal*, 2(2) : 154-162.
- Qorib, A. Dan I. H. Harahap. 2016. Penerapan Malahah Mursalah dalam Ekonomi Islam. *Jurnal Analitica Islamica*, 5(1) : 55-80.
- Said, S & A. M. A. Amiruddin. 2019. Wakaf Tunai dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah*, 3(1): 43-55.
- Suganda, A. D. 2014. Konsep Wakaf Tunai. *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(2): 1-15.
- Thohari, A. 2013. Epistimologi Fikih Lingkungan: Revitalisasi Konsep Masalahah. *Az-Zarqa'*, 5(2): 145-161.
- Yuliafitri, I dan A. I. Rivaldi. 2017. Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* dan Promosi terhadap Penerimaan Wakaf Tunai (Pada Lembaga Pengelola Wakaf Di Indonesia). *Jurnal InFestasi*, 13(1) : 217-226.
- Yumni, A. 2016. Kemaslahatan dalam Konsep Maqashid Al-Syariah. *NIZHAMIYAH*, 6(2): 47-57.

Wulandari, S., J. Effendi & I. T. Saptono. 2019. Pemilihan Nazhir dalam Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Uang (*An Analysis of Nazhir Selection In Optimizing Cash Waqf Management*). *Jurnal Aplikasi Manajemen dan Bisnis*, 5(2): 295-307.

2

KETIDAKHALALAN MARK UP MURABAHAH

A. Pendahuluan

Momentum kemunculan ekonomi Islam yang dimulai tahun 1900-an menandai perkembangan akuntansi syariah di Indonesia. Hal ini diawali dengan beropersinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tanggal 1 Mei 1992 yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah sebagai bank umum pertama yang menerapkannya (Pratiwi dan Septriani, 2014; Menne, 2017). Beroperasinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) belum mampu memberikan harapan bagi masyarakat terutama bagi pengusaha mikro kecil. Menurut Febrian dan Mardian (2017) penyebab dari masalah tersebut dikarenakan Bank Muamalat sangat terikat dengan peraturan-peraturan perbankan yang kaku. Untuk mengatasi hal tersebut, perlu didirikan sebuah Lembaga Keuangan Syariah alternatif yang relatif kecil dan fleksibel untuk melayani usaha mikro tersebut. Lembaga tersebut dinamakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yaitu *Baitul Mal Wat Tanwil* (BMT) yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah (Febrian dan Mardian, 2017).

Baitul Mal Wat Tanwil (BMT) merupakan lembaga keuangan kecil dan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil yang mempunyai badan hukum dan bertujuan untuk membela kepentingan masyarakat kalangan ekonomi menengah bawah (Mughni, 2019; Mediawati dan Agustami, 2016). Di Indonesia, kehadiran BMT sudah sangat membantu perekonomian masyarakat. Lembaga ini telah mengupayakan agar kegiatan transaksi bebas dari praktik riba dan menghindarkan manusia dari dosa besar (Haryoso, 2017; Perwitasari, 2017). Secara kuantitatif, peran perbankan syariah terhadap UMKM (Usaha Mikro, Kecil

dan Menengah) dapat ditunjukkan melalui seberapa besar dana yang dialokasikan untuk pembiayaan UMKM.

Munculnya lembaga keuangan syariah di Indonesia sejenis perbankan syariah mempunyai arti yang penting bagi perkembangan ekonomi Islam di masa mendatang dan merupakan *fase booming*-nya ekonomi Islam secara kelembagaan (Parno dan Tikawati, 2016). Banyak sekali perbankan syariah, asuransi syariah dan lembaga keuangan lainnya yang mengusung nama syariah bermunculan. Tetapi, yang perlu diperhatikan adalah kesadaran kita akan suatu pemahaman bahwa ekonomi Islam bukan hanya dimonopoli oleh dunia perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah lainnya. Menurut Yuspin (2007); Menne dkk. (2017) walaupun bank-bank syariah keberadaannya telah menjamur di Indonesia, sebagian masyarakat masih ada yang berasumsi bahwa bank syariah hanyalah sebuah label yang digunakan untuk menarik simpati masyarakat muslim di bidang perbankan. Bank syariah merupakan bank konvensional dengan menggunakan istilah-istilah Islam, dengan kepala akad yang dibubuhi kalimat *Bismillahirrahmanirrahim* dan pegawai yang mengenakan busana islami dengan mengucapkan salam, akan tetapi dalam pelaksanaan akad pada bank syariah masih menggunakan cara-cara yang dilarang oleh agama. Hal ini kemudian diperjelas oleh penelitian Prabowo (2009) yang menyatakan bahwa sikap skeptis dari masyarakat tentang perbankan syariah tersebut tidak dapat dipungkiri karena konotasi perbankan sejak dahulu memang terpisah secara nyata dengan syariah, sehingga pada awal mula pembentukan perbankan syariah banyak yang tidak percaya akan adanya keberhasilan para ekonom Islam dalam menyatukan institusi perbankan syariah. Oleh karena itu, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam aplikasi perbankan syariah adalah konsistensi pemeliharaan dan pengembangan penerapan prinsip-prinsip Islam di dalam sektor bisnis berupa nilai keadilan, efisiensi, stabilitas, dan pertumbuhan (Imama, 2014). Menurut Perwitasari (2018) kemunculan dan perkembangan bank dan lembaga keuangan syariah ataupun entitas syariah menimbulkan tantangan besar khususnya bagi dunia akuntansi.

Salah satu transaksi syariah yang merupakan produk dari pembiayaan perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah lainnya adalah pembiayaan *murabahah*. Menurut Parno dan

Tikawati (2016); Zainal san Sarkan (2017) pembiayaan *murabahah* merupakan sistem penjualan barang yang dijual berdasarkan harga perolehan ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati bersama dan adanya pengungkapan mengenai harga perolehan tersebut dari penjual kepada pembeli. Pembiayaan ini dilakukan oleh bank untuk membiayai aset atau kebutuhan nasabah bukan dalam bentuk *cash*. Hal ini tidak sejalan dengan salah satu penelitian yang menyatakan bahwa bank melakukan pembiayaan dengan uang tunai atau tidak mneyerahkan barang kepada nasabah tetapi memberi uang kepada nasabah sebagai wakil untuk membeli barang yang dibutuhkan (Wardi dan Putri, 2011). *Murabahah* merupakan jenis pembiayaan yang paling diminati oleh masyarakat dalam pengajuan pembiayaan dibandingkan dengan pembiayaan lainnya karena prosesnya yang cepat serta persyaratan yang tidak terlalu sulit. Selain itu, *mark-up* dalam *murabahah* ditetapkan sedemikian rupa yang memastikan bahwa bank Islam akan memperoleh keuntungan yang sebanding dengan keuntungan berbasis bunga (Utami dan Hasmanto, 2014).

Perbankan syariah adalah perbankan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam yaitu tata cara beroperasinya sesuai dengan al-Quran dan hadis, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat (Yusuf, 2013). Tata cara bermuamalat mengatur hubungan antara bank dengan pihak lain dalam rangka penghimpunan dan penyaluran dana, serta kegiatan perbankan syariah lainnya. Penyaluran dana meliputi pola jual beli yang dibukukan dalam perkiraan piutang. Menurut Yusuf (2013) piutang *murabahah* yang diakui sebesar biaya perolehan *murabahah* ditambah keuntungan yang disepakati, pada akhir periode laporan keuangan akan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang. Margin *murabahah* yang ditanggguhkan disajikan sebagai pos lawan piutang *murabahah*. Hal ini sejalan dengan penelitian Parno dan Tikawati (2016) yang menyatakan bahwa margin *murabahah* tangguhan disajikan sebagai pengurang (*contra account*) piutang *murabahah*. Bab ini akan membahas terkait kehalalan *mark up murabahah* dilihat dari sudut pandang Islam.

B. *Syariah Enterprise Theory*

Teori syariah *enterprise* mencakup nilai-nilai syariah (keadilan, *rahmatan lil alamin*, dan *masalahah*) karena teori menjelaskan bahwa kesejahteraan tidak hanya diperuntukkan oleh pemilik modal. Dengan demikian pemilik modal maupun pengelola modal harus saling menjaga amanah dengan mengingat bahwa segala tindakan akan diminta pertanggungjawabannya. Menurut Hafid dkk. (2018) *shariah enterprise theory* adalah teori yang dibangun berdasarkan metafora amanah dan metafora zakat, lebih menghendaki keseimbangan antara sifat egoistik dan altruistik. Syariah *enterprise theory* memiliki cakupan akuntabilitas yang luas, akuntabilitas yang dimaksud adalah akuntabilitas kepada Tuhan, manusia, dan alam. Bentuk akuntabilitas ini berfungsi sebagai tali pengikat agar akuntansi syariah selalu terhubung dengan nilai-nilai yang dapat membangkitkan kesadaran ketuhanan. Konsep penting dalam *shariah enterprise theory* adalah Allah sebagai pencipta dan pemilik tunggal dari seluruh sumber daya yang ada di dunia ini. Oleh karena itu, yang berlaku dalam *syariah enterprise theory* adalah Allah adalah sumber amanah utama, karena Allah pemilik yang tunggal dan mutlak (Nurfajri, 2019).

Menurut Pramono (2013) sesuai dengan *shariah enterprise theory*, bahwa distribusi kekayaan atau nilai tambah tidak hanya berlaku pada partisipan yang terkait langsung atau yang memberikan kontribusi kepada operasi perusahaan, tetapi pihak lain yang tidak terkait langsung dengan bisnis yang dilakukan perusahaan atau pihak yang tidak memberikan kontribusi keuangan dan *skill*. Pemikiran ini dilandasi premis yang mengatakan bahwa manusia adalah *Khalifatullah Fil Ardh* yang membawa misi menciptakan dan mendistribusikan kesejahteraan bagi seluruh manusia dan alam. Premis ini mendorong *shariah enterprise theory* untuk mewujudkan nilai keadilan terhadap manusia dan lingkungan alam. Oleh karena itu, *shariah enterprise theory* akan membawa kemaslahatan *stakeholders*, *stockholders*, masyarakat dan lingkungan alam. Oleh karena itu, dengan sistem jual beli yang tidak masalah dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah maka diperlukan kesadaran ketuhanan dengan menjadikan Tuhan sebagai *stakeholders* tertinggi (Hafid dkk., 2018).

C. Konsep *Murabahah*

Pada zaman Rasulullah dan para sahabatnya transaksi jual beli atau *murabahah* sudah lazim dilakukan. *Murabahah* secara bahasa berasal dari bahasa arab yang berarti keuntungan, karena dalam jual beli *murabahah* harus menjelaskan sebuah keuntungan (Afrida, 2016). Secara istilah, *murabahah* berarti transaksi jual beli dengan harga pokok dengan penambahan sebuah keuntungan. Sejalan dengan pernyataan itu, Rosa dan Kusumawaty (2019) menyatakan bahwa *murabahah* adalah produk pembiayaan syariah yang paling sering ditawarkan oleh bank syariah, dimana *murabahah* berarti jual beli yang dilakukan berdasarkan harga asal kemudian ditambahkan dengan keuntungan yang disepakati. Menurut Nasir dan Sululing (2015) *murabahah* adalah akad jual beli atas suatu barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu. Dalam akad *murabahah*, penjual menjual barangnya dengan meminta kelebihan atas harga beli dengan harga jual. Perbedaan antara harga beli dan harga jual barang disebut dengan margin keuntungan. Hal yang sama juga diungkapkan oleh penelitian Imama (2014) yang menyatakan bahwa *murabahah* adalah salah satu bentuk jual beli dimana penjual menawarkan barang dagangannya dengan menyebutkan harga yang merupakan jumlah dari harga perolehan dengan menambahkan nominal tertentu sebagai keuntungan.

Dalam akad *murabahah*, penjual menjual barangnya dengan meminta kelebihan atas harga beli dengan harga jual. Perbedaan antara harga beli dan harga jual barang disebut dengan margin keuntungan. Menurut Haryoso (2017) penetapan margin dalam *murabahah* menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu, 1) Margin jual *murabahah* merupakan tingkat keuntungan yang diharapkan (*expected yield*) oleh lembaga keuangan syariah, 2) margin (*mark-up price*) ditentukan berdasarkan kesepakatan antara lembaga keuangan syariah dan nasabah, 3) margin dinyatakan dalam bentuk nominal atau persentase tertentu dari harga pokok lembaga keuangan syariah, 4) perhitungan margin dapat mengacu pada tingkat imbalan yang berlaku umum pada pasar keuangan dengan mempertimbangkan ekspektasi biaya dana, *risk premium* dan tingkat keuntungan, 5) margin tidak boleh bertambah

sepanjang masa pembiayaan setelah kontrak disepakati dan ditandatangani kedua belah pihak dan, 6) lembaga keuangan syariah dapat memberikan potongan margin *murabahah* sepanjang tidak menjadi kewajiban bank yang tertuang dalam perjanjian. Menurut Wardi dan Putri (2011) harga yang disepakati dalam *murabahah* adalah harga jual yang merupakan harga perolehan ditambah margin keuntungan yang disepakati adalah nilai harga perolehan bersih (harga jual dikurangi diskon/potongan) ditambah margin atau tingkat keuntungan yang ditentukan dari harga perolehan bersih, bukan dari harga perolehan kotor.

Penjelasan lain tentang margin dalam menentukan jangka waktu pembiayaan adalah persentase tertentu yang ditetapkan per tahun, perhitungan margin keuntungan secara harian, maka jumlah hari dalam setahun ditetapkan 360 hari, perhitungan margin secara bulanan maka ditetapkan 12 bulan (Rosa dan Kusumawaty, 2019). Pada umumnya, nasabah melakukan pembayaran secara angsuran. Pendapatan margin *murabahah* adalah penerimaan dana (arus masuk bruto) baik tunai maupun bukan tunai yang merupakan hasil dari perhitungan persentase keuntungan yang timbul dari transaksi *murabahah* yang besarnya telah ditentukan pada awal akad sesuai dengan kesepakatan yang tercantum didalam perjanjian pembiayaan (Fasiha, 2015).

Menurut Pratiwi dan Septiarini (2014) ada dua jenis jual beli *murabahah* yaitu: 1) *murabahah* tanpa pesanan, artinya barang tetap tersedia tanpa adanya pesanan terlebih dahulu, dan 2) *murabahah* berdasarkan pesanan, artinya transaksi jual beli dilakukan apabila ada pesanan terlebih dahulu. Menurut Haryoso (2017) *murabahah* sebagai wujud dari kegiatan muamalah tentu memiliki rukun dan syarat agar kegiatannya sesuai dengan syariat Islam. *Murabahah* pada umumnya digunakan oleh bank-bank islam sebagai metode utama pembiayaan yang merupakan hampir 75% dari asetnya (Hannanong, 2017; Miftahurrohman dan Ali, 2016). Di kalangan Ulama Fiqih, keabsahan pembiayaan *murabahah* pun masih *debatable*. Ada sebagian ulama yang membolehkan karena *murabahah* merupakan jual beli, tetapi ada sebagian ulama yang melarang karena beranggapan bahwa *murabahah* itu bukanlah jual beli melainkan *hilal* untuk mendapatkan riba. Ada sebagian ulama menganggapnya sebagai *bai' alinah* yang haram hukumnya, ada sebagian ulama yang menganggapnya sebagai *bai' al-ma'dum*,

dan ada pula yang menganggapnya sebagai *ba' iatani fi bai' ah* (Lubis, 2016).

Selain sistem pembiayaan *murabahah* terdapat sistem pembiayaan jual beli yang hampir sama dengan *murabahah* yaitu *bai'bi aman ajil*. Menurut Pratiwi dan Septriani (2014), *bai'bi aman ajil* adalah sistem pembiayaan dengan akad jual beli, dimana nasabah membutuhkan barang (alat untuk sarana usaha) dan membelinya di BMT dengan pembayaran diangsur sedangkan BMT (Bank Muamalat Indonesia) menyediakan barangnya. Mengenai besarnya angsuran dan lamanya pembayaran ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Hal ini sejalan dengan penelitian Fadhila (2015) yang menyatakan bahwa persetujuan jual beli suatu barang dengan harga sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati bersama yang meliputi jangka waktu pembayaran dan jumlah angsuran.

Bai' bi aman ajil hampir tidak ada bedanya dengan *murabahah*. *Bai' bi aman ajil* merupakan salah satu pembayaran *murabahah* (Imama, 2014). Jumlah kewajiban yang harus dibayarkan nasabah adalah jumlah atas harga barang dan *mark-up* yang disepakati oleh kedua belah pihak. *Bai' bi aman ajil* sah jika periode pembayaran disebutkan secara pasti dan spesifik, misalnya 3 bulan mendatang. Jika waktu tidak disebutkan secara spesifik, maka akad jual beli batal. Barang yang diperjualbelikan dalam *bai' bi aman ajil* tidak dijelaskan dalam perjanjian *bai' bi aman ajil* karena dalam pelaksanaannya setelah akad BMT memberikan pembiayaan yang berupa uang (Pratiwi dan Septriani, 2014).

D. Murabahah Sebagai Produk Pembiayaan Bank Syariah

Murabahah yang dipraktikkan oleh bank syariah termasuk istimewa karena merupakan bentuk *murabahah* berdasarkan permintaan pembeli. Yang dimaksud *murabahah* berdasarkan permintaan pembeli adalah *murabahah* yang dilakukan atas pengajuan dari nasabah kepada bank untuk mengadakan suatu barang dengan spesifikasi tertentu dan menjualnya kepada nasabah dengan keuntungan yang disepakati bersama (Imama, 2014). Dalam mengajukan permintaan kepada bank. Nasabah berjanji membeli barang tersebut secara *murabahah* dengan pembayaran angsur. Pembiayaan seperti ini dibenarkan dan dipraktikkan oleh bank syariah di Indonesia berdasarkan fatwa

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang membolehkan *murabahah* sebagai salah satu produk atau kegiatan usaha bank syariah. Sebagai salah satu produk bank syariah, *murabahah* tidak dapat dilepaskan dari posisi bank sebagai lembaga pembiayaan, dimana mayoritas bahkan keseluruhan transaksi *murabahah* bank syariah dilakukan karena nasabah bermaksud membeli barang yang diinginkannya secara angsur. Selain itu, sebagai lembaga keuangan dan bukan lembaga dagang, maka bank syariah tidak memiliki persediaan barang. Hal ini menimbulkan konsekuensi logis, yaitu bahwa bank hanya akan mengadakan suatu barang apabila terjadi permintaan dengan bekerja sama dengan para *supplier* barang yang diinginkan nasabah (Imronudin dan Hussain, 2016).

Bank syariah di Indonesia pada umumnya dalam memberikan pembiayaan *murabahah*, menetapkan syarat-syarat yang dibutuhkan dan prosedur yang harus ditempuh oleh *musytari* yang hampir sama dengan syarat dan prosedur kredit sebagaimana lazimnya yang ditetapkan oleh bank konvensional (Mahfudz, 2018). Syarat dan ketentuan umum pembiayaan *murabahah* yaitu: umum, tidak hanya diperuntukkan untuk kaum muslimin saja; harus cakap hukum, sesuai dengan KUHPerdata; memenuhi 5G yaitu, *character* (watak), *collateral* (jaminan), *capital* (modal), *condition of economy* (prospek usaha), *capability* (kemampuan). Fenomena *murabahah* menjadi fasilitas pembiayaan yang favorit dalam bisnis syariah disamping tidak terlepas dari rendahnya risiko bisnis dan tingginya potensi keuntungan yang dapat diperoleh, bank syariah menjadi daya tarik tersendiri, sehingga perbankan syariah lebih memilih pembiayaan *murabahah* sebagai model dalam berbisnis syariah (Suwito dan Soamole, 2018; Amin, 2016). Selain itu, dari aspek jenisnya pembiayaan *murabahah* lebih fleksibel yakni dapat dilakukan dengan pesanan (terikat dan tidak terikat) dan tanpa pesanan (Bahjatulloh, 2011).

E. Pembiayaan Murabahah dalam Perbankan Syariah

Pembiayaan *murabahah* diatur dalam PSAK No. 102. Di dalam PSAK No. 102 telah diterapkan sistem akuntansi yang melihat bagaimana proses pencatatan terhadap produk pembiayaan yang memakai sistem jual beli dari proses transaksi antara pihak-pihak yang terkait menjadi sistem akuntansi yang

dipakai lembaga perbankan syariah (IAI, 2016:102; Nurdiwaty dan Widiawati, 2018). Menurut Nasir dan Sululing (2015) PSAK No.102 ini menjadi acuan dari penerapan perlakuan akuntansi menggunakan akad *murabahah* (jual beli). Didalam standar akuntansi sudah diterangkan mengenai berbagai transaksi yang harus diakui seperti pada saat penerimaan uang muka nasabah untuk pengukuran aset yang diperoleh, pengukuran piutang dan dendanya, pencatatan tiap transaksinya, penyajian laporannya dan pengungkapan lainnya. Dalam PSAK No. 102 dijelaskan bahwa pembiayaan *murabahah* dapat dilakukan dengan pesanan atau tanpa pesanan, dalam artian bahwa bank syariah lah yang menyediakan barang sesuai pesanan pembeli atau melakukan pembelian barang sekalipun ada pembeli atau tidak, sehingga perlakuan akuntansi terhadap transaksi pembiayaan *murabahah* tersebut telah diatur mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya (Parno dan Tikawati, 2016).

Menurut Wardiantika dan Kusumaningtias (2014) pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan lain berdasarkan persetujuan kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil. *Murabahah* dalam perbankan syariah didefinisikan sebagai jasa pembiayaan dengan mengambil bentuk transaksi jual beli barang antara bank dan nasabah dengan cara pembayaran angsuran. Menurut Imama (2014) menyatakan bahwa apabila jual beli *murabahah* dilakukan secara tangguh, maka selanjutnya akan menghadirkan hukum piutang atas penjual dan pembeli sehingga hal-hal berkenaan dengan etika piutang harus diperhatikan seperti pencatatan kesepakatan piutang. Dalam perjanjian *murabahah*, bank membiayai pembelian barang atau aset yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli barang itu dari pemasok barang dan kemudian menjualnya kepada nasabah tersebut dengan menambahkan suatu *mark-up* atau margin keuntungan (Rahmawaty, 2007).

Murabahah sebagaimana yang diterapkan dalam perbankan syariah pada prinsipnya didasarkan pada dua elemen pokok, yaitu harga beli serta biaya yang terkait dengan kesepakatan atas *mark-up*. Ciri dasar kontrak pembiayaan *murabahah* adalah sebagai

berikut: (1) pembeli harus memiliki pengetahuan tentang biaya-biaya terkait dan harga pokok barang dan batas *mark-up* harus diterapkan dalam bentuk persentase dari total harga plus biaya-biayanya; (2) apa yang dijual adalah barang atau komoditas dan dibayar dengan uang; (3) apa yang diperjualbelikan harus ada dan dimiliki oleh penjual dan penjual harus mampu menyerahkan barang itu kepada pembeli; dan (4) pembayarannya ditangguhkan (Imronudin dan Hussain, 2016). Menurut Prabowo (2009) keunggulan pembiayaan dari produk *murabahah* adalah bahwa nasabah dapat membeli suatu barang sesuai dengan keinginan dan kemampuan ekonominya dan pembiayaannya dilakukan dengan angsuran sehingga tidak memberatkan pihak nasabah itu sendiri.

Pembiayaan *murabahah* Bank Syariah mandiri adalah pembiayaan berdasarkan akad jual beli antara bank dan nasabah. Bank membeli barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan margin yang disepakati (Ansyar, 2015). Pembiayaan ini dapat dipergunakan untuk keperluan usaha (investasi, modal kerja) dan pembiayaan konsumen. Manfaat pembiayaan *murabahah* BSM untuk membiayai kebutuhan nasabah dalam hal pengadaan barang konsumsi seperti rumah, kendaraan atau barang produktif seperti mesin produksi, pabrik dan lain-lain. Nasabah dapat mengangsur pembayarannya dengan jumlah angsuran yang tidak akan berubah selama masa perjanjian. Fasilitas pembiayaan berupa metode kontrak ditentukan nasabah dan pembiayaan dalam valuta rupiah atau US dollar (Munif, 2018).

Salah satu bentuk jual beli yang populer adalah jual beli tangguh, yaitu jual beli dengan barang diterima pada saat akad dan pembayaran menyusul sesuai kesepakatan. Dalam jual beli tangguh, apabila kesepakatan telah terjadi, penjual menyerahkan barang kepada pembeli untuk kemudian pembeli membayar barang tersebut dalam jangka waktu yang telah disepakati (Imama, 2014). Jual beli angsur merupakan salah satu bentuk jual beli yang merupakan turunan dari jual beli tangguh dan populer pada masa sekarang, yaitu pembeli membeli barang dengan membayar uang muka dan sisanya dibayar secara angsur selama beberapa masa yang disepakati. Bentuk jual beli ini dapat menjadi halal dan dapat pula menjadi haram (Badriati, 2017).

Ketentuan halal dan haramnya hukum jual beli semacam ini sangat tergantung dalam beberapa hal seperti kejujuran dalam memberikan spesifikasi barang, pemberian syarat, serta penghitungan harga. Apabila jual beli *murabahah* dilakukan secara tangguh, maka selanjutnya akan menghadirkan hukum piutang atas penjual dan pembeli sehingga hal-hal berkenaan dengan etika piutang harus diperhatikan. Pada awalnya, jual beli secara *murabahah* bisa dilakukan secara kontrak, dimana serah terima barang dan harga dilakukan pada sat akad (Afif dan Mawardi, 2014). Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, ada yang melakukan jual beli *murabahah* dengan pembayaran tangguh. Dalam hal ini, biasanya pembeli menginginkan untu mendapatkan suatu barang akan tetapi tidak memiliki alat tukar yang cukup untuk membeli barang tersebut sehingga dia meminta pihak lain untuk menjual kepadanya secara tangguh. Jual beli semacam ini diperbolehkan walaupun penjual sedikit menaikkan harga dari pasaran dengan pertimbangan kemungkinan adanya perubahan nilai barang di kemudian hari (sebagai antisipasi kerugian) (Imama, 2014).

F. Halal Haramnya Penambahan *Mark-Up Murabahah* Ditinjau dari Aspek Syariah

Dalil yang dijadikan landasan bagi akad *murabahah* adalah firman Allah swt tentang landasan berdagang salah satunya QS an-Nisa ayat 29. “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu...” QS al-Baqarah ayat 275: ... padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...” (Rachmawati dan Damaya, 2018). Ketentuan-ketentuan *murabahah* bisa kita lihat pada sabda Rasulullah saw riwayat Al-Baihaqi dan Ibnu Majah dinilai sahih oleh Ibnu Hibban yang diikutip dari fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* “Dari Abu Said Al-Khudri bahwa Rasulullah saw bersabda, “sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.” Hadis riwayat ‘Abd al-Raziq dari Zaid bis Aslam “Rasulullah saw ditanya tentang ‘urban (uang muka) dalam jual beli, maka beliau menghalalkannya.” (Rahmawati dan Rokhman, 2015).

Murabahah, sebagaimana yang digunakan dalam perbankan syariah, prinsipnya didasarkan pada dua elemen pokok, yaitu harga beli serta biaya yang terkait, dan kesepakatan atas *mark-up* (laba) (Elwardah dan Nurhayati, 2019). *Murabahah* dapat dikatakan halal jika memenuhi syarat-syarat yang menjadikannya halal, yaitu 1) adanya kejelasan informasi mengenai besarnya modal awal (harga perolehan/pembelian). Semuanya harus diketahui oleh pembeli saat akad dan ini merupakan syarat salah satu syarat sah *murabahah*. Sebelumnya di atas telah dijelaskan dalam firman Allah bahwa transaksi *murabahah* dilandasi suka sama suka diantara kedua belah pihak sehingga dengan adanya kejelasan informasi di awal, pembeli dapat membuat keputusan apakah setuju atau tidak setuju, 2) adanya keharusan menjelaskan keuntungan (*ribh*) yang diambil penjual karena keuntungan merupakan bagian dari harga (*tsaman*). Sementara keharusan mengetahui harga barang merupakan syarat sah jual beli pada umumnya, 3) jual beli *murabahah* harus dilakukan atas barang yang telah dimiliki/hak kepemilikan telah berada ditangan penjual. Artinya bahwa keuntungan dan risiko barang tersebut ada pada penjual sebagai konsekuensi dari kepemilikan yang timbul dari akad yang sah, 4) transaksi pertama (antara penjual dan pembeli pertama) haruslah sah. Jika tidak sah, maka tidak boleh jual beli secara *murabahah* (antara pembeli pertama yang menjadi penjual kedua dengan pembeli *murabahah*), karena *murabahah* adalah jual beli dengan harga pertama disertai tambahan keuntungan, dan 5) hendaknya akad yang dilakukan terhindar dari praktik riba, baik akad yang pertama (antara penjual dalam *murabahah* sebagai pembeli dengan penjual barang) maupun pada akad yang kedua antara penjual dan pembeli dalam akad *murabahah* (Djuitaningsih, 2017).

Berbeda dengan di atas, mekanisme penjualan kredit dengan *mark-up* hukumnya mubah karena tidak terdapat *nash* yang mengharamkannya secara eksplisit dalam al-Qur'an dan sunnah Rasulullah saw. Hal ini juga tidak disamakan dengan riba dari segi manapun. Golongan Syafi'iyah, Hanafiyah, Zaid bin Ali, Al-Mu'ayyad Billah, dan Jumhur 'Ulama berpendapat mengenai hal ini adalah mubah berdasarkan keumuman dalil-dalil yang menetapkan pembolehan. Tapi, tentu dengan batasan-batasan yang jelas yang juga harus dikembalikan pada al-Qur'an dan

sunnah Rasulullah saw (Putra dkk., 2019). Penjualan dengan mekanisme kredit seperti ini punya permasalahan serius terkait metode-metode penentuan margin. Penjual boleh saja menaikkan harga dengan alasan-alasannya, asalkan tidak sampai pada batas eksploitasi dan kezaliman. Jika sampai terjadi demikian, maka haram hukumnya. Dengan tidak adanya penentuan hukum yang jelas dalam penggunaan metode-metode yang digunakan dalam praktik jual-beli kredit dan lembaga keuangan, maka praktik jual-beli kredit yang selama ini di dunia konvensional berubah status menjadi halal dan metode-metode ini dapat diterapkan pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dengan jaminan bahwa metode tersebut halal sebagaimana rekomendasi hukum halal pada metode tersebut. Hal ini berlaku sebagaimana *ushul fiqh* dalam bermuamalat yang sempat dipaparkan bahwa semua perkara didunia ini halal, sampai ada dalil yang mengharamkannya termasuk metode-metode penentuan margin pada penjualan kredit dengan akad *murabahah* ini (Ilyas, 2015).

G. Simpulan

Murabahah, sebagaimana yang digunakan dalam perbankan syariah, prinsipnya didasarkan pada dua elemen pokok, yaitu harga beli serta biaya yang terkait, dan kesepakatan atas *mark-up* (laba). *Murabahah* dapat dikatakan halal jika memenuhi syarat-syarat yang menjadikannya halal. Salah satu hadis tentang *murabahah* yaitu “dari Abu Said Al-Khudri bahwa Rasulullah saw bersabda, “sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.” Mengenai penambahan *mark-up*, kita dapat merujuk pada dalil diatas bahwa jika nasabah di awal perjanjian setuju dengan penambahan *mark up* tersebut maka itu sah. Jika kedua belah pihak di awal kesepakatan setuju, maka transaksi tersebut tidak menjadi masalah karena sebelumnya sudah dijelaskan di awal apa-apa saja ketentuan-ketentuan yang ada. Hal ini berlaku sebagaimana *ushul fiqh* dalam bermuamalah yang sempat dipaparkan bahwa semua perkara di dunia ini halal, sampai ada dalil yang mengharamkannya termasuk penambahan *mark-up* dalam *murabahah* ini.

Pembiayaan *murabahah* Bank Syariah Mandiri adalah pembiayaan berdasarkan akad jual beli antara bank dan nasabah. Bank membeli barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada

nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan margin yang disepakati. Pembiayaan ini dapat dipergunakan untuk keperluan usaha (investasi, modal kerja) dan pembiayaan konsumen. Manfaat pembiayaan *murabahah* BSM untuk membiayai kebutuhan nasabah dalam hal pengadaan barang konsumsi seperti rumah, kendaraan atau barang produktif seperti mesin produksi, pabrik dan lain-lain. Nasabah dapat mengangsur pembayarannya dengan jumlah angsuran yang tidak akan berubah selama masa perjanjian. Fasilitas pembiayaan berupa periode kontrak ditentukan nasabah dan pembiayaan dalam valuta rupiah dan US dollar.

Daftar Pustaka

- Afif, Z. N. dan I. Mawardi. 2014. Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap Laba melalui Variabel Intervening Pembiayaan Bermasalah Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2009-2013. *JESTT*, 1(8): 565-580.
- Afrida, Y. 2016. Analisis Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1(2): 155-166.
- Amin, R. 2016. Dinamika Penerapan Murabahah dalam Sistem Perbankan Syariah. *Jurnal Perbankan Syariah*, 1(1): 1-13.
- Ansyar, M. 2015. Analisis Pembiayaan Murabahah pada Pt. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (Kcp) Palu Tadulako. *e-Jurnal Katalogis*, 3(10): 96-104.
- Badriati, B. E. 2017. Kritik terhadap Implementasi Akad Murabahah di Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Ekonomi syariah*, 8(2): 264-284.
- Bahjatulloh, Q. M. 2011. Kajian Pembiayaan Murabahah Antara Teori dan Praktek. *Jurnal Muqtasid*, 2(2): 281-303.
- Djuitaningsih, T. 2017. Kesenjangan antara Konsep dan Praktik dalam akad Bai'al-Murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Media Riset Akuntansi*, 7(1): 121-135.
- Fadhila, N. 2014. Analisis Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah terhadap Laba Bank Syariah Mandiri. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*. 15(1): 65-77.
- Fasiha, 2015. Akad Murabahah dan Permasalahannya dalam Penerapan Di Lks. *Jurnal Muamalah*, 5(1): 11-19.
- Febrian, R. dan S. Mardian. 2017. Penerapan PSAK NO. 102 atas Transaksi Murabahah: Studi Pada Baitul Maal Wa Tamwil Di Depok, Jawa Barat. *Journal of Islamic Economics and Business*, 2(1): 19-40.
- Hafid, W. R., J. Majid dan M. S. S. Juardi. 2018. Penerapan Prinsip Profit Sharing dan Revenue Sharing Program Tabungan Mudharabah dan Deposito Mudharabah (Studi pada PT.

- Bank Muamalat Kantor Cabang Makassar). *Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah*, 2(1) : 65-81.
- Hannanong, I. 2017. Murabahah (Prinsip dan Mekanismenya dalam Perbankan Islam). *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum*, 15(1): 83-92.
- Haryoso, L. 2017. Penerapan Prinsip Pembiayaan Syariah (Murabahah) pada BMT Bina Usaha di Kabupaten Semarang. *Jurnal Law and Justice*, 2(1): 79-89.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2016. Standar Akuntansi Syariah. Jakarta : IAI.
- Ilyas, R. 2015. Kontrak Pembiayaan Murabahah dan Musawamah. *Bisnis*, 3(2): 290-311.
- Imama, L. S. 2014. Konsep dan Implementasi Murabahah pada Produk Pembiayaan Bank Syariah. *Iqtishadia*, 1(2): 220-247.
- Imronudin dan G. Hussain. 2016. Why Do Bank Finance Clients Prefer Mark-up to Profit Loss Sharing Principles? Evidence from Islamic Rural Banks and Small to Medium Enterprises in Indonesia. *International Journal of Economics and Financial Issue*, 6(4): 1407-1412.
- Lubis, A. 2016. Aplikasi Murabahah dalam Perbankan Syariah. *Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman*. 2(2): 181-202.
- Mahfudz. 2018. Mekanisme Pembiayaan Kpr Ib Berdasarkan Akad Murabahah di Perbankan Syariah. *Jurnal Pemikiran Islam*, 4(2): 91-108.
- Mediawati, E. dan S. Agustami. 2016. Sharia Compliance on Murabaha Financing. *Advances in Economics, Business and Management Research*, 15(1): 161-162.
- Menne, F., M. Idris dan Erni. 2017. Murabahah Accounting in Bni Syariah Makassar. *Jurnal Riset*, 3(006): 18-32.
- Menne, F., M. Idris dan Erni. 2017. Murabahah accounting in BNI Syariah Makassar. *Indonesia Prime*, 2(1): 14-21.

- Miftahurrohman dan H. Ali. 2016. Determinan yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 6(1): 31-44.
- Mughni, J. A. 2019. Analisis Penerapan Akuntansi Syariah berdasarkan Psak Nomor.102 pada Pembiayaan Murabahah di Bmt Al-Ittihad Cikurubuk Tasikmalaya. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 1(1): 1-10.
- Munif, A. 2018. Filosofi Dasar Akad Murabahah dan Mudharabah: Studi Perbandingan dalam Upaya Menggerakkan Sektor Riil. *Jurnal Hukum Islam*, 16(2): 222-236.
- Nasir, S. M. dan S. Sululing. 2015. Penerapan Akuntansi Murabahah terhadap Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Luwuk. *Jurnal Akuntansi*, XIX(01): 109-128.
- Nizar, A. S. dan M. K. Anwar. 2015. Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil dan Intellectual Capital Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah. *Jurnal Akuntansi*, 6(2): 127-143.
- Nurdiwati, D. dan H. S. Widiawati. 2018. Akuntansi Syariah untuk Pembiayaan Murabahah, Mudharabah Serta Kesesuaian Dengan Psak Syariah No 102 dan 105 pada Kspps Bmt Nu Jombang. *Jurnal Akuntansi & Ekonomi Fe. Un Pgri*, 3(2): 24-37.
- Nurfajri, F. dan T. Priyanto. 2019. Pengaruh Murabahah, Musyarakah, Mudharabah, dan Ijarah terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal MONEX*, 8(2) : 1-18.
- Parno dan Tikawati. 2016. Analisis Penerapan Psak No. 102 untuk Pembiayaan Murabahah Pada Kpn lain Samarinda. *Jurnal Ekonomi Islam*, 4(2): 285-316.
- Perwitasari, D. A., A. Roziq dan A. B. Sulistyo. 2017. Internalizing Values of Justice in Mudharabah Financing Practices and Mudharabah Deposits. *International Journal of Social Science and Business*, 1(2): 98-107.

- Prabowo, B. A. 2009. Konsep Akad Murabahah pada Perbankan Syariah (Analisa Kritis terhadap Aplikasi Konsep Akad Murabahah di Indonesia dan Malaysia). *Jurnal Hukum*, 16(1): 106-126.
- Pramono, N. H. 2013. Optimalisasi Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil pada Bank Syariah di Indonesia. *Accounting Analysis Journal*, 2(2) : 154-162.
- Pratiwi, I. E. dan D. F. Septiari. 2014. Analisis Penerapan Psak – 102 Murabahah (Studi Kasus pada Ksu Bmt Rahmat Syariah Kediri). *Jurnal Akuntansi*, 6(1): 17-32.
- Putra, A. M., A. M. Habbe dan M. Ashari. 2019. Analisis Penentuan Harga Jual dan Margin Akad Murabahah pada BMT Al-Amin Makassar. *JRAK*, 10(2): 146-169.
- Rachmawati, E. N. dan W. Darmaya. 2018. Analisis Penetapan Margin pada Pembiayaan Murabahah dan Nisbah Bagi Hasil pada Pembiayaan Mudharabah di Bmt Al-Ittihad Pekanbaru. *Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 1(2): 76-89.
- Rahmawati, F. A. dan W. Rokhman. 2015. Analisis Faktor-faktor yang memengaruhi Penetapan Margin pada Pembiayaan Murabahah di BMT Se-Kabupaten Jepara. *Equilibrium*, 3(2): 238-253.
- Rahmawaty, A. 2007. Ekonomi Syari'ah: Tinjauan Kritis Produk Murabahah dalam Perbankan Syari'ah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam*, 1(2): 187-203.
- Rosa, S. S. dan M. Kusumawaty. 2019. Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Suku Bunga BI terhadap Pendapatan Margin Murabahah Perbankan Syariah. *Jurnal Akuntanika*, 5(1): 94-103.
- Suwito dan B. Soamole. 2018. Formulation Of Profit Determination In Business Murabahah (Empirical Study The Bank Syari'ah Intown Ternate). *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 6(1): 92-113.

- Utami, T. dan B. Hasmano. 2014. Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Syariah terhadap Piutang Murabahah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 2(3): 275-290.
- Wardi, J. dan G. E. Putri. 2011. Analisis Perlakuan Akuntansi Syariah untuk Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, serta Kesesuaiannya dengan Psak No. 102, Dan 105. *Pekbis Jurnal*, 3(1): 447-455.
- Wardiantika, L. dan R. Kusumaningtias. 2014. Pengaruh Dpk, Car, Npf, Dan Swbi terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah Tahun 2008-2012. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 2(4): 1550-1561.
- Yuspin, W. 2007. Penerapan Prinsip Syariah dalam Pelaksanaan Akad Murabahah. *Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1): 55-67.
- Yusuf, M. 2013. Analisis Penerapan Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Pesanan dan tanpa Pesanan serta Kesesuaian Dengan Psak 102. *Binus Bussinees Review*, 4(1): 15-29.
- Zainal, V. R. dan Y. Sarkan. 2017. Shariah Compliance of House Ownership Financing with Murabahah Scheme. *Online Journal of Research in Islamic Studies*, 4(2): 47-57.

PRINSIP KEADILAN DALAM BAGI HASIL *MUDHARABAH*

A. Pendahuluan

Pada saat ini perkembangan lembaga keuangan syariah begitu pesat. Hal ini dapat dilihat dengan semakin banyaknya jumlah lembaga keuangan syariah dari tahun ke tahun. Fenomena ini didasari oleh meningkatnya kesadaran masyarakat muslim di Indonesia yang menilai pentingnya lembaga syariah dalam pengelolaan keuangan yang berlandaskan pada hukum Islam. Menurut Purwoko (2017) berkembangannya lembaga keuangan syariah yang berlandaskan prinsip Islam merupakan salah satu upaya untuk menerapkan prinsip Islam dalam kegiatan ekonomi. Lembaga keuangan syariah didirikan bertujuan untuk mengembangkan prinsip-prinsip syariah dalam transaksi keuangan dan perbankan. Prinsip syariah merupakan prinsip hukum Islam dalam kegiatan usaha berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, sehingga segala aktivitasnya sesuai dengan syariat Islam (Imamah, 2019 dan Mawarid, 2014). Salah satu lembaga keuangan syariah yang mengalami perkembangan yaitu bank syariah.

Menurut Rufaidah (2019) bank syariah merupakan lembaga perbankan yang menggunakan sistem dan operasi berdasarkan prinsip-prinsip hukum atau syariah Islam yang diatur dalam al-Qur'an dan hadis. Bank syariah yang berdasarkan prinsip syariah Islam tidak mengenal adanya bunga karena dianggap riba dan dilarang dalam agama, sehingga produk ataupun jasa yang ada pada bank syariah berbeda dengan bank konvensional. Sebagian besar produk bank syariah menggunakan prinsip bagi hasil (Sriyati, 2016). Sejalan dengan penelitian Sari (2019) yang mengungkapkan bahwa bank syariah dalam menjalankan

operasinya tidak menggunakan sistem bunga sebagai dasar untuk menentukan imbalan yang akan diterima atas jasa pembiayaan yang diberikan. Demikian pula, imbalan yang diberikan kepada nasabah atas dana yang dititipkan kepada bank. Penentuan imbalan yang diinginkan dan yang akan diberikan semata berdasarkan pada prinsip bagi hasil.

Menurut Sujana (2018) mengungkapkan bahwa pembiayaan di bank syariah yang disalurkan kepada *mudharib* di bank syariah tujuannya untuk memenuhi kebutuhan akan kekurangan dana usaha agar menghindari riba, untuk itu Islam mengaturnya agar saling bersarikat antara pemilik dana (*shohibul-maal*) dan pengurus dana (*mudharib*). Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada masyarakat didasarkan pada tujuan dan kebutuhan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah, sehingga akad yang diterapkanpun berbeda-beda. Akad pembiayaan yang paling banyak diterapkan oleh bank syariah selama ini yaitu akad *murabahah*, *mudharabah* dan *musyarakah* (Suryanto, 2016). Salah satu bentuk penyaluran dana berdasarkan prinsip syariah yang tidak dikenakan bunga, melainkan dengan konsep bagi hasil yaitu *mudharabah*. *Mudharabah* merupakan salah satu solusi yang ditawarkan oleh bank syariah guna menghindari transaksi riba. Saat dilakukannya kontrak, baik bank syariah sebagai *shahibul maal* maupun *mudharib* tidak menetapkan tingkat bunga tertentu sebagai keuntungan atau beban yang perlu dibayar (Zulfikar, 2019).

Menurut Purwoko (2017) akad *mudharabah* itu sendiri adalah suatu transaksi investasi kerjasama antara dua pihak yang mana pihak pertama (pemilik dana/*shahibull maal*) yaitu pihak yang menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana/*mudharib*) sebagai pihak yang akan mengelolah dana. Keuntungan yang didapat akan dibagi sesuai kesepakatan yang telah ditetapkan oleh kedua pihak, tetapi apabila mengalami kerugian maka hanya akan ditanggung oleh pemilik dana saja, selama kerugian bukan merupakan kesalahan dari pihak pengelola. Apabila kerugian disebabkan oleh pengelola seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan maka pihak pengelola akan menanggung kerugian tersebut. Penerapan metode pengukuran akuntansi khususnya pada pembiayaan

mudharabah harus disesuaikan dengan peraturan perbankan dan ketentuan-ketentuan syariah yang telah diatur (Mawarid, 2014).

Saat ini dalam praktik pembiayaan *mudharabah* terdapat beberapa ketidakseimbangan antara pemilik dana dan pengelola dana. Ketidakseimbangan juga terjadi dalam pembagian bagi hasil. Menurut Perwitasari (2017) mengungkapkan bahwa dalam sistem bagi hasil baik dalam penyaluran dana (pembiayaan *mudharabah*) maupun penghimpunan dana (deposito *mudharabah*) pada suatu bisnis syariah para pelaku bisnis dituntut untuk amanah, berlaku adil, dan tidak berbuat zalim yang berpraktik berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Akad *mudharabah*, asas keadilan benar-benar dapat diwujudkan dalam dunia nyata dikarenakan kedua belah pihak yang terkait, sama-sama menikmati keuntungan yang diperoleh. Sebagaimana mereka semua menanggung kerugian bila terjadi secara bersama-sama, pemodal menanggung kerugian materi (modal) sedangkan pelaku usaha menanggung kerugian non-materi (tenaga dan pikiran) (Sahban, 2017). Bab ini akan membahas mengenai *internalisasi* prinsip keadilan dalam sistem bagi hasil *mudharabah*, sehingga dapat mewujudkan kemaslahatan umat.

B. Syariah Enterprise Theory

Syariah enterprise theory mencakup nilai-nilai syariah (keadilan, *rahmatan lin alamin*, dan *maslahah*) karena teori menjelaskan bahwa kesejahteraan tidak hanya diperuntukan oleh pemilik modal. Dengan demikian pemilik modal maupun pengelola modal harus saling menjaga amanah dengan mengingat bahwa segala tindakan akan diminta pertanggungjawabannya. Menurut Hafid (2018) *shariah enterprise theory* adalah teori yang dibangun berdasarkan metafora amanah dan metafora zakat, lebih menghendaki keseimbangan antara sifat egoistik dan altruistik. *Syariah enterprise theory* memiliki cakupan akuntabilitas yang luas, akuntabilitas yang dimaksud adalah akuntabilitas kepada Tuhan, manusia, dan alam. Bentuk akuntabilitas ini berfungsi sebagai tali pengikat agar akuntansi syariah selalu terhubung dengan nilai-nilai yang dapat membangkitkan kesadaran ketuhanan. Konsep penting dalam *shariah enterprise theory* adalah Allah sebagai pencipta dan pemilik tunggal dari seluruh sumber daya yang ada di dunia ini. Oleh itu,

yang berlaku dalam *syariah enterprise theory* adalah Allah adalah sumber amanah utama, karena Allah pemilik yang tunggal dan mutlak (Nurfajri, 2019).

Menurut Triyuwono (2006) dalam Pramono (2013) sesuai dengan *shariah enterprise theory*, bahwa distribusi kekayaan atau nilai tambah tidak hanya berlaku pada partisipan yang terkait langsung atau yang memberikan kontribusi kepada operasi perusahaan, tetapi pihak lain yang tidak terkait langsung dengan bisnis yang dilakukan perusahaan atau pihak yang tidak memberikan kontribusi keuangan dan *skill*. Pemikiran ini dilandasi premis yang mengatakan bahwa manusia adalah *Khalifatullah fil Ardh* yang membawa misi menciptakan dan mendistribusikan kesejahteraan bagi seluruh manusia dan alam. Premis ini mendorong *shariah enterprise theory* untuk mewujudkan nilai keadilan terhadap manusia dan lingkungan alam. Oleh karena itu, *shariah enterprise theory* akan membawa kemaslahatan *stakeholders*, *stockholders*, masyarakat dan lingkungan alam. Oleh karena itu dengan sistem bagi hasil yang tidak masalah dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah maka diperlukan kesadaran ketuhanan dengan menjadikan Tuhan sebagai *stakeholder* tertinggi (Hafid dkk., 2018). Selain *shariah enterprise theory*, teori bagi hasil juga digunakan dalam akuntansi syariah.

C. Teori Bagi Hasil

Bunga yang diharamkan dalam syariah membawa konsekuensi adanya penghapusan bunga secara mutlak. Teori bagi hasil ini dibangun sebagai tawaran baru di luar sistem bunga yang cenderung tidak mencerminkan keadilan (*injustice/dzalim*) karena memberikan diskriminasi terhadap pembagian resiko maupun untung bagi para pelaku kegiatan ekonomi. Bagi hasil yang merupakan prinsip yang diterapkan oleh bank syariah memberikan manfaat bagi masyarakat. Dengan kata lain, ada keunggulan yang dimiliki sistem bagi hasil dibandingkan sistem bunga. Salah satu keunggulan dari bagi hasil ini yaitu memberikan keadilan sebab keuntungan dibagi tanpa ada pihak yang dirugikan dan kerugian ditanggung bersama selama bukan disebabkan oleh kelalaian salah satu pihak (Rufaida, 2019). Menurut Sri dkk. (2019) mengungkapkan bahwa sistem bagi hasil yang diterapkan oleh bank syariah merupakan sistem ketika

peminjam dan yang meminjam berbagai resiko dan keuntungan dengan pembagian sesuai dengan kesepakatan, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. *Profit – loss sharing* (bagi hasil) berarti keuntungan atau kerugian yang mungkin timbul dari kegiatan ekonomi/bisnis ditanggung secara bersama-sama (Yahya, 2011). Menurut Suherman (2017) *profit and loss sharing* dalam pelaksanaannya merupakan bentuk dari perjanjian kerjasama antara pemodal dan pengelola modal dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, dimana diantara keduanya terikat kontrak bahwa di dalam bisnis jika memperoleh keuntungan akan dibagi kepada kedua pihak sesuai dengan nisbah kesepakatan di awal perjanjian. Begitu pula bila bisnis mengalami kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua pihak sesuai porsi masing-masing. Sistem bagi hasil menjamin adanya keadilan dan tidak ada pihak yang terekploitasi (Natalia dkk., 2014)

Menurut Menurut Yahya (2011) dalam atribut nisbah bagi hasil tidak terdapat suatu *fixed and certai return* sebagaimana bunga, tetapi *profit and loss sharing* dilakukan berdasarkan produktifitas nyata dari produk tersebut. Sejalan dengan penelitian yang Setiono (2015) yang mengungkapkan bahwa dalam perjanjian bagi hasil yang disepakati adalah proporsi pembagian hasil dalam ukuran persentase atas kemungkinan hasil produktivitas nyata. Teori bagi hasil atau *Profit and Loss Sharing* (PLS) dikembangkan dalam dua model yaitu model *mudharabah* dan *musyarakah*. Model *mudharabah* merujuk pada bentuk kerjasama usaha antar dua belah pihak. pihak pertama yaitu yaitu *shahibul maal* dan pihak lainnya yaitu *mudharib*. Sedangkan model *musyarakah* merupakan akad kerjasama.

D. Konsep Keadilan dan Masalah

Keadilan yang ditunjukkan oleh hukum Islam adalah keadilan mutlak dan sempurna bukan keadilan relatif dan parsial seperti hukum Yunani, Romawi maupun produk lainnya. Menurut Andriyaldi (2017) prinsip keadilan merupakan pilar penting dalam ekonomi islam, penegakan keadilan telah ditekankan oleh al-Qur'an sebagai misi utama para Nabi yang diutus Allah swt. Allah swt. Yang menurunkan Islam sebagai sistem kehidupan bagi seluruh umat manusia, menekankan pentingnya keadilan dalam setiap sektor, baik ekonomi, politik

maupun sosial. Keadilan (*al'adalah*) mengandung arti bahwa selalu menempatkan sesuatu pada yang berhak dan sesuai porsinya yang direalisasikan dalam bingkai muamalah yang melarang adanya unsur riba atau bunga, kezaliman (*dzulm*), *masysir* (unsur judi dan sikap spekulatif), *gharar* (unsur ketidakjelasan), dan penggunaan unsur haram dalam barang, jasa maupun aktivitas operasi (Perwitasari, 2017). Menurut Helmi (2015) keadilan merupakan upaya untuk menemukan keseimbangan, persamaan, kebenaran serta memutuskan jika terdapat pelanggaran yang telah diatur secara formalitas, hal ini bersifat prosedural. Adanya keadilan prosedural diharapkan keadilan substansial terwujud. Tanpa adanya keadilan prosedural maka keadilan substansial tidak akan terwujud, serta tanpa keadilan substansial maka keadilan prosedural tidak menyentuh realitas masyarakat. Menurut Lukman dkk. (2016) keadilan dapat tercipta apabila kepentingan dan kewajiban seluruh aspek objek keadilan dapat terpenuhi. Minimal pengorbanan dan perolehan yang diperoleh masing-masing objek keadilan relevan dan masuk akal.

Menurut Sahban (2017) asas dari semua akad adalah keadilan. Allah swt. berfirman dalam QS al-Hadid ayat 25 yang berbunyi sesungguhnya kami telah mengutuskan para Rasul dengan bukti-bukti, dan kami telah menurunkan pada mereka al-Kitab dan timbangan (standar yang *haq* dan *bathil*), agar manusia menegakan keadilan. Menurut Rangkuti (2017) keadilan memiliki beberapa makna yaitu 1) adil berarti sama, berarti tidak membedakan seseorang dengan yang lain. Persamaan yang dimaksud dalam konteks ini adalah persamaan hak; 2) adil berarti seimbang, seandainya ada salah satu anggota tubuh kita berlebih atau berkurang dari kadar atau syarat yang seharusnya, pasti tidak akan terjadi keseimbangan (keadilan); 3) adil berarti perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak tersebut pada setiap pemiliknya. Adil dalam hal ini bisa didefinisikan sebagai *wadh al-syai' fi mahallih* (menempatkan sesuatu pada tempatnya). Lawannya adalah *zalim*, yaitu *wadh' al-syai' fi ghairi mahallih* (menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya). Pengertian keadilan seperti ini akan melahirkan keadilan sosial; 4) adil yang dinisbatkan pada ilahi, semua wujud tidak memiliki hak atas Allah swt. Keadilan ilahi merupakan

rahmat dan kebaikan-Nya. Kebaikan-Nya mengandung konsekuensi bahwa rahmat Allah swt. Tidak tertahan untuk diperoleh sejauh makhluk itu dapat meraihnya. Allah disebut *qaa'iman bi al qisth* (yang menegakkan keadilan). Allah swt berfirman dalam QS Ali-Imran ayat 18 yang artinya tidak ada tuhan melainkan dia (yang berhak disembah), yang menegakkan keadilan . para malaikat dan orang-orang berilmu (juga menyatakan yang demikian itu). Tidak ada Tuhan melainkan dia (yang berhak disembah), Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Syariah Islam menginginkan manusia mencapai dan memelihara kesehjahteraannya. Menurut Imam Syatibi, *masalahah* adalah sifat atau kemampuan barang atau jasa yang mendukung elemen-elemen dan tujuan dari kehidupan manusia dimuka bumi ini (Khasanah, 2010). Menurut Qorib (2016) *masalahah* yaitu mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan. Prinsip kemaslahatan esensinya merupakan segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan kolektif. Sejalan dengan Perwitasari (2017) yang mengungkapkan kemaslahatan (*masalahah*) mengandung arti bahwa segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, dan individual dan kolektif serta harus memenuhi unsur-unsur yang menjadi tujuan ketetapan syariah (*maqasyid* syariah) yaitu pemeliharaan terhadap agama (*dien*), akal (*aql*), keturunan (*nasl*), jiwa (*nafs*) dan harta benda (*Maal*). Kemaslahatan yang diakui harus memenuhi dua unsur yakni kepatuhan syariah (halal) serta bermanfaat dan membawa kebaikan dalam semua aspek (Ardiansyah, 2014).

Maslahah dapat dikategorikan berdasarkan kualitas dan kepentingan kemaslahatan, kandungan kemaslahatan, berubah atau tidaknya kemaslahatan, dan keberadaan *masalahah*. Dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan, ulama ushul fiqh membaginya menjadi tiga *dhawabih* (tingkatan) yaitu *masalahah dururiyah*, *masalahah hajiyyah* dan *masalahah tahsiniyah*. Dilihat dari segi kandungan *masalahah*, para ulama ushul fiqh membaginya menjadi *masalahah ammah* dan *masalahah khassah*. Jika dilihat dari segi berubah atau tidaknya *masalahah*, dibagi menjadi dua yaitu *masalahah sabita* dan *masalahah mutaqayyirah*. Sedangkan dilihat dari segi

keberadaan *masalah* menurut syara' *masalah* dibagi menjadi *masalah mu'tabarah*, *masalah mulghah* dan *masalah mursalah* (Qorib, 2016). Menurut Ardiansyah (2014) *masalah ammah* (kemaslahatan umum) merupakan landasan muamalah, yaitu kemaslahatan yang dibingkai secara *syar'i*, bukan semata-mata *profit motive* dan *material rentability* sebagaimana dalam ekonomi konvensional.

E. Konsep *Mudharabah*

Menurut Fadhila (2015) *mudharabah* berarti ungkapan penyerahan hak milik seseorang kepada orang lain sebagai usaha. Keuntungan yang diperoleh atas usaha yang dilakukan dibagi bersama, sedangkan jika terjadi kerugian maka hal tersebut ditanggung oleh pemilik modal. Sementara menurut syara' *mudharabah* berarti akad dua pihak untuk bekerja sama dalam perdagangan, salah satu pihak menyerahkan dana kepada pihak lainnya sebagai modal usaha yang halal dan produktif. Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan kesepakatan. Menurut Marpaung (2012) *Mudharabah* merupakan transaksi yang harus dilaksanakan atas dasar kepercayaan diantara dua belah pihak. Kepercayaan harus didasari dengan penerapan akidah, akhlaq, dan moral sesuai dengan ketentuan syariah. Sedangkan, menurut Rokhlinasari (2016) *mudharabah* menjadi wahana utama untuk lembaga keuangan syariah dalam memobilisasi dana masyarakat dan untuk menyediakan fasilitas, yaitu fasilitas pembiayaan bagi para nasabah. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 105 pada paragraf 4, *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antar dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola dan keuntungan usaha dibagi antar mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian *financial* hanya ditanggung oleh pemilik dana (Azis, 2019).

Menurut Hadi (2016) akad *mudharabah* merupakan suatu transaksi pendanaan atau investasi yang berdasarkan kepercayaan. Kepercayaan ini sangat penting, karena dalam akad *mudharabah* pemilik dana tidak boleh ikut campur di dalam manajemen perusahaan atau proyek yang dibiayai dengan dana dari pemilik dana tersebut, kecuali sebatas memberikan saran dan

pengawasan pada pengelolaan dana. Oleh karena itu, pemilik dana sangat perlu mencari pengelola dana yang berakhlak mulia, jujur, dapat dipercaya, kompeten dan benar. Secara muamalah, pemilik modal (*shahibul maal*) menyerahkan modalnya kepada pedagang atau pengusaha (*mudharib*) untuk digunakan dalam aktivitas perdagangan atau usaha. Keuntungan atas usaha perdagangan yang dilakukan oleh *mudharib* itu akan dibagihasilkan dengan *shahibul maal*. Pembagian hasil usaha berdasarkan kesepakatan yang telah dituangkan dalam akad (Azis, 2019). Menurut Rokhlinasari (2016) *mudharabah* diklasifikasi menjadi 3 macam yaitu *mudharabah muthalaqah*, *mudharabah muqayyadah*, dan *mudharabah musytarakah*. *Mudharabah muthalaqah* adalah *mudharabah* dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana pengelolaan dananya. *Mudharabah muqayyadah* adalah *mudharabah* dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana, antara lain mengenai tempat, cara dan obyek investasi. *Mudharabah musytarakah* adalah bentuk *mudharabah* yang mana pengelola dan menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama usaha atau investasi.

Menurut Nurdiwati (2018) pembiayaan *mudharabah* di atur dalam PSAK No 105. Di dalam PSAK 105 telah ditetapkan sistem akuntansi yang melihat proses pencatatan terhadap produk pembiayaan yang memakai sistem kerjasama bisnis dimana pihak pertama menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. PSAK No.105 bertujuan untuk mengakui, mengukur, menyajikan dan mengungkapkan transaksi-transaksi atau kejadian-kejadian operasional organisasi. Akan tetapi penekanan pada PSAK tersebut adalah pada pengakuan dan pengukuran transaksi yang terjadi pada *mudharabah* sehingga dapat memberi penilaian pada transaksi yang berlaku dilapangan. Dalam PSAK No.105 juga mengatur perlakuan akuntansi lembaga keuangan syariah baik bank maupun non-bank (Wulandari, 2016). Diterbitkannya PSAK No.105 yang mengatur akuntansi pembiayaan *mudharabah*, maka seharusnya lembaga keuangan bank maupun non bank yang melakukan transaksi dengan akad *mudharabah* dapat berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah dalam perlakuan akuntansinya yang sesuai dengan PSAK No.105.

Pembiayaan *mudharabah* merupakan perjanjian atas sesuatu jenis perkongsian, dimana pihak pertama menyediakan dana dan pihak kedua bertanggungjawab atas pengelolaan usaha. Keuntungan hasil usaha dibagi sesuai dengan nisbah porsi bagi hasil yang telah disepakati bersama sejak awal. Oleh karena itu, apabila mengalami kerugian *shahibul maal* akan kehilangan sebagian imbalan dari hasil kerja keras dan *managerial skill* selama proyek berlangsung (Fadhila, 2015). Pembiayaan *mudharabah* dikembangkan dengan prinsip bagi hasil, dimana prinsip bagi hasil ini berbeda dengan prinsip bunga sebagaimana yang terdapat dalam produk konvensional. Bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan, bila usaha merugi maka kerugian akan ditanggung oleh kedua belah pihak sedangkan bunga pembayarannya bersifat tetap tanpa mempertimbangkan apakah proyek yang dijalankan oleh nasabah untung atau rugi. Menurut Imamah (2019) dalam pembiayaan *mudharabah* keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan dalam kontrak, sedangkan apabila mengalami kerugian maka ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian pengelola dana (*mudharib*). Seandainya kerugian itu disebabkan oleh kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional No. 7/DSN-MUI/IV/2000 menjelaskan bahwa dalam prinsipnya pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan di dalamnya, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, bank dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang sudah disepakati (Purwoko, 2017). Menurut sari (2019) ada 3 ketentuan umum dari pembiayaan *mudharabah* yaitu 1) jumlah modal yang disetorkan kepada nasabah selaku pengelola dana harus diserahkan tunai, dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang, 2) hasil usaha yang dibagi sesuai dengan perhitungan dalam akad, pada setiap bulan atau waktu yang disepakati. Bank selaku pemilik modal menanggung kerugian kecuali akibat kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah, dan 3) bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan, namun tidak berhak mencampuri urusan nasabah.

Salah satu produk dari *mudharabah* adalah deposito *mudharabah*. Deposito merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah penyimpan dengan bank (Sriyati, 2016). Berdasarkan Fatwa DWSN-MUI Nomor 3 Tahun 2000 menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan dalam syariah adalah deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*. Dalam transaksi deposito *mudharabah*, nasabah bertindak sebagai pemilik dana dan bank bertindak sebagai pengelola dana (Umiyati, 2016). Menurut Hafid dkk. (2018) mengungkapkan bahwa deposito *mudharabah* merupakan simpanan berjangka dengan akad *mudharabah* dimana pemilik dana (*shahibul maal*) mempercayakan dananya oleh bank untuk dikelola atau bertindak sebagai *mudharib* dengan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati sejak awal. Secara teknis deposito *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana nasabah bertindak sebagai pemilik dana dan bank bertindak sebagai pengelola dana.

Bank syariah dituntut transparan dalam memberikan informasi terkait hasil yang diperoleh serta pembagiannya dalam perhitungan bagi hasil kepada deposan, sehingga dapat diketahui besarnya perolehan bagi para deposen (Sriyati, 2016). Menurut Umiyati (2016) Ketentuan umum dalam deposito *mudharabah* yaitu 1) dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana, 2) dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembannya, termasuk didalamnya *mudharabah* dengan lain pihak, 3) modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang, 4) pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening, dan 5) bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.

F. Nilai Keadilan dalam Sistem Bagi Hasil *Mudharabah*

Prinsip bagi hasil merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank syariah secara keseluruhan. Menurut Rosita (2011) secara syariah prinsip bagi hasil berdasarkan kaidah *al-mudharabah*. Berdasarkan prinsip ini akan

ada pihak sebagai *mudharib* dan *shahibul maal*. Antara kedua pihak ini akan diadakan akad *mudharabah* yang menyatakan pembagian keuntungan masing-masing pihak. PSAK 105 paragraf 11 menjelaskan bahwa pembagian hasil usaha *mudharabah* dapat dilakukan berdasarkan prinsip *revenue sharing* atau *profit sharing*. Berdasarkan prinsip *revenue sharing*, dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto (*gross profit*) bukan total pendapatan (*omset*) sedangkan jika berdasarkan prinsip *profit sharing* dasar pembagian hasil usahanya adalah laba neto (*net profit*) yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana *mudharabah* (Imamah, 2019). Menurut Rokhlinasari (2016) mengungkapkan bahwa pada akhir bulan, setelah perhitungan pendapatan dari pembiayaan didapatkan, bank syariah akan membagi keuntungan sesuai proporsi dana nasabah dan nisbah bagi hasilnya. Ketika bank syariah mengalami kerugian, maka diterima atau tidaknya bagi hasil tergantung dari sistem bagi hasil yang diterapkan. Apabila sistem bagi hasil yang diterapkan *revenue sharing* maka bagi hasil akan tetap diterima. Namun, jika yang digunakan *profit sharing*, maka nasabah hanya akan menerima bagi hasil jika memperoleh laba. Pada aturan syariah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan dulu pada awal terjadinya kontrak (akad).

Pada pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan, akan diperoleh keuntungan bagi hasil dari nisbah yang telah disepakati. Pendapatan bagi hasil dapat diperoleh jika pengelola dana dapat memaksimalkan usaha yang dijalankannya dengan optimal. Seluruh dana dipercayakan oleh pemberi modal (*shahibul maal*) kepada Pengelola dana (*mudharib*) untuk dapat dimaksimalkan dalam melaksanakan kegiatan usahanya dan dapat menghasilkan keuntungan bagi hasil (Nurfajri, 2019). Menurut Sriyati (2016) besarnya penentuan nisbah bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai dengan kesepakatan bersama dan harus terjadi kerelaan dimasing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan. Dalam sistem bagi hasil, baik dalam penyaluran dana (pembiayaan *mudharabah*) maupun penghimpunan dana (deposito *mudharabah*) pada suatu bisnis syariah, para pelaku bisnis dituntut untuk amanah, berlaku adil dan tidak berbuat zalim yang berpraktik berdasarkan prinsip-prinsip syariah (Perwitasari, 2017).

Prinsip keadilan merupakan pilar penting dalam ekonomi Islam, penegakan keadilan telah ditekankan oleh al-Qur'an sebagai misi utama para Nabi yang diutus Allah swt. Allah swt yang menurunkan Islam sebagai sitem kehidupan bagi seluruh umat manusia, menekankan pentingnya keadilan dalam setiap sektor, baik ekonomi, politik maupun sosial (Andriyaldi, 2017). Konsep bagi hasil merupakan prinsip yang paling mendasar dari ekonomi Islam, yang dapat mendukung aspek keadilan. Aktivitas bagi hasil ini dibangun berdasarkan kesepakatan antar pemodal dan pengelola dana untuk memberikan pembagian hasil berdasarkan persentase tertentu dari hasil usaha. Kesepakatan ini dilakukan dengan adil dan transparan. Adil artinya setial pihak mendapatkan bagi hasil sesuai dengan kontribusi yang diberikan yaitu modal dan keterampilan ataupun tenaga (Waluyo, 2016). Menurut Perwitasari (2017) implementasi keadilan dalam kegiatan usaha berupa aturan prinsip muamalah yang melarang adanya unsur riba, kedzaliman, *maysir*, *gharar*, dan haram. Prinsip keadilan dalam bermuamalah harus memenuhi nilai-nilai keadilan antara pihak yang melakukan akad dalam bermuamalah misalnya keadilan dalam pembagian hasil antara pemilik modal (*shahibul maal*) dengan pengelola modal (*mudharib*). Prinsip keadilan ini menjadi nilai-nilai dalam pengimplementasian akad *mudharabah*. Artinya bahwa bank syariah harus benar-benar besikap adil, khususnya dalam membuaat pola hubungan antara nasabah dengan nasabah, maupun nasabah dengan bank syariah, terkait hak dan kewaajiban masing-masing (Shaban, 2017).

Akad *mudharabah*, asas keadilan benar-benar dapat diwujudkan dalam dunia nyata, karena kedua belah pihak yang terkait yaitu *shahibul maal* dan *mudharib* sama-sama merasakan keuntungan yang diperoleh. Serta sama-sama menanggung kerugian, dimana *shahibul maal* menanggung kerugian materi (modal) dan *mudharib* menanggung kerugian non-materi (tenaga daan pikiran). Islam mengganti sistem bunga menjadi sistem bagi hasil yang ditarapkan dalam ekonomi syariah jelas lebih berkeadilan (Shaban, 2017). Sejalan dengan penelitian Srisusilawati (2017) yang mengungkapkan nilai keadilan dalam akad *mudharabah* terletak pada keuntungan dan pembagian resiko pada masing-masing pihak yang sedang melaakukan kerjasama sesuai dengan porsi keterlibatannya. Kedua belah pihak akan

menikmati keuntungan proporsional, jika kerjasama tersebut mendapatkan keuntungan. Sebaliknya masing-masing pihak menerima kerugian secara proporsional, jika usaha yang digalang bersama tidak mendapatkan hasil. Bagi pemberi dana (*shahibul maal*) resiko yang diperoleh yaitu kehilangan uang yang diinvestasikan dan dari pihak pengelola dana (*mudharib*) menerima resiko berupa kehilangan tenaga dan pikiran dalam melakukan pengelolaan dana.

Menurut Siregar (2016) wujud dari prinsip keadilan dalam bermitra yaitu apabila jumlah perolehan keuntungan disisi mitra pengguna meningkat, maka nominal bagi hasil yang diperoleh oleh bank syariah dan penyimpan dana meningkat. Demikian pula sebaliknya, apabila terjadi penurunan dana atau kerugian disisi mitra pengguna dana, maka bank syariah dan nasabah akan memperoleh nominal bagi hasil yang menurun atau bahkan turut memikul kerugian. Lembaga keuangan syariah sebaiknya mengedepankan prinsip sistem bagi hasil dan resiko jika ingin mengedepankan prinsip keadilan dan kebersamaan dalam berusaha, baik dalam memperoleh keuntungan maupun dalam menghadapi resiko (Imamah, 2019). Menurut Khasanah (2010) mengungkapkan bahwa dalam pelaksanaan bersyarikat atau proses bagi hasil tidak boleh berbuat dzalim dan harus berlaku adil. Pemilik modal tidak boleh sewenang-wenang dengan membuat keputusan sendiri yang hanya menguntungkan pada dirinya saja, sedangkan kepentingan lainnya diabaikan.

G. Sistem Bagi Hasil dalam Mewujudkan Kemaslahatan Umat

Syariah Islam menginginkan manusia mencapai dan memelihara kesehatannya. Menurut Imam Syatibi, masalah adalah sifat atau kemampuan barang atau jasa yang mendukung elemen-elemen dan tujuan dari kehidupan manusia dimuka bumi ini (Khasanah, 2010). Menurut Qorib (2016) *masalah* yaitu mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan. Prinsip kemaslahatan esensinya merupakan segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan kolektif. Menurut Hermansyah (2018) akad *mudharabah* diperbolehkan dalam hukum Islam karena

bertujuan untuk saling membantu antara pemilik modal dan seseorang yang memiliki ahli dalam mengelolah usaha.

Salah satu skim yang terdapat dalam ekonomi Islam serta merupakan salah satu komponen dalam sistem kesejahteraan Islam adalah bagi hasil. Apabila pelaksanaan proses bagi hasil ini benar-benar dilaksanakan sesuai dengan dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw, niscaya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Khasanah, 2010). Menurut Suherman (2017) mengungkapkan bahwa melalui mekanisme sistem bagi hasil akan tampak jelas rasa keadilan dan kebersamaan antara kedua belah pihak. Terwujudnya keadilan dan kebersamaan dari sebuah hasil upaya pengaturan tentang harta bagian tidak bisa dipungkiri lagi sebagai sebuah pencapaian tujuan kemaslahatan yang sangat menjunjung nilai-nilai syariah dan tidak bertentangan dengan maqasid syariah itu sendiri. Sistem bagi hasil *mudharabah* akan dapat memberikan penyelesaian dan kemaslahatan terhadap masyarakat terutama sekali bagi umat Islam. *Mudharabah* termasuk kedalam salah satu *maqashid* syariah yaitu kemaslahatan yang meliputi aspek *jalbiyyah* dan aspek *salbiyyah*. Aspek *jalbiyyah* yaitu mendorong untuk mengembangkan diri agar lebih produktif dan dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan, sedangkan aspek *salbiyyah* yaitu menjaga agar tidak menimbulkan kemufسادatan atau menimbulkan hal yang negatif (Hermansyah, 2018).

H. Simpulan

Konsep bagi hasil merupakan prinsip yang paling mendasar dalam ekonomi Islam, yang dapat mendukung aspek keadilan. Implementasi keadilan dalam kegiatan usaha berupa aturan prinsip muamalah yang melarang adanya unsur riba, kedzaliman, *maysir*, *gharar*, dan haram. Prinsip keadilan dalam bermuamalah harus memenuhi nilai-nilai keadilan antara pihak yang melakukan akad dalam bermualah misalnya keadilan dalam pembagian hasil antara pemilik modal (*shahibul maal*) dengan pengelola modal (*mudharib*). Akad *mudharabah* asas keadilan benar-benar dapat diwujudkan dalam dunia nyata, karena kedua belah pihak yang terkait yaitu *shahibul maal* dan *mudharib* sama-sama merasakan keuntungan yang diperoleh. Serta sama-sama menanggung kerugian, dimana *shahibul maal* menanggung kerugian materi (modal) dan *mudharib* menanggung kerugian non-materi (tenaga

daan pikiran). Islam mengganti sistem bunga menjadi sistem bagi hasil yang diterapkan dalam ekonomi syariah jelas lebih berkeadilan.

Melalui mekanisme sistem bagi hasil akan tampak jelas rasa keadilan dan kebersamaan antara kedua belah pihak. Terwujudnya keadilan dan kebersamaan dari sebuah hasil upaya pengaturan tentang harta bagian tidak bisa dipungkiri lagi sebagai sebuah pencapaian tujuan kemaslahatan yang sangat menjunjung nilai-nilai syariah dan tidak bertentangan dengan *maqasid* syariah itu sendiri. Sistem bagi hasil *mudharabah* akan dapat memberikan penyelesaian dan kemaslahatan terhadap masyarakat terutama sekali bagi umat Islam. *Mudharabah* termasuk kedalam salah satu *maqashid* syariah yaitu kemaslahatan yang meliputi aspek *jalbiyyah* dan aspek *salbiyyah*.

Daftar Pustaka

- Andriyaldi. 2017. Prinsip Dasar Filosofi Ekonomi Islam dalam Konteks Modern (Perspektif Maqashid Syariah). *Batusangkar International Conference* 11: 87-98.
- Ardiansyah, M. 2014. Bayang – Bayang Teori Keagenan pada Produk Pembiayaan Perbankan Syariah. *Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 14(2): 21-269.
- Azis, I. 2019. Perlakuan Akuntansi dan Telaah Bagi Hasil Produk Mudharabah Berdasarkan PSAK 105 pada PT Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen*, 16(2): 226-232.
- Fadhila, N. 2015. Analisis Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah terhadap Laba Bank Syariah Mandiri. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 15(1): 65-77.
- Hadi, A. Dan K. A. Kusuma. 2016. Ekonomi Islam dan Peradaban : Analisis Mudharabah Sebagai Elemen Ekonomi Tolak Ukur Peradaban. *Islamic Banking and Finance Journal*, 1(1): 1-17.
- Hafid, W. R., J. Majid dan M. S. S. Juardi. 2018. Penerapan Prinsip Profit Sharing dan Revenue Sharing Program Tabungan Mudharabah dan Deposito Mudharabah (Studi pada PT Bank Muamalat Kantor Cabang Makassar). *Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah*, 2(1): 65-81.
- Helmi, M. 2015. Konsep Keadilan dalam Filsafat Hukum dan Filsafat Hukum Islam. *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 14(2): 133-144.
- Hermansyah. 2018. Implementasi Metode Bagi Hasil dengan Prinsip Mudharabah pada Bank Syariah di Indonesia Dihubungkan dengan Fatwa DSN No.15/DSN-MUI/IX/2000. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 4(1): 43-62.
- Imamah, I. F. 2019. Penentuan Nisbah Bagi Hasil pada Pembiayaan Mudharabah dan Perlakuan Akuntansinya. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 8(2): 199-220.

- Lukman, A. Rahman dzn Khairunnisa. 2016. Rekonstruksi Nilai Keadilan dalam Penetapan Margin Murabahah di PT. Amanah Finance Makassar. *Jurnal Fenomena*, 8(2): 127-142.
- Khasanah, U. 2010. Sistem Bagi Hasil dalam Syariat Islam. *Jurnal Syariah dan Hukum*, 1(2): 120-132.
- Marpaung, A. M. dan S. I. Rosita. 2012. Analisi Perlakuan Akuntansi Pendanaan Mudharabah dalam Kaitannya dengan PSAK 105 pada PT. Bank Jabar Banten Syariah. *Jurnal Ilmiah Ranggagading*, 12(2): 110-118.
- Mawarid, H. 2014. Analisi Penerapan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) No. 105 Tentang Pembiayaan Mudharabah pada Laporan Keuangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Kalbar Madani Pontianak. *Jurnal Audit dan Akuntansi*, 3(2): 27-42.
- Natalia, E., M. Dzulkirom dan S. M. Rahayu. 2014. Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Deposito Bank Syariah dan Suku Bunga Deposito Bank Umum terhadap Jumlah Simpanan Deposito Mudharabah. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 9(1): 1-7.
- Nurdiwaty, D. dan H. S. Widiawati. 2018. Akuntansi syariah untuk Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Serta Kesesuaian dengan PSAK Syariah No. 102 dan 105 pada KSPPS BMT NU Jombang. *Jurnal Akuntansi dan Ekonomi*, 3(2): 24-37.
- Nurfajri, F. dan T. Priyanto. 2019. Pengaruh Murabahah, Musyarakah, Mudharabah, dan Ijarah terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Monex*, 8(2): 1-18.
- Perwitasari, D. A. 2017. Internalisasi Nilai-Nilai Keadilan dalam Praktik Pembiayaan Mudharabah dan Deposito Mudharabah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 2(1): 71-95.
- Purwoko, S. dan N. Setiawan. 2017. Analisis Penerapan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Berdasarkan PSAK 105. *Jurnal Profita Kajian Ilmu Akuntansi*, 5(1): 1-14.
- Pramono, N. H. 2013. Optimalisasi Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil pada Bank Syariah di Indonesia. *Accounting Analysis Journal*, 2(2): 154-162.

- Qorib, A. Dan I. H. Harahap. 2016. Penerapan Malahah Mursalah dalam Ekonomi Islam. *Jurnal Analitica Islamica*, 5(1): 55-80.
- Rangkuti, A. 2017. Konsep Keadilan dalam Perspektif Islam. *Jurnal Pendidikan Islam Tazkiya*, 6(1): 1-21.
- Riyadi, S. dan A. Yulianto. 2014. Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli, Financing to Deposit Ratio (FDR), dan Non Performing Financing (NPF) terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. *Accounting Analysis Journal*, 3(4): 466-474.
- Rokhlinsari, S. dan D. Astuti. 2016. Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 105 pada Pembiayaan Mudharabah di Bank BNI Syariah Cabang Cirebon. *Al-Amwal Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syaria'ah*, 8(1): 1-17.
- Rufaidah, E. R. dan Alamsyah. 2019. Metode Pengakuan Pendapatan Bagi Hasil. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(1): 27-39.
- Sari, M. dan A. Afriyeni. 2019. Prosedur Pembiayaan Mudharabah pada PT Bank Negara Indonesia (BNI) Syariaiah Tbk Cabang Padang. *OSF Preprints*.
- Sahban, 2017. Esensi Akad Mudharabah dan Musyarakah pada Perbankan Syariah dalam Mewujudkan Keadilan Ekonomi. *Jurnal Al-Ishlah*, 19(1): 107-118.
- Setiono, B. A. 2015. Teori Perusahaan : Kajian Tentang Teori Bagi Hasil Perusahaan (Profit and Loss Sharing) dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *Jurnal Aplikasi Pelayaran dan Kepelabuhanan*, 5(2): 153-169.
- Siregar, S. 2016. Apakah Distribusi Bagi Hasil Cash Basis Adil Bagi Depositor Bank Syariah. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 7(1): 81-90.
- Sri, M., Wahyuni dan T. W. Putra. 2019. Audit Manajemen atas Sistem Bagi Hasil pada PT. BNI Syariah Makassar. *Jurnal Ar-Ribh*, 2(1): 73-91.

- Sriyati dan A. N, Yushita. 2016. Penerapan Bagi Hasil untuk Deposito Mudharabah dengan Pedoman PSAK No. 105 pada PT BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta. *Jurnal Profita Kajian Ilmu Akuntansi*, 4(7): 1-14.
- Srisusilawati, P. dan N. Aprianti. 2017. Penerapan Prinsip Keadilan dalam Akad Mudharabah di Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Law and Justice*, 2(1): 12-23.
- Suherman. 2017. Penerapan Prinsip Bagi Hasil pada Perbankan Syariah Sebuah Pendekatan Al-Maqasidu Al-Syariah. *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, 2(3): 295-304.
- Sujana, D. 2018. Pengaruh Implementasi Pembiayaan Mudharabah dan Risiko terhadap Pendapatan pada PT. Bank Jabar Banten Syariah. *Journal of Knowledge Management*, 12(1): 21-29.
- Suryanto, A. dan A. A. Nasrulloh. 2016. Pengaruh Diversifikasi Produk Pembiayaan terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1): 1-13.
- Umiyati dan S. H. Syarif. 2016. Kinerja Keuangan dan Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 4(1): 45-66.
- Waluyo, B. 2016. Implementasi Pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah untuk Merealisasikan Tujuan Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2(2): 186-204.
- Wulandari, T. 2016. Analisis Implementasi PSAK No. 105 Akuntansi Mudharabah pada Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Sidogiri di Kecamatan Pagak Kabupaten Malang. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 4(1): 1-10.
- Yahya, M. dan E. Y. Agunggunanto. 2011. Teori Bagi Hasil (Profit and Loss Sharing) dan Perbankan Syariah dalam Ekonomi Syariah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 1(1): 65-73.
- Zulfikar, Z., Mujiyati, A. D. B. Bawono dan S. Wahyuni. 2019. Dampak Kebijakan Loan Loss Provison Pembiayaan Mudharabah pada Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Keuangan Indonesia*, 4(1): 43-52.

AKTUALISASI SHARIAH COMPLIANCE PADA PRAKTIK MUDHARABAH

A. Pendahuluan

Shariah compliance (kepatuhan syariah) merupakan ketaatan syariah terhadap prinsip syariah. Kepatuhan syariah adalah bagian penting bagi industri keuangan syari'ah dalam segi pengelolaan (manajemen) maupun operasionalnya (Nurhisam, 2016). Salah satu ciri yuridis dalam industri keuangan syariah adalah pada regulasi tentang kepatuhan syariah (*Shariah Compliance*) yang menjadi dasar dan asas dalam operasionalnya. Kepatuhan syariah merupakan suatu bagian yang sangat penting dalam segi pengelolaan (manajemen) maupun pada sistem operasionalnya (Supandi, 2019). Kepatuhan syariah adalah diantara aspek yang membedakan ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional atau antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional (Mardian, 2015).

Shariah compliance merupakan *key player* dalam pelaksanaan tata kelola pada industri perbankan syariah. Menurut Lubis dan Saramawati (2014) pentingnya pelaksanaan tata kelola merupakan salah satu upaya untuk melindungi kepentingan *stakeholder*, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum pada industri perbankan syariah. Tingkat penerapan *shariah compliance* mengindikasikan bahwa tingkat penerapan tata kelola paling berpengaruh dalam mendorong para pengelola bank syariah menjalankan aktivitas bisnisnya dengan merujuk kepada kepatuhan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai syariah (Mulazid, 2016).

Menurut Latif (2018) *shariah compliance* merupakan pemenuhan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sebagai wujud dari karakteristik Lembaga Keuangan

Syariah (LKS) serta sebagai inti dari integritas dan kredibilitas. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan pengawasan fungsi kepatuhan syariah sebagai tindakan dan langkah untuk memastikan kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah sesuai ketentuan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Minarmi, 2013). Jika peran DPS tidak optimal dalam melakukan pengawasan syariah terhadap praktik syariah yang berakibat pada pelanggaran syariah *compliance*, maka citra dan kredibilitas bank syariah di mata masyarakat menjadi negatif, sehingga dapat menurunkan kepercayaan masyarakat kepada bank syariah bersangkutan. Hal ini sejalan dengan penelitian Musyafa dkk (2018) yang menyatakan bahwa upaya yang dilakukan untuk mempertegas kepatuhan syariah harus dilaksanakan oleh lembaga keuangan syariah untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip syariah, memperoleh dan menjaga kepercayaan investor sehingga dalam operasinya sejalan dengan tujuan syariah.

Lembaga keuangan syariah khususnya perbankan syariah perlu memiliki tata kelola yang handal dan strategi yang tepat untuk mendorong pelaksanaan *shariah compliance* yang kuat dan efektif. Prinsip *mudharabah* diterapkan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dalam menjalankan usahanya. Sebagai pengelola dana, LKS melakukan penghimpunan dana dalam bentuk tabungan dan deposito. Selain itu LKS berperan sebagai pemilik dana yang menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan modal kerja. Menurut Riani dan Mardian (2017) dan Hidayat (2016) pemenuhan kepatuhan syariah tersebut bertujuan menjaga citra publik khususnya kepentingan *stakeholder* dengan harapan mewujudkan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, kegiatan investasi yang bebas dari riba. Akan tetapi, dalam beberapa hal, lembaga keuangan syariah memiliki perlakuan yang berbeda karena transaksi-transaksi yang berlaku dalam lembaga keuangan syariah sangat khusus. Hal itu terlihat dari adanya prinsip kepatuhan syariah dalam setiap operasionalnya dengan menghilangkan riba, *maysir*, *qharar*, *tadlis* dan larangan syariah lainnya (Umam, 2015).

Pembiayaan merupakan penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan antara bank dan pihak lain yang wajib

untuk mengembalikan uang atau tagihan setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Pembiayaan yang sering dilakukan dalam lembaga keuangan syariah diantaranya menggunakan sistem pembiayaan *mudharabah*, yakni guna memperlancar roda perekonomian umat, sebab dianggap mampu menekan terjadinya inflasi karena tidak adanya ketetapan bunga yang harus dibayar, selain itu juga dapat merubah haluan kaum muslimin dalam setiap transaksi perdagangan dan keuangan yang sejalan dengan ajaran syariat Islam. Menurut Ibrahim (2014) dan Arifin (2013), prinsip *mudharabah* merupakan salah satu skim inti dalam ekonomi Islam produk perbankan syariah yang unik, karena pada prinsip ini terkandung perbedaan filosofis antara praktik sistem perbankan konvensional yang menganut sistem bunga (*interest rate*) dengan perbankan syariah yang menganut prinsip bagi keuntungan atau kerugian. Transaksi dengan akad *mudharabah* (jual-beli) ini dapat dilaksanakan dengan berbagai cara yaitu, dapat berbentuk tunai setelah penerima barang, ditangguhkan dengan cicilan setelah penerimaan barang, ataupun ditangguhkan dengan membayar sekaligus dikemudian hari (Nasir dan Sululing, 2015).

Salah satu bentuk untuk memutar dana dapat dilakukan dengan *mudharabah*, dimana pemilik dana (*shahibul maal*) memberikan dananya untuk dikelola *mudharib* (pengelola/pekerja) dengan pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan di muka, dan jika terjadi kerugian tidak disengaja pekerja, maka kerugian tersebut akan ditanggung oleh pemilik dana, dalam pelaksanaannya di bank dibutuhkan suatu pedoman dengan tujuan agar pelaksanaannya tidak menyimpang dari syariah. Kerjasama *mudharabah* antara pemilik modal dan pelaksana usaha merupakan langkah tepat, sebagaimana dilakukan Nabi Muhammad saw ketika bekerjasama dengan seorang wanita pengusaha bernama Sitti Khadijah. Adapun caranya, Khadijah menyerahkan modal berupa dagangan untuk di bawa Muhammad berniaga antara negeri Mekkah dengan Syam. Menurut Permata dan Wartoyo (2017) Akad *mudharabah* dalam lembaga keuangan syariah bersifat fleksibel, karena dapat ditetapkan pada produk penghimpunan yang dapat berupa produk deposito *mudharabah* dan tabungan *mudharabah*, maupun

penyaluran. Bab ini akan membahas mengenai *shariah compliance* yang diaktualisasikan dalam praktik mudharabah.

B. Konsep Syariah Compliance

Kepatuhan Syariah (*Sharia Compliance*) adalah wujud praktis operasional lembaga keuangan syariah terhadap kaidah syariah yang bersumber dari al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad saw. Dari sumber utama hukum Islam tersebut, para ulama menerjemahkannya dalam bentuk *fiqh* yang merupakan hasil *Ijtihad*, dengan didukung sumber hukum Islam sekunder lain seperti Ijma' dan Qiyas dari masa ke masa. *Fiqh* muamalah sebagai produk *Ijtihad* para ulama berkembang sesuai jaman waktu dan keadaan. Perkembangan perbankan dan lembaga keuangan syariah kontemporer saat ini pun membutuhkan *Ijtihad* Ulama'. Di Indonesia otoritas ijtihad tersebut diberikan kepada DSN-MUI. Menurut Nurhisam (2016) sebagai industri keuangan yang berbasis pada agama, industri keuangan yang menjalankan aktivitas berbasis Islam karenanya secara ketat didikte oleh ajaran agama, yakni al-Qur'an dan sunnah Rasulullah saw. Sistem keuangan Islam secara substansial berbeda dari industri keuangan yang masih menggunakan sistem konvensional. Saat ini pemahaman masyarakat tentang keunikan dan karakteristik dari produk perbankan syariah masih sangat rendah bahkan terdapat kecurigan dan ketidakpuasan masyarakat dan menganggap bahwa perbankan syariah sama dengan perbankan konvensional. Oleh karena itu perbankan syariah harus memperhatikan bahwa produk-produk perbankan syariah telah sesuai prinsip melalui kepatuhan syariah (*shariah compliance*) (Wardayanti, 2011). Penting untuk dilakukan pengawasan fungsi kepatuhan syariah di industri keuangan syariah, dimana fungsi kepatuhan merupakan tindakan dan langkah yang bersifat *ex-ante* (preventif), untuk memastikan kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank Islam sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, fatwa DSN dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dilakukan untuk mengontrol operasional perbankan syariah serta menjadikan bank syariah agar tidak keluar dari koridornya, disiplin dan langkah untuk meminimalisir resiko perbankan. Begitu juga inovasi produk yang menjadi kunci perbankan syariah untuk lebih bermanfaat,

kompetitif dan lebih berkembang dengan cepat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Inovasi produk harus menjadi strategi prioritas bagi bank-bank syariah, karena inovasi memiliki peran penting dalam merambah dan menguasai pasar yang selalu berubah. Untuk itu, industri perbankan syariah dituntut melakukan pengembangan, kreatifitas dan inovasi-inovasi produk baru. Keberhasilan sistem perbankan syariah di masa depan akan banyak tergantung kepada kemampuan bank-bank syariah menyajikan produk-produk yang menarik, kompetitif dan memberikan kemudahan transaksi, sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan industri pasar.

C. Akuntansi *Mudharabah*

Menurut istilah fiqih *mudharabah* adalah suatu akad antara dua belah pihak yang salah satu pihak menyerahkan uang atau modal kepada pihak yang lain untuk diperdagangkan, dimana keuntungan dibagi dua yang sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak tersebut. Menurut Ascarya (2011), *mudharabah* merupakan akad bagi hasil ketika pemilik dana/ modal (pemodal), biasanya disebut *shahibul maal/rabbul maal*, menyediakan modal (100%) kepada pengusaha sebagai pengelola, biasanya disebut *mudharib*, untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad. Bagi hasil merupakan bagi keuntungan atas sejumlah dana masyarakat yang diikutkan dalam operasional bank syariah dalam melayani akan kebutuhan pembiayaan dan pembayaran masyarakat (Khudori, 2018). Pembiayaan *mudharabah* dikembangkan dengan prinsip bagi hasil, dimana prinsip ini berbeda dengan prinsip bunga sebagaimana yang terdapat dalam produk konvensional. Hal ini sejalan dengan dengan penelitian Sari dan Wahyudi (2013) yang menyatakan bahwa pembiayaan yang menggunakan sistem bagi hasil antara nasabah dengan pihak bank dalam pembagian keuntungannya sesuai dengan nisbah yang disepakati pada saat akad. Pada saat akad penyaluran pembiayaan *mudharabah* harus terdapat kepastian mengenai persentase perolehan bagi hasil keuntungan usaha yang dibiayai.

PSAK 105 tentang Akuntansi *Mudharabah* adalah bagian dari PSAK Syariah yang menjelaskan bahwa ruang lingkup Akuntansi *Mudharabah* adalah untuk entitas yang melakukan transaksi *mudharabah* baik sebagai pemilik dana maupun pengelola dana. PSAK ini tidak mencakup pengaturan perlakuan akuntansi atas obligasi syariah yang menggunakan akad *mudharabah*. PSAK No. 105 bertujuan untuk mengakui, mengukur, menyajikan dan mengungkapkan transaksi-transaksi atau kejadian-kejadian operasional organisasi serta mengatur perlakuan akuntansi lembaga keuangan syariah baik bank maupun non-bank. Menurut Mawarid (2014) penerapan metode pengukuran akuntansi pada PSAK No.105 khususnya pada pembiayaan *mudharabah* harus disesuaikan dengan peraturan perbankan dan ketentuan-ketentuan syariah yang telah diatur. Dengan diterbitkannya PSAK No.105 yang mengatur akuntansi pembiayaan *mudharabah*, maka seharusnya lembaga keuangan bank maupun non bank yang melakukan transaksi dengan akad *mudharabah* dapat berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah dalam perlakuan akuntansinya. Namun masih terdapat ketidaksesuaian perlakuan akuntansi *mudharabah* dengan PSAK 105 dalam hal pengakuan dana yang disalurkan sebagai pembiayaan *mudharabah* (Purwoko, 2017).

Akuntansi *mudharabah* diatur dalam PSAK No.105 yang merupakan standar akuntansi keuangan syariah yang mengatur tentang perlakuan akuntansi yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan atas transaksi *mudharabah*. Pada pembiayaan *mudharabah* diterapkan keadilan, kejujuran dan transparansi dari kedua belah pihak PSAK Nomor 105 merupakan acuan dalam penerapan sistem syariah yang mengedepankan tentang hubungan kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola dana, sehingga dengan adanya batasan tersebut diharapkan terjadi transaksi yang lebih transparan. Hal ini sejalan dengan penelitian Sari dan Wahyudi (2013) yang menyatakan bahwa pada saat akad penyaluran pembiayaan *mudharabah* harus terdapat kepastian mengenai persentase perolehan bagi hasil keuntungan usaha yang dibiayai. Dengan diterbitkannya PSAK No.105 yang mengatur akuntansi pembiayaan *mudharabah*, maka seharusnya lembaga keuangan bank maupun non bank yang melakukan transaksi dengan akad

mudharabah dapat berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah dalam perlakuan akuntansinya yang sesuai dengan PSAK No.105.

Jika dilihat bentuk-bentuk *mudharabah*, pada prinsipnya *mudharabah* sifatnya mutlak dimana pemilik modal (*shahib al-mal*) tidak menetapkan syarat-syarat tertentu kepada si *mudharib*, hal ini disebabkan karena ciri khas *mudharabah* zaman dulu adalah berdasarkan hubungan langsung diantara dua pihak berdasarkan kepercayaan atau amanah yang amat tinggi. Bentuk *mudharabah* ini disebut *mudharabah muthlaqah*. Namun demikian, apabila dipandang perlu, pemilik modal boleh menetapkan batasan-batasan atau syarat-syarat tertentu guna menyelamatkan modalnya dari resiko kerugian. Syarat-syarat atau batasan tersebut harus dipenuhi oleh si *mudharib*. Apabila dia melanggar batasan itu, dia harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul. Jenis *mudharabah* seperti ini disebut *mudharabah muqayyadah*. Pada dasarnya terdapat dua bentuk *mudharabah*, yakni *muthlaqah* dan *muqayyadah*.

D. Bagi Hasil

Bagi hasil menurut terminologi asing (*Inggris*) dikenal dengan *profit sharing*. Prinsip bagi hasil (*profit Sharing*) merupakan karakteristik umum dan berlandaskan dasar bagi operasional bank Islam secara keseluruhan. Pada mekanisme bank syariah, pendapatan bagi hasil ini berlaku untuk produk-produk penyertaan, baik penyertaan menyeluruh maupun sebagian, atau bentuk bisnis korporasi (kerjasama). Keuntungan yang dibagihasilkan harus dibagi secara proporsional antara *shohibul maal* dengan *mudharib*. Keuntungan bersih harus dibagi antara *shahibul maal* dan *mudharib* sesuai dengan proporsi yang disepakati sebelumnya dan secara eksplisit disebutkan dalam perjanjian diawal (Madian, 2011). Instrumen dasar yang digunakan pada perbankan syariah adalah bagi hasil sedangkan dalam perbankan konvensional instrumen yang digunakan adalah bunga. Keduanya memiliki dasar filosofis dan mekanisme yang berbeda namun memiliki fungsi yang sama yaitu sebagai *return* atas dana yang dipinjamkan kepada pihak pengelola dana atau sebagai kompensasi dari hasil investasi yang telah dilakukan. Semakin besar jumlah simpanan yang dimiliki maka akan berdampak pada jumlah *return* yang akan diterima baik itu berupa bagi hasil atau

bunga (Wardayanti dan Maria, 2011). Salah satu yang perlu diperhatikan oleh bank syariah untuk bisa berjaya (*survive*) adalah kondisi tingkat bagi hasil. Dengan tingkat bagi hasil yang tinggi pada bank syariah akan memberikan rangsangan terhadap masyarakat untuk menempatkan dananya pada bank syariah.

Sistem bagi hasil dengan ajaran al-Qur'an yaitu bahwa keuntungan tidak akan diketahui, apakah rugi atau untung. Hal ini dimaksudkan agar terdapat rasa keadilan antara kedua belah pihak, seperti pada ayat al-Qur'an surah Luqman ayat 34 yang artinya "*Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari Kiamat; dan Dia-lah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana Dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal*". (QS Luqman: 34). Maksud ayat di atas menerangkan bahwa, pelaksanaan bagi hasil yang berlaku sesuai dengan ajaran agama Islam. Hal ini dijelaskan bahwa setiap usaha yang dilakukan hari ini dan besok, tidak diketahui oleh manusia kecuali dengan kuasa Allah swt. Jadi, suatu hasil dari usaha yang bank syariah dapatkan hari ini, tidak selalu sama dengan apa yang akan didapatkan esok (Firdaweri, 2014). Oleh karena itu, dalam suatu perbankan syariah tidak boleh memastikan hasil usaha yang akan dibagi dihasilkan kepada nasabahnya.

Disini menjelaskan bahwa suatu usaha akan terjadi kemungkinan untung rugi tergantung kepada kepandaian pengelola dana, kondisi dan situasi pasar pun ikut menentukan hasil yang didapatkan. Hubungan yang terjadi adalah apabila tingkat bagi hasil yang diberikan mengalami kenaikan maka besarnya pembiayaan *mudharabah* juga akan meningkat dan sebaliknya jika bagi hasil yang diberikan menurun maka besarnya pembiayaan *mudharabah* menurun (Darmawan dan Hamid, 2018). Menurut Arifin (2013) prinsip bagi hasil dalam *mudharabah* mendasarkan pengelolaan usahanya dengan filosofi utama kemitraan dan kebersamaan (*sharing*), dimana didalamnya terdapat unsur-unsur kepercayaan (amanah), kejujuran dan kesepakatan. Kehadiran bank syariah dengan produknya skim *mudharabah* sebagai pola usaha kemitraan akan memberikan dampak positif pada peningkatan pendapatan masyarakat

menengah bawah, dimana pada bank syariah dengan skim *mudharabah* merupakan lembaga keuangan yang berfungsi sebagai media perputaran dana (Ibrahim, 2014).

E. Intensi Akuntan Menerapkan *Shariah Compliance* sebagai Instrumen Pertanggungjawaban

Perangkat regulasi yang didesain secara spesifik untuk mengatur kepatuhan syariah tidak lagi dapat dihindari penyiapannya. Tuntutan untuk meningkatkan kerangka regulasi bagi kepatuhan *syariah* merupakan sebuah tantangan yuridis yang dihadapi oleh setiap negara yang berkeinginan untuk mengembangkan bisnis keuangan berbasis Islam (*syariah*). Negara-negara tersebut ditantang untuk mereformulasi kerangka hukum mereka agar mampu secara sepenuhnya mengakomodasi kekhasan dari keuangan Islam (*syariah*). Selama kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah merupakan keharusan bagi industri keuangan syariah, maka pengawasan (*supervisory*) syariah ada di Indonesia. Sehingga dapat dikatakan bahwa pengawasan syariah oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan bagian tak terpisahkan dari kepatuhan syariah. Dalam konteks ini, regulasi tentang pengawasan syariah, tentu saja mencakup di dalamnya keberadaan dewan syariah (*sharia board*), yang mana adalah bagian penting dari kerangka aturan-aturan regulasi sebagai kepatuhan syariah (*sharia compliance*) (Khotibul, 2015). Fungsi kepatuhan sebagai tindakan dan langkah yang bersifat *ex-ante* (preventif), untuk memastikan kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank Islam. Untuk itu, Bank Islam wajib memahami seluruh ketentuan perundangan yang berlaku, sehingga menjadi tanggung jawab setiap individu dari jajaran tertinggi yaitu Direksi sampai pegawai terendah jajaran Bank. Begitu juga inovasi produk perbankan Islam mengacu pada standar syariah (*shariah standards*) dan *shariah governance*, berpedoman pada standar internasional, pemenuhan integritas dan kualitas sumber daya manusia perbankan Islam, kesesuaian akad, dan tidak mendzalimi masyarakat sebagai konsumen.

Industri keuangan syariah baik bank maupun non-bank yang saat ini masih dalam tahap awal evolusinya. Walaupun tingkat pertumbuhannya cukup cepat, sejauh ini baru menempati

ceruk kecil (*small niche*) di sektor finansial negeri-negeri muslim, apalagi di sektor keuangan internasional. Meskipun terdapat sejumlah kesulitan, gerakan Islamisasi perbankan berjalan dengan baik. Meskipun institusi keuangan itu selalu berevolusi, kebangkitan keuangan Islam tidak dapat dikatakan sebagai semata-mata proses evolusi dari industri keuangan yang ada (Setiawan, 2009). Sikap terhadap praktik pengungkapan *syari'ah compliance* adalah evaluasi kepercayaan atau perasaan positif (menerima) atau negatif (menolak) individu akuntan terhadap praktik pengungkapan *syari'ah compliance* sebagai instrumen pertanggungjawaban Islami untuk memenuhi penyediaan informasi kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah (Asrori, 2011).

Oleh karena itu, penting untuk dilakukan pengawasan fungsi kepatuhan syariah di industri keuangan syariah, dimana fungsi kepatuhan merupakan tindakan dan langkah yang bersifat *ex-ante* (preventif), untuk memastikan kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank Islam sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, fatwa DSN dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dilakukan untuk mengontrol operasional perbankan syariah serta menjadikan bank syariah agar tidak keluar dari koridornya, disiplin dan langkah untuk meminimalisir resiko perbankan. Begitu juga inovasi produk yang menjadi kunci perbankan syariah untuk lebih bermanfaat, kompetitif dan lebih berkembang dengan cepat sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Setiawan, 2009). Pelaku industri dan bisnis keuangan Islam untuk menjaga aspek kepatuhan syariah (*shariah compliance*) sebagai alat pencegahan kemungkinan resiko dan *fraud* di sektor riil. Begitu juga tantangan terhadap inovasi produk keuangan harus dilakukan dengan melakukan penyesuaian antara manfaat, dinamika masyarakat serta kondisi perekonomian global. Nilai-nilai Islam mampu dan eksis dalam persaingan bisnis, perdagangan di era globalisasi modern serta menjaga keberlangsungan usaha (*sustainability*) perbankan Islam di Indonesia.

Fungsi kepatuhan sebagai tindakan dan langkah yang bersifat *ex-ante* (preventif), untuk memastikan kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank Islam. Untuk itu, Bank Islam wajib

memahami seluruh ketentuan perundangan yang berlaku, sehingga menjadi tanggung jawab setiap individu dari jajaran tertinggi yaitu direksi sampai pegawai terendah jajaran Bank. Begitu juga inovasi produk perbankan Islam mengacu pada standar syariah (*shariah standards*) dan *shariah governance*, berpedoman pada standar internasional, pemenuhan integritas dan kualitas sumber daya manusia perbankan Islam, kesesuaian akad, dan tidak mendzalimi masyarakat sebagai konsumen.

Di masa depan DSN perlu melibatkan para pakar syariah yang berkompeten di bidangnya. Selama ini anggota DPS masih dominan berasal dari anggota Dewan Syariah Nasional seperti itu. Padahal masih banyak pakar syariah di luar DSN yang memiliki kompetensi keilmuan secara komprehensif, baik ilmu ekonomi keuangan maupun syariah. Harus dicatat, kondisi pakar yang berkompeten pada 10 tahun yang lalu berbeda dengan sekarang. Akselerasi pendidikan ekonomi syariah untuk melahirkan ilmuwan demikian cepat. Maka figur-figur ilmuwan ekonomi syariah yang kompeten perlu diapresiasi untuk mengawal dan menjamin terlaksananya kepatuhan kepada syariah. Selain itu perlu dicermati bahwa, untuk lebih terjaminnya syariah compliance di masa depan, Dewan Pengawas Syariah (DPS) tidak cukup hanya mengerti ilmu keuangan dan perbankan sebagaimana juga tidak bisa hanya ulama dan cendekiawan muslim yang tak mengerti operasional perbankan dan ilmu ekonomi keuangan.

F. Penyajian Praktik Akuntansi pada Akad *Mudharabah*

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha (Antonio, 2001: 95). Hal ini juga sesuai dengan berlandaskan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 07/DSNMUI/ IV/2000, bahwa pihak Lembaga Keuangan Syariah dapat menyalurkan dananya kepada pihak lain dengan cara *mudharabah* yaitu akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*/LKS) menyediakan seluruh modal sedangkan pihak kedua (*mudharib*/nasabah) bertindak selaku pengelola dan keuntungan usaha dibagi antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Pembiayaan

mudharabah dikembangkan dengan prinsip bagi hasil, di mana prinsip ini berbeda dengan prinsip bunga sebagaimana yang terdapat dalam produk konvensional. Bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan, bila usaha merugi maka kerugian akan ditanggung oleh kedua belah pihak sedangkan bunga pembayarannya bersifat tetap tanpa mempertimbangkan apakah proyek yang dijalankan oleh nasabah untung atau rugi. Dalam prinsip *mudharabah* terdapat suatu akad. Akad *mudharabah* adalah akad yang biasa digunakan dalam *syirkah*/kongsi, dimana pihak bank menjadi pemodal dan nasabah sebagai *mudharib*. Atas dasar usaha yang dikelola oleh *mudharib* terdapat keuntungan, maka *mudharib* akan membagi keuntungan tersebut kepada pemodal/bank dengan nisbah yang telah disepakati bersama (Adnan dan Purwoko, 2013). Berbeda dengan bunga yang besarnya ditentukan atas nilai dasar uang dan akan bertambah seiring dengan bertambahnya waktu.

Masalah yang terjadi dalam praktik akuntansi disebabkan adanya perbedaan kepentingan antara *principal* dan *agent* sehingga masing-masing pihak saling berusaha meningkatkan kepentingannya. Konflik kepentingan antara *principal* dan *agent* terjadi karena adanya perbedaan antara kedua belah pihak dimana *agent* mungkin berbuat atau menjalankan usaha tidak selalu sesuai dengan yang diharapkan pihak *principal* (Garas, 2012). Akuntansi harus bisa menjamin bahwa informasi-informasi yang disusun dan disajikan harus benar-benar bebas dari unsur penipuan dan ketidakadilan, serta bebas dari pemihakan kepada kepentingan kelompok tertentu. Informasi yang diberikan harus transparan, teruji, dan dapat dipertanggungjawabkan dunia akhirat. Dalam konteks ini, akuntan jangan hanya berhenti pada masalah perlakuan pendapatan, pengakuan, pelaporan persediaan, pemilihan metode (Trianta dan Agus, 2009).

PSAK 105 tentang Akuntansi *Mudharabah* adalah bagian dari PSAK Syariah yang menjelaskan bahwa ruang lingkup akuntansi *mudharabah* adalah untuk entitas yang melakukan transaksi *mudharabah* baik sebagai pemilik dana maupun pengelola dana. PSAK ini tidak mencakup pengaturan perlakuan akuntansi atas obligasi syariah yang menggunakan akad *mudharabah*. Akad *mudharabah* merupakan suatu transaksi pendanaan atau investasi yang berdasarkan kepercayaan. Kepercayaan ini menjadi sangat

penting karena dalam *mudharabah* pemilik modal tidak diperkenankan untuk ikut campur dalam manajemen perusahaan atau proyek yang didanai, kecuali hanya memberikan saran dan melakukan pengawasan. Apabila usaha tersebut mengalami kegagalan maka yang menanggung kerugian hanyalah pemilik modal, kecuali apabila kerugian disebabkan oleh kelalaian pengelola dana. Pengelola dana hanya akan merasakan kerugian berupa waktu, tenaga, pikiran dan kesempatan untuk memperoleh sebagian dari keuntungan usaha tersebut. Penyajian pemilik dana menyajikan investasi *mudharabah* dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat. Pengungkapan pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi *mudharabah*, tetapi tidak terbatas, pada: a) isi kesepakatan utama usaha *mudharabah*, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha *mudharabah*, dan lain-lain; b) rincian jumlah investasi *mudharabah* berdasarkan jenisnya (Latifah dkk, 2016).

G. Simpulan

Kepatuhan syariah adalah bagian penting bagi industri keuangan syaria'ah dalam segi pengelolaan (manajemen) maupun operasionalnya. Kepatuhan Syariah (*Shariah Compliance*) adalah wujud praktis operasional lembaga keuangan syariah terhadap kaidah syariah yang bersumber dari al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad saw. Salah satu ciri yuridis dalam industri keuangan syariah adalah pada regulasi tentang kepatuhan syariah (*Shariah Compliance*) yang menjadi dasar dan asas dalam operasionalnya. Kepatuhan syariah merupakan suatu bagian yang sangat penting dalam segi pengelolaan (manajemen) maupun pada sistem operasionalnya akuntan percaya terhadap praktik pengungkapan *shariah compliance* sebagai pertanggung jawaban kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah terhadap prinsip-prinsip bank Islam dilihat dari perspektif teori tindakan.

Pembiayaan yang sering dilakukan dalam lembaga keuangan syariah diantaranya menggunakan sistem pembiayaan *mudharabah*, yakni guna memperlancar roda perekonomian umat, sebab dianggap mampu menekan terjadinya inflasi karena tidak adanya ketetapan bunga yang harus dibayar, selain itu juga dapat merubah haluan kaum muslimin dalam setiap transaksi perdagangan dan keuangan yang sejalan dengan ajaran syariat

Islam. Akuntansi *mudharabah* diatur dalam PSAK No.105 yang merupakan standar akuntansi keuangan syariah yang mengatur tentang perlakuan akuntansi yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan atas transaksi *mudharabah*. Pada pembiayaan *mudharabah* diterapkan keadilan, kejujuran dan transparansi dari kedua belah pihak PSAK Nomor 105 merupakan acuan dalam penerapan sistem syariah yang mengedepankan tentang hubungan kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola dana, sehingga dengan adanya batasan tersebut diharapkan terjadi transaksi yang lebih transparan.

Daftar Pustaka

- Adnan, M. A. dan D, Purwoko. 2013. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Rendahnya Pembiayaan Mudharabah Menurut Perspektif Manajemen Bank Syariah Dengan Pendekatan Kritis. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*. 14(1): 14-31.
- Arifin, M. A. 2013. Mudharabah Dalam Fiqih dan Perbankan Syariah. *Equilibrium*, 2(1): 302-323.
- Asrori. 2011. Pengungkapan Syariah Compliance dan Kepatuhan Bank Syariah Terhadap Prinsip Syariah. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 3(1): 1-7.
- Darmawan dan A, Hamid. 2018. Penerapan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Berdasarkan PSAK No. 105 Pada Bank BNI Syariah Kantor Cabang Mikro Kota Parepare. *Jurnal Syariah dan Hukum Diktum*, 16(1): 65-80.
- Firdaweri. 2014. Perikatan Syariah Berbasis Mudharabah (Teori dan Praktik). *Asas*, (6)1: 54-77.
- Garas, S. N. 2012. The Conrol of the Shari'a Supervisory Board in the Islamic financial Institutions. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 5(1): 8-24.
- Gilang, N. G. 2013. Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Accounting Analysis Journal*, 29(1): 96-103.
- Hidayat, F. 2016. Alternative Sistem Pengawasan pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Dalam Mewujudkan Syariah Compliance. *Mahkamah*, 1(2): 343-407.
- Ibrahim, K. 2014. Penerapan Prinsip Mudharabah Dalam Perbankan Syariah. *Jurnal IUS*, 2(4): 42-53.
- Khotibul, U. 2015. Urgensi Standarisasi Dewan Pengawas Syariah dalam Meningkatkan Kualitas Audit Kepatuhan Syariah. *Pangung Hukum*, 1(2).

- Khudori, S. 2018. Analisis Kepatuhan Syariah Implementasi Prinsip Bagi Hasil pada Simpanan Mudharabah di KPPSS Binamas Purworejo. *Jurnal Ekonomi Islam*, 19(1): 1-17.
- Latif, A. 2018. Teknik Pengawasan Kualitas Kepatuhan Syariah (*Shariah Compliance*). *Jurnal Ekonomi Islam*, 10(1): 89-108.
- Latifah, E., S. Pranoto dan E. Susilowati. 2016. Kajian Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Mudharabah Dengan PSAK No. 105 Pada Koperasi Syariah Lamongan. *Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi*, 11(2): 78-90.
- Lubis, A. T. dan D. A. M. Saramawati. 2014. Analisis Pengungkapan Syariah Compliance Dalam Pelaksanaan Good Corporate Governance Bank Syariah Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 2(2): 107-126.
- Mardian, S. 2011. Studi Eksplorasi Pengungkapan Prinsip Syariah (*Shariah Compliance*) di Bank Syariah. *Jurnal Sebi*, 4(1).
- Mardian, S. 2015. Tingkat Kepatuhan Syariah di Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Akuntansi Keuangan Islam*, 3(1): 57-67.
- Mawarid, H. 2014. Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Nomor 105 Tentang Pembiayaan Mudharabah pada Laporan Keuangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Kalbar Madani Pontianak. *Jurnal Audit dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura*, 3(2): 27-42.
- Minarni. 2013. Konsep Pengawasan, Kerangka Audit Syariah dan Tata Kelola Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Ekonomi Islam*, 7(1): 29-39.
- Mulazid, A. S. 2016. Pelaksanaan Syariah Compliance pada Bank Syariah (Studi Kasus pada Bank Syariah Mandiri, Jakarta). *Madania*, 20(1): 37-54.
- Mulazid, A. S. 2016. Pelaksanaan Syariah Compliance pada Bank Syariah (Studi Kasus pada Bank Syariah Mandiri, Jakarta). *Madania*, 20(1): 37-54.
- Nasir, S. M. dan S. Sululing. 2015. Penerapan Akuntansi Mudharabah Terhadap Pembiayaan Kredit Pemilikan

- Rumah Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Luwuk. *Jurnal Akuntansi*, 19(1): 109-128.
- Nurhizam, L. 2016. Kepatuhan Syariah (Shariah Compliance) Dalam Industri Keuangan Syariah. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 23(1): 77-96.
- Permata, F. E. dan Wartoyo. 2017. Analisis Penerapan PSAK No. 105 pada Tabungan Berjangka Mudharabah dan Pembiayaan Mudharabah. *Al-Amwal*, 9(1): 1-18.
- Purwoko, S. 2017. Analisis Penerapan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Berdasarkan PSAK 105. *Jurnal Profita*, Edisi 1.
- Riani. dan S. Mardian. 2017. Dinamika Kualitas Audit di Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 5(2): 177-194.
- Sari, K. dan H. Wahyudi. 2013. Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Medan. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 2(2): 11-20.
- Setiawan, A. B. 2009. Perbankan Syariah: Challenges dan Opportunity Untuk Pengembangan di Indonesia. *Jurnal Kordinat*, 3(1): 1-18.
- Supandi, A. F. 2019. Optimalisasi Akad Mudharabah Dalam Perbankan Syariah (Analisis Terhadap Akad Mudharabah dan Relevansinya Pada Fatwa Dsn-Mui Di Indonesia). *Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis*, 5(1): 72-82.
- Triyanta dan Agus. 2009. Implementasi Kepatuhan Syariah Dalam Perbankan Islam (Syariah): Studi Perbandingan Antara Malaysia dan Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 4(6).
- Umam, K. 2015. Urgensi Standarisasi Dewan Pengawas Syariah dalam Meningkatkan Kualitas Audit Kepatuhan Syariah. *Jurnal Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia*, 1(2): 114-138.
- Wardayanti, S. M. 2011. Implikasi *Shariah Governance* terhadap Reputasi dan Kepercayaan Bank Syariah. *Journal Walisongo*, 9(1): 1-10.

Widialoka, W., A. R. Hidayat, dan Azib. 2016. Analisis Pengaruh Kepatuhan Syariah (Shariah Compliance) Terhadap Dana Pihak Ketiga pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode Tahun 2010-2015. *Prosiding Keuangan dan Perbankan Syariah*, 2(2): 672-678.

REORIENTASI ARAH DISTRIBUSI ZAKAT

A. Pendahuluan

Suatu negara dikatakan berhasil dalam pembangunan jika ia mampu menekan angka kemiskinan. Taraf kesejahteraan suatu negara akan berpengaruh di kancah internasional. Oleh karena itu memerangi kemiskinan merupakan tantangan yang dihadapi oleh setiap negara. Tingkat kemiskinan di suatu negara mempengaruhi apakah negara tersebut termasuk negara maju, berkembang ataukah miskin, dengan kata lain, tingkat kesejahteraan suatu negara dipengaruhi oleh besarnya persentase kemiskinan di negara tersebut (Purbasari, 2015). Meningkatnya jumlah penduduk miskin merupakan bahaya besar bagi umat manusia dan tidak sedikit umat yang jatuh peradabannya hanya karena kefakiran, oleh karena itu diperlukan suatu kebijakan dalam pemberantasan kemiskinan (Andriyanto, 2011). Permasalahan kemiskinan sampai saat ini merupakan isu yang menarik untuk dibahas. Berbagai macam program dan solusi yang sudah dilakukan oleh pemerintah maupun swadaya masyarakat, kemiskinan masih belum mengalami penurunan. Salah satu solusi mengatasi kemiskinan tersebut adalah dengan sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam yang sudah berkembang saat ini adalah mengenai perbankan dan lembaga keuangan syariah. Meskipun isu perbankan dan lembaga keuangan syariah telah menerima perhatian yang paling banyak, para informan penelitian menilai bahwa isu perbankan dan lembaga keuangan syariah bukanlah isu yang paling prioritas (Huda, Anggraini, Mardoni, & Rini, 2014). Di zaman modern sekarang ini pengelolaan zakat diupayakan dan dirumuskan sedemikian rupa, sehingga dapat dikelola secara baik. Para pengelola telah merumuskan pengelolaan zakat berbasis manajemen. Pengelolaan zakat

berbasis manajemen dapat dilakukan dengan asumsi dasar bahwa semua aktivitas yang terkait dengan zakat dilakukan secara professional. Pengelolaan zakat secara professional, perlu dilakukan dengan saling keterkaitan antara berbagai aktivitas yang terkait dengan zakat. Dalam hal ini, keterkaitan antara sosialisasi, pengumpulan, pendistribusian atau pendayagunaan, serta pengawasan (Ahmad Atabik, 2015).

Upaya yang dapat dilakukan untuk menyentuh dan menyelesaikan faktor-faktor penyebab kemiskinan di atas adalah melalui distribusi dana zakat secara adil dan menyeluruh. Distribusi ini tidak dapat dilakukan secara personal dan tanpa rencana, kecuali melalui kelembagaan dan perencanaan yang sesuai sehingga tujuan adanya distribusi dana zakat ini tercapai. Berbagai upaya telah dilakukan, baik oleh negara ataupun organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat, untuk dapat mendistribusikan dana zakat secara sesuai dan tepat sasaran (Canggih, Fikriyah, & Yasin, 2017). Dalam pengelolaan penggunaan dana zakat, yang terpenting dan tidak boleh dilupakan adalah peran amil zakat (baca: Organisasi Pengelola Zakat) selaku pengemban amanah pengelolaan dana-dana zakat itu. Jika para amil zakatnya baik dalam pengelolaannya, maka dapat berpengaruh signifikan positif terhadap *ashnaf mustahik* lainnya. Tapi jika para amil zakat tidak baik dalam pengelolaannya, maka diduga hak *ashnaf mustahik* yang lain tidak akan terpenuhi, itulah nilai esensi strategisnya amil zakat (Parisi, 2017). Zakat akan dapat memberikan dampak yang lebih luas (*multiplier effect*), dan menyentuh semua aspek kehidupan, apabila pendistribusian zakat lebih diarahkan pada yang kegiatan bersifat produktif (Pratama, 2015). Pengelolaan zakat menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 adalah suatu kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengorganisasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat (Rahman, 2015).

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebagai organisasi profesi akuntan di Indonesia berupaya memberikan kontribusi dalam rangka mewujudkan sistem akuntansi yang baik dari suatu OPZ. Pada tahun 2010, IAI menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109. PSAK ini bertujuan untuk mengatur tentang akuntansi zakat, *infaq* dan *shadaqah* yakni mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi

zakat dan infak/sedekah yang berlaku bagi organisasi pengelola zakat yang berkewajiban menghimpun dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah. PSAK tersebut diterbitkan sebagai pedoman standardisasi dalam pencatatan transaksi dan penyusunan laporan keuangan yang dibuat oleh organisasi pengelola zakat. Dengan adanya standardisasi tersebut maka akan terjadi keseragaman (*uniformity*) dan keterbandingan (*comparability*) dalam pencatatan dan pelaporan keuangan yang dibuat oleh Organisasi Pengelola Zakat yang ada di Indonesia, hal ini juga dapat membantu memudahkan akuntan publik dalam melakukan audit atas laporan keuangan OPZ (Rahman, 2015). Adanya regulasi mengenai pengelolaan keuangan Organisasi Pengelola Zakat, seperti ditetapkannya PSAK 109 tentang akuntansi zakat serta yang terbaru dikeluarkannya UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pada 25 November 2011, ternyata belum bisa sepenuhnya meyakinkan publik bahwa pengelolaan keuangan LAZ dan BAZ sudah dilakukan dengan semestinya (Puspitasari & Habiburrochman, 2013).

Zakat merupakan salah satu pilar dalam rukun Islam sebagai bentuk tindakan sosial yang wajib dilakukan oleh setiap Muslim (Canggih *et al.*, 2017). Zakat sebagai salah satu rukun Islam mempunyai peran penting dalam dunia nyata. Peranan zakat baik zakat harta maupun zakat fithrah sebagai sarana komunikasi utama dari masyarakat yang mampu dengan masyarakat yang tidak mampu (Romdhoni, 2017). Zakat bukan sesuatu yang baru dalam pandangan orang-orang Islam. Orang-orang Islam sangat mempercayai dan meyakini bahwa zakat merupakan salah satu dari pilar agama Islam. Kebanyakan orang Islam pun berkeyakinan bahwa zakat mempunyai peran yang sangat penting dalam pemberdayaan ekonomi umat (Kiryanto & Khasanah, 2016).

Mampu atau tidak zakat dapat memberdayakan ekonomi masyarakat sangat bergantung pada bagaimana sistem distribusi zakat tersebut diterapkan. Menurut Mubasirun (2013) mengungkapkan bahwa masyarakat sangat tergantung pada bagaimana sistem distribusi yang diterapkan. Distribusi zakat dapat dikategorikan menjadi dua yaitu distribusi zakat secara konsumtif dan secara produktif. Secara konsumtif berarti harta zakat dibagikan langsung kepada *mustahiq* untuk dimanfaatkan

secara konsumtif. Sementara, harta zakat didistribusikan secara produktif berarti *mustahiq* tidak menerima harta zakat yang langsung dimanfaatkan untuk dikonsumsi tetapi diusahakan terlebih dahulu, baik oleh *mustahiq* sendiri maupun oleh lembaga amil. Adapun yang dikonsumsi adalah hasil dari usaha tersebut. dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna , zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariah Islam, amanah, bermanfaat, berkeadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat apabila kebutuhan dasar *mustahiq* telah terpenuhi (Saifuddin, 2013). Optimalisasi distribusi dana zakat secara profesional akan memberikan dampak yang lebih baik dalam upaya pendistribusian kekayaan atau pendapatan kepada masyarakat. Bab ini akan membahas mengenai distribusi zakat dalam mempersempit jurang ketimpangan.

B. Syariah Enterprise Theory

Shariah enterprise theory merupakan *enterprise theory* yang telah diinternalisasi dengan nilai-nilai Islam dalam rangka menghasilkan teori yang transedental dan lebih humanis. Menurut Hafid (2018) *syariah enterprise theory* memiliki cakupan akuntabilitas yang luas, akuntabilitas yang dimaksud adalah akuntabilitas kepada Tuhan, manusia, dan alam. Bentuk akuntabilitas ini berfungsi sebagai tali pengikat agar akuntansi syariah selalu terhubung dengan nilai-nilai yang dapat membangkitkan kesadaran ketuhanan. Konsep penting dalam *shariah enterprise theory* adalah Allah sebagai pencipta dan pemilik tunggal dari seluruh sumber daya yang ada di dunia ini. Oleh itu, yang berlaku dalam syariah *enterprise theory* adalah Allah adalah sumber amanah utama, karena Allah pemilik yang tunggal dan mutlak (Nurfajri, 2019).

Menurut Triyuwono (2012) menyatakan bahwa teori syariah *enterprise* dianggap paling cocok untuk akuntansi syariah karena mengandung nilai keadilan, kebenaran, kejujuran, amanah dan pertanggungjawaban. Konsep penting dalam *shariah enterprise theory* adalah Allah swt sebagai pencipta dan pemilik tunggal dari

seluruh sumber daya yang ada di dunia ini (Nurfajri dan Priyanto, 2019; Kalbarini dan Suprayogi, 2014). Menurut Pramono (2013) sesuai dengan *shariah enterprise theory*, bahwa distribusi kekayaan atau nilai tambah tidak hanya berlaku pada partisipan yang terkait langsung atau yang memberikan kontribusi kepada operasi perusahaan, tetapi pihak lain yang tidak terkait langsung dengan bisnis yang dilakukan perusahaan atau pihak yang tidak memberikan kontribusi keuangan dan *skill*. Pemikiran ini dilandasi premis yang mengatakan bahwa manusia adalah *Khalifatullah fil Ardh* yang membawa misi menciptakan dan mendistribusikan kesejahteraan bagi seluruh manusia dan alam. Oleh karena itu, *shariah enterprise theory* akan membawa kemaslahatan *stakeholders*, *stockholders*, masyarakat dan lingkungan alam.

C. *Maqashid Syariah*

Menurut Thohari (2013) *al-maqashid al-syariah* adalah tujuan-tujuan dan rahasia-rahasia yang diletakkan Allah swt dan terkandung dalam setiap hukum untuk keperluan pemenuhan manfaat umat. *Maqashid syariah* penting untuk diimplementasikan agar dapat menjadi pengawal bagi setiap transaksi ekonomi dan keuangan agar bisa mengikuti perkembangan zaman namun sekaligus tidak lepas dari prinsip dasar syariat. Tanpa *Maqashid syariah*, maka semua pemahaman mengenai ekonomi syariah, keuangan, dan perbankan syariah akan sempit dan kaku serta kehilangan substansi syariahnya (Yumni, 2016). Syariah Islam menginginkan manusia mencapai dan memelihara kesehatannya. Menurut Imam Syatibi, *maslahah* adalah sifat atau kemampuan barang atau jasa yang mendukung elemen-elemen dan tujuan dari kehidupan manusia dimuka bumi ini (Khasanah, 2010).

Menurut Muchlis & Sukirman (2016) hukum Islam atau biasa disebut syariah Islam memiliki tiga sasaran yang ingin dicapai yaitu penyucian jiwa, penegakan keadilan dalam masyarakat, dan perwujudan kemaslahatan manusia. Penyucian jiwa mengandung pengertian agar manusia mampu berperan sebagai sumber kebaikan bagi masyarakat dan lingkungannya dengan salah satunya menunaikan ibadah zakat, sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an bahwa zakat berfungsi untuk

membersihkan harta manusia. Kedua adalah menegakkan keadilan dalam masyarakat, keadilan disini meliputi segala bidang kehidupan manusia, termasuk keadilan dari sisi hukum, sisi ekonomi dan sisi persaksian. Sasaran yang terakhir adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia (Asmarani & Kusumaningtias, 2019).

Syariah Islam menginginkan manusia mencapai dan memelihara kesehjahteraannya. Menurut Imam Syatibi, *masalahah* adalah sifat atau kemampuan barang atau jasa yang mendukung elemen-elemen dan tujuan dari kehidupan manusia dimuka bumi ini (Khasanah, 2010). Menurut Qorib (2016) *masalahah* yaitu mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan. Prinsip kemaslahatan esensinya merupakan segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan kolektif. Sejalan dengan Perwitasari (2017) yang mengungkapkan kemaslahatan (*masalahah*) mengandung arti bahwa segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, dan individual dan kolektif serta harus memenuhi unsur-unsur yang menjadi tujuan ketetapan syariah (*magasyid syari'ah*) yaitu pemeliharaan terhadap agama (*dien*), akal (*aql*), keturunan (*nasl*), jiwa (*nafs*) dan harta benda (*Maal*).

D. Zakat

Zakat sebagai rukun Islam yang ketiga , merupakan instrumen dalam ajaran Islam yang berfungsi sebagai pemberdayaan dari tangan si kaya kepada si miskin. Perintah mengeluarkan dalam al-Qur'an seringkali disandingkan dengan perintah shalat. Zakat sendiri secara *etismologi* berasal dari kata kerja dasar *zaka* yang artinya tumbuh dan berkembang, memberi berkah, bertambah kebaikannya, menyucikan serta menyanjung (Saifuddin, 2013). Menurut Andriyanto (2013) zakat adalah salah satu rukun Islam yang berdimensi keadilan sosial kemasyarakatan. Secara *terminologi* zakat adalah sejumlah harta yang diwajibkan oleh Allah yang diambil dari harta orang-orang tertentu untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Zakat merupakan salah satu instrumen dalam upaya mengurangi kemiskinan. Semakin banyak zakat yang terkumpul dan semakin tepat sasaran

dalam pendistribusiannya maka akan semakin mampu untuk mengurangi kemiskinan yang ada. Oleh karena itu, zakat mempunyai petan yang krusial dalam pertumbuhan roda perekonomian dan pembangunan (Haidir, 2019).

Esensi dari zakat adalah pengelolaan dana yang diambil dari aghniya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dan bertujuan untuk mensejahterakan kehidupan sosial kemasyarakatan umat Islam (Andriyanto, 2014). Menurut Saifuddin (2013) zakat mempunyai enam prinsip penting yaitu 1) prinsip keyakinan keagamaan, 2) prinsip pemerataan dan keadilan, 3) prinsip produktivitas, 4) prinsip nalar, 5) prinsip kebebasan dan 6) prinsip etika dan kewajaran. Sedangkan, tujuan dari zakat adalah untuk mencapai keadilan sosial ekonomi. Dilihat dari aspek keadilan sosial, perintah zakat dapat dipahami sebagai satu kesatuan sistem yang tidak terpisahkan dalam pencapaian kesejahteraan sosial, ekonomi, dan masyarakat. Menurut Kristin (2011) mengungkapkan bahwa hikmah dari zakat adalah menambah keimanan kepada Allah swt, mensyukuri nikmatnya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialitas, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki. Adapun fungsi zakat menurut Sayyid Quthb yaitu 1) zakat sebagai asuransi sosial (*al ta'min al ijtimaiyy*) untuk masyarakat muslim, dan 2) zakat sebagai jaminan sosial (*al dhaman al ijtimaiyy*).

E. Pendistribusian Zakat

Pendistribusian adalah tata cara atau tindakan penyaluran barang atau jasa ke pihak lain dengan tujuan tertentu. Pendistribusian zakat adalah penyaluran zakat kepada orang yang berhak menerima (*mustahiq*) baik secara konsumtif atau secara produktif dengan tujuan agar kesejahteraan *mustahiq* dapat meningkat. Sasaran *mustahik* zakat sudah ditentukan sebagaimana dalam al-Qur'an surah at-Taubah ayat 60 yaitu delapan golongan. Taubah ayat 60 yaitu delapan golongan. Dari ayat tersebut cukup jelas bahwa pendistribusian zakat harus sampai kepada delapan golongan yang telah disebutkan, walaupun dalam perkembangannya mengalami perluasan makna karena menyesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi

modern (Shariza dkk., 2019). Menurut saifuddin (2013) dengan adanya penyaluran dana zakat kepada kaum dhuafa (*mustahiq*) akan menaikkan pendapatan, dan secara otomatis akan meningkatkan kemampuan mereka untuk mengkonsumsi barang-barang dan jasa yang di jual. Selain sebagai ibadah murni zakat juga berdimensi ekonomi. Dengan demikian penyaluran dan pendistribusian zakat yang dilakukan secara baik memberikan dampak positif dalam siklus perkembangan ekonomi masyarakat.

Model pendistribusian harta zakat oleh *muzaki* ada dua cara yaitu dapat dilakukan secara langsung kepada mustahik atau lewat lembaga zakat yang nantinya akan disalurkan kepada *mustahiq*. Distribusi zakat terkadang hanya bersirkulasi pada suatu tempat tertentu, ketika zakat tidak dikelola secara keseimbangan dan diberikan langsung oleh si pemberi zakat (*muzaki*) kepada *mustahik*. hal ini disebabkan karena kurang adanya lembaga zakat yang profesional, yang menyampaikan dana zakat tersebut kepada umat yang membutuhkan. Selain itu juga berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat (Shariza dkk., 2019). Menurut Mubasirun (2013) mengungkapkan bahwa sistem distribusi zakat yang merupakan sarana pemberdaya ekonomi umat dapat dikategorikan menjadi dua yaitu secara konsumtif dan secara produktif. Secara konsumtif berarti harta zakat dibagikan langsung kepada *mustahiq* yang untuk dimanfaatkan secara konsumtif. Sementara, harta zakat didistribusikan secara produktif berarti *mustahiq* tidak menerima harta zakat yang langsung dimanfaatkan untuk dikonsumsi tetapi harus diusahakan terlebih dahulu maupun oleh lembaga amal, yang dikonsumsi berupa hasil dari usaha tersebut.

Pendistribusian Dana Zakat yang Bersifat Konsumtif

Menurut Mubasirun (2013) mengungkapkan bahwa bentuk distribusi dana zakat yang bersifat konsumtif dapat dilakukan melalui empat bentuk yaitu 1) bantuan biaya hidup, pendistribusian zakat untuk porsi bantuan biaya hidup dapat diarahkan kepada asnaf fakir-miskin yang berdasarkan pengamatan amal zakat terhadap kehidupan sehari-harinya memang membutuhkan bantuan biaya hidup. 2) bantuan biaya pendidikan, distribusi dana zakat untuk bantuan biaya

pendidikan dapat dilakukan misalnya dengan memberikan beasiswa kepada para siswa dari keluarga tidak mampu untuk meringankan beban para orang tuanya. 3) bantuan kesehatan, program bantuan biaya kesehatan dapat berupa santunan untuk kesehatan, pelayan medis, biaya kelahiran bagi keluarga kurang mampu. 4) bantuan *da'i* dan desa binaan, *da'i* merupakan salah satu bagian dari upaya penegakan agama (*i'la'i kalimaatillah*). Maka sudah sewajarnya kalau lembaga amil zakat ikut memikirkan kesejahteraan para *da'i* dengan mengalokasikan dana zakat untuk disalurkan kepada mereka. Saudara dapat memasukkan para *da'i* ke dalam kelompok *ashnaf sabililah*.

Menurut Aibak (2015) mengungkapkan bahwa distribusi konsumtif; pola pendistribusian semacam ini sama halnya dengan pola distribusi konsumtif tradisional seperti yang selama ini telah dilakukan, karena dalam pola ini tidak ada tujuan lain kecuali untuk memenuhi kebutuhan dasar orang-orang yang berhak menerima (*mustahiq*), misalnya kebutuhan sandang, pangan dan papan. Akan tetapi, hal yang harus dipahami adalah bahwa pola distribusi zakat yang seperti ini akan dapat mengakibatkan ketergantungan tinggi dari para *mustahiq* terhadap zakat. Pada akhirnya, pola konsumtif yang seperti ini akan menyebabkan para *mustahiq* itu malas bekerja, selalu menggantungkan diri pada zakat, dan hal ini tentu tidak akan bisa mencapai tujuan zakat yang semestinya serta sama saja dengan mengabadikan kemiskinan.

Pendistribusian Dana Zakat yang Bersifat Produktif

Zakat produktif adalah zakat yang didistribusikan kepada *mustahik* dengan dikelola dan dikembangkan melalui perilaku-perilaku bisnis. Indikasinya adalah harta tersebut dimanfaatkan sebagai modal yang diharapkan dapat meningkatkan taraf ekonomi *mustahiq*. Termasuk juga dalam pengertian zakat produktif jika harta zakat dikelola dan dikembangkan oleh amil yang hasilnya disalurkan kepada *mustahiq* secara berkala. Lebih tegasnya zakat produktif adalah zakat yang disalurkan kepada *mustahik* dengan cara yang tepat guna, efektif manfaatnya dengan sistem yang serba guna dan produktif, sesuai dengan pesan syariat dan peran serta fungsi sosial ekonomis dari zakat (Zalikha, 2016). Menurut Mubasirun (2013) mengungkapkan bahwa

pendistribusian dana zakat yang bersifat produktif dapat dilakukan dalam beberapa model seperti: Pertama, model dengan sistem *in kind*, yakni dana zakat diberikan dalam bentuk alat-alat produksi yang dibutuhkan oleh *mustahiq*/ kaum ekonomi lemah yang ingin berproduksi, baik mereka yang baru mulai usahanya maupun yang telah berusaha untuk pengembangan usaha yang telah ada. Kedua, model sistem *qardul hasan*, yakni peminjaman modal usaha dengan mengembalikan pokok tanpa ada tambahan jasa. Pokok pinjaman atau modal memang dikembalikan oleh *mustahiq* kepada lembaga amal zakat, namun tidak berarti bahwa modal itu tidak lagi menjadi hak *mustahiq* tersebut. Artinya modal masih dapat dikembalikan lagi kepada *mustahiq* yang bersangkutan untuk dikembangkan lagi, atau bisa juga digulirkan ke *mustahiq* lain. Dengan cara ini diharapkan lembaga amal zakat dapat menjadi patner bagi para *mustahiq* untuk pengembangan usahanya sehingga secara pelan tapi pasti dapat mengubah statusnya dari *mustahiq* berubah menjadi *muzakki*.

Menurut Syahriza dkk. (2019) mengungkapkan bahwa dalam penyaluran zakat produktif ada dua macam yaitu zakat produktif tradisional dan produktif kreatif. Zakat produktif tradisional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif. Misalnya kambing, sapi, mesin jahit, alat-alat pertukangan dan sebagainya. Pemberian zakat dalam bentuk ini akan dapat mendorong orang menciptakan suatu usaha atau memberikan lapangan kerja bagi fakir miskin. Kategori terakhir yaitu zakat produktif kreatif yaitu semua pendayagunaan zakat yang diwujudkan dalam bentuk modal yang dapat dipergunakan untuk membangun suatu proyek sosial maupun untuk membantu atau menambah modal seseorang pedagang atau pengusaha kecil. Menurut Wahyudi (2015) mengungkapkan bahwa zakat produktif merupakan zakat yang diberikan kepada fakir miskin berupa modal usaha atau yang lainnya yang digunakan untuk usaha produktif yang mana hal ini akan meningkatkan taraf hidupnya, dengan harapan seorang *mustahiq* akan bisa menjadi *muzakki* jika dapat menggunakan harta zakat tersebut untuk usahanya. Hal ini juga pernah dilakukan oleh Nabi, dimana beliau memberikan harta zakat untuk digunakan shahabatnya sebagai modal usaha. Lebih tegasnya zakat produktif adalah pendayagunaan zakat secara produktif, yang pemahamannya lebih kepada bagaimana

cara atau metode menyampaikan dana zakat kepada sasaran dalam pengertian lebih luas, sesuai dengan ruh dan tujuan syara'. Cara pemberian yang tepat guna, efektif manfaatnya dengan system yang serba guna dan peran serta fungsi social ekonomi dari zakat.

F. Distribusi zakat dalam Mempersempit Jurang Ketimpangan

Menurut Yusuf (2014) mengungkapkan bahwa pendistribusian zakat bertujuan untuk memperkecil jurang antara orang kaya dan miskin. Semakin dekatnya jurang antara orang kaya dengan orang miskin menggambarkan semakin sejahtera dan perkasanya suatu masyarakat. Hal ini mempunyai kesamaan tujuan dengan *maqasid* syari'ah untuk menciptakan sebanyak mungkin kemashlahatan dalam kehidupan masyarakat. Disamping itu pula konsep CSR pada dasarnya adalah bentuk tanggungjawab perusahaan yang tumbuh secara alami dan penuh kesadaran untuk memperbaiki kondisi masyarakat kearah yang lebih baik dan berkeadilan. Ketiga unsur, baik zakat, *maqasid* syari'ah dan CSR mempunyai tujuan yang sama. Yaitu memberdayakan masyarakat kepada kehidupan yang lebih harmoni, nyaman, makmur dan berkeadilan serta mengurangi jurang kemiskinan yang terjadi dalam masyarakat. Menurut Hafriza dkk. (2018) mengungkapkan bahwa zakat berfungsi sebagai redistribusi kekayaan yang adil dalam pendapatan, yang diberlakukan melalui kewajiban moral dan kebijakan fiskal dalam kondisi ekonomi dan sosial. Beberapa ulama kontemporer menilai bahwa perlu adanya pelembagaan zakat agar potensi, pemanfaatan dan pendayagunaannya mampu mencapai tujuan disyariatkannya. Beberapa negara juga telah menerapkan pengelolaan zakat melalui lembaga-lembaga resmi, baik yang didirikan pemerintah maupun swasta.

Menurut Susila (2018) mengungkapkan bahwa zakat adalah untuk delapan asnaf, bahkan dapat melebar ketika terjadi keadaan darurat. Dengan demikian, penyaluran zakat tidak menumpuk pada satu orang tertentu, tetapi tersebar kepada semua asnaf secara adil dan merata. Pembayaran zakat pada asnaf tertentu, berakibat gemuknya satu asnaf, sementara asnaf yang lain kekurangan. Padahal semua asnaf memiliki hak yang sama untuk

mendapatkan zakat. Zakat dibagi secara prioritas sesuai kebutuhan yang paling mendesak. Al-Qur'an memang menyebutkan delapan asnaf, tetapi tidak menyebutkan harus bagi rata. Di dalamnya ada ruang gerak untuk berkreasi, sehingga lebih fokus dalam pencapaian tujuan penetapan kewajiban zakat.

Menurut Ghofur (2016) mengungkapkan bahwa zakat memiliki banyak makna dan dimensi, dalam dimensi sosial, zakat merupakan kewajiban sosial yang bersifat ibadah, dikenakan terhadap harta individu yang ditunaikan kepada masyarakat agar terpenuhi kebutuhan dan menghilangkan kemiskinan. Prinsip utama tentang distribusi dalam ajaran Islam yakni "agar harta tidak hanya beredar dikalangan orang-orang kaya diantara kamu". Prinsip tersebut, menjadi aturan main yang harus dijalankan karena jika diabaikan, akan menimbulkan jurang yang dalam antara si miskin dan si kaya, serta tidak tercipta keadilan ekonomi di masyarakat. Menurut Masruroh (2015) mengungkapkan bahwa dalam Islam, zakat ditujukan untuk membersihkan harta benda dari keburukan (Q.S at Taubah, ayat 103), mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan, membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi *mustahiq* zakat, membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya, membersihkan diri dari sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial), menjembatani jurang pemisah antara orang kaya dan orang miskin dalam suatu masyarakat serta sebagai sarana pemerataan pendapatan (rezeki) untuk mencapai keadilan sosial.

G. Distribusi Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat

Menurut Fitri (2017) mengungkapkan bahwa kesejahteraan sosial dalam perspektif Islam adalah tentang bagaimana hubungan ajaran agama dengan kehidupan umat. Atas dasar perspektif tersebut, maka istilah kesejahteraan umat, menyangkut gambaran atmosfir keagamaan yakni dari sisi hubungan ajaran agama dengan kehidupan umat dalam hal ini hubungan ajaran Islam dengan umat Islam. Kesejahteraan umat dapat dilihat dari sisi manusia sebagai komunitas keagamaan yang memiliki kebutuhan-kebutuhan sosial ekonomi dan politik dalam arti sebagai manusia dalam melakukan interaksi dengan lingkungan

sosialnya pada satu sisi dan penciptaan hubungan dengan Tuhan sebagai konsekuensi sebagai makhluk yang beragama. Menurut Amelia (2016) mengungkapkan bahwa zakat, di samping sebagai rukun Islam yang ketiga dan bagian dari ibadah mahdah kepada Allah swt, juga merupakan ibadah maliyah yang memiliki berbagai fungsi sosial yang strategis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umat. Secara empirik, hal ini pernah terbukti dalam sejarah pada masa Khalifah Umar bin Abdul Azis. Ketika itu, zakat dikelola oleh para petugas (amil zakat) yang amanah dan profesional, di bawah kendali pemerintah yang adil dan bertanggung jawab, ternyata telah mampu meningkatkan kesejahteraan umat dan meminimalisir hal-hal yang berkaitan dengan kemiskinan dalam waktu yang relatif tidak lama. Menurut Jumena (2016) mengungkapkan bahwa zakat adalah ibadah maliyah yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Zakat mempunyai dimensi dan fungsi sosial ekonomi atau pemerataan karunia Allah dan juga merupakan solidaritas sosial, pernyataan rasa kemanusiaan dan keadilan, pembuktian persaudaraan Islam, pengikat persatuan umat dan bangsa, sebagai pengikat batin antara golongan kaya dan miskin dan sebagai jurang pemisah antara golongan yang kuat dengan yang lemah.

Menurut Hastuti (2016) mengungkapkan bahwa zakat sesungguhnya bukanlah sekedar memenuhi kebutuhan para *mustahiq*, terutama fakir miskin, yang bersifat konsumtif dalam waktu sesaat, akan tetapi memberikan kecukupan dan kesejahteraan kepada mereka, dengan cara menghilangkan ataupun memperkecil penyebab kehidupan mereka menjadi miskin dan menderita. Kebakhilan dan ketidakmauan berzakat, disamping akan menimbulkan sifat hasad dan dengki dari orang-orang yang miskin dan menderita, juga akan mengundang azab Allah swt. Menurut Fitri (2017) mengungkapkan bahwa konsep kesejahteraan sosial menurut perspektif ekonomi Islam didasarkan atas keseluruhan ajaran Islam dalam memandang segala aspek kehidupan termasuk tentang kesejahteraan sosial. Berdasarkan pandangan Islam rumusan kesejahteraan sosial mencakup:

- 1) Kesejahteraan holistik dan seimbang. Artinya kesejahteraan ini mencakup dimensi materiil maupun spiritual serta mencakup individu maupun sosial.
- 2) Kesejahteraan di dunia maupun di akhirat, sebab manusia tidak hanya hidup di dunia saja tetapi juga di akhirat.

Istilah umum yang banyak digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan hidup yang sejahtera secara materiil-spiritual pada kehidupan dunia maupun akhirat dalam bingkai ajaran Islam adalah *falāh*.

H. Simpulan

pendistribusian zakat bertujuan untuk memperkecil jurang antara orang kaya dan miskin. Semakin dekatnya jurang antara orang kaya dengan orang miskin menggambarkan semakin sejahtera dan perkasanya suatu masyarakat. Hal ini mempunyai kesamaan tujuan dengan maqasid syari'ah untuk menciptakan sebanyak mungkin kemashlahatan dalam kehidupan masyarakat. Zakat berfungsi sebagai redistribusi kekayaan yang adil dalam pendapatan, yang diberlakukan melalui kewajiban moral dan kebijakan fiskal dalam kondisi ekonomi dan sosial. Prinsip utama tentang distribusi dalam ajaran Islam yakni "agar harta tidak hanya beredar dikalangan orang-orang kaya diantara kamu". Prinsip tersebut, menjadi aturan main yang harus dijalankan karena jika diabaikan, akan menimbulkan jurang yang dalam antara si miskin dan si kaya, serta tidak tercipta keadilan ekonomi di masyarakat. Dalam Islam, zakat ditujukan untuk membersihkan harta benda dari keburukan (QS at-Taubah: 103), mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan, membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi *mustahiq* zakat, membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya, membersihkan diri dari sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial), menjembatani jurang pemisah antara orang kaya dan orang miskin dalam suatu masyarakat serta sebagai sarana pemerataan pendapatan (rezeki) untuk mencapai keadilan sosial.

Kesejahteraan sosial dalam perpektif Islam adalah tentang bagaimana hubungan ajaran agama dengan kehidupan umat. Atas dasar perspektif tersebut, maka istilah kesejahteraan umat, menyangkut gambaran atmosfir keagamaan yakni dari sisi

hubungan ajaran agama dengan kehidupan umat dalam hal ini hubungan ajaran Islam dengan umat Islam. Zakat, di samping sebagai rukun Islam yang ketiga dan bagian dari ibadah mahdah kepada Allah swt, juga merupakan ibadah maliyah yang memiliki berbagai fungsi sosial yang strategis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umat. Zakat mempunyai dimensi dan fungsi sosial ekonomi atau pemerataan karunia Allah dan juga merupakan solidaritas sosial, pernyataan rasa kemanusiaan dan keadilan, pembuktian persaudaraan Islam, pengikat persatuan umat dan bangsa, sebagai pengikat batin antara golongan kaya dan miskin dan sebagai jurang pemisah antara golongan yang kuat dengan yang lemah. Ketika zakat dikelola oleh para petugas (amil zakat) yang amanah dan profesional, di bawah kendali pemerintah yang adil dan bertanggung jawab, ternyata telah mampu meningkatkan kesejahteraan umat dan meminimalisir hal-hal yang berkaitan dengan kemiskinan dalam waktu yang relatif tidak lama.

Daftar Pustaka

- Ahmad Atabik. (2015). Manajemen Pengelolaan Zakat yang Efektif di Era Kontemporer. *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 2(1): 40-62.
- Aibak, K. 2015. Zakat dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah. *Jurnal Ahkam*, 3(2): 199-218.
- Amelia, N. 2016. Analisis Potensi Zakat dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kalimantan Selatan. *Jurnal Humaniora Teknologi*, 2(1): 1-9.
- Andriyanto, I. (2011). Strategi Pengelolaan Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan. *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 19(1):25.
- Andriyanto, I. 2014. Pemberdayaan Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat. *Jurnal ZISWAF*, 1(2) : 227-248.
- Asmarani, M & R. Kusumaningtias. 2019. Akuntabilitas Lembaga Amil Zakat dalam Perspektif Maqashid Syariah: Studi pada Yayasan Dana Sosial Al-Falah Surabaya. *Jurnal Akuntansi Unesa*, 8(1): 1-11.
- Canggih, C., Fikriyah, K., & Yasin, A. (2017). Potensi dan Realisasi Dana Zakat Indonesia. *Al-Uqud: Journal of Islamic Economics*, 1(1): 14-26.
- Fitri, M. 2019. Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat. *Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1) :149-173.
- Ghofur, R. A. 2016. Peran Instrumen Distribusi Ekonomi Islam dalam Menciptakan Kesejahteraan di Masyarakat. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1(1) : 27-39.
- Hafid, W. R., J. Majid dan M. S. S. Juardi. 2018. Penerapan Prinsip Profit Sharing dan Revenue Sharing Program Tabungan Mudharabah dan Deposito Mudharabah (Studi pada PT. Bank Muamalat Kantor Cabang Makassar). *Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah*, 2(1): 65-81.

- Hafrizah, R. H., Firdaus dan A. Chuzairi. 2018. Manajemen Zakat Sebagai Penyeimbang Perekonomian Umat. *Jurnal Perada*, 1(1): 45-58.
- Haidir, M. S. 2019. Revitalisasi Pendistribusian Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Era Modern. *Jurnal Muqtashid*, 10(1): 57-68.
- Hastuti, Q. A. W. 2014. Urgensi Manajemen Zakat dan Wakaf bagi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ziswaf*, 1(2) : 379-403.
- Huda, N., Anggraini, D., Mardoni, K. M. A. Y., & Rini, N. (2014). Zakat dengan Metode Ahp. *Al-Iqtishad*, 5(2), 223-238.
- Jumena, J. dan A. Izzudin. 2016. Pengelolaan Zakat Produktif Bagi Kesejahteraan Mustahik di Zakat Center Cirebon.
- Kalbarini, R. Y., dan N. Suprayogi. 2014. Implementasi Akuntabilitas dalam Konsep Metafora Amanah di Lembaga Bisnis Syariah (Studi Kasus: Swalayan Pamella Yogyakarta). *JESTT*, 1(7): 506-517.
- Khasanah, U. 2010. Sistem Bagi Hasil dalam Syariat Islam. *Jurnal Syariah dan Hukum*, 1(2): 120-132.
- Kiryanto, K., & Khasanah, V. N. (2016). Analisis Karakteristik Muzakki dan Tata Kelola Laz Terhadap Motivasi Membayar Zakat Penghasilan. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 2(1), 51-64
- Kristin, A. dan U. K. Umah. 2011. Penerapan Akuntansi Zakat pada Lembaga Amil Zakat. *Jurnal Value Added*, 7(2): 68-97.
- Masruroh, N. 2015. Zakat di Perbankan Syariah. *Jurnal Al-Mashraf*, 2(1): 33-46.
- Mubasirun. 2013. Distribusi Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Jurnal Penelitian Sosial Keagenan*, 7(2): 493-512.
- Muchlis, S & A. S. Sukirman. 2016. Implementasi Maqashid Syariah dalam *Corporate Social Responsibility* di PT Bank Muamalat Indonesia. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 7(1): 1- 155.

- Nurfajri, F. dan T. Priyanto. 2019. Pengaruh Murabahah, Mudharabah, dan Ijarah terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Monex*, 8(2): 1-18.
- Parisi, S. Al. (2017). Tingkat Efisiensi dan Produktivitas Lembaga Zakat di Indonesia. *Esensi*, 7(1): 63-72.
- Perwitasari, D. A. 2017. Internalisasi Nilai-Nilai Keadilan dalam Praktik Pembiayaan Mudharabah dan Deposito Mudharabah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 2(1): 71-95.
- Pratama, Y. C. (2015). Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus: Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional). *The Journal of Tauhidinomics*, 1(1): 93-104.
- Pramono, N. H. 2013. Optimalisasi Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil pada Bank Syariah di Indonesia. *Accounting Analysis Journal*, 2(2): 154-162.
- Purbasari, I. (2015). Pengelolaan Zakat oleh Badan dan Lembaga Amil Zakat di Surabaya dan Gresik. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 27(1): 68.
- Puspitasari, Y., & Habiburrochman, H. (2013). Penerapan PSAK No.109 atas Pengungkapan Wajib dan Sukarela. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 4(3): 479-494.
- Qorib, A. Dan I. H. Harahap. 2016. Penerapan Malahah Mursalah dalam Ekonomi Islam. *Jurnal Analitica Islamica*, 5(1): 55-80.
- Rahman, T. (2015). Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 6(1): 141-164.
- Romdhoni, A. H. (2017). Zakat dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 3(01): 41.
- Saifuddin. 2013. Optimalisasi Distribusi Dana Zakat : Upaya Distribusi Kekayaan (Studi Terhadap UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan zakat). *Jurnal Az Zaqqa*, 5(2): 25-53.

- Syahriza, M., P. Harahap dan Z. Fuad. 2019. Analisi Efektivitas Distribusi Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik. *Jurnal At-Tawassuth*, 4(1): 137-159.
- Triyuwono, I. 2012. *Akuntansi Syariah Perspektif, Metodologi dan Teori*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Thohari, A. 2013. Epistemologi Fikih Lingkungan: Revitalisasi Konsep Masalahah. *Az-Zarqa'*, 5(2): 145-161.
- Wahyudi, N. dan Ubaidillah. 2015. Penerapan Dana Zakat Produktif Terhadap Keuntungan Usaha Mustahik Zakat. *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 3(2): 24-31.
- Yumni, A. 2016. Kemaslahatan dalam Konsep Maqashid Al-Syariah. *Nizhamiyah*, 6(2): 47-57.
- Yusuf, M. Y. 2014. Pola Distribusi Zakat Produktif : Pendekatan Maqhasid Syariah dan Konsep CSR. *Jurnal Media Syariah*, 16(1): 207-230.
- Zalikha, S. 2016. Pendistribusian Zakat Produktif dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 15(2): 304-319.

AKUNTANSI ZAKAT: PERSPEKTIF METAFORA AMANAH

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu Negara dengan jumlah penduduk beragama Islam terbesar. Seiring berjalannya waktu, Indonesia tentu memiliki potensi zakat yang cukup besar. Dalam ajaran Islam terdapat hal-hal yang berkaitan dengan aspek ekonomi yang bersifat solutif, dengan menjadikan zakat, infaq, wakaf, dan sedekah sebagai bagian dari sumber pendapatan Negara. Islam memiliki konsep pemberdayaan umat, yaitu dengan memaksimalkan peran lembaga pemberdayaan ekonomi umat seperti zakat, infaq, dan sedekah.

Jumlah zakat yang terhimpun di Indonesia naik tiap tahun, namun tidak pernah mencapai potensi yang sesungguhnya, kolektifitas pengumpulan zakat masih jauh dari harapan (Nikmatunyah, 2014). Adapun penyebab rendahnya penerimaan zakat yang diperoleh adalah masih rendahnya kesadaran umat Islam dalam memberikan dan menyalurkan zakat mereka melalui Lembaga Amil Zakat/Badan Amil Zakat resmi karena kurangnya sosialisasi dan informasi dari Badan Zakat Nasional. Padahal penyaluran zakat melalui Organisasi Pengelola Zakat akan lebih tepat sasaran kepada mereka yang membutuhkan. Selain itu, pengelolaan zakat pada Lembaga Amil Zakat/Badan Amil Zakat yang belum sepenuhnya efisien dan efektif.

Besarnya potensi zakat tidak seimbang dengan dana zakat yang terkumpul melalui lembaga. Artinya, di satu sisi petugas BAZNAS masih kekurangan tenaga Sumber Daya Manusia. Selain itu adanya faktor ketidakpercayaan *muzakki* pada pengelolaan dana zakat baik itu Badan Amil Zakat dikarenakan kurangnya transparansi pada Laporan Keuangan, akuntabilitas dari pihak Badan Amil Zakat serta tidak mendapatkan manfaat yang lebih besar apabila dana zakat tersebut di salurkan melalui Badan Amil

Zakat dan Lembaga Amil Zakat dibandingkan dengan penyaluran secara langsung (Septiarini, 2011). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar *muzakki* masih menginginkan pengelolaan zakat yang lebih baik, yaitu bahwa pengelola zakat harus memiliki profesionalisme, transparansi dalam pelaporan dan penyaluran yang tepat sasaran, dengan program-program yang menarik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kepercayaan akan terjadi bila pihak pengelola ZIS mampu memberikan akuntabilitas publik atas pengelolaan ZIS (Endakawati, 2014).

Perkembangan Badan Amil Zakat perlu di ikuti dengan proses akuntabilitas publik yang baik dan transparan dengan mengedepankan motivasi melaksanakan amanah umat. Sebagaimana kedudukan kewajiban zakat Islam sangat mendasar dan fundamental. Begitu mendasarnya sehingga dalam al-Qur'an seringkali kata zakat di pakai bersamaan dengan kata shalat, yang menegaskan adanya kaitan komplementer antara ibadah shalat dan zakat. Shalat berdimensi vertikal ketuhanan dimana perintah zakat dalam al-Qur'an sering disertai dengan ancaman yang tegas.

Zakat sebagai rukun Islam yang ketiga, merupakan instrumen utama dalam ajaran Islam, yang berfungsi sebagai distributor aliran kekayaan dari tangan *the have* kepada *the have not*. Merupakan institusi resmi yang diarahkan untuk menciptakan pemerataan dan keadilan bagi masyarakat, sehingga taraf kehidupan masyarakat dapat di tingkatkan (Kristin, 2011). Badan Amal Zakat dituntut dapat memberikan informasi mengenai pengelolaan kepada semua pihak yang berkepentingan. Kemampuan untuk memberikan informasi yang terbuka, seimbang dan merata kepada *stakeholders* terutama mengenai pengelolaan keuangan adalah salah satu kriteria yang menentukan tingkat akuntabilitas dan aksesibilitas lembaga. Senada dengan hal itu Ipansyah (2013) menyatakan agar zakat yang di keluarkan oleh *muzakki* (pembayaran zakat) dapat mencapai sasaran, maka di perlukanlah organisasi pengelola zakat (OPZ) untuk menyalurkan zakat yang telah mereka bayarkan kepada masyarakat yang membutuhkan secara efektif dan efisien.

Menurut PSAK No. 109, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh *muzakki* sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (*mustahiq*). Pemberian kewajiban syariah dari *muzakki* ke *mustahiq* dapat

melalui amil ataupun secara langsung. Ketentuan zakat mengatur mengenai persyaratan nisab, haul (baik yang periodik maupun yang tidak periodik). Tarif zakat (*qadar*), dan peruntukannya. Sedangkan zakat maal adalah zakat yang dikenakan atas harta yang dimiliki oleh individu atau lembaga dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan secara hukum Islam. Untuk itu diperlukan akuntansi, jadi secara sederhana akuntansi zakat berfungsi untuk melakukan pencatatan dan pelaporan atas penerimaan dan pengalokasian zakat. Mengingat pentingnya akuntabilitas dan transparansi sebagai lembaga publik, amil zakat memerlukan standarisasi pelaporan agar publik dan pemangku kepentingan lainnya dapat memantau, dan menilai kinerja mereka serta memberikan umpan balik atas pertanggungjawaban pelaporan tersebut. Yakni dalam membagi dan menyalurkan seluruh harta kepada yang berhak (Adi dan Syarif, 2009).

Terbukanya laporan keuangan zakat yang diberikan oleh suatu lembaga Amil Zakat menambahkan rasa kepercayaan kepada masyarakat untuk menyalurkan dana zakat, infaq/sedekah kepada lembaga. Bentuk pertanggungjawaban ini bukan hanya diikuti dengan pemberian data yang lengkap namun juga benar adanya. Karena meskipun masyarakat dalam hal ini *muzakki* tidak mengetahui apakah data berupa angka-angka akuntansi data yang benar, ada yang lebih mengetahui secara detail yaitu Allah swt (Salle, 2015).

Sebagaimana Nikmatuniayah (2012) dengan tujuan berfokus pada penyajian laporan keuangan ZIS untuk publik bahwa dengan menyajikan laporan zakat untuk publik maka pengelola menjadi lebih amanah dan masyarakat (*muzakki*) menjadi percaya pada lembaga yang bersangkutan. Selain dikemukakan Huda dan Sawarjowo (2013) membahas mengenai akuntabilitas pengelolaan zakat melalui pendekatan modifikasi *action research* dengan menunjukkan tumpang tindihnya program pemberdayaan antar OPZ, data *muzakki* dan *mustahiq* tidak akurat, terbatasnya kemitraan OPZ, kebijakan pemerintah bertentangan dengan program pendayagunaan, belum didapatkan model promosi murah dan keterbatasan tenaga amil profesional. Dalam konteks ini, transparansi menjadi kontrol publik terhadap organisasi pengelola zakat sehingga transparansi dikaitkan dengan tingkat akses bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi sebanyak

mungkin (Muhammad, 2006). Bab sebelumnya telah dibahas mengenai arah distribusi zakat, pada bab ini akan dibahas lebih dalam mengenai akuntansi zakat dilihat dari metafora amanah.

B. *Syariah Enterprise Theory*

Syariah Enterprise Theory tidak mendudukkan manusia sebagai pusat dari segala sesuatu sebagaimana dipahami oleh *antroposentrisme*. Tapi sebaliknya, *Syariah Enterprise Theory* menempatkan Tuhan sebagai pusat dari segala sesuatu. Tuhan menjadi pusat tempat kembalinya manusia dan alam semesta. Oleh karena itu, manusia di sini hanya sebagai wakilnya (*khalituLlah fil ardh*), sebagai perpanjangan tangan yang memiliki konsekuensi patuh terhadap semua hukum-hukum Tuhan. Artinya sebagai *khalifatullah fil ardh* manusia memiliki misi mulia yaitu menciptakan dan mendistribusikan kesejahteraan (materi dan nonmateri) bagi seluruh manusia dan alam semesta, untuk mempermudah tugas ini manusia dapat menciptakan organisasi (organisasi *profit* atau organisasi *nonprofit*) yang digunakan sebagai instrumen dalam mengemban tugas tersebut sehingga organisasi diharuskan mempertanggung jawabkan seluruh aktivitas kepada Allah secara vertikal, dan kemudian dijabarkan lagi dalam bentuk pertanggungjawaban secara horizontal kepada umat manusia lain serta pada lingkungan alam (Kalbarini, 2014).

Proses kembali ke Tuhan memerlukan proses penyatuan dan pendekatan diri dengan sesama manusia dan alam sekaligus dengan hukum-hukum yang melekat di dalamnya. Tentu saja konsep ini sangat berbeda dengan *Entity Theory* yang menempatkan manusia dalam hal ini *stakeholders* sebagai pusat, sehingga *Syariah Enterprise Theory* ini sangat erat kaitannya dengan aspek akuntabilitas yang ada pada Badan Amil Zakat karna mampu untuk menjawab segala aspek yang berkaitan secara mendasar didalamnya utamanya yang berkaitan dengan pengelolaan akuntansi zakat.

Syariah Enterprise Teory menyeimbangkan nilai egoistik dengan nilai altruistik, nilai materi, dengan nilai spiritual. Dalam syariah Islam, bentuk keseimbangann secara konkrit diwujudkan dalam salah satu bentuk ibadah yaitu zakat. Zakat secara implisit mengandung nilai egoistik. Altruistik, materi spiritual, dan individu-jamaah. Tuhan menjadi pusat tempat kembalinya

manusia dan alam semesta. Kepatuhan manusia semata-mata dalam rangka kembali kepada tuhan dengan jiwa yang tenang. Hal ini tercermin dalam konsep mertafora amanah dimana nilai, tata cara dan praktek hidup yang diatur islam sebuah dimensi universal yang mencakup keseluruhan aspek hidup manusia, di dunia maupun di akhirat. Selain itu amanah dari Allah yang didalamnya melekat sebuah tanggungjawab untuk menggunakan cara dan tujuan yang ditetapkan oleh sang mahah pemberi amanah.

C. Konsep Mertafora Amanah

Amanah dalam konteks ekonomi menyatakan bahwa segala sumber daya milik allah dan manusia dari seseorang yang diberi amanah untuk menyebar nilai sacral yang ditugaskan kepadanya. Tujuan organisasi menurut islam adalah menyebarkan nikmat bagi semua makhluk (Kalbarini, 2014). Tujuan itu pada hakekatnya tidak terbatas pada kehidupan dunia individu, tetapi juga kehidupan setelah dunia ini. Senada dengan Koni (2014) bahwa dalam melakukan segala sesuatu harus didasarkan pada kesadaran diri sebagai khalifah di bumi mempunyai konsekuensi bahwa semua aktivitas harus sesuai dengan kekuatan tuhan dan dapat bermanfaat bagi sesama makhluk tuhan.

Dalam hal ini reputasi sikap amanah dan profesionalitas merupakan modal utama bagi lembaga-lembaga zakat (Kholis dkk., 2013). Pemaknaan konsep akuntabilitas dalam pengelolaan akuntansi zakat yang merupakan bentuk amanah dari Allah, yakni atas dasar nilai-nilai spiritual di dukung oleh tiga nilai kejujuran yang dapat diterapkan agar bisa berhasil dalam menjalankan amanah, kejujuran bernat, kejujuran lahiriah, serta kejujuran batiniah.

Organisasi dengan metafora amanah ini tidak saja mempunyai kepedulian terhadap kesejahteraan alam yang dikelola dengan cara-cara yang adil dengan menggunakan potensi internal yaitu dengan akal dan hati (Kholmi, 2012). Dalam tradisi Islam atau organisasi yang menggunakan metafora amanah, badan Amil Zakat harus dioperasikan atas dasar nilai-nilai etika yaitu etika yang diformulasikan dalam bentuk syariah dalam pengertian luas, syariah merupakan pedoman yang digunakan oleh umat Islam untuk berperilaku dalam segala aspek kehidupa.

Bila metafora ini secara sadar diterima dan dipraktikkan dalam kegiatan pada suatu lembaga secara lebih menyeluruh, maka akan tercipta apa yang dinamakan dengan realitas organisasi dengan jaringan-jaringan kuasa ilahi.

D. Zakat, Infaq, dan Sedekah

Zakat, infaq, dan sedekah merupakan bagian dari kedermawanan (*filantropi*) dalam konteks masyarakat Muslim. Zakat merupakan kewajiban bagian dari setiap muslim yang mampu serta menjadi unsur dari Rukun Islam, Menurut PSAK NO. 109, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (*mustahiq*). Sedangkan Infaq dan Sedekah merupakan wujud kecintaan hamba terhadap nikmat dari Allah swt yang telah diberikan kepadanya sehingga seorang hamba rela menyisihkan sebagian hartanya untuk kepentingan agama baik dalam rangka membantu sesama maupun perjuangan dakwah Islamiyah (Fardan Ngoyo dan Lince, 2015).

Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan kewajiban bagi orang beriman (*muzakki*) yang mempunyai harta yang telah mencapai ukuran tertentu (*nisab*) dan waktu tertentu (*haul*) untuk diberikan pada orang yang berhak (*mustahiq*). Sedangkan kewajiban zakat dalam Islam memiliki makna yang sangat fundamental, saling berkaitan erat dengan aspek-aspek ke Tuhanan, juga ekonomi sosial (Nuruddin, 2006:1). Sebagai rukun ketiga dari rukun Islam, zakat juga menjadi salah satu diantara panji-panji Islam yang tidak boleh diabaikan oleh siapa pun juga. Oleh karena itu, orang yang enggan membayar zakat boleh diperangi dan orang yang menolak kewajiban zakat dianggap kafir.

Hikmah dan Tujuan Zakat

Zakat merupakan ibadah yang memiliki banyak arti dalam kehidupan umat manusia terutama ummat Islam. Zakat memiliki banyak hikmah, baik yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhan Nya, maupun hubungan sosial kemasyarakatan di antara manusia adalah :

1. Menyucikan diri dari kotoran dosa, memurnikan jiwa, menumbuhkan akhlak mulia menjadi murah hati, memiliki rasa kemanusiaan, dan mengikis sifat *bakhil* (kikir), serta serakah sehingga dapat merasakan ketenangan batin, karena terbebas dari tuntutan Allah dan tuntutan kewajiban masyarakat.
2. Memberantas penyakit iri hati, rasa benci, dan dengki dari diri manusia yang biasa timbul ketika melihat kecukupan atau kelebihan orang disekitarnya dengan kemewahan, sedangkan ia sendiri tak punya apa-apa dan tidak ada uluran tangan dari mereka (orang kaya) kepadanya.
3. Dapat menolong membina, dan membangkaum yang lemah untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, sehingga mereka dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya terhadap Allah swt.
4. Dapat menunjang terwujudnya sistem kemasyarakatan islam yang berdiri di atas prinsip-prinsip *ummatan wahidan* (umat yang satu), *musawah* (persamaan derajat, hak dan kewajiban), *ukhuwah islamiyah*, dan *takaful ijtima'* (tanggung jawab sosial bersama).
5. Menjadi unsur penting dalam keseimbangan dalam distribusi harta sosial (*social distruction*) keseimbangan dalam kepemilikan harta (*social ownership*), dan keseimbangan tanggung jawab individu dalam masyarakat.
6. Zakat adalah ibadah *maliyyah* yang mempunyai dimensi dan fungsi ekonomi atau pemerataan karunia Allah dan merupakan perwujudan solidaritas sosial, pembuktian persaudaraan Islam, pengikat persaudaraan ummat dan bangsa sebagai penghubung antara golongan kuat dan lemah.

E. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas pada Badan Amil Zakat

Akuntabilitas sangat erat kaitannya dengan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik juga tersirat dalam al-Qur'an surah al-Baqarah 282, yang mewajibkan pencatatan dari setiap aktivitas transaksi. Kemudian Akuntansi syari'ah memandang bahwa akuntabilitas yang dianggap sebagai suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Dalam hal ini reputasi sikap amanah dan

profesionalitas merupakan modal utama bagi lembaga-lembaga zakat (Kholis *et al.*, 2013). Akuntansi syari'ah melihat bahwa akuntansi bisa benar-benar berfungsi sebagai alat penghubung antara *stakeholders*, *entity* dan publik dengan tetap berpegangan pada nilai-nilai akuntansi dan ibadah syari'ah. Kondisi ini menunjukkan bahwa akuntansi syari'ah memberikan informasi akuntansi sesuai dengan kondisi *riil*, tanpa ada rekayasa dari semua pihak, sebagai bentuk ibadah kepada Allah, sehingga akan tercipta hubungan yang baik antara *stakeholders*, para akuntan, dan hubungan sosial antar manusia yang lebih baik. Hal ini karena akuntansi syari'ah memandang bahwa organisasi ini sebagai *Syariah Enterprise Theory*, dimana keberlangsungan hidup sebuah organisasi ditentukan oleh banyak pihak. Dalam hal ini reputasi sikap amanah dan profesionalita merupakan modal utama bagi lembaga-lembaga zakat.

Unsur pertanggungjawaban dalam pelaporan keuangan harus lebih diutamakan dari sekedar aspek pembuatan keputusan, dengan menjadikan zakat sebagai aspek utama dalam pelaporan keuangan, maka dapat dihindari perbedaan kepentingan antara berbagai pihak pemakai laporan keuangan. Disamping itu dapat dihindari berbagai jenis praktek kecurangan dalam pelaporan keuangan, seperti *window dressing* dan penyajian informasi yang menyesatkan pemakai laporan. Akuntansi yang berbasis pada zakat mampu menyelesaikan masalah ekonomi masyarakat, sebab konsep zakat tidak dapat dipisahkan dengan tanggung jawab seseorang terhadap lingkungan sosialnya.

Laporan keuangan zakat merupakan bagian penting dari proses akuntabilitas publik (konsep amanah) (Jasafat, 2015). Oleh karena itu, dalam akuntansi terdapat sistem pencatatan yang lebih baik dan dapat mengatasi kelemahan. Sistem ini disebut sistem pencatatan. Sistem pencatatan inilah yang sering disebut akuntansi. Menurut sistem ini, pada dasarnya suatu transaksi ekonomi akan dicatat dua kali. Pencatatan dengan sistem ini disebut dengan istilah menjurnal. Sistem ini akan mempermudah penyusunan laporan keuangan karena perhitungan yang akurat dan berkesinambungan. Sehingga diakhir periode dapat dinilai sejauh mana kinerja yang telah dicapai dan dapat menjadi acuan untuk pengelolaan zakat dan infak/sedekah selanjutnya serta dapat dilihat seberapa besar pertanggung jawaban Badan Amil

Zakat. Dimana kualitas pada suatu lembaga pengelola zakat harus diukur, yaitu amanah, professional serta transparan dengan adanya pengelolaan zakat infaq dan sedekah ini rasa curiga dan ketidakpercayaan masyarakat akan mampu di minimalisasi (Yulinartati *et al.*, 2012).

Intik (2013) menyatakan bahwa laporan keuangan lembaga amil menjadi salah satu media untuk pertanggungjawaban operasionalnya, yaitu dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana zakat infak dan sedekah. Untuk itu agar laporan keuangan tersebut akuntabel dan transparan maka dibutuhkan standar akuntansi yang mengaturnya. Berbeda dengan entitas syariah, aktivitas pengumpulan dan penyaluran dan ZIS juga dilakukan dalam rangka melaksanakan fungsi social selain fungsi komersial, sehingga komponen laporan keuangan yang dimuat dalam PSAK 101 juga memiliki laporan sumber dan penggunaan dana ZIS.

Akuntabilitas organisasi pengelola zakat ditunjukkan dalam laporan keuangan tersebut, untuk bisa disahkan sebagai organisasi resmi, lembaga zakat harus menggunakan sistem pembukuan yang benar dan siap untuk diaudit akuntan publik. Ini artinya standar akuntansi zakat mutlak diperlukan. Di dalam PSAK 109 terdapat panduan standar dalam mengatur pengakuan, pengukuran penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat, infak dan shadaqah.

F. Cerminkan Amanah sebagai Spiritual Pengelolaan Zakat

Dalam Islam, konsep amanah sebagai penting dan memiliki konsekuensi yang besar untuk orang-orang yang mengabaikan amanah. Amanah berkaitan dengan akhlak seperti kejujuran, kesabaran dan keberanian, dan ketegasan. Untuk menjalankan amanah, seseorang perlu keberanian yang tegas dengan menerima konsekuensi dari apa yang diperbuat. Seseorang yang diberikan amanah disebut dengan wali amanat (*steward*) yang dapat menjaga dan mengatur sendiri amanah yang diberikan kepadanya, islam memandang kepemilikan sebagai sebuah amanah. Kepemilikan tersebut adalah mutlak milik Allah dan manusia hanya sebagai perpanjangan tangan dari Nya.

Konsep amanah merupakan bagian universal yang kemudian diturunkan menjadi akuntabilitas, sebuah konsep Barat yang diturunkan dari teori agensi (Kholmi, 2012). Pertanggungjawaban dalam perspektif amanah tidak hanya

bertitik pada pertanggungjawaban di dunia, namun juga akan berlanjut pertanggungjawaban di akhirat. Perspektif amanah yang selanjutnya oleh Triyuwono dijadikan sebagai metafora dalam menjelaskan tujuan dibangunnya suatu lembaga dalam menyebarkan rahmat bagi seluruh alam, tentunya dapat dilihat atau dipantau dari iklim atau suasana yang ada di dalam organisasi tersebut, harapan keberadaan organisasi tersebut dapat memberikan iklim *humanis* dan *transendental* dalam kehidupan organisasi. Menurutny, metafora amanah diturunkan kepada metafora zakat, sehingga lembaga bisnis syariah berorientasi terhadap zakat. Pada perusahaan, zakat dapat dipandang sebagai biaya sehingga zakat akan mengurangi keuntungan yang tercermin dalam laba bersih yang dijadikan subjek zakat. Perusahaan akan menyukai untuk mengganti pembayaran zakat dengan memasukkannya sebagai elemen biaya. Jadi, bagian pengeluaran zakat akan kembali ke perusahaan dari zakat yang dikeluarkan.

Akuntabilitas yang kerap dituntut masyarakat dari sebuah lembaga publik, dapat diterapkan dengan mendorong seluruh organ perusahaan menyadari tanggung jawab, wewenang hak dan kewajibannya. Akuntabilitas merupakan suatu cara pertanggung jawaban manajemen atau penerima amanah kepada pemberi amanah atas pengelolaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepadanya baik secara vertikal maupun secara horizontal, juga tersirat dalam al-Qur'an surah al-Baqarah 282 yang mewajibkan pencatatan dari setiap aktivitas transaksi. Hal inilah yang menjadikan perbedaan besar dengan tujuan dasar akuntansi konvensional. Akuntansi syari'ah melihat bahwa akuntansi bisa benar-benar berfungsi sebagai alat "penghubung" antara *stakeholders*, *entity* dan publik dengan tetap berpegangan pada nilai-nilai akuntansi dan ibadah syari'ah.

Lembaga pengelola zakat dituntut mampu untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas nya, bukan saja mengandung nilai ibadah, moral, spiritual, dan *ukhrawi*, melainkan juga nilai ekonomi yang berkaitan dengan kemampuan Badan Amil Zakat dalam meningkatkan kepercayaan para *muzakki* (Fadillah *et al.*, 2012). Esensinya bertujuan untuk memperkaya jiwa manusia dengan nilai-nilai spiritual yang dapat meninggikan harkat dan martabat manusia melebihi martabat benda, dan menghilangkan sifat materialisme dalam diri manusia. Dengan prinsip ini Badan Amil Zakat berupaya memberikan informasi laporan kegiatan

maupun laporan pengumpulan dan pendistribusian dana ZIS secara jelas, jujur dan dapat dipercaya. Sebagai organisasi yang dijalankan oleh manusia, Badan Amil Zakat tak luput dengan kesalahan. Oleh karenanya dalam setiap pemberian laporan keuangan, Badan Amil Zakat juga meminta konfirmasi dan verifikasi dari *muzakki* atau Organisasi Pengelola Zakat jika terjadi kesalahan dalam pelaporannya. Lembaga pengelola ZIS tidak dapat dianggap remeh mengenai pertanggungjawaban publik atas dana yang diserahkan donatur. Akuntabilitas yang merupakan suatu hal yang kerap dituntut oleh masyarakat dari sebuah lembaga publik, masyarakat perlu mengetahui aliran dana dan kinerja lembaga tersebut. Sebagai lembaga umat yang dijadikan sebagai naungan, Badan Amil Zakat sebagai Organisasi Pengelola Zakat harus memiliki akuntabilitas yang tinggi meskipun mereka secara ikhlas menyerahkan dananya untuk keperluan ZIS (Yulinartati *et al.*, 2012).

G. Organisasi Pengelola Zakat

Badan Amil Zakat merupakan salah satu contoh organisasi yang memerlukan tingkat transparansi yang tinggi dikarenakan Badan Amil Zakat merupakan organisasi nirlaba yang bergerak dalam bidang sosial kemanusiaan di mana tugas dari organisasi ini adalah menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkannya (Endahwati *et al.*, 2014).

Disisi lain belum sempurnanya regulasi yang diatur pemerintah antara lain terlihat dari belum diaturnya kewajiban muslim untuk membayar zakat dalam peraturan perundang-undangan (Rahayu, 2014). Namun dengan adanya badan pengelola ZIS tersebut merupakan suatu hal yang menggembirakan, karena pengumpulan dana penghimpunan ZIS terus meningkat. Namun disisi lain hal ini memunculkan tantangan bagi pendayagunaan dana ZIS agar efektif dan berdampak luas di masyarakat. Sehingga Lembaga Pengelola Zakat dituntut untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas organisasi.

H. Simpulan

Proses penghimpunan dan pengelolaan zakat, infak dan sedekah, dana yang terhimpun berasal dari masyarakat berbagai instansi dan perusahaan-perusahaan. Penghimpunan dana pada

Badan Amil Zakat baik itu dana Zakat, infaq, sedekah dan dana lainnya dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain para *muzakki* dapat menyalurkannya dengan mendatangi langsung Badan Amil Zakat, atau dengan layanan zakat dimana pengurus lembaga pengelola zakat dapat menjemput langsung zakat dari *muzakki* baik atas permintaan *muzakki* yang bersangkutan maupun inisiatif amil sendiri, serta bisa mendonasikannya melalui transfer ke rekening, Bank Syariah, Bank syariah mandiri, Bank BNI syariah, dan Bank Muamalat.

Penyaluran melalui Bank tentu memiliki cara tersendiri, yaitu *muzakki* sebagai pemberi sebelum melakukan transfer dana perlu menyampaikan niatnya kepada pihak Badan Amil Zakat, dengan demikian *muzakki* akan diarahkan untuk menyalurkannya ke rekening yang telah ditentukan. Setelah melakukan transfer, *muzakki* kembali datang untuk mengkonfirmasi kepada pihak Badan Amil Zakat.

Selain itu pula, pendistribusian yang dilakukan oleh pihak amil tidak terlepas dari sifat *Shiddiq* yang berarti benar, *Tabligh* artinya menyampaikan, *Amanah* berarti dapat dipercaya, dan *fathonah* berarti cerdas. Jika menilik pada pandangan pengelola keuangan zakat yaitu amil, dengan memahami bahwa dana zakat merupakan amanah, amil dapat mempersepsikan bahwa orang-orang yang telah mempercayakan amanahnya (*muzakki*) tersebut adalah anggota masyarakat muslim yang dengan ikhlas memberikan sumber dana kepada organisasi pengelola zakat untuk disalurkan kepada *mustahiq* yang membutuhkan.

Dalam proses penyusunan laporan keuangan Badan Amil Zakat tidak terlepas dari proses pengumpulan bukti-bukti baik itu bukti penerimaan maupun pengeluaran untuk dicatat. Kendati demikian Badan Amil Zakat tidak melakukan penjurnalan, hanya melakukan beberapa pencatatan pembukuan dengan rincian sebagai akun penerimaan atau akun pengeluaran. Pembukuan yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat menggunakan sistem *single entry* memiliki kelebihan dan kelemahan yakni pencatatan ini dianggap mudah dan cukup sederhana serta mudah untuk dipahami, namun tidak dapat menghasilkan laporan keuangan yang lengkap serta sulit untuk menemukan kesalahan dalam pencatatan dan sulit untuk di kontrol.

Daftar Pustaka

- Mohammad Daud. 2006. Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Endahwati, dan D. Yoso. 2014. Akuntabilitas Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS). *Jurnal Ilmiah Akuntanasi dan Humanika*, 4(1): 1356-1379.
- Fadillah, S., Nurleli, R. Lestari, dan Helliana. 2012. Membangun Kepercayaan Konsumen: Faktor Penting pada Lembaga Amil Zakat Seluruh Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan PKM: Sosial, Ekonomi, dan Humaniora*, 3(1): 127-137.
- Fardan, N. Muh, dan L. Bulutoding. 2015. Kajian Penerapan Akuntansi Zakat, Infaq, Sedekah. Berdasarkan PSAK 109 pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar. *Artikel*, 1-15.
- Huda, N. dan T. Sawarjuwono. 2013. Akuntabilitas Pengelolaan Zakat melalui Pendekatan Modifikasi Action Research. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 4(3): 376-388.
- Ipansyah, N., N. Rahmi, dan R. Helmi. 2013. Studi Penerapan Akuntansi Zakat pada BAZNAS Provinsi Kalsel dan BAZNAS Kota Banjarmasin. *Jurnal Penelitian Agama dan Sosial Budaya*, 1(1): 75-83.
- Istutik. 2013. Analisis Implementasi Akuntansi Zakat dan Infak atau Sedekah (PSAK: 109) pada Lembaga Amil Zakat di Kota Malang. *Jurnal Akuntansi Akrual*, 2(1): 19-24.
- Jasafat. 2015. Manajemen Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sadaqah pada Baitul Mal Aceh Besar. *Jurnal Al Ijtima'iyyah*, 1(1): 1-18.
- Kalbarini, R. Y., dan N. Suprayogi. 2014. Implementasi Akuntabilitas dalam Konsep Metafora Amanah di Lembaga Bisnis Syariah (Studi Kasus: Swalayan Pamella Yogyakarta). *JESTT*, 1(7): 506-517.

- Kholis, N., S. Sobaya, Y. Ardiansyah, dan M. Iqbal. 2013. Potret Filantropi Islam di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Ekonomi Islam*, 7(1): 61-84.
- Kholmi, M. 2012. Akuntabilitas dan Pembentukan Perilaku Amanah dalam Masyarakat Islam. *Jurnal Salam*, 15(1): 1-18.
- Koni, W. 2014. Akuntansi Syariah: Solusi Krisis Akuntansi Kapitalis. *Jurnal AL Mizan*, 10(1): 107-120.
- Kristin, A. dan U. K. Umah. 2011. Penerapan Akuntansi Zakat pada Lembaga Amil Zakat. *Jurnal Value Added*, 7(2) : 68-97.
- Nirmatuniayah. 2012. Akuntabilitas Laporan Keuangan Organisasi Pengelola Zakat Yayasan Daruttaqwa Semarang. *Prosiding Sosial, Ekonomi, dan Humaniora*, 3(1): 523-531.
- Nikmatuniyah. 2014. Komparasi System Pengendalian Internal Pengelolaan Lembaga Amil Zakat. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 5(3): 345-510.
- Nuruddin, Ali. 2006. Zakat sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Rahayu, dan N.W. Islami. 2014. Lembaga Amil Zakat, Politik Lokal, dan Good Governance di Jember. *Karsa*, 22(2): 1-17.
- Salle, I. Z. 2015. Akuntabilitas Manuntungi: Memaknai Nilai Kalambusang pada Lembaga Amil Zakat Kawasan Adat Ammatoa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 6(1): 28-37
- Septiarini, D. F. 2011. Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengumpulan Dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh pada LAZ di Surabaya. *Jurnal Akuntansi*, 2(2): 172-179.
- Yulinartati, L. A. F. Ekaningsih, dan A. Roziq. 2012. Akuntabilitas Lembaga Pengelola Zakat di Kabupaten Jember. *Proceedings of Conference in Business, Accounting and Management*, 1(1): 1193-1212.

INTERNALISASI *FINTECH* SYARIAH DALAM MEWUJUDKAN KEMASLAHATAN UMAT

A. Pendahuluan

Saat ini perkembangan teknologi berkembang sangat pesat dan telah masuk ke semua sektor, diantaranya adalah sektor keuangan. Perihal masuknya teknologi ke sektor keuangan, maka secara perlahan mengubah industri keuangan ke era digital (Fitriani, 2018). Melalui pemanfaatan teknologi, masyarakat sangat terbantu untuk mendapatkan sebuah layanan. Sama halnya di bidang keuangan atau *financial* juga mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Teknologi dan *financial* memiliki keterkaitan satu sama lain (Ansori, 2019). Saat ini, industri yang menarik dan sedang mengalami perkembangan adalah industri teknologi keuangan atau lebih dikenal *fintech* (*Financial Technology*). Teknologi keuangan atau *fintech* di Indonesia merupakan peluang pasar yang sangat potensial.

Fintech merupakan suatu inovasi pada sektor finansial dengan sentuhan teknologi modern. Inovasi finansial ini mendapat sentuhan teknologi modern. *Fintech* merupakan implementasi dan pemanfaatan teknologi untuk peningkatan layanan jasa perbankan dan keuangan yang umumnya dilakukan oleh perusahaan rintisan (*startup*) dengan memanfaatkan teknologi *software*, internet, komunikasi, dan komputasi terkini (Rahadiyan dan Sari, 2019). Menurut Musdalifa dkk. (2018) *fintech* secara global menunjukkan perkembangan secara pesat. *Fintech* berkembang di berbagai sektor, mulai dari *startup* pembayaran, peminjaman (*lending*), perencanaan keuangan (*personal finance*), investasi ritel, pembiayaan (*crowdfunding*), remitansi, riset keuangan, dan lain-lain. Menurut Rahmanto dan Nasrulloh (2019) menyatakan beberapa tahun terakhir investasi global terhadap

usaha *fintech* terus melaju cepat, jumlah pengguna internet di Indonesia telah mencapai 83,6 juta pengguna internet dan 297 juta pelanggan telepon seluler. Pertumbuhan konsumsi masyarakat terhadap internet menjadi indikator baik dalam mengembangkan layanan dan produk keuangan syariah berbasis digital supaya menjangkau ke seluruh wilayah Indonesia (Nurfalah dan Rusydiana, 2019).

Kini, perkembangan *fintech* syariah menunjukkan tren yang cukup baik. Menurut catatan Asosiasi *Fintech* Syariah Indonesia (AFSI), saat ini terdapat 55 *fintech* syariah yang sudah resmi bergabung di AFSI. Berdasarkan data tersebut, peluang pasar *Fintech* Syariah cukup menjanjikan. Hal ini didasarkan pada beberapa hal: 1) mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, dan 64% masih *unbanked*, sehingga dapat memperbesar jumlah target calon pengguna *fintech* syariah; 2) ekonomi syariah terus mengalami pertumbuhan; 3) ekonomi syariah, termasuk *fintech* syariah, didukung dengan teknologi yang mapan; 4) regulasi untuk *fintech* syariah masih dalam tahap penggarapan, sehingga menciptakan peluang untuk berinovasi melalui *fintech* syariah (Rahmawati dkk., 2018).

Kini, preferensi konsumen telah bergeser. Pada bisnis di sektor keuangan seperti *financial technology*, konsumen lebih menyukai kenyamanan, kecepatan, biaya yang lebih murah, dan kemudahan penggunaan layanan keuangan (Rahmawati dkk., 2018). Perkembangan *fintech* di Indonesia berdasarkan analisis SWOT secara global adalah masih memiliki potensi pasar yang sangat besar karena *fintech* merupakan alternatif solusi terhadap akses jasa industri keuangan tradisional. Menggunakan *fintech* yang berbasis syariah yang juga merupakan inovasi teknologi yang sesuai dengan ketentuan syariah serta menjadi solusi untuk dapat terhindar dari transaksi ribawi (Yarli, 2018). Hal ini berbeda dengan penelitian Ansori (2019) bahwa lembaga keuangan berbasis Syariah belum mampu masuk dalam skala kecil atau lingkup masyarakat kecil, karenanya fasilitas *fintech* yang digunakan oleh masyarakat yaitu *fintech* berbasis konvensional. Hal ini bisa dilihat dari keseluruhan jumlah *fintech* di Indonesia yang terdaftar di OJK hanya ada dua *fintech* yang berbasis syariah dari 88 perusahaan *fintech*.

Sebagai negara dengan perekonomian terbesar di kawasan Asia Tenggara dengan jumlah penduduk diperkirakan mencapai 265 juta jiwa pada 2018 dan mayoritas berusia di bawah 35 tahun dengan pertumbuhan *smartphone* dan pengguna internet menjadi peluang bagi tumbuhnya *Financial Technology (FinTech)* nasional (Marginingsih, 2019). *Fintech* sebagai inovasi penting dalam industri keuangan yang berkembang dengan cepat, didorong oleh pemerataan ekonomi, regulasi yang menguntungkan dan teknologi informasi (Zaenurrosyid, 2014). Oleh karenanya, tidak heran jika *fintech* banyak memiliki peluang yang sangat potensial. Berikut ada empat peluang *fintech* yang dapat menjadi alasan utama bagi percepatan pertumbuhan industri *fintech* syariah di masa mendatang. Peluang-peluang tersebut meliputi: a) penggunaan yang efisien melalui pembayaran seluler; b) pembiayaan dan harga yang menarik; c) fleksibilitas dan transparansi (untuk menghindari *gharar*), dan d) masih banyaknya masyarakat muslim yang *unbanked* (belum memiliki rekening) (Puspita dan Ishii, 2016). *Fintech* juga mampu mengubah ekspektasi konsumen, dimana menyamaratakan bisnis kecil dan besar sehingga cenderung untuk memiliki ekspektasi tinggi meski terhadap bisnis kecil yang baru dibangun (Rifa'i 2017). Sehingga *fintech* dipandang berpeluang besar untuk meningkatkan akses keuangan (inklusi keuangan) (Wulansari dkk, 2017).

Selain memiliki sejumlah peluang yang potensial, industri *fintech* syariah juga harus menghadapi beberapa tantangan serius. Industri *fintech* syariah masih terus diguncang dengan tantangan berupa kondisi masyarakat kelas bawah yang belum memiliki cukup akses dalam bertransaksi secara digital (Rusydiana, 2018). Salah satu faktor penyebab paling dominan adalah realita kesenjangan digital (*digital divide*) yang masih tinggi di Indonesia (Iman, 2017). Kendala lain adalah terbatasnya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas (*qualified*) (Setyaningsih, 2018). Keterbatasan SDM yang berkualitas menjadi salah satu faktor internal yang semakin menghambat profesionalisme perusahaan. Tantangan-tantangan serius tersebut tentu harus dihadapi dengan respon yang baik. Apabila melihat berbagai kondisi yang dihadapi dalam menerapkan *fintech* syariah, diharapkan peran *fintech* syariah dapat membawa kemaslahatan bagi umat. Berdasarkan uraian tersebut maka memunculkan pertanyaan-pertanyaan,

yaitu: (1) Bagaimana perkembangan dari *fintech* syariah? (2) Bagaimana peranan dari *fintech* syariah? (3) Bagaimana internalisasi *fintech* syariah dalam mewujudkan kemaslahatan umat? Hal ini akan dibahas dalam bab ini.

B. *Syariah Enterprise Theory*

Teori *syariah enterprise* mencakup nilai-nilai syariah (keadilan, *rahmatan lin alamin*, dan maslahah) karena teori menjelaskan bahwa kesejahteraan tidak hanya diperuntukan oleh pemilik modal. Dengan demikian pemilik modal maupun pengelola modal harus saling menjaga amanah dengan mengingat bahwa segala tindakan akan diminta pertanggungjawabannya. Menurut Hafid dkk. (2018) *shariah enterprise theory* adalah teori yang dibangun berdasarkan metafora amanah dan metafora zakat, lebih menghendaki keseimbangan antara sifat egoistik dan altruistik. *Syariah enterprise theory* memiliki cakupan akuntabilitas yang luas, akuntabilitas yang dimaksud adalah akuntabilitas kepada Tuhan, manusia, dan alam. Bentuk akuntabilitas ini berfungsi sebagai tali pengikat agar akuntansi syariah selalu terhubung dengan nilai-nilai yang dapat membangkitkan kesadaran ketuhanan. Konsep penting dalam *shariah enterprise theory* adalah Allah sebagai pencipta dan pemilik tunggal dari seluruh sumber daya yang ada di dunia ini. Oleh itu, yang berlaku dalam *syariah enterprise theory* adalah Allah adalah sumber amanah utama, karena Allah pemilik yang tunggal dan mutlak (Nurfajri, 2019).

Menurut Triyuwono (2006) dalam Pramono (2013) sesuai dengan *shariah enterprise theory*, bahwa distribusi kekayaan atau nilai tambah tidak hanya berlaku pada partisipan yang terkait langsung atau yang memberikan kontribusi kepada operasi perusahaan, tetapi pihak lain yang tidak terkait langsung dengan bisnis yang dilakukan perusahaan atau pihak yang tidak memberikan kontribusi keuangan dan *skill*. Pemikiran ini dilandasi premis yang mengatakan bahwa manusia adalah *Khalifatullah fil Ardh* yang membawa misi menciptakan dan mendistribusikan kesejahteraan bagi seluruh manusia dan alam. Premis ini mendorong *shariah enterprise theory* untuk mewujudkan nilai keadilan terhadap manusia dan lingkungan alam. Oleh karena itu, *shariah enterprise theory* akan membawa kemaslahatan

stakeholders, stockholders, masyarakat dan lingkungan alam. Oleh karena itu dengan sistem bagi hasil yang tidak *masalah* dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah maka diperlukan kesadaran ketuhanan dengan menjadikan Tuhan sebagai *stakeholder* tertinggi (Hafid dkk., 2018).

C. Konsep Masalah

Syariah Islam menginginkan manusia mencapai dan memelihara kesejahteraan. Menurut Imam Syatibi, *masalah* adalah sifat atau kemampuan barang atau jasa yang mendukung elemen-elemen dan tujuan dari kehidupan manusia dimuka bumi ini (Khasanah, 2010). Menurut Qorib (2016) *masalah* yaitu mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan. Prinsip kemaslahatan esensinya merupakan segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan kolektif. Sejalan dengan Perwitasari (2017) yang mengungkapkan kemaslahatan (*masalah*) mengandung arti bahwa segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, dan individual dan kolektif serta harus memenuhi unsur-unsur yang menjadi tujuan ketetapan syariah (*magasyid syari'ah*) yaitu pemeliharaan terhadap agama (*dien*), akal (*aql*), keturunan (*nasl*), jiwa (*nafs*) dan harta benda (*Maal*). Kemaslahatan yang diakui harus memenuhi dua unsur yakni kepatuhan syariah (halal) serta bermanfaat dan membawa kebaikan dalam semua aspek (Ardiansyah, 2014).

Maslahah dapat dikategorikan berdasarkan kualitas dan kepentingan kemaslahatan, kandungan kemaslahatan, berubah atau tidaknya kemaslahatan, dan keberadaan *masalah*. Dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan, ulama ushul fiqh membaginya menjadi tiga *dhawabih* (tingkatan) yaitu *masalah dururiyah*, *masalah hajiyyah* dan *masalah tahsiniyah*. Dilihat dari segi kandungan *masalah*, para ulama ushul fiqh membaginya menjadi *masalah ammah* dan *masalah khassah*. Jika dilihat dari segi berubah atau tidaknya *masalah*, dibagi menjadi dua yaitu *masalah sabita* dan *masalah mutaqayyirah*. Sedangkan dilihat dari segi keberadaan *masalah* menurut syara' *masalah* dibagi menjadi *masalah mu'tabarah*, *masalah mulghah* dan *masalah mursalah* (Qorib, 2016). Menurut Ardiansyah (2014) *masalah ammah*

(kemaslahatan umum) merupakan landasan muamalah, yaitu kemaslahatan yang dibingkai secara *syar'i*, bukan semata-mata *profit motive* dan *material rentability* sebagaimana dalam ekonomi konvensional.

D. *Fintech* Syariah

Fintech merupakan suatu inovasi pada sektor finansial dengan sentuhan teknologi modern. Inovasi finansial ini mendapat sentuhan teknologi modern. *Fintech* merupakan implementasi dan pemanfaatan teknologi untuk peningkatan layanan jasa perbankan dan keuangan yang umumnya dilakukan oleh perusahaan rintisan (*startup*) dengan memanfaatkan teknologi *software*, internet, komunikasi, dan komputasi terkini (Rahadiyan dan Sari, 2019). Teknologi finansial adalah istilah yang digunakan untuk menyebut suatu inovasi di bidang jasa finansial, di mana istilah tersebut berasal dari kata "*financial*" dan "*technology*" (*FinTech*) yang mengacu pada inovasi finansial dengan sentuhan teknologi modern (Chrismastianto, 2017; Rahmayani, 2018). Sejalan dengan penelitian Arner dkk. (2017) bahwa *fintech* (*financial technology*) adalah aplikasi dan inovasi teknologi baru yang bertujuan untuk menyediakan metode baru yang lebih efektif dan efisien dalam pelayanan keuangan. Oleh karena itu, *fintech* merupakan model bisnis baru yang bertujuan untuk menyediakan layanan keuangan dengan memanfaatkan perangkat lunak dan teknologi modern.

Masyarakat muslim global juga mulai berpartisipasi aktif dalam pengembangan industri *fintech* ini. Namun, mereka cenderung menawarkan inovasi baru dengan mengintegrasikan sistem *fintech* dengan berbasis syariah. Seiring perkembangan *fintech* saat ini, maka penerapannya dalam fikih muamalah menurut perspektif Islam harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang terhindar dari *maysir* (spekulasi), *gharar* (ketidakpastian) dan *riba*. Menggunakan *fintech* yang berbasis syariah yang juga merupakan inovasi teknologi yang sesuai dengan ketentuan syariah serta menjadi solusi untuk dapat terhindar dari transaksi ribawi (Yarli, 2018). Menurut Musdalifa dkk. (2018) *fintech* berkembang di berbagai sektor, mulai dari *startup* pembayaran, peminjaman (*lending*), perencanaan keuangan

(*personal finance*), investasi ritel, pembiayaan (*crowdfunding*), remitansi, riset keuangan, dan lain-lain.

a) Perkembangan *Fintech* Syariah

Menurut Musdalifa dkk. (2018) *fintech* secara global menunjukkan perkembangan secara pesat. *Fintech* berkembang di berbagai sektor, mulai dari *startup* pembayaran, peminjaman (*lending*), perencanaan keuangan (*personal finance*), investasi ritel, pembiayaan (*crowdfunding*), remitansi, riset keuangan, dan lain-lain. Pelaku *fintech* Indonesia masih dominan berbisnis *payment* (43%), pinjaman (17%), dan sisanya berbentuk *agregator*, *crowdfunding* dan lain-lain. Hal ini diperkuat dengan salah satu penelitian bahwa kemajuan dunia digital dan penggunaan *smartphone* juga menjadi penyebab berkembangnya *fintech* karena sekarang ini hampir setiap orang memiliki *smartphone*. Kemudian perubahan tren yang sangat cepat dan penawaran produk *fintech* yang lebih menguntungkan dan mudah diakses (Ansori, 2019). Fenomena pembaharuan di sektor keuangan ini tentu saja dirasakan juga oleh umat Islam yang menjadi bagian dari masyarakat global. Menariknya, masyarakat muslim global juga mulai berpartisipasi aktif dalam pengembangan industri *fintech* ini. Namun, mereka cenderung menawarkan inovasi baru dengan mengintegrasikan sistem *fintech* dengan berbasis syariah. Seiring perkembangan *fintech* saat ini, maka penerapannya dalam fikih muamalah menurut perspektif Islam harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang terhindar dari *maysir* (spekulasi), *gharar* (ketidakpastian) dan Riba (Yarli, 2018).

Kini, perkembangan *fintech* syariah menunjukkan tren yang cukup baik. Menurut catatan Asosiasi *Fintech* Syariah Indonesia (AFSI), saat ini terdapat 55 *fintech* syariah yang sudah resmi bergabung di AFSI. Berdasarkan data tersebut, peluang pasar *Fintech* Syariah cukup menjanjikan. Hal ini didasarkan pada beberapa hal: (1) mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, dan 64% masih *unbanked*, sehingga dapat memperbesar jumlah target calon pengguna *Fintech* syariah; (2) ekonomi syariah terus mengalami pertumbuhan; (3) ekonomi syariah, termasuk *fintech* syariah, didukung dengan teknologi yang mapan; (4) regulasi untuk *Fintech* Syariah masih dalam tahap penggarapan, sehingga menciptakan peluang untuk berinovasi melalui *Fintech* syariah (Rahmawati dkk., 2018). Perkembangan *fintech* di Indonesia

berdasarkan analisis SWOT secara global adalah masih memiliki potensi pasar yang sangat besar karena *fintech* merupakan alternatif solusi terhadap akses jasa industri keuangan tradisional. Menggunakan *fintech* yang berbasis syariah yang juga merupakan inovasi teknologi yang sesuai dengan ketentuan syariah serta menjadi solusi untuk dapat terhindar dari transaksi ribawi (Yarli, 2018). Hal ini bisa dilihat dari keseluruhan jumlah *fintech* di Indonesia yang terdaftar di OJK hanya ada dua *fintech* yang berbasis syariah dari 88 perusahaan *fintech*.

Selain memiliki sejumlah peluang yang potensial, industri *fintech* syariah juga harus menghadapi beberapa tantangan serius. *Fintech* syariah sebagai pendatang baru tentu pada mulanya harus menghadapi tantangan serius berupa kompetisi dengan berbagai perusahaan sejenis. Salah satunya adalah kompetisi melawan industri perbankan. Selain itu kurangnya instrumen kebijakan yang melindungi proses layanan *fintech* dari hulu hingga hilir (Pollari, 2016). Alih-alih membicarakan keamanan transaksi, seluruh perusahaan yang tergabung dalam industri *fintech* tentu harus menghadapi tantangan serius di bidang *internet security* (keamanan internet) (Saksonova dan Merlino, 2017). Selaras dengan pernyataan tersebut, risiko keamanan data (*cyber risks*), privasi, dan kepemilikan data serta tata kelola (*governance*) data yang disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab (Marginingsih, 2019). Kendala lain adalah terbatasnya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas (*qualified*) (Setyaningsih, 2018). Keterbatasan SDM yang berkualitas menjadi salah satu faktor internal yang semakin menghambat profesionalisme perusahaan. Tantangan-tantangan serius tersebut tentu harus dihadapi dengan respon yang baik.

b) Peranan *Fintech* Syariah

Menurut Fitriani (2018) *fintech* adalah salah satu layanan jasa keuangan yang mulai populer di era digital. Sektor inilah yang diharapkan oleh pemerintah dan masyarakat untuk mendorong peningkatan jumlah masyarakat yang memiliki akses kepada layanan keuangan. Kehadiran *fintech* diharapkan dapat menghemat waktu, pikiran, tenaga, dan biaya. *Fintech* memberikan kemudahan akses bagi seluruh lapisan masyarakat, sehingga keberadaanya dapat diterima dan dinilai turut berkontribusi terhadap pembangunan dan perekonomian

nasional (Rahadiyan dan Sari, 2019). Keberadaan *fintech* membuat masyarakat lebih mudah mengakses produk-produk keuangan, mempermudah transaksi dan juga meningkatkan literasi keuangan.

Peran *fintech* tidak hanya sebatas membantu pembiayaan modal usaha, tetapi sudah merambah ke berbagai aspek seperti layanan pembayaran digital dan pengaturan keuangan. Hal ini sejalan dengan Muzdalifah dkk. (2018) mengungkapkan *fintech* memiliki peran penting dalam mengubah perilaku dan ekspektasi konsumen dimana menyamaratakan bisnis besar dan kecil sehingga cenderung untuk memiliki ekspektasi tinggi meski terhadap bisnis kecil yang baru dibangun. Sejalan dengan Fitriani (2018) menyatakan peran *fintech* sebagai solusi pertumbuhan *e-commerce*, membantu dalam mengembangkan pasar, dan mendorong pertumbuhan usaha kecil menengah dan wiraswasta. Sektor finansial memiliki peran yang penting untuk mendukung kekuatan perekonomian suatu Negara. Dengan perkembangan teknologi yang semakin maju, sektor finansial turut mengalami perkembangan ke arah yang lebih modern dan praktis (Rahadiyan dan Sari, 2019). Untuk mencapai dampak positif yang dimaksud, kuncinya adalah dengan memandang *fintech* sebagai tantangan berkolaborasi dan bukannya sebagai kompetitor. Peran dari *fintech* ini tentunya sama dengan peran *fintech* berbasis syariah, hanya saja sistem yang digunakan berbeda dimana *fintech* syariah menggunakan prinsip-prinsip syariah, yang terhindar dari *maysir* (spekulasi), *gharar* (ketidakpastian) dan *riba*.

E. Nilai-Nilai Keadilan dalam Penerapan *Fintech* Syariah

Prinsip keadilan merupakan pilar penting dalam ekonomi Islam, penegakan keadilan telah ditekankan oleh al-Qur'an sebagai misi utama para Nabi yang diutus Allah swt. Allah swt yang menurunkan Islam sebagai sitem kehidupan bagi seluruh umat manusia, menekankan pentingnya keadilan dalam setiap sektor, baik ekonomi, politik maupun sosial (Andriyaldi, 2017). Adil artinya setial pihak mendapatkan bagi hasil sesuai dengan kontribusi yang diberikan yaitu modal dan keterampilan ataupun tenaga (Waluyo, 2016). Menurut Perwitasari (2017) implementasi keadilan dalam kegiatan usaha berupa aturan prinsip muamalah yang melarang adanya unsur *riba*, *kedzaliman*, *maysir*, *gharar*, dan

haram. Prinsip keadilan dalam bermuamalah harus memenuhi nilai-nilai keadilan antara pihak yang melakukan akad dalam bermuamalah misalnya keadilan dalam pembagian hasil antara pemilik modal (*shahibul maal*) dengan pengelola modal (*mudharib*).

Menurut Fitriani (2018) *fintech* syariah merupakan inovasi baru dengan mengintegrasikan sistem *fintech* dengan berbasis syariah. Seiring perkembangan *fintech* saat ini, maka penerapannya dalam fikih muamalah menurut perspektif Islam harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang terhindar dari *maysir* (spekulasi), *gharar* (ketidakpastian) dan Riba. Menggunakan *fintech* yang berbasis syariah yang juga merupakan inovasi teknologi yang sesuai dengan ketentuan syariah serta menjadi solusi untuk dapat terhindar dari transaksi ribawi (Yarli, 2018). Nilai-nilai keadilan pada industri *fintech* syariah ini terletak pada sistem atau prinsip-prinsip syariah yang digunakan dalam mengimplementasikan *fintech* syariah itu sendiri.

F. *Fintech* Syariah dalam Mewujudkan Kemaslahatan Umat

Syariah Islam menginginkan manusia mencapai dan memelihara kesejahteraannya. Menurut Imam Syatibi, masalah adalah sifat atau kemampuan barang atau jasa yang mendukung elemen-elemen dan tujuan dari kehidupan manusia dimuka bumi ini (Khasanah, 2010). Menurut Qorib (2016) *masalah* yaitu mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan. Prinsip kemaslahatan esensinya merupakan segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan kolektif. *Fintech* syariah dapat mewujudkan kemaslahatan umat dilihat dari banyaknya manfaat yang didapat oleh banyak kalangan.

Fintech merupakan alternatif solusi terhadap akses jasa industri keuangan tradisional. Menggunakan *fintech* yang berbasis syariah yang juga merupakan inovasi teknologi yang sesuai dengan ketentuan syariah serta menjadi solusi untuk dapat terhindar dari transaksi ribawi (Yarli, 2018). *Fintech* (*financial technology*) adalah aplikasi dan inovasi teknologi baru yang bertujuan untuk menyediakan metode baru yang lebih efektif dan efisien dalam pelayanan keuangan. *Fintech* merupakan model bisnis baru yang bertujuan untuk menyediakan layanan keuangan dengan memanfaatkan perangkat lunak dan teknologi modern.

Pada bisnis di sektor keuangan seperti *financial technology*, konsumen akan memperoleh kenyamanan, kecepatan, biaya yang lebih murah, dan kemudahan penggunaan layanan keuangan Musdalifa dkk. (2018). Melalui *fintech* segala bentuk transaksi menjadi lebih cepat, mudah, efisien tanpa melakukan tatap muka. Oleh karena itu, banyaknya manfaat yang diperoleh dengan hadirnya *fintech* syariah ini, secara tidak langsung pula akan dapat mewujudkan kemaslahatan umat.

G. Simpulan

Perkembangan *fintech* syariah menunjukkan tren yang cukup baik. Kemudian perubahan tren yang sangat cepat dan penawaran produk *fintech* yang lebih menguntungkan dan mudah diakses. Seiring perkembangan *fintech* saat ini, maka penerapannya dalam fikih muamalah menurut perspektif Islam harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang terhindar dari *maysir* (spekulasi), *gharar* (ketidakpastian) dan Riba. Perkembangan *fintech* syariah di Indonesia secara global masih memiliki potensi pasar yang sangat besar karena *fintech* merupakan alternatif solusi terhadap akses jasa industri keuangan tradisional. Selain memiliki sejumlah peluang yang potensial, industri *fintech* syariah juga harus menghadapi beberapa tantangan serius dalam penerapannya.

Peran dari *fintech* syariah ini tentunya sama dengan peran *fintech* secara umum, hanya saja sistem yang digunakan berbeda. *Fintech* syariah menggunakan prinsip-prinsip syariah, yang terhindar dari *maysir* (spekulasi), *gharar* (ketidakpastian) dan riba. Kehadiran *fintech* diharapkan dapat menghemat waktu, pikiran, tenaga, dan biaya. *Fintech* memberikan kemudahan akses bagi seluruh lapisan masyarakat, sehingga keberadaanya dapat diterima dan dinilai turut berkontribusi terhadap pembangunan dan perekonomian nasional. Peran *fintech* tidak hanya sebatas membantu pembiayaan modal usaha, tetapi sudah merambah ke berbagai aspek seperti layanan pembayaran digital dan pengaturan keuangan. Peran *fintech* sebagai solusi pertumbuhan *e-commerce*, membantu dalam mengembangkan pasar, dan mendorong pertumbuhan usaha kecil menengah dan wiraswasta.

Fintech merupakan model bisnis baru yang bertujuan untuk menyediakan layanan keuangan dengan memanfaatkan perangkat

lunak dan teknologi modern. Pada bisnis di sektor keuangan seperti *financial technology*, konsumen akan memperoleh kenyamanan, kecepatan, biaya yang lebih murah, dan kemudahan penggunaan layanan keuangan. Melalui *fintech*, segala bentuk transaksi menjadi lebih cepat, mudah, efisien tanpa melakukan tatap muka. Oleh karena itu, *fintech* syariah dapat mewujudkan kemaslahatan umat dilihat dari banyaknya manfaat yang didapat oleh berbagai kalangan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Andriyaldi. 2017. Prinsip Dasar Filosofi Ekonomi Islam dalam Konteks Modern (Perspektif Maqashid Syariah). *Batusangkar International Conference*, 1(1): 87-98.
- Ansori, M. 2019. Perkembangan dan Dampak Financial Technology (Fintech) terhadap Industri Keuangan Syariah di Jawa Tengah. *Jurnal Studi Keislaman*, 5(1): 31-45.
- Ardiansyah, M. 2014. Bayang – Bayang Teori Keagenan pada Produk Pembiayaan Perbankan Syariah. *Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 14(2): 21-269.
- Arner, D. W., J. Barberis, dan R. P. Buckley. 2017. FinTech, RegTech, and the Reconceptualization of Financial Regulation. *Northwestern Journal of International Law & Business*, 37(3): 371-413.
- Chrismastianto, I. A. W. 2017. Analisis SWOT Implementasi Teknologi Finansial terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 20(1): 134-136.
- Fitriani, H. 2018. Kontribusi Fintech dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif pada Pertanian (Studi Analisis Melalui Pendekatan Keuangan Syariah dengan Situs Peer to Peer Lending pada Pertanian di Indonesia). *Journal of Islamic Economics and Business*, 1(1): 1-26.
- Hafid, W. R., J. Majid dan M. S. S. Juardi. 2018. Penerapan Prinsip Profit Sharing dan Revenue Sharing Program Tabungan Mudharabah dan Deposito Mudharabah (Studi pada PT. Bank Muamalat Kantor Cabang Makassar). *Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah*, 2(1): 65-81.
- Helmi, M. 2015. Konsep Keadilan dalam Filsafat Hukum dan Filsafat Hukum Islam. *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 14(2): 133-144.
- Iman, N. 2017. Fintech, Islamic Finance, and Its Challenges: Menggali Potensi Keuangan syariah Melalui Pemanfaatan Teknologi dalam Mendorong

- Pertumbuhan Ekonomi. *Riset & Jurnal Akuntansi*, 3(1): 21-27.
- Khasanah, U. 2010. Sistem Bagi Hasil dalam Syariah Islam. *Jurnal Syariah dan Hukum*, 1(2): 120-132.
- Lukman, A. Rahman dzn Khairunnisa. 2016. Rekonstruksi Nilai Keadilan dalam Penetapan Margin Murabahah di PT. Amanah Finance Makassar. *Jurnal Fenomena*, 8(2): 127-142.
- Marginingsih, R. 2019. Analisis SWOT Technology Financial (FinTech) terhadap Industri Perbankan. *Cakrawala-Jurnal Humaniora*, 19(1): 55-60.
- Muzdalifa, I., I. A. Rahma, dan B. G. Novalia. 2018. Peran Fintech dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif pada UMKM di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah). *Jurnal Masharif al-Syariah*, 3(1): 1-24.
- Nurfajri, F. dan T. Priyanto. 2019. Pengaruh Murabahah, Musyarakah, Mudharabah, dan Ijarah terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal MONEX*, 8(2): 1-18.
- Nurfalah, I., A. S. Rusydiana. 2019. Digitalisasi Keuangan Syariah Menuju Keuangan Inklusif: Kerangka Maqashid Syariah. *Eksansi: Jurnal ekonomi, Keuangan, Perbankan dan Akuntansi*, 11(1): 55-76.
- Perwitasari, D. A. 2017. Internalisasi Nilai-Nilai Keadilan dalam Praktik Pembiayaan Mudharabah dan Deposito Mudharabah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 2(1): 71-95.
- Pollari, I. 2016. The Rise of Fintech: Opportunities and Challenges. *JASSA The Finsia Journal of Applied Finance*, 3: 15-21.
- Pramono, N. H. 2013. Optimalisasi Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil pada Bank Syariah di Indonesia. *Accounting Analysis Journal*, 2(2): 154-162.
- Puspitasari, L. dan K. Ishii. 2016. Digital Divides and Mobile Internet in Indonesia: Impact of Smartphones. *Telematics and Informatics*, 33: 472-483.

- Qorib, A. Dan I. H. Harahap. 2016. Penerapan Malahah Mursalah dalam Ekonomi Islam. *Jurnal Analitica Islamica*, 5(1): 55-80.
- Rahadiyan, I. dan A. R. Sari. 2019. Peluang dan Tantangan Implementasi Fintech Peer to Peer Lending sebagai Salah Satu Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Indonesia. *DEFENDONESIA*, 4(1): 18-28.
- Rahmanto, D. N. A. dan Nasrulloh. 2019. Risiko dan Peraturan: *Fintech* untuk Sistem Stabilitas Keuangan. *Jurnal Inovasi*, 15(1): 44-52.
- Rahmawati, L., B. Badriati, dan I. Tanjung. 2018. Analisis Permintaan dan Perilaku Konsumen Fintech Syariah Model Crowdfunding. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan*, 2(1): 35-49.
- Rahmayani, N. 2018. Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terkait Pengawasan Perusahaan Berbasis Financial Technology di Indonesia. *Pagaruyuang Law Journal*, 2(1): 24-41.
- Rangkuti, A. 2017. Konsep Keadilan dalam Perspektif Islam. *Jurnal Pendidikan Islam Tazkiya*, 6(1): 1-21.
- Rifa'i, A. 2017. Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif melalui Pembiayaan UMKM. *Jurnal Human Falah*, 4(2): 194-217.
- Rusydiana, A. S. 2018. Developing Islamic Financial Technology in Indonesia. *Hasanuddin Economics and Business Review*, 2(2): 143-152.
- Sahban, 2017. Esensi Akad Mudharabah dan Musyarakah pada Perbankan Syariah dalam Mewujudkan Keadilan Ekonomi. *Jurnal Al-Ishlah*, 19(1): 107-118.
- Saksonova, S. dan I. K. Merlino. 2017. Fintech as Financial Innovation: The Possibilities and Problems of Implementation. *European Research Studies Journal*, 20(3): 961-973.

- Setyaningsih, E. D. 2018. Analisis SWOT Implementasi Financial Technology Syariah pada Telkom Indonesia. *Jurnal Syi'ar Iqtishadi*, 2(2): 73-91.
- Waluyo, B. 2016. Implementasi Pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah untuk Merealisasikan Tujuan Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2(2) : 186-204.
- Wulansari, N., Wahyu dan Y. Kurniawan. 2017. Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi melalui Sinergi UMKM dan *Good Governance* di Indonesia. *Prosoding Seminar nasional dan Call for Paper Ekonomi dan Bisnis*.
- Yarli, D. 2018. Analisis Akad Tijarah pada Transaksi Fintech Syariah dengan Pendekatan Maqhashid. *Yudisia*, 9(2): 245-256.
- Zaenurrosyid, A. 2014. Filantropi Islam melalui Pengembangan Wakaf Produktif (Studi atas Pengelolaan Masjid Agung Semarang). *Jurnal JIE*, 3(2): 431-459.

SISI PENYAJIAN WAJAR DALAM LAPORAN KEUANGAN: PERSPEKTIF SYARIAH

A. Pendahuluan

Entitas syariah di Indonesia semakin berkembang dengan menunjukkan angka yang signifikan, perkembangannya dapat dilihat dengan semakin banyaknya entitas syariah diantara entitas konvensional yang telah ada seperti yang terlihat pada saat ini entitas syariah yang paling banyak dikenal oleh masyarakat adalah perbankan syariah (Hasamduddin dan Pricilia, 2013). Seperti dalam penelitian Ilyas (2016) yang mengatakan bahwa perbankan syariah merupakan bagian dari entitas syariah yang berfungsi sebagai lembaga *intermediary* keuangan diharapkan dapat menampilkan dirinya dengan baik. Gambaran tentang baik buruknya suatu entitas dapat di kenali melalui kinerjanya yang tergambar dalam laporan keuangan. Menurut Fajarwati dan Sambodo (2010) mengatakan bahwa laporan keuangan adalah informasi tentang posisi laporan keuangan, maka lembaga keuangan syariah tentu harus dipahami apa akuntansi syariah itu, sebab laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi. Hal ini sejalan dengan penelitian Widiana (2017) yang mengungkapkan bahwa akuntansi syariah berhubungan dengan pengakuan dan pencatatan transaksi dan pengungkapan hak-hak dan kewajiban secara adil. Diterapkannya akuntansi syariah adalah untuk mencapai keadilan sosial ekonomi, dan sebagai bentuk menjalankan ibadah kita dalam memenuhi kewajiban kepada Allah swt sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap tugas individu dalam melaporkan segala hal yang berkaitan dengan laporan keuangan.

Keandalan merupakan unsur penting dalam pelaporan keuangan, konsep mengenai pentingnya keandalan informasi

laporan keuangan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan yang berimplikasi pada peningkatan akuntabilitas pelaporan keuangan (Nuryanto dan Afiah, 2013). Mansur *et al.*, (2017) mengungkapkan bahwa pelaporan keuangan adalah seperangkat laporan keuangan dan informasi-informasi yang lainnya untuk melaporkan keadaan keuangan dari suatu kesatuan usaha. Informasi keuangan menunjukkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan yang digunakan oleh pemakainya sesuai dengan kepentingan masing-masing. Penelitian ini bertentangan dengan penelitian Triwardana (2017) yang mengungkapkan bahwa informasi dalam laporan keuangan hanya akan bermanfaat jika laporan keuangan yang diinformasikan disajikan dengan benar atau *valid* dan dapat diandalkan secara wajar. Hal ini justru bertentangan dengan penelitian Wahyuni dan Diantimala (2016) yang mengungkapkan bahwa informasi dalam penyajian laporan keuangan harus di ungkapkan dan di mengerti, hal ini dengan mengeluarkan standar mengenai pengungkapan standar informasi, jika mengenai entitas syariah maka harus mengikuti standar akuntansi standar akuntansi syariah yaitu PSAK syariah. PSAK syariah merupakan salah satu standar akuntansi keuangan yang mengatur tentang penyusunan laporan keuangan bagi lembaga keuangan syariah. Menelusuk kedalam PSAK syariah, ada beberapa pertimbangan yang menyeluruh dalam PSAK 101 mengenai penyajian laporan keuangan entitas syariah yang dapat diketahui harus menyajikan secara wajar, hal ini dilihat pada PSAK 101 paragraf 16, dimana wajar biasanya didalam sebuah perusahaan terkait dengan adanya tingkat materialitas atau batas toleransi kesalahan yang digunakan dalam membuat laporan keuangan dengan menerapkan pernyataan standar akuntansi secara benar disertai dengan pengungkapan yang diharuskan, namun apakah hal tersebut berlaku juga didalam entitas syariah yang menggunakan prinsip-prinsip Islam, dimana Islam tidak menghendaki adanya kesalahan yang diwajibkan seperti yang telah dijelaskan didalam PSAK 101 (Hisamduddin dan Pricilia, 2013).

Susilowati (2017) menjelaskan bahwa menanamkan nilai spiritual akuntansi, perlu adanya nilai-nilai Islam yang berlandaskan tanggung jawab, keadilan dan kebenaran yang sesuai dengan al-Qur'an dan hadis yang merupakan realita yang

harus diupayakan. Islam telah mengatur secara jelas yang dinyatakan dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 282. Penjelasan mengenai makna benar yang terkandung di dalam al-Baqarah ayat 282, menjelaskan bahwa kata "*adl*" yang ada dalam al-Baqarah yang diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia menjadi benar, dimana benar memiliki arti yang luas. Benar yang menjadi makna dari surah al-Baqarah tersebut sebagai kebenaran dalam menuliskan kejadian atau aktivitas sesuai dengan kesepakatan didalam suatu entitas, apabila diaplikasikan kedalam laporan keuangan, lebih kearah mencatat dan memasukkan angka-angka kedalam laporan keuangan sesuai dengan kejadian dan kesepakatan yang telah ada, tidak condong pada satu pihak, tidak ada pere kayasaan, dan tidak melanggar aturan Allah swt (Hisamduddin dan Pricilia, 2013).

Wajar dan materialitas masih bisa diterima didalam akuntansi konvensional untuk digunakan dalam penyajian laporan keuangan, namun jika didalam akuntansi syariah dan laporan keuangan untuk entitas syariah, tentu toleransi kesalahan ini bukanlah hal yang dapat dimaklumi seperti yang telah dijelaskan dalam PSAK 101. Laporan keuangan entitas syariah harus menyajikan secara benar, hal ini dijelaskan dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 282, didalam konteks ayat tersebut menyatakan bahwa pencatatan harus dilakukan secara benar atau dengan kata lain menghindari adanya kesalahan (Hisamduddin dan Pricilia, 2013). Menurut Fajarwati dan Sambodo (2010) berbicara mengenai tugas pertama akuntansi adalah mencatat transaksi keuangan, kemudian dikaitkan dengan prinsip Islam, dimana Allah swt telah memberi petunjuk kepada umat Islam dalam al-Qur'an. Akuntansi dalam Islam dapat kita lihat dari berbagai bukti sejarah maupun dalam al-Qur'an yang memerintahkan untuk melakukan sistem pencatatan dan tekanan utamanya adalah tujuan kebenaran, kepastian, keterbukaan, dan keadilan antara kedua pihak yang memiliki hubungan muamalah (Siregar, 2015). Dimana informasi dalam laporan keuangan pada entitas syariah harus disajikan secara wajar atau dapat diandalkan sesuai dengan penjelasan dalam PSAK 101, maka dari itu penelitian ini berfokus mengenai bagaimana penggunaan istilah wajar dalam laporan keuangan yang tercantum pada PSAK 101

serta bagaimana pemaknaan kebenaran dalam laporan keuangan yang tercantum pada surah al-Baqarah ayat 282?

B. Konsep Kebenaran

Kebenaran dalam akuntansi syariah adalah kesesuaian antara apa yang dicatat dan dilaporkan dengan apa yang terjadi dilapangan, termasuk didalamnya prinsip kebenaran yang menyangkut pengukuran kekayaan, utang, modal, pendapatan, biaya, laba perusahaan dan laporan keuangan sehingga seorang akuntan dalam praktiknya wajib mengukur semuanya secara tanggung jawab, benar dan adil berdasarkan bukti-bukti yang ada dalam entitas (Susilowati, 2017). Prinsip kebenaran ini sebenarnya tidak lepas dari prinsip keadilan. Kebenaran di dalam al-Qur'an tidak diperbolehkan untuk dicampuradukkan dengan kebathilan. al-Qur'an telah menggariskan bahwa ukuran, alat atau instrumen untuk menetapkan kebenaran tidaklah didasarkan pada nafsu (Mauladi, 2014). Kebenaran selain mengandung makna kebenaran lawan dari kesalahan, mengandung pula dua unsur yaitu kebajikan dan kejujuran, dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses akad (transaksi) (Mawaddah dan Wijaya, 2016). Akuntansi syariah meregulasi penyajian informasi laporan keuangan yang *haq* (Benar) dan jauh dari kebohongan (*bathil*). Seluruh informasi yang tersaji dalam laporan keuangan didasarkan pada praktik-praktik Islami yang dijamin keakuratannya, kejujurannya, dan terbebas dari kecurangan (Anisah dan Utomo, 2017).

Penerapan konsep pertanggungjawaban dalam akuntansi syariah adalah penyusunan laporan keuangan yang dilakukan oleh pelaku bisnis atau individu yang terlibat dalam praktik bisnis sebagai bentuk pertanggungjawaban atas amanah kepada pihak-pihak terkait (Apriyanti, 2017). Benar yang menjadi makna dari surah al-Baqarah tersebut sebagai kebenaran dalam menuliskan kejadian atau aktivitas sesuai dengan kesepakatan didalam suatu entitas, apabila diaplikasikan kedalam laporan keuangan, lebih kearah mencatat dan memasukkan angka-angka kedalam laporan keuangan sesuai dengan kejadian dan kesepakatan yang telah ada, tindak condong pada satu pihak, tidak ada perekrayasaan, dan tidak melanggar peraturan Allah swt (Hisamduddin dan Pricilia, 2013).

C. Akuntansi Syariah

Hal utama yang berkaitan dengan akuntansi adalah pencatatan transaksi keuangan, pengakuan, penilaian dan pengungkapan laporan keuangan. Berbicara dengan akuntansi syariah dan keterkaitannya dengan pencatatan, pelaporan dan penyajian informasi akuntansinya, sebenarnya informasi akuntansi itu sendiri bukanlah hal yang baru dalam dunia Islam, bukan pada zaman Rasulullah saw beliau telah melakukan, hal ini menunjukkan bagaimana akuntansi sendiri telah ada semenjak zaman dulu dan telah diterapkan dalam melakukan transaksi dan kegiatan usaha (Hisamduddin dan pricilia, 2013). Akuntansi syariah didapatkan secara informatif dari perintah yang ada didalam al-Qur'an yang digunakan sebagai arah praktik akuntansi. Arah praktik akuntansi tersebut tentu saja akan sesuai dengan syariah, dalam akuntansi syariah pencatatan transaksi akuntansi dikaitkan dengan semangat Islam sesuai dengan surah al-Baqarah ayat 282. Akuntansi syariah merupakan suatu akuntansi yang sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Allah swt. Akuntansi syariah merupakan hal penting bagi semua pemakai lembaga keuangan yang berbasis syariah dan yang berkepentingan terhadapnya (Apriyanti, 2017). Ilmu akuntansi sebagai perwujudan dan proses mencatat dan membukukan selanjutnya melaporkan harus ditetapkan dalam setiap kehidupan bermuamalah cepat atau lambat bermuamalah pada akhirnya menimbulkan transaksi keuangan yang mempengaruhi penghasilan, biaya, harta maupun kewajiban. Pencatatan dan syariah merupakan kewajiban sebagaimana difirmankan dalam al-Qur'an (Sitompul *et al.*, 2016).

Pemecahan masalah dalam akuntansi syariah harus bebas dari kepentingan dan hanya ditunjukkan untuk tujuan yang benar sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dalam al-Qur'an dan berorientasi jangka panjang, tidak hanya berorientasi jangka pendek saja, dengan pendekatan teori yang benar seharusnya orang dapat melihat masalah yang muncul dalam perspektif yang lebih luas yang tidak hanya sekedar coba-coba *trial and error* (Apriyanti, 2017). Mencermati surah al-Baqarah ayat 282, Allah swt memerintahkan untuk melakukan penulisan secara benar atas segala transaksi yang pernah terjadi selama melakukan muamalah, dari hasil penulisan tersebut dapat digunakan sebagai

informasi untuk menentukan apa yang akan diperbuat oleh seseorang (Mauladi, 2014). Allah memberikan keleluasaan dalam bermuamalah termasuk kaitannya dengan perekonomian dan laporan akuntansi syariah merupakan salah satu produknya. Tujuan akuntansi syariah untuk membumikan nilai-nilai syariah melalui interpretasi angka dan keuangan atas transaksi ekonomi secara transparan dan akuntabel dalam sebuah lembaga keuangan, khususnya lembaga keuangan syariah (Utami *et al.*, 2018).

Laporan Keuangan Syariah

Laporan keuangan adalah ringkasan dari suatu proses pencatatan dan merupakan suatu ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan. Laporan akuntansi syariah biasanya terdiri atas laporan perubahan posisi keuangan, laba rugi, perubahan ekuitas, arus kas, perubahan investasi yang dibatasi dengan ekuivalennya, sumber daya penggunaan dana dalam suatu entitas syariah (Kadarningsih *et al.*, 2017). Tujuan laporan keuangan syariah adalah untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan suatu entitas syariah yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Mencapai keadilan sosial-ekonomi, sebagai bentuk menjalankan ibadah dalam memenuhi kewajiban kepada Allah swt, sebagai bentuk pertanggungjawaban, terhadap tugas individu dalam melaporkan segala hal yang berkaitan dengan laporan keuangan (Widiana, 2017). Pertanggungjawaban merupakan suatu evolusi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh seorang baik masih berada pada jalur otoritasnya. Teknik akuntansi syariah dalam entitas syariah yang menjadi pembeda dengan akuntansi konvensional ialah memberikan informasi laporan keuangan yang jujur dan akurat untuk menghitung dana sosial serta mempertanggungjawabkannya dihadapan Allah swt, semua itu dapat terwujud apabila dilengkapi dengan sumber daya insani yang jujur, bertanggungjawab, berakhlak mulia, profesional, dan memiliki integritas yang baik (Sitompul *et al.*, 2016).

Menyajikan laporan keuangan syariah, bukan terbatas pada kepentingan penyajian informasi semata, namun yang terpenting adalah menginternalisasikan aspek pertanggungjawaban dalam

setiap informasi yang termuat didalamnya (Rahmanti, 2012). Memilih kebijakan akuntansi, harus menetapkan kebijakan untuk memastikan bahwa laporan keuangan menyajikan informasi yang terkait terhadap keutuhan para pemakai laporan untuk pengambilan keputusan dengan pengertian menggambarkan akuntabilitas penyajian hasil dan posisi keuangan entitas syariah, mencerminkan substansi ekonomi dari suatu kejadian atau transaksi dan tidak semata-mata dalam bentuk sisi hukumnya, netral yaitu bebas dari unsur keberpihakan serta mencerminkan kehati-hatian dan meliputi semua hal yang material (PSAK 101) (Hidayat, 2013).

Menurut Yuliana *et al.* (2016) laporan keuangan mempunyai peranan penting dalam setiap entitas yang bertujuan untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan untuk para pemakai dalam pengambilan keputusan. Laporan keuangan dalam sebuah entitas harus disajikan melalui proses yang memberikan jaminan keterandalan dan ketepatan waktu penyajiannya. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Andriani (2010) yang menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan, harus menyadari bahwa banyak pihak yang mengandalkan informasi dalam laporan keuangan, salah satu tujuannya adalah sebagai dasar pengambilan keputusan, oleh karena itu informasi yang terjadi dalam laporan keuangan harus andal agar dapat bermanfaat bagi pemakai. Keandalan adalah kemampuan informasi untuk memberi keyakinan bahwa informasi tersebut benar atau valid. Informasi yang memiliki kualitas andal adalah informasi tersebut bebas dari informasi yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang jujur dari yang seharusnya disajikan (Angggreani dan Riduan, 2014).

PSAK 101

PSAK merupakan salah satu standar akuntansi keuangan yang mengatur tentang penyusunan laporan keuangan bagi lembaga keuangan syariah. PSAK ini sebagian besar diambil dari standar yang dikeluarkan oleh Akuntansi dan Auditing untuk Organisasi Lembaga Keuangan Islam/*Accounting dan Auditing Organisation for Islamic Financial Institution* (AAOFI) telah mengeluarkan standar mengenai pengungkapan informasi yang

diinginkan dalam lembaga keuangan Islam. AAOFI dalam standar akuntansi syariah, disusun dengan harapan mampu menjadi pedoman bagi lembaga keuangan syariah yang lahir sebagai terobosan dalam praktik akuntansi konvensional (Wahyuni dan Diantimala, 2016). Standar akuntansi yang di gunakan untuk mengatur penyusunan laporan keuangan bagi lembaga keuangan syariah adalah PSAK syariah, diharapkan PSAK syariah tidak sekedar “ganti baju” namun diharapkan PSAK syariah ini mampu menjadi upaya payung praktik akuntansi syariah di Indonesia (Muhammad, 2017).

Seiring dengan perkembangan praktik akuntansi syariah yang dibuktikan dengan pesatnya perkembangan ekonomi syariah di Indonesia kearah tren yang membanggakan, sangat penting rasanya ada aturan-aturan baku yang diterima secara umum. Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) sejauh ini telah menerbitkan sembilan standar terkait dengan akuntansi syariah (Bustamam *et al.*, 2015). PSAK 101 merupakan dasar untuk menetapkan penyajian laporan keuangan bertujuan umum untuk entitas syariah yang selanjutnya disebut “laporan keuangan” agar dapat dibandingkan baik dalam laporan keuangan periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas syariah lain. Pernyataan ini mengatur persyaratan penyajian laporan keuangan, struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimal isi laporan keuangan (Wahyuningsih *et al.*, 2018).

D. Makna Wajar dalam Laporan Keuangan yang Terdapat pada PSAK 101

Penyajian laporan keuangan dalam hal menjalankan operasinya, lembaga keuangan syariah harus memiliki kesesuaian dengan prinsip syariah, sebuah lembaga independen sangat dibutuhkan regulasi akuntansi untuk menganalisis kesesuaian lembaga keuangan syariah terhadap prinsip-prinsip syariah (Wahyuni dan Diantimala, 2016). Penyajian laporan keuangan, salah satu standar akuntansi keuangan yang diguakan untuk mengatur penyusunan laporan keuangan bagi lembaga keuangan syariah adalah PSAK 101 yang menetapkan dasar penyajian laporan keuangan yang bertujuan umum untuk entitas syariah yang selannjutnya disebut laporan keuangan yang akan dapat dibandingkan, baik dalam laporan keuangan periode sebelumnya

maupun dengan laporan keuangan entitas syariah lain. Pernyataan ini mengatur persyaratan penyajian laporan keuangan, struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimal isi laporan keuangan (Ikhsan dan Haridhi, 2017).

PSAK 101 mengenai penyajian laporan keuangan syariah. Dapat diketahui harus menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, arus kas entitas syariah dengan menerapkan standar akuntansi keuangan secara benar disertai dengan pengungkapan yang diharuskan dalam catatan atas laporan keuangan. Menelusuk kedalam PSAK syariah, ada beberapa pertimbangan yang menyeluruh dalam PSAK 101 mengenai penyajian laporan keuangan entitas syariah yang dapat diketahui harus menyajikan secara wajar, hal ini dilihat pada PSAK 101 paragraf 16, dimana wajar biasanya didalam sebuah perusahaan terkait dengan adanya tingkat materialitas atau batas toleransi kesalahan yang digunakan dalam membuat laporan keuangan dengan menerapkan pernyataan standar akuntansi secara benar disertai dengan pengungkapan yang diharuskan, namun apakah hal tersebut berlaku juga didalam entitas syariah yang menggunakan prinsip-prinsip Islam, dimana Islam tidak menghendaki adanya kesalahan yang diwajibkan seperti yang telah dijelaskan dalam PSAK 101 (Hisamduddin dan Pricilia, 2013).

E. Makna Benar dalam Laporan Keuangan yang terdapat pada Surah Al-Baqarah ayat 282

Akuntansi adalah identifikasi transaksi yang kemudian diikuti dengan kegiatan pencatatan, penggolongan, serta pengikhtisaran transaksi, sehingga menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan dalam pelaporan keuangan dan sistem akuntansi dalam Islam didesain sesuai dengan sistem ekonomi dan bisnis Islam yang bersumber pada al-Qur'an dan sunnah (Sari, 2014). Penelitian Linaria dan Chintya (2017) menyatakan bahwa, perintah untuk melakukan pencatatan dan perlakuan pada setiap transaksi sudah diterapkan saat zaman Rasulullah sebagaimana dijelaskan dalam surah al-Baqarah ayat 282: *"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan,*

hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar”.

Penjelasan mengenai makna benar yang terkandung di dalam al-Baqarah ayat 282, menjelaskan bahwa kata “*adl*” yang ada dalam al-Baqarah yang diterjemakan kedalam Bahasa Indonesia menjadi benar, dimana benar memiliki arti yang luas. Benar yang menjadi makna dari surah al-Baqarah tersebut sebagai kebenaran dalam menuliskan kejadian atau aktifitas sesuai dengan kesepakatan didalam sesuai entitas, apabila diaplikasikan kedalam laporan keuangan, lebih kearah mencatat dan memasukkan angkut-angka kedalam laporan keuangan sesuai dengan kejadian dan kesepakatan yang telah ada, tidak condong pada satu pihak, tidak ada perekeyasaan, dan tidak melanggar aturan Allah swt (Hisamduddin dan Pricilia, 2013). Surah al-Baqarah ayat 282 adalah ayat pertama yang berkaitan dengan proses mencatat (akuntansi) dalam kegiatan bisnis, yang pada intinya ayat tersebut mengajarkan kepada manusia agar kegiatan bisnis dilakukan sesuai dengan konsep kejujuran, keadilan dan kebenaran (Mawaddah dan Wijaya, 2016).

F. Makna Wajar dan Benar dalam Laporan Keuangan

Wajar yang ada dalam penyajian laporan keuangan untuk entitass syariah masih cenderung sama dengan yang ada didalam entitas bisnis non syariah sejalan dengan masih digunakannya tingkat materialitas. Wajar tersebut juga masih memberikan toleransi kesalahan yang terjadi selama penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah, asalkan secara keseluruhan masih sesuai dengan standar yang berlaku umum (Hasamduddin dan Pricilia, 2013). Standar akuntansi keuangan syariah melengkapi standar akuntansi keuangan umum dengan mengatur akuntansi untuk transaksi syariah. Standar akuntansi keuangan syariah berbasis pada konsep-konsep akuntansi umum yang telah disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah (Wahyuningsih *et al.*, 2018). Tujuan akuntansi syariah memiliki aliran pragmatis yang masih berpedoman pada tujuan akuntansi konvensional dengan perubahan modifikasi dan penyesuaian berdasarkan prinsip-prinsip syariah, hal ini menjadi tidak sinkron antara teori syariah dalam praktiknya di lapangan, diduga menjadi penyebabnya adalah perbedaan kondisi dilapangan dan cara

pengimplementasian terhadap entitas. Implementasi model laporan keuangan versi PSAK syariah yang telah diterbitkan IAI untuk entitas syariah, menjadi salah satu sasaran kritik bagi pakar/pengamat syariah karena kesesuaiannya antara standar dan pengimplementasian pada entitas syariah (Rahmati, 2012).

Menurut Hisamduddin dan Pricilia (2013) mengungkapkan bahwa istilah wajar sendiri merupakan istilah yang sudah jelas ada didalam akuntansi, wajar disini biasanya dalam sebuah perusahaan terkait dengan adanya tingkat materialitas yang digunakan dalam membuat laporan keuangan dan juga terkait dengan pemilihan metode-metode yang digunakan dalam menghitung komponen didalam laporan keuangan. Wajar dari maksud materialitas itu sendiri, yakni besarnya informasi akuntansi yang apabila terjadi penghilangan atau salah saji, dilihat dari keadaan yang melingkupinya yang dapat mengubah atau mempengaruhi orang yang meletakkan kepercayaan terhadap informasi tersebut, dengan kata lain perusahaan memiliki toleransi atas terjadinya kesalahan dalam penyajian informasi akuntansi didalam laporan keuangan dengan syarat tidak melebihi batas. Seperti dalam penelitian Soedarso (2018) materialitas adalah besarnya nilai yang dihilangkan atau salah saji informasi akuntansi, yang dilihat dari keadaan melingkupinya. Tingkat materialitas suatu laporan keuangan tidak akan sama, hal ini tergantung pada ukuran laporan keuangan tersebut.

Istilah wajar dalam menyajikan laporan keuangan ditentukan dalam tingkat materialitas atau batas toleransi kesalahan dalam menyajikan laporan keuangan, akan tetapi dalam penerapannya tersebut akan memicu niat para akuntan untuk memanipulasi atau menyembunyikan informasi yang seharusnya dilaporkan dan disajikan dalam laporan keuangan (Hisamduddin dan Pricilia, 2013). Hal ini tidak sejalan dengan penelitian Sulistiyo (2011) yang mengungkapkan bahwa Fakta menunjukkan banyaknya skandal akuntansi dan manipulasi laporan keuangan yang melanda perusahaan serta rendahnya kepedulian mereka akan tanggung jawab sosial dan lingkungan menyiratkan bahwa terjadi perubahan yang sangat besar pada para pelaku akuntansi, kondisi ini menggambarkan bahwa akuntansi telah gagal untuk menggambarkan realitas bisnis secara utuh. Penelitian ini bertentangan dengan penelitian Alfian (2016) yang menegaskan

bahwa Kecurangan yang terjadi dalam laporan keuangan pada umumnya disebabkan oleh lingkungan internal dan lingkungan eksternal, salah satu pengaruh lingkungan internal adalah lemahnya perilaku etika.

Penyajian laporan keuangan syariah dilakukan secara benar, banyak hal yang perlu diperhatikan, baik dalam pencatatannya yang harus dilakukan dengan benar tanpa manipulasi dan rekayasa maupun dalam pemilihan transaksi dan aliran uang yang keluar masuk didalam entitas syariah, namun sulit untuk mengaplikasikan benar secara mutlak dan menyeluruh didalam entitas syariah yang ada di Indonesia, karena butuh pengkajian secara mendalam sebelum menjadikan istilah benar menjadi standar agar dapat diterapkan secara menyeluruh. PSAK 101 sendiri jika dipandang dari sisi Islam, sudah cukup dengan menggunakan kata wajar dengan syarat tetap menggunakan unsur benar yang bukan hanya pada pencatatannya saja, melainkan juga benar berdasarkan jumlah yang telah disepakati oleh semua pihak dan sesuai dengan kejadian, serta tidak melanggar ketentuan Allah swt (Hisamduddin dan Pricilia, 2013). Berdasarkan hal tersebut, menyajikan laporan keuangan untuk entitas syariah, wajar dan benar perlu berjalan seiringan untuk menghasilkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan bukan hanya kepada sesama manusia, melainkan juga kepada alam dan Allah swt. Pertanggungjawaban dalam akuntansi syariah adalah penyusunan laporan keuangan yang dilakukan oleh pelaku bisnis atau individu yang terlibat dalam praktik bisnis sebagai bentuk pertanggungjawaban atas amanah kepada pihak-pihak terkait.

G. Simpulan

Laporan keuangan merupakan catatan informasi keuangan yang menggambarkan kinerja keuangan suatu entitas dan sebagian besar digunakan para pemakai dalam pengambilan keputusan, dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan harus mengikuti aturan yang ada didalam standar akuntansi keuangan. Standar akuntansi yang digunakan untuk mengatur penyusunan laporan keuangan bagi lembaga keuangan syariah adalah PSAK syariah, diharapkan PSAK syariah tidak sekedar “ganti baju” dalam suatu entitas, namun diharapkan PSAK

syariah ini mampu menjadi upaya payung praktik akuntansi syariah di Indonesia. Sejauh ini dalam praktiknya, Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) telah menerbitkan Sembilan standar terkait dengan akuntansi syariah, salah satunya adalah PSAK 101 mengenai penyajian laporan keuangan entitas syariah, yang dapat diketahui harus menyajikan secara wajar posisi kinerja keuangan dengan menerapkan pernyataan standar akuntansi secara benar dan pengungkapan yang seharusnya. Menelusuk kedalam PSAK 101, ada beberapa pertimbangan yang menyeluruh didalam PSAK 101 paragraf 16 yang menyatakan, harus menyajikan secara wajar. Istilah wajar merupakan istilah yang sudah jelas dalam akuntansi konvensional yang terkait dengan tingkat materialitas atau batas toleransi dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan dengan syarat tidak melebihi batas. Namun apakah hal tersebut berlaku juga didalam entitas syariah yang menggunakan prinsip-prinsip Islam, dimana Islam tidak menghendaki adanya kesalahan yang diwajibkan seperti yang telah dijelaskann dalam PSAK 101.

Pemaknaan wajar didalam laporan keuangan sebagai kesesuaian antara laporan keuangan yang tersaji dalam suatu entitas dengan aturan yang ada didalam standar yang berlaku umum yang ditetapkan oleh IAI, dimana standar akuntansi syariah berbasis pada konsep-konsep akuntansi umum yang kemudian dimodifikasi dan disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah, akan tetapi hal ini menjadi tidak sinkron antara teori syariah dan praktiknya karena perbedaan lapangan dan cara pengimplementasian didalam entitas tersebut. Implementasi model laporan keuangan PSAK 101 mengenai penyajian laporan keuangan entitas syariah, yang dapat diketahui harus menyajikan secara wajar yang terkait dengan tingkat materialitas atau batas toleransi kesalahan dalam menyajikan laporan keuangan, akan tetapi didalam entitas syariah toleransi kesalahan ini bukanlah hal yang dapat dimaklumi.

Makna benar (*adl*) yang berangkat dari surah al-Baqarah ayat 282 sebagai kesesuaian antara apa yang dicatat dan dilaporkan dengan apa yang terjadi dilapangan, maka dari seorang akuntan dalam prakteknya harus mengukur semuanya secara benar tanpa ada *windows dressing* dalam praktik akuntansi didalam suatu entitas, seperti yang telah dijelaskan dalam surah al-Baqarah ayat 282 Allah memerintahkan untuk melakukan

penulisan secara benar atas transaksi yang dilakukan dalam kegiatan muamalah. Jadi, apabila diaplikasikan kedalam laporan keuangan lebih kearah mencatat dan memasukkan angka-angka ke dalam laporan keuangan sesuai dengan kejadian dan kesepakatan yang ada tanpa adanya tindakan mengurangi atau menambah jumlah yang ada, tidak condong pada satu pihak dan tidak melanggar aturan Allah swt.

Daftar Pustaka

- Andriani, Wiwik. 2010. Pengaruh Kepastian Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan). *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 5(1): 69-80.
- Anggreani, Dian Tri dan Akhmad Ridwan. 2014. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada SKPD di Kabupaten Sidoarjo). *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 3(3): 1-16.
- Alfian, Nurul. 2016. Nilai-Nilai Islam dalam Upaya Pencegahan Fraud. *Aktiva Jurnal Akuntansi dan Investasi*, 1(2): 205-218.
- Apriyanti, Hani Werdi. 2017. Akuntansi Syariah Sebuah Tinjauan Antara Teori dan Praktik. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 6(2):131-140.
- Anisah, Nur dan Langgeng Prayitno Utomo. 2017. Penerapan Prinsip Akuntansi Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Akuntansi Pendidikan*, 6(2):107-116.
- Bustamam, Ridwan Ibrahim dan Dedy Saputra. 2015. Analisis Penyajian Laporan Keuangan Syariah pada Bitul Mal Provinsi Aceh. *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis*, 2(1): 82-91.
- Fajarwati, Diana dan Djoko Sambodo. 2010. Pengkajian Tentang Penyusunan dan Penyajian Laporan keuangan pada Lembaga Keuangan Syariah. *JRAK*, 2(1): 15-31.
- Hisamduddin, Nur dan Eka Ayu Hilda Pricilia. 2013. Persepsi Mengenai Wajar dan Benar dalam Penyajian Laporan Keuangan Entitas Syariah. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 11(2): 62-77.
- Hidayat, Solikhul. 2013. Penerapan Aluntansi Syariah pada BMT Lisa Sejahtera Jepara. *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis*, 10(2): 167-179.
- Ilyas, Rahmat. 2016. Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian

- Laporan Keuangan syariah. *Asy-Asyar'iyah*, 1(1): 19-41.
- Ikhsan, Amrul dan Musfiari Hardhi. 2017. Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Syariah pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (Jasa pada Baitul Qiradh Di Kota Banda Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 2(3): 100-110.
- Kadarningsih, Ana, Hendri Harmawan Adinugraha, Aditia Motik, dan Tanti Fitriati Nadila. 2017. Penyajian Akuntansi Qurdhul Hasan dalam Laporan Keuangan Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 7(1): 32-41.
- Linaria, dan Aprina Chintya. 2017. Penerapan PSAK pada Perlakuan Akuntansi Musyarakah di BMT Al-Ihsan Metro Lampung. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(1): 32-46.
- Mansur, Fitriani, Eko Prasetyo, dan Reka Maiyarni. 2017. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Journal of Applied Accounting and Taxation*, 8(2): 143-152.
- Maulana, Fahry dan Etna Nur Afry Yuyetta. 2014. Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR). *Diponegoro Journal Of Accounting*, 3(2): 1-14.
- Muhammad, Rifqi. 2017. Studi Kritis Exposure Draft PSAK Syariah. *Aplikasi Bisnis*, 7(10): 815-827.
- Mauladi, Ali. 2014. Akuntansi Syariah: Pendekatan Normatif, Historis dan Aplikatif. *Iqtishadia*, 1(1): 59-75.
- Mawaddah, Nurul dan Indra Wijaya. 2016. Relevansi Nilai Etika Bisnis dalam Ruang Lingkup Akuntansi Syariah. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 3(1): 34-48.
- Nuryanto, M., dan N. N. Alfiah. 2013. The Impact of Apparatus Competence, Information Technology Utilization and Internal Control on Financial Statement Quality (Studi on Local Government of Jakarta Province Indonesia). *World Review of Business Research*, 3(4): 157-171.
- Novalia, Fitri dan Marselisa Nindito. 2016. Pengaruh Konservatisme Akuntansi dan Economic Value Added

- Terhadap Penilaian Ekuitas Perusahaan. *Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi*, 11(2): 1-17.
- Rahmanti, Virginia Nur. 2012. Sebuah Kajian Mengapa Akuntansi Syariah Masih Sulit Tumbuh Subur di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan investasi*, 13(2): 161-178.
- Soedarso, Patriandari. 2018. Pengaruh Profesionalisme, Mterialitas, dan Risiko Audit terhadap Pengendalian Intern Serta Implikasinya terhadap Opini Audit. *Akademika*, 16(1): 15-23.
- Sulistiyo, Agung Budi. 2011. Peran Spiritualitas Keagamaan Bagi Akuntan dalam Lingkungan Organisasi. *Jurnal Review Akuntansi dan Keuangan*, 1(2): 127-139.
- Suryaningrum, Diah Hari. 2011. Sikap Sosio Spiritual dalam Akuntansi Kontemporer: Telaah, Tantangan, dan Imajinasi Diri. *Akrual Jurnal Akuntansi*, 3(1): 38-57.
- Saksakotama, Paramita Hana, Nur Cahyonowati. 2014. Determinan Integritas Laporan Keuangan Perusahaan Manufaktur di Indonesia. *Dipoonegoro Journal Of Accounting*, 3(2): 1-13.
- Susilowati, Lantip. 2017. Tanggung Jawab, Keadilan dan Kebenaran Akuntansi Syariah. *An-Nisbah*, 3(2): 295-320.
- Siregar, Budi Gautama. 2015. Implementasi Akuntansi dalam Kehidupan Menurut Perspektif Islam. *Al-Masyarif*, 3(1): 1-16.
- Sitompul, Mhd Syahman, Nurlaila, dan Hendra Hermain. 2016. Implementasi Surah Al-Baqarah Ayat 282 dalam Pertanggungjawaban Mesjid Di Sumatera Timur, *Human Falah*, 3(2): 1-23.
- Sari, Nurma. 2014. Akuntansi Syariah. *Jurnal Katulistiwa Journal Of Islamic Studies*, 4(1): 28-44.
- Triwardana, Dedy. 2017. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD (Studi pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Kampar). *JOM Fekon*

4(1): 641-655.

- Trisnani, Emy Dwi, Moh Dimyati, dan Hadi Paramu. 2017. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Keandalan Laporan Keuangan dengan Mediasi Penatausahaan Aset Tetap. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 11(3): 271-282.
- Utami, Vina Putri, Rosita Apriliya Rani, dan Septi Dwi Azizah. 2018. Laporan Keuangan Syariah Sebagai Bentuk Transparansi Pengalokasian Rekening Dana Kebijakan. *Jurnal Peta*, 3(2): 49-58.
- Widiana. 2017. Analisa Perkembangan Peraturan dan Penerapan Akuntansi Syariah di Indonesia. *Jurnal Law and Justice*, 2(2): 168-176.
- Wahyuni, Cut Eka dan Yossi Diaantimala. 2016. Tingkat Pengungkapan Wajib Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekoonomi Akuntansi*, 1(1): 173-271.
- Wahyuningsih, Herman Karamoy, dan Dhullo Afandy. 2018. Analisis Pelaporan Keuangan di Yayasan As-Salam Manado (Berdasarkan PSAK 45 dan PSAK 101). *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 13(2): 512-528.
- Yuliana, Nur Laila, Berkah Susanto, dan Farida. 2016. Analisis Determinasi Keandalan dan Timelineess Pelaporan Keuangan. *JAFFA*, 4(2): 145-160

INTERNALISASI NILAI RELIGIUS DALAM KINERJA AKUNTAN

A. Pendahuluan

Permasalahan krisis moral dalam membuat laporan keuangan sedang di alami negeri ini. Kiranayanti dan Erawati (2016) menyatakan bahwa fenomena kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia merupakan suatu hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Pemikiran ini ada bermula pada saat terdapat penyimpangan-penyimpangan yang berhasil ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pelaksanaan audit pemerintah daerah. Wati dkk. (2014) Mengatakan bahwa laporan keuangan merupakan suatu yang dihasilkan oleh disiplin ilmu. Sehingga untuk menghasilkan laporan keuangan diperlukan orang-orang yang ahli dibidangnya. Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 (Nurillah, 2014).

Laporan keuangan merupakan suatu cerminan untuk dapat mengetahui apakah suatu pemerintahan telah berjalan dengan baik, sehingga pemerintah diharuskan untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas (Wati, dkk. 2014). Rini (2014) mengungkapkan dalam penelitiannya bahwa untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dibutuhkan pelaporan keuangan yang baik. Septarini dan Papilaya (2016) menyatakan untuk menyajikan laporan keuangan yang berkualitas diperlukan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten di bidang akuntansi, karena laporan keuangan merupakan produk yang dihasilkan oleh bidang ilmu akuntansi. SDM yang kompeten akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik. Seperti halnya dengan penelitian Juwita (2013) yang

mengatakan bahwa dalam rangka menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas laporan keuangan harus memenuhi kriteria yang memadai yaitu memiliki relevansi, dapat diandalkan, dapat dinilai atau dibandingkan, dan dapat dipahami, Keempat kriteria tersebut merupakan hal yang sangat penting bagi terciptanya kualitas laporan keuangan yang baik sebagai bukti pertanggungjawaban penggunaan anggaran dari pemerintah.

Bagi pemerintah daerah menjadi suatu keharusan untuk menyusun laporan keuangan yang berkualitas. Septarini dan Papilaya (2016) Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dapat tercermin dari hasil pemeriksaan BPK. Adapun kriteria pemberian opini menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pernyataan Profesional Pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan didasarkan pada kriteria sebagai berikut : a) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, b) kecukupan pengungkapan, c) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undang, dan d) efektivitas sistem pengendalian intern (Ratifah dan Ridwan, 2012). Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah mencerminkan tertib pengelolaan keuangan pemerintah daerah, yang mencakup tertib administrasi dan taat asas (Adhi dan Soehardjo, 2013). Wati dkk. (2014) mengatakan dalam penelitiannya bahwa sumber daya manusia adalah faktor penting demi terciptanya laporan keuangan yang berkualitas.

Akuntansi syariah baik secara teoritis maupun praktis menjadi sebuah wacana dalam diskusi yang menarik dan mendorong pemahaman yang mendalam perihal kehadirannya sebagai bidang studi yang masih dianggap “baru” (Prasetyo, 2010). Pembahasan akuntansi syariah dalam seminar, *workshop*, diskusi akhir-akhir ini semakin sering kita dengar, baik didalam negeri maupun di luar negeri, walaupun keberadaan akuntansi syariah itu sendiri seperti halnya dengan keberadaan sistem ekonomi Islam masih dipertanyakan. Pembicaraan semacam itu muncul karena ilmu akuntansi yang dipelajari sampai saat ini masih tertuju dan merujuk pada sistem akuntansi Barat, yang didalamnya mengandung persoalan pertama kepemilikan, asumsi dasar, efek ketiga isu asumsi dasar ke tingkat standar, atau bahkan metode akuntansi yang dipilih (Kariyoto, 2017). Rahayu (2019)

diterapkannya akuntansi syariah untuk mencapai keadilan sosial-ekonomi, dan sebagai bentuk menjalankan ibadah kita dalam memenuhi kewajiban kepada Allah swt, sebagai bentuk pertanggungjawaban kita terhadap tugas individu dalam melaporkan segala hal yang berkaitan dengan laporan keuangan.

Tujuan laporan keuangan dalam masyarakat muslim tentunya memiliki ciri khas khusus, yaitu berpijak pada syariah (Wijaya, 2014). Menurut Rahmadieni (2019) proses penyajian laporan keuangan syariah harus sesuai standar akuntansi syariah yang dijadikan solusi dalam menjaga akuntabilitas laporan keuangan. Standar Akuntansi Syariah merupakan pernyataan yang diterapkan dalam penyajian laporan keuangan entitas syariah. Maka laporan keuangan syariah BMT disusun dan disajikan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK No.101). Kualitas pelaporan keuangan bank syariah diduga akan dapat tercapai dengan baik apabila dilaksanakan pengendalian *intern* atas pelaporan keuangan yang efektif (Rini, 2014).

Internalisasi agama merupakan hal yang penting dilakukan dalam suatu lembaga. Seorang akuntan harus memiliki komitmen yang baik dalam menyusun laporan keuangan. Salah satu asumsi hilangnya perilaku etis disebabkan kurangnya nilai-nilai religius dalam diri akuntan. Hilangnya nilai religius akan mengakibatkan akuntan tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk (Kusumaningtyias, 2016). Susilowati (2017) Akuntansi dengan nilai-nilai Islam yang berlandaskan pada tanggung jawab, keadilan dan kebenaran yang sesuai dengan al-Qur'an dan hadis merupakan suatu realita yang harus diupayakan. Kehidupan umat manusia yang berlandaskan agama (Islam) yang mengharapkan kesejahteraan dan kemakmuran serta kebahagiaan di dunia dan di akhirat yang didasarkan hubungan manusia dengan Tuhan (*hablum minallah*) dan hubungan sesama manusia (*hablum minannas*), maka memerlukan praktik yang ideal dan sesuai dengan hukum-hukum syariah. Menurut Mulia (2012) Keseimbangan antara IQ, EQ dan SQ tidak cukup jika hanya dipergunakan untuk kepentingan diri sendiri, karena secara tidak langsung hal tersebut berujung pada sifat serakah (*greedy*). Bab ini akan membahas mengenai peningkatan kinerja akuntan berbasis

nilai religius, serta kinerja akuntan berbasis nilai religius dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan.

B. Syariah Enterprise Theory

Menurut Hafid dkk, (2018) *syariah enterprise theory* adalah teori yang dibangun berdasarkan metafora zakat, lebih menghendaki keseimbangan antara sifat egoistik dan altruistik. *Syariah enterprise theory* memiliki cakupan akuntabilitas yang luas, akuntabilitas yang dimaksud adalah akuntabilitas kepada Tuhan, manusia, dan alam. Dengan ini, maka hubungan akuntansi syariah tetap tertuju pada “membangkitkan kesadaran ketuhanan” agar para pengguna tetap terjamin. kedua adalah manusia, dimana dapat dibagi menjadi dua kelompok yaitu *direct-stakeholder* dan *indirect-stakeholder*. *Direct-stakeholders* adalah pihak-pihak yang secara langsung memberikan kontribusi pada perusahaan, baik dalam bentuk kontribusi keuangan maupun non-keuangan, sedangkan *indirect-stakeholder* adalah pihak-pihak yang sama sekali tidak memberikan kontribusi kepada perusahaan (baik secara keuangan maupun non-keuangan), tetapi secara syari’ah mereka adalah pihak yang memiliki hak untuk mendapatkan kesejahteraan dari perusahaan. *Stakeholder* terakhir adalah alam. Alam adalah pihak yang memberikan kontribusi bagi matihidupnya perusahaan sebagaimana pihak Allah dan manusia. Bentuk akuntabilitas ini berfungsi sebagai tali pengikat agar akuntansi syariah selalu terhubung dengan nilai-nilai yang dapat membangkitkan kesadaran ketuhanan.

Konsep penting dalam *shariah enterprise theory* adalah Allah sebagai pencipta dan pemilik tunggal dari seluruh sumber daya yang ada didunia ini. Oleh karena itu, yang berlaku dalam *shariah enterprise theory* adalah Allah sumber amanah utama, karena Allah pemilik yang tunggal dan mutlak (Nurfajri, 2019). Teori syariah *enterprise* mencakup nilai-nilai syariah (keadilan, rahmatan lil alamin, dan maslahah). *Shariah enterprise theory* merupakan *enterprise theory* yang telah diinternalisasi dengan nilai-nilai islam dalam rangka menghasilkan teori yang transdental dan lebih humanis. Teori ini telah diperkenalkan oleh Iwan Triyuwono melalui tulisannya yang memiliki cakupan akuntabilitas luas yaitu akuntabilitas kepada Allah swt, manusia dan alam (Asmarani dan Kusumaningtias, 2019). Bentuk dari akuntabilitas ini berfungsi

sebagai tali pengikat agar akuntansi syariah terhubung dengan nilai-nilai yang dapat membangkitkan kesadaran. Teori *shariah enterprise* dianggap paling cocok untuk akuntansi syariah karena mengandung nilai keadilan, kebenaran, kejujuran, amanah dan pertanggungjawaban (Triyuwono, 2012). Dengan adanya teori ini pada perbankan syariah dapat melakukan aktivitas sesuai dengan ajaran dan nilai-nilai yang terkandung yaitu kejujuran, amanah dan dapat dipertanggungjawabkan.

C. Konsep Nilai Religius

Konsep religius merupakan rumusan brilian profesi yang diperlukan sebagai *fardu kifayah*. Agar seorang akuntan mampu mewujudkan nilai religius dalam menyusun laporan keuangan, akuntan terlebih dahulu harus paham tentang konsep dan nilai-nilai yang ada dalam nilai religius. Umahmudah dkk. (2019) mengatakan bahwa religiusitas merupakan faktor yang paling mempengaruhi kebiasaan, nilai dan perilaku seseorang termasuk pegawai perusahaan dalam memilih pendekatan maupun pengambilan keputusan. Religiusitas adalah hubungan pribadi dengan pribadi Illahi Yang Maha Kuasa, Maha pengasih dan Maha Penyanyang (Tuhan) yang berkonsekuensi hasrat untuk berkenan kepada pribadi yang illahi itu dengan melaksanakan kehendak-Nya dan menjahui larangan-Nya (Kusumaningtyias, 2016). Badudu dan Sain mengatakan bahwa jika dilihat dari bahasanya nilai religius berasal dari gabungan dua kata, yaitu kata nilai dan kata religius. Kata nilai dapat diartikan secara *etimologis* dan *terminologis*. Dari segi *etimologis* nilai adalah harga, derajat. Sedangkan menurut penelitian Rosyadi, nilai adalah ukuran untuk memilih tindakan atau upaya kegiatan dan tujuan tertentu. Kusumanigtyas (2016) mengungkapkan bahwa Islam juga mengatur pada aspek nilai profesi akuntan, bukan hanya berfikir duniawi tetapi juga harus bisa menghataarkan semua pihak baik manajemen, karyawan, investor, analis dan akuntan menuju keselamatan dunia dan akhirat. Syariah merupakan pedoman yang digunakan oleh umat Islam untuk berperilaku dalam segala aspek kehidupan.

Umahmudah dkk. (2019) mengatakan bahwa religiusitas merupakan faktor yang paling mempengaruhi kebiasaan, nilai dan perilaku seseorang termasuk pegawai perusahaan dalam memilih

pendekatan maupun pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan seorang akuntan dituntut untuk memiliki integritas atas nilai-nilai etika dan moral, sehingga informasi yang disampaikan memiliki tingkat keandalan tinggi agar bermanfaat bagi masyarakat. Beberapa operasionalisasi dari religiusitas sudah tersedia diantaranya *intrinsic* dan *extrinsic religiousness*. Glock dan Stark merumuskan religiusitas sebagai komitmen religius (yang berhubungan dengan agama atau keyakinan iman), yang dapat dilihat melalui aktivitas atau perilaku individu yang bersangkutan dengan agama atau keyakinan iman yang dianut (Pamungkas, 2014). Susilowati (2017) akuntansi dengan nilai-nilai Islam yang berlandaskan pada tanggung jawab, keadilan dan kebenaran yang sesuai dengan al-Qur'an dan hadis merupakan suatu realita yang harus diupayakan.

D. Kualitas Laporan Keuangan

Kualitas laporan keuangan adalah sejauh mana laporan keuangan yang disajikan menunjukkan informasi yang benar dan jujur. Kualitas Laporan keuangan (*financial statement*) adalah hasil akhir dari proses kegiatan akuntansi atau suatu ringkasan dari transaksi keuangan. Laporan keuangan memiliki kualitas tinggi apabila memenuhi persyaratan kualitatif laporan keuangan. Menurut KDPPLKS paragraf 45- 63, karakteristik kualitatif laporan keuangan yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami (Rahmadini dan Qozim, 2019). Wati dkk. (2014) menyatakan bahwa Laporan keuangan adalah produk yang dihasilkan oleh disiplin ilmu akuntansi. sehingga untuk menghasilkan laporan keuangan diperlukan orang-orang yang berkompeten. Kompetensi sumber daya manusia sangat diperlukan agar laporan keuangan yang dihasilkan dapat memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan. Sehingga laporan keuangan yang dihasilkan dapat berkualitas dan bermanfaat dalam hal pengambilan keputusan.

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah mencerminkan tertib pengelolaan keuangan pemerintah daerah, yang mencakup tertib administrasi dan taat asas (Adhi dan Soehardjo, 2013). Muslih (2010) menyatakan bahwa suatu laporan keuangan bermanfaat bagi pemakai apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut memiliki karakteristik

kualitatif meliputi: 1) dapat dipahami, 2) relevan, 3) keandalan, dan 4) dapat diperbandingkan. Bagi pemerintah daerah menjadi suatu keharusan untuk menyusun laporan keuangan yang berkualitas. Laporan keuangan pemerintah harus menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik (Adhi dan Soehardjo, 2013).

Kiranayanti dan Erawati (2015) mengatakan bahwa fenomena kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia merupakan sesuatu hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Dasar pemikiran ini berasal dari fakta bahwa terdapat penyimpangan-penyimpangan yang berhasil ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dalam pelaksanaan audit laporan keuangan pemerintah. Tingginya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah juga ditentukan oleh seberapa baik pengendalian internal yang dimiliki institusi pemerintah daerah. Menurut Evicahyani dan Setiawini (2016) kualitas laporan keuangan adalah penyajian laporan keuangan yang memiliki kriteria berupa: a) kesesuaian dengan SAP, b) kecukupan pengungkapan, c) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan d) efektivitas sistem pengendalian *intern* (SPI). Kualitas laporan keuangan sangat berpengaruh pada akuntabilitas, dengan kualitas laporan keuangan yang baik akan memberikan dedikasi terhadap akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas laporan keuangan yang dibuat yang akan berpengaruh terhadap pemberian opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan (LHP BPK-RI atas LKPD Tabanan Tahun 2013).

Tujuan laporan keuangan dalam masyarakat muslim tentunya memiliki ciri khas khusus, yaitu berpijak pada syariah (Wijaya, 2014). Rahmadieni (2019) mengatakan bahwa kualitas laporan keuangan adalah sejauh mana laporan keuangan yang disajikan menunjukkan informasi yang benar dan jujur. Kualitas laporan keuangan (*financial statement*) adalah hasil akhir dari proses kegiatan akuntansi atau suatu ringkasan dari transaksi keuangan. Laporan keuangan memiliki kualitas tinggi apabila memenuhi persyaratan kualitatif laporan keuangan. Suatu laporan keuangan bermanfaat bagi pemakai apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut memiliki karakteristik

kualitatif berupa: 1) dapat dipahami, 2) relevan, 3) keandalan, dan 4) dapat diperbandingkan (Muslih, 2010).

E. Audit Syariah

Audit syariah dikhususkan untuk entitas yang berlandaskan syariah dan menggunakan standar pelaporan syariah dan dari sisi auditornya, mereka dituntut tidak hanya memiliki pengetahuan akuntansi tetapi juga pengetahuan terkait syariah yang dibuktikan dengan adanya sertifikat SAS. Selain itu opini yang dikeluarkan dalam audit syariah adalah opini berisi *shariah compliance* atau tidaknya suatu entitas yang artinya pihak auditor menilai apakah aktivitas entitas telah dijalankan sesuai dengan syariah melalui indikator yang diadaptasi dari standar audit AAOFI (Nuha, 2017). Praktik audit syariah merupakan pemeriksaan semua aspek material telah sesuai dengan prinsip syariah, hukum syariah, AAOIFI, dan standar akuntansi nasional. Aspek ini diukur dengan *Framework* Audit Syariah, Kualifikasi dan Keahlian auditor Syariah pada LKS, *Scope* (ruang lingkup) Audit Syariah, dan Independensi Auditor (Mardiyah dan Mardian, 2015). Kriteria untuk mengevaluasi informasi bervariasi tergantung pada informasi yang diaudit. Dalam audit atas laporan keuangan historis oleh auditor, kriteria biasanya standar laporan keuangan (Wardayati dan Wahid, 2016).

Audit syariah harus memastikan kebenaran, keadilan dan relevansi laporan keuangan yang diterbitkan oleh manajemen dan memastikan bahwa manajemen telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan hukum dan prinsip Islam serta melaksanakan tujuan syariah (*maqasid* syariah) untuk melindungi dan meningkatkan kehidupan umat manusia. Seorang auditor syariah harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang mencukupi terkait dengan fungsi audit syariah yaitu mumpuni dalam bidang akuntansi atau auditing dan dibidang syariah (Nuha, 2017). Umam (2015) mengatakan bahwa dewan pengawas syariah kedepannya dapat melakukan audit kepatuhan syariah secara professional atas dasar-dasar ketentuan prinsip-prinsip syariah dan perundang-undangan yang berlaku dilembaga keuangan syariah serta dapat turut serta secara aktif dalam hal menciptakan dan mengembangkan produk dan jasa keuangan syariah berdasarkan keahlian yang lebih komprehensif yang mereka

miliki baik dibidang fiqih muamalah, akuntansi, keuangan dan sistem tata kelola di lembaga keuangan syariah. Proses jasa audit syariah, kriterianya dapat dikembangkan berdasarkan pendapat tertulis dari Lembaga Pengawas Syariah, manual produk dan Standard Operasional Prosedur (SOP). Petunjuk atau bukti dalam audit syariah diantaranya: kesaksian lisan dari auditor, komunikasi tertulis dengan pihak luar, pengamatan oleh auditor, serta transaksi data elektronik. Audit syariah akan mengembangkan program audit yang sistematis dan menyeluruh (Wardayati, 2016).

Mardiyah dan Mardian (2015) mengungkapkan dalam penelitiannya bahwa auditor syariah memegang peran krusial untuk memastikan akuntabilitas laporan keuangan dan pemenuhan aspek syariah. Sehingga *stakeholder* merasa aman berinvestasi dan dana yang dimiliki oleh LKS dapat dipastikan telah dikelola dengan baik dan benar sesuai syariat Islam. Adanya kebutuhan untuk mengembangkan program audit syariah secara sistematis dalam kerangka konseptual Islam yang sesuai dengan kebutuhan LKS, namun tidak ada pedoman dan standar auditing syariah yang diakui bersama adalah masalah utama yang dihadapi saat ini dalam menyusun kerangka audit syariah (Kasim dkk, 2009). Sejalan dengan penelitian Minarni (2013) yang menyatakan bahwa audit syariah dapat dimaknai sebagai suatu proses untuk memastikan bahwa aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh institusi keuangan Islam tidak melanggar syariah atau pengujian kepatuhan syariah secara menyeluruh terhadap aktivitas bank syariah.

Rahmadieni (2019) mengatakan bahwa auditor syariah memegang peranan krusial untuk memastikan akuntabilitas laporan keuangan dan pemenuhan aspek syariah. Audit syariah juga harus memastikan kebenaran, keadilan dan relevansi laporan keuangan. Namun, peran auditor syariah saat ini belum sepenuhnya menguasai ilmu akuntansi ataupun auditing secara syariah. Istilah auditor syariah digunakan untuk menyesuaikan dengan operasional entitas syariah karena proses audit dilakukan tidak hanya sesuai dengan standar regulasi tetapi juga sesuai dengan prinsip syariah (Mardian, 2015). Nugraheni (2012) auditor syariah melaksanakan audit dengan dua tujuan, yaitu tujuan obyektif berupa informasi keuangan (misal pembagian

keuntungan) dan informasi subyektif (informasi syariah) untuk memastikan kepatuhan bank syariah dengan prinsip syariah. Auditor juga diperlukan untuk melaporkan sejauh mana sebuah organisasi bisnis melakukan tindakan sosial, pencemaran lingkungan, menghabiskan sumber daya tak terbarukan atau melakukan kegiatan ilegal.

Pendidikan audit syariah akan menghasilkan orang-orang yang kompeten dan independen menjadi auditor syariah. Syarat menjadi auditor syariah yang baik adalah harus memahami kriteria yang digunakan dalam audit syariah, kompeten untuk mengetahui jenis dan jumlah bukti yang menumpuk sebelum menyimpulkan audit dan memiliki sikap mental yang independen (Wardayati dan Wahid, 2016). Istilah auditor syariah digunakan untuk menyesuaikan dengan operasional entitas syariah karena proses audit dilakukan tidak hanya sesuai dengan standar regulasi tetapi juga sesuai dengan prinsip syariah (Mardian, 2013). Tugas auditor syariah yang juga harus melakukan uji kepatuhan syariah. Mereka harus memastikan bahwa manajemen telah mengikuti prinsip bebas riba' dan halal yang telah ditentukan oleh DPS. Sehingga dinyatakan bahwa pemain kunci atau *key player* dalam audit syariah adalah Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan auditor internal serta auditor eksternal (Haniffa, 2010).

F. Lembaga Keuangan Syariah

Dewasa ini Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia menunjukkan perkembangan yang pesat. Perkembangan tersebut menjadi faktor pendorong berkembangnya praktik akuntansi syariah fungsi audit baru yakni audit syariah. Audit syariah memiliki ruang lingkup lebih luas dari pada audit konvensional karena audit syariah digunakan untuk memastikan produk, jasa, dan semua kegiatan yang dilakukan oleh LKS telah sesuai, adil dan relevan dengan prinsip syariah (Yaacob, 2012). Nugraheni (2012) menyatakan bahwa fungsi audit syariah dalam LKS bisa dilakukan oleh auditor internal yang memiliki pengetahuan dan keahlian yang memadai yang berhubungan dengan syariah, atau auditor internal bisa bekerjasama dengan ahli syariah dari LKS sepanjang tidak mempengaruhi obyektivitas auditor dan alternative yang ketiga, LKS bisa menunjuk auditor eksternal untuk melakukan audit syariah.

Market share perbankan syariah saat ini masih berada pada kisaran 5% dari pangsa pasar nasional. Ini menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat secara umum masih rendah terhadap LKS, diantaranya terhadap kepatuhan syariah (*shariah compliance*) LKS. Kepatuhan syariah merupakan pilar utama dan pembeda LKS dengan lembaga keuangan konvensional (Mardiyah dan Mardian, 2015). Lembaga keuangan syariah wajib menunjukkan transparansi, pertanggungjawaban dan akuntabilitasnya kepada pihak *skateholder* yang di wujudkan dalam laporan keuangan syariah. Oleh karena itu, LKS juga membutuhkan proses auditing terhadap laporan keuangan dan kegiatan operasionalnya. Audit laporan keuangan termasuk bank syariah dilakukan oleh auditor eksternal yang memiliki kompetensi yang memadai sesuai dengan kebutuhan profesional profesi akuntan (Nugraheni, 2012). Audit sebagai sarana akuntabilitas dan pengawasan bagi *stakeholder* perusahaan. Maka dari itu, dibutuhkan audit syariah dalam LKS untuk menilai secara independen tentang laporan keuangan syariah dalam pengambilan keputusan (Aprilianto dkk, 2017)

Adanya pelanggaran kepatuhan syariah pada LKS dapat mereduksi kepercayaan masyarakat (Kurrohman, 2016). Oleh sebab itu kepatuhan syariah harus berorientasi pada pencapaian nilai-nilai *maqasid* syariah yang teraktualisasi dalam bentuk mendidik individu, penegakan keadilan dan kemaslahatan. Pencapaian tersebut dapat tercapai jika regulasi bank syariah mendukung pencapaian ekonomi yang berkeadilan sosial sesuai dengan cita-cita ekonomi pancasila. Ada dua prinsip yang harus diterapkan oleh bank syariah yaitu 1) Prinsip *al-Ta'awun* merupakan prinsip untuk saling membantu dan bekerja sama dalam berbuat keadilan dan takwa dan 2) Prinsip menghindari *al-lkhtinaz* yaitu tidak membiarkan uang menganggur dan tidak berputar. Sebaiknya bank syariah tidak melakukan transaksi yang terdapat hal-hal seperti *gharar*, *masyir*, dan *riba* sehingga dapat meyakinkan kepercayaan masyarakat (Bangsawan, 2017).

G. Religiusitas pada Kinerja Akuntan dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan

Prajitno (2012) mengatakan bahwa ada banyak profesi dalam bidang perusahaan. Salah satu profesi yang menjadi sorotan dalam bidang ekonomi adalah profesi akuntan publik. Profesi

akuntan publik adalah profesi yang sangat penting dalam hal menentukan ukuran kinerja perusahaan. Hasil ukuran kinerja yang di berikan akuntan publik dibutuhkan oleh masyarakat dunia usaha dalam pengambilan keputusan. Untuk menentukan ukuran kinerja perusahaan peran akuntan publik adalah dalam bentuk memberikan jasa audit kepada perusahaan kliennya. Kinerja yang lebih tinggi memiliki kualitas yang baik, sehingga tugas yang akan diberikan kepada individu dalam suatu organisasi dapat dilaksanakan dengan tepat waktu. Kinerja yang sangat tinggi berarti terjadinya peningkatan efisiensi, efektivitas, dan kualitas lebih baik dalam menyelesaikan tugas- tugas yang akan dibebankan pada setiap individu (Murty dan Hudainarsih, 2012).

Religiusitas dalam motivasi kerja seorang akuntan sangatlah mempengaruhi akan kualitas seorang akuntan. Seorang akuntan haruslah mampu bertanggungjawab atas pekerjaannya, harus mampu menjalankan etika profesi seorang akuntan sendiri yang telah diatur dalam kelembagaannya. Jika seorang akuntan memiliki motivasi kerja yang kurang baik maka otomatis kualitas laporan keuangan yang akan dibuat akan kurang mampu menggambarkan kondisi keuangan atau kondisi perusahaan pada periode tertentu (Kusumaningtyas, 2016). Irma (2012) mengatakan bahwa perilaku religius tidak terlepas dari dua faktor penting yang mempengaruhinya yaitu individual dan situasional. Faktor individual terdiri dari masa kerja, usia, psikis, fisik, jenis kelamin dan motivasi berperilaku. Faktor situasional atau lingkungan luar adalah suasana kerja, lingkungan kerja dan sebagainya.

Kusumaningtyas dan Solikah (2016) mengatakan bahwa akuntan mempunyai kewajiban untuk menjaga standar perilaku etika tertinggi mereka kepada organisasi dimana mereka bernaung, profesi mereka, masyarakat dan diri mereka sendiri. Akuntan mempunyai tanggungjawab menjadi kompeten dan untuk menjaga integritas dan obyektivitas mereka. Dalam menjalankan profesinya seorang akuntan secara terus menerus berhadapan dengan dilema etika yang melibatkan pilihan antara nilai-nilai yang bertentangan dengan lembaga, maupun kebijakan yang diberikan lembaga. Meskipun etika akuntan sudah terdapat pada etika profesi namun masih banyak perilaku yang tidak etis dan tidak mampu menghindari nafsu keserakahan manusia

terhadap keuntungan material. Seorang akuntan harus memiliki komitmen yang baik dalam menyusun laporan keuangan. Salah satu asumsi hilangnya perilaku etis disebabkan kurangnya nilai-nilai religius dalam diri akuntan. Hilangnya nilai religius akan mengakibatkan akuntan tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk (Kusumaningtyas, 2016). Dalam bekerja selain ditunjang dengan kecerdasan untuk berpikir juga dituntut untuk memiliki etika kerja yang baik. Sistem kerja menurut sudut pandang Islam, memaknai kerja sebagai suatu amalan bernilai ibadah yang tujuan akhirnya adalah meraih sukses tak hanya di dunia namun juga akhirat (Novianty dan gunawan, 2010).

Terdapat tiga kunci utama yang merupakan pandangan dunia al-Qur'an tentang etika, diantaranya yaitu Islam, iman dan taqwa yang jika direnungkan akan menghasilkan arti yang sama. Istilah iman lahir dari kata "amanah" yang artinya keamanan, damai, dan bebas dari bahaya. Sedangkan Islam sendiri timbul dari kata "salam" yang artinya aman dan integral, terlindungi dari disintegrasi dan kehancuran (Risqifani dan Suwarno, 2018). Selanjutnya yang menjadi tolak ukur nilai moral atau etika dalam etos kerja islam adalah penggunaan nilai-nilai spiritual. Nilai moral-spiritual tersebut antara lain yaitu *Shiddiq* (jujur), *Amanah* (tanggung jawab), *Tabligh* (komunikatif), serta *Fathanah* (professional). Keempat nilai moral tersebut dijadikan sebagai pola pemikiran etos kerja islam (Djasuli dan Harwida, 2011). Kecerdasan spritual adalah kecerdasan jiwa yang membantu seorang auditor untuk memberikan makna ibadah dan pemikiran yang positif dalam melakukan suatu tindakan saat sedang menjalankan tugasnya.

H. Simpulan

Laporan keuangan merupakan sesuatu yang dihasilkan oleh disiplin ilmu akuntansi, sehingga untuk menghasilkan laporan keuangan diperlukan orang-orang yang berkompeten. Laporan keuangan merupakan suatu cerminan untuk dapat mengetahui apakah suatu pemerintahan telah berjalan dengan baik, sehingga pemerintah diharuskan untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dibutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten di bidang akuntansi untuk menyajikan

laporan keuangan tersebut, karena laporan keuangan berkualitas merupakan produk yang dihasilkan oleh bidang ilmu akuntansi. Kualitas laporan keuangan ini mengukur sejauh mana laporan keuangan yang disajikan menunjukkan informasi yang benar dan jujur. Kualitas Laporan keuangan ini juga merupakan hasil akhir dari proses kegiatan akuntansi atau suatu ringkasan dari transaksi keuangan.

Seorang akuntan harus memiliki komitmen yang baik dalam menyusun laporan keuangan, dan harus memahami nilai religius. Karena hilangnya nilai religius akan mengakibatkan akuntan tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Religiusitas dalam memotivasi kerja seorang akuntan sangat mempengaruhi akan adanya kualitas seorang akuntan. Seorang akuntan harus mampu bertanggungjawab atas pekerjaannya dan mampu menjalankan etika profesi seorang akuntan sendiri yang telah diatur dalam kelebagaannya. Jika seorang akuntan memiliki motivasi kerja yang kurang baik maka otomatis kualitas laporan keuangan yang akan dibuat akan kurang mampu menggambarkan kondisi keuangan atau kondisi perusahaan pada periode tertentu.

Selain itu dibutuhkan juga auditor syariah yang memegang peranan kursorial untuk memastikan akuntabilitas laporan keuangan dan pemenuhan aspek syariah. Audit syariah ini juga harus memastikan kebenaran, keadilan dan relevansi laporan keuangan. Syarat menjadi auditor syariah yang baik adalah harus memahami kriteria yang digunakan dalam audit syariah, kompeten untuk mengetahui jenis dan jumlah bukti yang menumpuk sebelum menyimpulkan audit dan memiliki sikap mental yang independen. Audit syariah dikhususkan untuk entitas yang berlandaskan syariah dan menggunakan standar pelaporan syariah dan dari sisi auditornya, audit syariah mereka dituntut tidak hanya memiliki pengetahuan akuntansi tetapi juga pengetahuan terkait syariah yang dibuktikan dengan adanya sertifikat SAS.

Daftar Pustaka

- Adhi, D. K. dan Y. Suhardjo. 2013. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Tual). *Jurnal Stie Semarang*, 5(3): 93-111.
- Evicahyani, S. I. dan N. D. Setiawina. 2016. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 5(3): 403-428.
- Juwita. R. 2013. Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Trikonomika*, 12(2): 201-214.
- Kariyoto. 2017. Teori dan Praktik Akuntansi Syariah di Indonesia. *El-Muhasaba*, 8(2): 166 – 177.
- Kiranayanti, I. A. E. dan N. M. A, Erawati. 2016. Pengaruh Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Pemahaman Basis AkruaI terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 16(2): 1290-1318.
- Kusumaningtyias, D. 2016. Religiusitas Pada Motivasi dan Etika Profesi Akuntan dalam Prespektif Islam. *Jurnal Cendekia Akuntansi*, 4(3): 116-126.
- Mulia, A. S. 2012. Mengungkap Pemahaman tentang Akuntansi Dari Kecerdasan Emosional, Spiritual dan Sosial Mahasiswa. *Jurnal Multiparadigma*, 3(3): 334-501.
- Muslih, A. R. 2010. Pengaruh Penerapan Sistem Informasi dan Komunikasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Syariah (Suatu Kajian terhadap BMT-BMT di Kota Bandung). *Jurnal Computech & Bisnis*, 4(1): 33-42.
- Nurillah, A. S. 2014. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem

- Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada SKPD Kota Depok). *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 1(1): 2337-3806.
- Pamungkas, I. D. 2014. Pengaruh Religiusitas dan Rasionalisasi dalam Mencegah Dan Mendeteksi Kecenderungan Kecurangan Akuntansi. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 15(2): 48-59.
- Prasetyo, W. 2010. Kajian Karakter Akuntansi Syari'ah: Dulu, Kini, dan Esok. *Jurnal akuntansi universitas jember*, 8(2): 14-39.
- Rahayu. 2019. Kepatuhan Prinsip-Prinsip Syariah pada Bank Nasional Indonesia (BNI) Syariah Cabang Palembang. *Jurnal Akuntika*, 5(1): 104-111.
- Rahmadieni, R. Y. dan I. Qizam. 2019. Pengaruh Penerapan Standar Audit Syariah terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan pada Baitul Mal Wa Tamwil di Kabupaten Wonogiri. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(2): 133-143.
- Rini. 2014. Pengaruh Penerapan Peran Komite Audit, Peran Dewan Pengawas Syariah, dan Efektivitas Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan (Studi Empiris pada Bank Syariah di Indonesia). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 2(2): 143-155.
- Septarini, D. F. dan F. Papilaya. 2016. Interaksi Komitmen Organisasi terhadap Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu Ekonomi & Sosial*, 7(2): 100-116.
- Susilowati, L. 2017. Tanggung Jawab, Keadilan, dan Kebenaran Akuntansi Syariah. *An-Nisbah*, 3(2): 296-320.
- Umahmudah, N., S. Dwita. dan N. H. Y. 2019. Pengaruh Budaya dan Religiusitas terhadap Keputusan Akuntan (Studi Eksperimentasi Semu pada Mahasiswa Akuntansi di Kota Padang dan Madura). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(2): 627-645.

- Wati, K. D., N. T. Herawati dan N. K. Sinarwati. 2014. Pengaruh Kompetensi SDM, Penerapan SAP, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1*, 2(1): 1-11.
- Ratifah, I dan Ridwan, M. 2012. Komitmen Organisasi Memoderasi Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan, *Trikonomika*, 11 (1): 29-39.
- Rahmadieni, R. Y. 2019. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Syariah Baitul Maal Wa Tamwil di Kabupaten Wonogiri. *Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah*, 3(2): 128-139.
- Wijaya, I. F. 2014. Persepsi User Muslim terhadap Tujuan Pelaporan Keuangan Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Ekonomi Manajemen & Akuntansi*, 12(2): 49-58.
- Badudu, JS dan S. M. Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), 944.
- Kasim, N., H. S., Sulaiman. 2009. Ahriah Auditing ini Islamic Financial Institutions: Exploring the gap between the “desired” and the “actual”. *Global Economy & Finance Journal*, 2(2): 127-137.
- Khoiron Rosyadi, K. *Pendidikan Profetik*, Cet.1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 114.
- Bangsawan, M. I. 2017. Eksistensi Ekonomi Islam (Studi tentang Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia). *Jurnal Law and Justice*, 2(1): 1-11.
- Kurrohman, T. 2017. Peran Dewan Pengawas Syariah terhadap Syariah Compliance pada Perbankan Syariah. *Jurnal Surya Kencana Satu*, 8(2): 1-13.
- Nuha, G. A. 2017. Review Audit dengan Perspektif Syariah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Indonesia*, 2(2): 1-11.
- Mardiyah, Q. dan S. Mardian. 2015. Praktik Audit Syariah di Lembaga Keuangan Syariah. *Akuntabilitas*, 7(1): 1-17.

- Nugraheni, P. 2012. Review Audit Perspektif Syariah. *JIAI (Jurnal Ilmiah Akuntansi Indonesia)*, 2(2): 2650-5432.
- Wardayati, S. M dan Wahid, A. M. A. 2016. Pandangan Institusi Keuangan Islam terhadap Audit Syariah. *Fenomena*, 8(2): 111-126.
- Mardian, S. 2015. Tingkat Kepatuhan Syariah di Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 3(1): 57-68.
- Minarni. 2013. Konsep, Pengawasan, Kerangka Audit Syariah, dan Tata Kelola Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Ekonomi Islam*, 6(1): 28-40.
- Aprilianto, B., A. Roziq, A. T. Agustini, dan Y. Sayekti. 2017. Praktik Audit Syariah dalam perspektif Internasional. *Prosiding Seminar Nasional dan Call For Paper Ekonomi dan Bisnis*. Hal: 169:178.
- Asmarani, M., dan R. Kusumaningtyas. 2019. Akuntabilitas Lembaga Amil Zakat dalam Perspektif Maqashid Syariah: Studi pada Yayasan Dana Sosial Al Falah Surabaya. *Jurnal Akuntansi Unesa*, 8(1): 1-11.
- Triyuwono, I. 2012. Pengaturan dan Pengawasan pada Bank Syariah. *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 2(1): 1-20.
- Yaacob, H. (2012). Issues and challenges of Shari'ah audit in Islamic financial institution: A contemporary view. In *3rd International Conference on Business and Economic Research (3rd ICBER 2012)*. Bandung: www.internationalconference.com.my.
- Prajitno, S. 2012. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Akuntan Publik di Jakarta. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 14(3): 181-192.
- Murty, W. Aprilia, dan Hudiwinarsih Gunasti. 2012. Pengaruh Kompensasi, Motivasi dan Komitemen Organisasional terhadap Kinerja Karyawan Bagian Akuntansi. *Jurnal STIE Perbanas*, 2 (2):215-228.
- Risqifani dan Suwarno, 2018. Persepsi Akuntan dan Ulama' terhadap Problematika Etika Profesi Akuntan Publik

- Perspektif Islam. *Journal of Islamic Accounting and Tax*.1(2):119-133.
- Kusumaningtyas, D dan M. Solikah. 2016. Pengaruh Etika Profesi Akuntan terhadap Perilaku Tidak Etis di Lembaga Keuangan Syariah. *Syariah Paper Accounting FEB UMS*.
- Novianty, L dan H. Gunawan. 2010. Pengaruh Etika Kerja Islam dan Etika Bisnis terhadap Komitmen Organisasi dengan Komitmen Profesi sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Manajemen Teori dan Terapan*.(2):170-188.
- Djasuli, M dan G. A. Harwida. 2011. Etos Kerja Spiritual sebagai Moderator Hubungan Antara Motivasi Kerja dengan Kinerja Pegawai Negeri Sipil. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*.3(2).
- Haniffa, R. 2010. Auditing Islamic financial institutions. In *Islamic finance: Instruments and Markets*. Bloomsbury, London: QFinance.

SHOULD ISLAMIC ACCOUNTING STANDARD FOLLOW TO IFRS

A. Pendahuluan

Akuntansi bisa membentuk dan dibentuk oleh lingkungan di mana akuntansi tersebut dikembangkan. Akuntansi yang berkembang saat ini adalah bentukan dari ideologi kapitalisme. Kapitalisme lahir dari nilai rasional, nilai kebebasan, dan nilai materi dengan paham yang menganggap kemakmuran masyarakat hanya akan dapat diperoleh jika kegiatan produksi diserahkan kepada tiap individu dengan memberi keleluasaan tanpa batas untuk pengelolaan sumber daya yang akan digunakan dalam mencapai tujuan.

Islam sebagai ideologi yang berbeda diperlukan sebagai pembanding yang diharapkan dapat memenuhi tuntutan masyarakat akan akuntansi yang memiliki nilai keadilan dan kebenaran bagi *stakeholders*. Akuntansi sebagai suatu produk budaya dalam perkembangannya dijiwai oleh ideologi dimana akuntansi ditumbuhkan. Sehingga nilai-nilai yang melekat dalam akuntansi tersebut merupakan pencerminan dari balutan ideologi yang mendasari konsep-konsep yang dipakainya.

Triuwono dalam seminar nasional Ekonomi Islam di Semarang mengungkapkan: "Bila akuntansi dilahirkan dalam lingkungan kapitalis, maka informasi yang disampaikan mengandung nilai-nilai kapitalis. Kemudian keputusan dan tindakan ekonomi yang diambil seseorang yang berdasarkan pada informasi ini juga mengandung nilai-nilai kapitalis. Akhirnya realitas yang diciptakan adalah realitas kapitalistik. Singkatnya, informasi akuntansi yang kapitalistik akan membentuk jaringan kapitalistik. Jaringan kuasa inilah yang akhirnya mengikat dan memilih manusia dalam kapitalisme (Fakhrudin, 2008). Belkoui (1999) secara tegas mengungkapkan bahwa akuntansi keuangan

konvensional menitikberatkan pada akibat transaksi dua atau lebih kesatuan ekonomi. Hal tersebut mendorong timbulnya keresahan dan ketidakpercayaan masyarakat sebagai pemakai laporan keuangan terhadap informasi yang disampaikan manajemen perusahaan dalam laporan keuangan.

Akuntansi yang dibentuk oleh lingkungannya (dalam hal ini ideologi) akan dapat mempengaruhi jiwa dan alur pikir dari akuntansi. Menurut Belkaoui (1999) akuntansi bisa dianggap sebagai suatu ideologi, karena akuntansi dinilai telah menopang atau sebagai sub sistem dari ideologi kapitalisme yang mengutamakan kepentingan pihak pemilik modal (Harahap, 2001). Berdasarkan kriteria di atas Belkaoui (1985) menjelaskan pendapat Karl Marx bahwa akuntansi ini adalah merupakan bagian dari ideologi kapitalis. Hayashi (1989) dalam Harahap (2001), dalam tesisnya yang berjudul "On Islamic Accounting" menjelaskan :

"Akuntansi konvensional memiliki sifat yang dibuat sendiri dengan berpedoman pada filsafat kapitalisme. Sifat-sifat akuntansi barat ini menurut dia kehilangan arah bila dihubungkan dengan etika, sosial, dan bebas nilai (*value free*)."

Harahap (2001) dengan meminjam teori " Colonial Model " yang diungkapkan oleh Gambling, ia merancang model kemunculan akuntansi Islam yang dimulai dari keberadaan masyarakat Islam, kemudian akan memunculkan ekonomi Islam dan akuntansi Islam, dari sini akan dilahirkan praktik akuntansi Islam. Namun realitas yang ada, sekarang masyarakat yang secara penuh menggunakan konsep syariah tidak ada, sehingga yang terjadi adalah akuntansinya pun campuran. Oleh karena itu dalam kondisi saat ini adalah bagaimana menjaga kemurnian dan dalam prakteknya bagaimana kita mengambil konsep yang sesuai dengan nilai islami dan membuang yang bertentangan.

Menghadapi permasalahan ini perlu dibuatnya standar akuntansi yang berbeda untuk akuntansi syariah berbasis Islam. Adanya kebutuhan rasionalitas kerangka konseptual akuntansi syariah yang lebih baik lagi ini mendorong terbentuknya Standar Akuntansi Syariah. Enam standar terkait dengan akuntansi syariah yang telah diterbitkan oleh IAI (Ikatan Akuntan

Indonesia), yaitu PSAK 101 (penyajian dan pengungkapan laporan keuangan entitas syariah), PSAK 102 (*murabahah*), PSAK 103 (*salam*), PSAK 104 (*istishna*), PSAK 105 (*mudharabah*) dan PSAK 106 (*musyarakah*). Tetapi adanya standar-standar Akuntansi Syariah masih belum juga dapat membuat pihak-pihak yang berkepentingan merasa cukup terselesaikan permasalahannya.

Menurut (Hasyshi:1986; Bydoun dan Willet, 2000 serta Harahap; 2001) akuntansi syariah dapat dipandang sebagai konstruksi sosial masyarakat Islam agar dapat diterapkan ekonomi sosial dalam kegiatan ekonomi. Akuntansi syariah merupakan sub sistem dari sistem ekonomi dan keuangan Islam yang dipakai sebagai alat pendukung nilai-nilai Islami dalam ranah akuntansi yang berfungsi sebagai alat manajemen yang menyediakan informasi keuangan kepada pihak eksternal dan internal.

International Accounting Standards Board (IASB) berdiri pada tahun 2001 untuk mengembangkan *International Financial Reporting Standards* (IFRS), IFRS didirikan pada tahun 2003, dimana setidaknya 19 negara membutuhkan kepatuhan dengan standar internasional. Setahun kemudian, negara-negara Uni Eropa (UE) berkomitmen untuk mewajibkan IFRS pada semua perusahaan yang terdaftar di yurisdiksi, dan mulai aktif pada tahun 2005. Saat itu, hampir 70 negara (termasuk negara UE) telah memandatkan IFRS untuk semua perusahaan yang terdaftar. Pada tahun 2007, setidaknya 40 negara terus membutuhkan standar akuntansi, negara tersebut mencakup Brasil, Kanada, Cina, Jepang, India dan Amerika Serikat (Ramanna & Sletten, 2009). Munculnya IFRS di suatu negara akibat tuntutan globalisasi yang mengharuskan para pelaku bisnis di suatu negara ikut serta dalam bisnis lintas negara (Dewanti, 2015).

Perluasannya suatu standar internasional yang berlaku sama disemua negara untuk mempermudah proses rekonsiliasi bisnis. Dengan adanya pasar modal dituntut adanya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang seragam sehingga dapat diterima oleh banyak negara guna mendukung kegiatan ekonomi terutama investasi dan perdagangan lintas negara. IFRS memiliki tujuan mengembangkan dan mendorong penggunaan standar akuntansi yang memiliki kualitas tinggi, dapat dipahami serta dibandingkan (Patralalita & Juliarto, 2014).

Banyak upaya telah dilakukan dalam mendirikan standar akuntansi Islam di beberapa negara Muslim. Oleh karena itu, pengembangan banyak lembaga keuangan Islam di seluruh dunia, diperlukan untuk standardisasi akuntansi mereka agar dapat dibandingkan dan memenuhi kriteria keseragaman. Organisasi akuntansi dan audit untuk lembaga keuangan Islam (AAOIFI) sebagai badan akuntan hukum di daerah ini tidak memiliki kewenangan untuk menegakkan negara-negara muslim dan lainnya untuk mengikuti standar mereka (Ainley, 1997).

Di sisi lain, AAOIFI harus belajar dari (Dewan standar akuntansi keuangan) pengalaman FASB dalam mendirikan kerangka konseptual dengan mengevaluasi tujuan pertama dan menerima tanggapan untuk merekonstruksi kerangka kerja. Namun, FASB masih memiliki beberapa masalah mengenai masalah ini karena definisi tidak jelas istilah akuntansi (Dopuch & Sunder, 1980; Miller, 1990), ketidaklengkapan (Agrawal, 1987) dan inkonsistensi dengan beberapa standar akuntansi (Lane & Terry, 1990). Saat ini, untuk memecahkan divergensi standar akuntansi, beberapa negara mencoba untuk mengadopsi satu standar, *International Financial Reporting Standard* (IFRS). Kecenderungan konvergensi IFRS telah mengangkat masalah baru selain beberapa kompleksitas mungkin masih ada (Jermakowicz & Gornik-Tomaszewski, 2006).

Saat ini, topik akuntansi dan keuangan Islam merangsang keingintahuan profesional dari banyak peneliti, yang akibatnya saya ingin lebih mendalam meneliti tentang topik ini, dengan ini tujuan penelitian ini meliputi: pertama, memberikan sinopsis tentang IFRS dan perkembangannya; kedua, mendeskripsikan tentang standar akuntansi Islam, termasuk AAOIFI; ketiga, menjelaskan tentang upaya untuk adopsi IFRSs di berbagai negara Islam. Namun, batas penelitian yang signifikan dan melampaui Aksesibilitas untuk sumber data primer atau hambatan linguistik dan referensi. Tujuan keempat, untuk mengamati suksesi proses covergensi IFRS kedalam PSAK Syariah dan tujuan kelima, menjelaskan pendekatan nilai-nilai keislaman dalam konvergensi IFRS.

B. IFRS (*International Financial Reporting Standard*)

International Accounting Standards Board (IASB) berdiri pada tahun 2001 untuk mengembangkan *International Financial Reporting Standards* (IFRS), IFRS didirikan pada tahun 2003, dimana setidaknya 19 negara membutuhkan kepatuhan dengan standar internasional. Setahun kemudian, negara-negara Uni Eropa (UE) berkomitmen untuk mewajibkan IFRS pada semua perusahaan yang terdaftar di yurisdiksi, dan mulai aktif pada tahun 2005. Saat itu, hampir 70 negara (termasuk negara UE) telah memandatkan IFRS untuk semua perusahaan yang terdaftar. Pada tahun 2007, setidaknya 40 negara terus membutuhkan standar akuntansi, negara tersebut mencakup Brasil, Kanada, Cina, Jepang, India dan Amerika Serikat (Ramanna & Sletten, 2009). Munculnya IFRS di suatu negara akibat tuntutan globalisasi yang mengharuskan para pelaku bisnis di suatu negara ikut serta dalam bisnis lintas negara (Dewanti, 2015).

Untuk itu diperlukan suatu standar internasional yang berlaku sama di semua negara untuk mempermudah proses rekonsiliasi bisnis. Dengan adanya pasar modal dituntut adanya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang seragam sehingga dapat diterima oleh banyak negara guna mendukung kegiatan ekonomi terutama investasi dan perdagangan lintas negara. IFRS memiliki tujuan mengembangkan dan mendorong penggunaan standar akuntansi yang memiliki kualitas tinggi, dapat dipahami serta dibandingkan (Patralalita & Juliarto, 2014).

Dewan Standar Akuntansi Internasional (IASB) adalah organisasi swasta lingkup internasional yang didirikan pada tahun 1973 dan berkantor pusat di London. Ini telah mengeluarkan seperangkat standar yang akan digunakan ketika menyiapkan laporan keuangan, yaitu Standar Akuntansi Internasional (IAS) dan 13 Standar Pelaporan Keuangan Internasional (IFRS). IAS adalah standar yang dikeluarkan oleh IASB pada tahun 2001 dan IFRS adalah standar yang dikeluarkan setelah tahun itu. Namun demikian, saat ini, ekspresi IFRS biasanya digunakan sendiri untuk menetapkan seperangkat aturan ini (IAS dan IFRS) (Warsono, 2011). Jumlah negara yang mengizinkan dan / atau mengharuskan adopsi IFRS ketika menyiapkan laporan keuangan telah meningkat selama beberapa tahun terakhir.

Tahun 2005 telah menjadi tonggak yang sangat penting dalam hal adopsi IFRS wajib, karena ini adalah tahun di mana terjadi di Uni Eropa dan Australia (Ramdani, 2017). Peraturan EU 1606/2002 menetapkan bahwa semua perusahaan yang terdaftar di bursa saham di negara Uni Eropa manapun mulai bersiap, mulai dari periode akuntansi yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2005, laporan keuangan konsolidasian mereka sesuai dengan IFRS, disetujui oleh Komisi Uni Eropa (Lourenço & Branco, 2015).

Menurut *International Accounting Standard Board* (IASB) hingga tahun 2017 telah tercatat sekitar 149 negara di seluruh dunia yang telah mengadopsi IFRS (Ramdani, 2017). Dari 149 Negara sekitar 27 negara muslim yang telah mengadopsi IFRS, baik yang mengadopsi seluruhnya ataupun yang hanya mengacu pada IFRS tertentu. Negara yang mengadopsi IFRS berkisar sekitar 149 negara, dimana terdapat 18% atau sekitar 27 negara muslim yang telah menerapkan dan mengadopsi IFRS sebagai standar pelaporan keuangan. Negara Islam seperti Afganistan, Albania, Iraq, Ireland, Kuwait dan Syiria merupakan negara yang mengadopsi IFRS secara penuh, namun sebagian negara Islam seperti Egypt standar IFRS tidak diizinkan, IFRS diizinkan hanya untuk listing oleh perusahaan asing.

Dahawy & Conover (2007) berpendapat bahwa penerapan IFRS di Mesir menciptakan resistensi (ketidaksiapan akan suatu perubahan) yang tercermin dalam seluruh persyaratan standar IFRS. Selain negara muslim di Mesir, Indonesia pun menjadi salah satu negara muslim yang mengadopsi IFRS, dalam proses adopsi IFRS di Indonesia terdapat perbedaan standar yang terletak pada SAK ETAP, selain standar SAK ETAP standar untuk mengatur lembaga *non-profit* juga masih belum diterapkan karena terdapat perbedaan standar yang diterapkan di negara Indonesia (Dewanti, 2015).

Permasalahan pro kontra standar akuntansi syariah terhadap IFRS yang mencakup transaksi keuangan syariah adalah berkembangnya sistem akuntansi syariah yang dilatar belakangi oleh banyaknya transaksi keuangan dengan dasar syariah. Transaksi keuangan syariah terbentur oleh permasalahan *basic accrual* dan kas yang syariah. Seperti dalam sistem akuntansi konvensional berbasis *accrual* mengakui adanya pendapatan yang

terjadi di masa yang akan datang. Sedangkan dalam syariah Islam mengakui suatu pendapatan yang sifatnya belum pasti adalah dilarang (Mariyam, 2014).

Adapun Perdebatan terkait relevansi IFRS dengan negara-negara berkembangpun tidak relevan jika negara-negara mengejar satu set standar akuntansi global untuk memungkinkan mereka bersaing secara global dan diterima di komunitas Internasional. Oleh karena itu, negara-negara yang telah mengadopsi IFRS cenderung berfokus pada hambatan dan tantangannya (Abdullah & Sapiei, 2013). Argument White, menyatakan bahwa standar akuntansi internasional saat ini tidak dapat mengakomodasi agama Islam. Sebagaimana Islam menekankan kewajiban individu kepada masyarakat dan bukan hak individu, tidak seperti sistem akuntansi barat yang hanya berfokus kepada pemilik entitas (Mukhlisin, 2017). Miazee (2014) berpendapat bahwa sifat pengadopsian IFRS di Bangladesh didorong oleh tekanan yang diberikan oleh Bank Dunia, sehingga sifat adopsi IFRS di negara Bangladesh tidak demokratis serta menciptakan dan meningkatkan konflik diantara berbagai pemakainya.

Proses awal yang dilalui IASB dimulai dengan meminta anggota staff untuk mengidentifikasi serta mengangkat isu yang harus mendapat perhatian IASB, kemudian dilanjutkan dengan melakukan public meeting untuk memutuskan apakah akan melakukan proyek baru atas isu terkait serta konsultasi dengan SAC terkait prioritas mana yang harus dilakukan. Tahap selanjutnya IASB akan memutuskan untuk menangani proyek tersebut atau melakukannya dengan organisasi, standar *setter* lain akan mengeluarkan *discussion paper* sebagai publikasi yang pertama jika *discussion paper* tidak dikeluarkan maka akan ada penjelasan dari IAS terkait hal tersebut. Penyusunan dan publikasi atas *exposure draft* IAS/IFRS dilampirkan dari hasil konsultasi dengan SAC, *working group*, organisasi *standard setter* lain dan komentar dari sesi sosialisasi.

Setelah penyusunan *exposure draft* yang dilalui sebelumnya tahapan selanjutnya berlanjut pada proses untuk mengetahui kesepakatan atas draft IFRS atau IAS apakah dapat tercapai atau tidak. Jika draft tersebut diterima minimal harus memperoleh persetujuan dari sembilan anggota IASB, kemudian IASB akan mengeluarkan draft IAS/IFRS dengan *dissenting opinion* untuk

dikomentari oleh masyarakat. IASB akan melakukan *review* atas komentar yang diperoleh melalui kunjungan lapangan, *public hearing*, dan *round table meeting*, tahap terakhir IASB akan melakukan pengesahan atas draft IAS/IFRS tersebut. Namun apabila persetujuan atas draft IAS/IFRS tidak diterima atau ditolak maka tidak akan dikeluarkannya IAS/IFRS (Purba, 2010).

Namun dibalik banyaknya sisi positif penerapan IFRS, Terdapat beberapa kendala yang menjadi penghambat penerapan IFRS sebagai standar akuntansi dan pelaporan keuangan di dunia hingga saat ini. Kendala tersebut berkaitan dengan faktor berikut : 1.) Sistem hukum dan politik, 2.) Sistem perpajakan dan fiskal, 3.) Nilai - nilai budaya korporasi, 4.) Sistem pasar modal dan peraturan terkait dengan kepemilikan korporasi, 5.) Kondisi ekonomi dan aktivitas bisnis, 6.) Teknologi. Keenam faktor tersebut telah memberikan warna dan ciri khas dari masing-masing sistem akuntansi dan pelaporan keuangan di seluruh dunia (Purba, 2010).

Penjelasan terkait IFRS dengan menyatakan bahwa IFRS yang berbasis prinsip berbeda dengan pengembangan standar sebelumnya yaitu GAAP yang lebih berbasis aturan (*rules*). Untuk kemudahan dalam membedakan antara berbasis prinsip dan berbasis aturan, Kieso *et al.* (2011) menyatakan bahwa standar yang berbasis prinsip pengembangannya akan lebih ringkas karena standar diterbitkannya berbentuk tuntutan (*guidance*), sedangkan pengembangan standar berbasis aturan pada dasarnya lebih detail (Warsono, 2011). Pernyataan terkait standar berbasis prinsip dan aturan dapat pula dinyatakan bahwa, IFRS telah berfokus pada prinsip umum yang diturunkan dari kerangka konseptual, sedangkan GAAP cenderung pada aspek perhitungan.

Standar pelaporan keuangan internasional & standar akuntansi internasional: IFRS mencakup sejumlah prinsip akuntansi, termasuk substansi atas formulir, nilai waktu uang, nilai wajar, dan probabilitas. Hal ini berdampak signifikan pada transaksi keuangan Syariah. Bagian ini ulasan IFRS dan IAS tertentu yang menjadi perhatian untuk mencatat transaksi keuangan Syariah. Hal ini juga dicatat bahwa *setter* standar lokal seperti MASB dan standar internasional *setter* seperti IASB dan AAOIFI telah mengadopsi berbagai pendekatan yang berkaitan dengan akuntansi dan pelaporan transaksi keuangan Islam,

seperti yang tercermin dalam masing-masing standar dan pedoman.

Standar akuntansi dikembangkan berdasarkan prinsip akuntansi yang diterima secara umum (PABU) yang pada dasarnya mencakup konsep akuntansi fundamental. The GAAP termasuk konsep seperti: biaya *historis*, konservatisme, akrual dan pencocokan, substansi atas bentuk, akan perhatian, pengukuran moneter, nilai waktu uang, nilai wajar, probabilitas, materialitas dan konsistensi . Hal ini juga mencakup konsep yang berhubungan dengan aspek pengakuan dan pengukuran transaksi akuntansi. Prinsip ini membentuk dasar konstruksi kerangka kerja konseptual dan standar akuntansi yang dikembangkan oleh IASB. IASB menekankan pentingnya memiliki kerangka kerja konseptual yang akan membantu dalam harmonisasi peraturan, standar dan prosedur akuntansi yang berhubungan dengan penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Pada saat ini, IASB telah menerbitkan sembilan IFRS dan dua puluh sembilan IAS yang diterbitkan di situs web Yayasan IFRS.

C. *Islamic Accounting Standards*

Dalam surah al-Baqarah ayat 282, Allah memerintahkan untuk melakukan penulisan secara benar atas segala transaksi yang pernah terjadi selama melakukan muamalah. Dari hasil penulisan tersebut dapat digunakan sebagai informasi untuk menentukan apa yang akan diperbuat oleh seseorang. Sehubungan dengan ini, beberapa definisi akuntansi dapat disajikan di sini, di antaranya (Muhammad, 2005) :

- 1) Menurut Littleton, tujuan utama dari akuntansi adalah untuk melaksanakan perhitungan periodik antara biaya (usaha) dan hasil (prestasi). Konsep ini merupakan inti dari teori akuntansi dan merupakan ukuran yang dijadikan sebagai rujukan dalam mempelajari akuntansi;
- 2) APB (*Accounting Principle Board*) *Statement* N0.4 mendefinisikan sebagai berikut: “akuntansi adalah suatu kegiatan jasa. Fungsinya adalah memberikan informasi kuantitatif, umumnya dalam ukuran uang, mengenai suatu badan ekonomi yang dimaksudkan untuk digunakan dalam pengertian keputusan ekonomi, yang digunakan dalam memilih di antara beberapa alternatif”;

- 3) AICPA (*American Institued of Certified Public Accountant*, 2006) mendefinisikan sebagai berikut: "akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dan dalam ukuran moneter, transaksi, dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan dan termasuk penafsiran hasil-hasilnya"
- 4) Dalam buku *A Statement of Basic Accounting Theory* (Muhammad, 2005) dinyatakan bahwa akuntansi adalah "proses mengidentifikasi mengukur, dan menyampaikan informasi ekonomi sebagai bahan informasi dalam hal pertimbangan dalam mengambil kesimpulan oleh para pemakainya".

Ada makna yang berbeda dari akuntansi Islam. Pertama, hal ini dapat dipahami dalam arti religius ketika aturan akuntansi dipengaruhi oleh dogma agama. Kedua, label akuntansi Islam dapat diterapkan ke negara-negeri di mana Islam telah menjadi agama yang dominan pada saat tertentu dalam waktu. Mengingat ini komentar terakhir, kita harus menyebutkan bahwa pengaruh agama ini pada aturan akuntansi nasional mungkin berbeda jauh dari satu negara ke yang lain. Untuk waktu yang lama bukti sejarah akuntansi Islam tersedia dalam bahasa Inggris, tipis dan terutama didasarkan pada beberapa sumber sekunder. Baru-baru ini, teknologi modern dan alat komunikasi memungkinkan eksplorasi catatan utama.

Pada awalnya, klasifikasi akuntansi internasional tidak menyebutkan banyak negara Islam, menunjukkan sedikit minat dalam membandingkan negara ini di antara mereka atau dengan yurisdiksi lain di dunia. Mueller (1968) dalam klasifikasi kedua berpendapat bahwa lingkungan bisnis yang berbeda membutuhkan sistem akuntansi yang berbeda dan yang paling dekat ia sampai ke negara-negara Islam adalah referensi ke kelompok yang diwakili oleh "negara-negara berkembang di dekat dan Timur jauh", yang mungkin memerlukan sistem akuntansi standar. Ide ini telah berkali-kali disampaikan oleh literatur modern karena Islam terlihat berbeda dari negara Barat, sehingga harus memiliki sistem akuntansi sendiri (Lihat di perjudian & Karim, 1986). Nair & Frank's (1980:429) *classification using clustering includes, for example, Pakistan in the British Commonwealth model*; Sedangkan Doupnik & Salter (1993), dalam pengujian klasifikasi

Nobes (1983), menyarankan model umum tentang penyebab perbedaan akuntansi, berpose 10 variabel, dan termasuk dalam studi sekelompok negara Arab.

The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions /Organisasi akuntansi dan audit untuk lembaga keuangan Islam (AAOIFI) adalah badan pengaturan standar yang berbasis di Bahrain. Bidang yang diminati AAOIFI meliputi akuntansi, audit, tata kelola, etika dan standar Syariah untuk lembaga keuangan dan industri Islam. AAOIFI didukung oleh anggota kelembagaan (200 anggota dari 45 negara, sejauh ini) termasuk bank sentral, lembaga keuangan Islam, dan peserta lainnya dari perbankan Islam internasional dan industri keuangan, di seluruh dunia. Meskipun standar AAOIFI tidak wajib; telah berhasil mempromosikan standarnya ke negara Islam (Kerajaan Bahrain, Dubai *International Financial Centre*, Jordan, Lebanon, Qatar, Sudan dan Suriah).

Selain itu, otoritas yang relevan di Australia, Indonesia, Malaysia, Pakistan, Arab Saudi, dan Afrika Selatan telah mengeluarkan pedoman yang didasarkan pada standar AAOIFI dan pernyataan. Sebagai contoh, Indonesia berencana untuk saat ini mempertahankan GAAP Nasional (standar akuntansi keuangan Indonesia, IFAS) dan konversinya secara bertahap dengan IFRS. Namun, sejak '70, Indonesia terus mengembangkan pedoman untuk sektor perbankan Syariah dan transaksi Syariah berdasarkan standar AAOIFI dan peraturan Islam setempat lainnya (fatwa Dewan Indonesia Ulemas; Kerangka kerja konseptual untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan untuk transaksi Syariah).

D. Konvergensi Akuntansi Syariah terhadap IFRS

Kehadiran ekonomi Islam ini merupakan suatu langkah yang digunakan untuk melepaskan diri dari jeratan kapitalisme dan sosialisme, menurut (Damayanti,2007). Dua sumber utama konsep ekonomi syariah berporos pada al-Qur'an dan hadis. Ironisnya, kedua hukum Islam tersebut tidak pernah benar-benar digunakan sebagai landasan dalam merumuskan konsep epistemologis ekonomi Islam itu sendiri melainkan fiqh yang "sekedar" rasionalisasi kreatif ulama yang dijadikan sebagai acuan utamanya.

Oleh karenanya, ekonomi Islam banyak mengadopsi begitu saja teori-teori yang ada dalam ekonomi konvensional dengan melakukan penyesuaian atau dipaksakan dengan melakukan sedikit penyesuaian atau dipaksakan agar sesuai dengan ayat atau hadis tertentu. Jika memang ada ayat atau hadis yang dijadikan sebagai suatu landasan syariah bagi suatu model transaksi ekonomi syariah, pengaturan yang berbasis sistematis dan kritis yang memenuhi prinsip-prinsip interpretasi yang valid tidak dilakukan terlebih dahulu. Dampak nyatanya adalah, bahwa penerapan ekonomi yang disebut syariah merupakan suatu kumpulan teori ekonomi konvensional yang disajikan seolah-olah berdalil al-Qur'an dan as-Sunnah. Metodologi akuntansi syariah yang sedang berkembang dewasa ini terbagi menjadi dua kubu yang memiliki pendekatan yang berbeda dalam merumuskan akuntansi syariah. Menurut Suwiknyo (2007) kubu yang pertama merupakan kubu yang berusaha keras menerapkan akuntansi syariah dari ajaran syariat Islam yang dijadikan sebagai pedoman. Kubu yang kedua dalam menerapkannya masih berlandaskan banyak pada akuntansi konvensional, sedangkan prinsip murni ajaran syariah hanya dijadikan sebagai pelengkap nama "syariah" saja.

Faktanya, aspek-aspek akuntansi konvensional tidak dapat diterapkan pada lembaga yang menggunakan prinsip-prinsip Islam baik dari implikasi akuntansi maupun akibat ekonomi, menurut Muhammad (2004). Dalam pendapatnya Gambling dan Karim (1991 dalam IAI, 2008) juga berargumentasi bahwa dalam perspektif Islam konsep *income* ekonomi tidak bias diterapkan karena hal-hal yang tak bisa diterima itu begitu fundamental bagi teori deduktif Barat.

Apabila diambil suatu contoh seperti, model tingkat ekonomi pengembalian modal (*economic rate of return on capital*) yang membentuk basis bagi kalkulasi pendapatan di muka dengan asumsi bahwa uang punya nilai waktu (*Time value for money*), diutarakan oleh Gambling dan Karim dalam pendapatnya sebagai hal yang sangat tidak diperkenankan dalam agama Islam baik dengan alasan apapun. Mengacu pada pendapat ini, bagian dari teori *accounting* deduktif banyak terpengaruh pada teori ekonomi konvensional sangatlah tidak patut diterapkan sebagai

landasan pemikiran untuk menciptakan teori landasan akuntansi Syariah menurut Islam.

Adanya penerapan pendekatan yang mengkomparasikan sasaran-sasaran yang ada dalam akuntansi kontemporer dan akuntansi syariah, apabila tidak sejalan tinggalkan tertuang dalam Majalah Akuntan Indonesia (2008) menurut AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization of Islamic Financial*). Lembaga ini berpendapat bahwa cara itu konsisten dengan prinsip-prinsip Islam lebih luas bahwa suatu pandangan tak selalu memerlukan konsep yang mesti diambil dari Syariah. Dengan demikian, konsep informasi akuntansi berguna, seperti relevansi dan reliabilitas, bisa begitu saja dimasukkan dalam praktek akuntansi Islami oleh AAOIFI. Alternatif pendekatan yang dilakukan AAOIFI ini mungkin bisa digunakan sebagai kunci dalam menghadapi masalah yang terjadi dalam penerapan Akuntansi Syariah di Indonesia, namun fakta yang terjadi sangatlah kompleks permasalahan yang terjadi untuk dapat menyatukan dua hal yang berbeda dengan kerangka konseptual dan landasan yang bertentangan. Untuk itu, dalam menghadapi permasalahan ini perlu dibuatnya standar akuntansi yang berbeda untuk akuntansi syariah berbasis Islam.

Adanya kebutuhan rasionalitas kerangka konseptual akuntansi syariah yang lebih baik lagi ini mendorong terbentuknya Standar Akuntansi Syariah. Enam standar terkait dengan akuntansi syariah yang telah diterbitkan oleh IAI (Ikatan Akuntan Indonesia), yaitu PSAK 101 (penyajian dan pengungkapan laporan keuangan entitas syariah), PSAK 102 (murabahah), PSAK 103 (salam), PSAK 104 (istishna), PSAK 105 (mudharabah) dan PSAK 106 (musyarakah). Sesuai dengan Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah, kerangka dasar ini menyajikan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi para penggunanya.

Tetapi kiranya adanya standar-standar akuntansi syariah masih belum juga dapat membuat pihak-pihak yang berkepentingan merasa cukup terselesaikan permasalahannya. Banyak kebimbangan dan ketakutan yang masih membayangi pengngaplikasian akuntansi syariah berbasis Islam ini. Belum juga masalah ini terselesaikan, akuntansi syariah juga dihadapkan dengan permasalahan kompleks seputar konvergensi *International*

Financial Reporting Standards (IFRS) pada standar akuntansi Indonesia.

Hingga saat ini Indonesia masih terus melakukan proses sinkronisasi dalam hal konvergensi kepada IFRS (Dewanti, 2015). Akan tetapi, terdapat beberapa perbedaan standar di Indonesia dengan IFRS. Perbedaan tersebut terdapat pada SAK ETAP dan standar untuk *non profit*, perbedaan tersebut terjadi akibat adanya perbedaan kondisi yang memerlukan adanya standar tambahan yang mampu mengatur kondisi tersebut.

Penelitian Maulana & Mukhlisin (2011) menunjukkan bahwa publikasi laporan keuangan 2012 oleh perusahaan yang menerapkan PSAK revisi IAS tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *Trading Volume Activity* (TVA) dalam perusahaan tersebut. Dengan adanya konvergensi IFRS di Indonesia diharapkan mampu mengurangi tingkat kerumitan perusahaan multinasional dalam menyusun laporan keuangan serta IFRS dapat menjadi solusi dalam hal bisnis yang berbentuk multinasional dan lintas pasar modal. Namun, meski ada beberapa standar IFRS yang tidak digunakan di negara Indonesia karena tidak sesuai atau bertentangan dengan prinsip standar yang harus digunakan, Indonesia tetap termasuk sebagai salah satu negara yang cukup tinggi patuh dalam hal adopsi IFRS.

Masalah Syariah dalam IFRS dan IAS tertentu: salah satu penelitian penting tentang penerapan IFRS terhadap transaksi keuangan syariah dilakukan oleh *Asian Oceanian Standard-Setters Group* (AOSSG). Ini adalah pengelompokan standar akuntansi-setter di wilayah *Asian Oceanian* membahas masalah dan berbagi pengalaman pada adopsi IFRS. Tujuan dari kelompok kerja ini adalah untuk memfasilitasi pertimbangan dan penerapan IFRS oleh anggota AOSSG dengan memberikan masukan dan masukan kepada IASB atas kecukupan dan kelayakan usulan dan kegiatan IFRS yang ada untuk transaksi dan peristiwa keuangan Syariah

AOSSG membahas masalah akuntansi terkait transaksi keuangan Islam dalam kerangka kerja IFRS. Dalam perspektif membahas isu penting harmonisasi pelaporan keuangan, studi AOSSG sampel pendapat anggota kelompok kerja yang terdiri dari akuntan dari industri keuangan Islam di berbagai yurisdiksi termasuk Indonesia, Pakistan, Arab Saudi dan Malaysia-pada isu yang berkaitan dengan pelaporan keuangan dalam keuangan

Islam. Menurut AOSSG , dua pendekatan utama dapat diadopsi ketika akuntansi untuk transaksi keuangan Islam: (i) melalui seperangkat standar akuntansi Islam yang terpisah; atau (II) dengan mengadaptasi IFRS dengan beberapa modifikasi untuk mengakomodasi prinsip Syariah.

Dalam kaitannya dengan transaksi keuangan Islam, tantangan utama adalah untuk menemukan kerangka kerja akuntansi yang relevan yang akan memungkinkan untuk keterbandingan dengan keuangan konvensional serta keterbandingan internasional tanpa mempengaruhi kepatuhan syariah dari transaksi keuangan syariah. Namun, jika IFRS diterapkan oleh IFIS, ada sejumlah masalah pelaporan yang mungkin timbul. Secara umum, hal ini dipertanyakan apakah standar akuntansi yang ada atau IFRS dapat secara memadai menangani pelaporan transaksi keuangan Islam, atau apakah transaksi begitu unik sehingga beberapa bentuk kerangka kerja akuntansi lainnya akan diperlukan . berbagai penelitian telah melihat kebutuhan dan kesulitan harmonisasi akuntansi tetapi tidak secara khusus menghubungkan ke industri keuangan Islam. Oleh karena itu studi saat ini mencoba untuk mengisi celah ini dengan melihat kemungkinan masalah syariah ketika IFIS menerapkan IFRS untuk merekam transaksi keuangan mereka.

Di antara standar IFRS dan IAS yang dikeluarkan, standar yang berdampak signifikan pada transaksi keuangan syariah adalah: kontrak asuransi IFRS 4; IFRS 7 instrumen keuangan: pengungkapan; IFRS 9 instrumen keuangan; dan IAS 17 *Leases*. Tabel 1 menggambarkan beberapa isu terkait syariah yang mungkin timbul ketika IFRS dan IAS ini diterapkan pada transaksi keuangan Islam. Secara luas, masalah yang berkaitan dengan: definisi Takaful di bawah IFRS 4; pengungkapan risiko suku bunga dalam operasi keuangan syariah di bawah IFRS 7; pengukuran nilai wajar dan tarif diskon yang relevan yang berlaku di bawah IFRS 9; dan perlakuan akuntansi untuk *Ijarah wa Iqtina* (sewa) di bawah IAS 17. Pro kontra standarisasi akuntansi syariah terhadap IFRS yaitu terkait akuntansi transaksi untuk keuangan syariah. Berkembangnya sistem akuntansi syariah dilatar belakangi oleh banyaknya transaksi keuangan dengan dasar syariah, baik yang dilakukan lembaga bisnis syariah maupun non syariah. Hal tersebut menyebabkan perlunya

pengaturan atau standar untuk pencatatan, pengukuran, maupun penyajian sehingga para praktisi dan pengguna keuangan mempunyai standar yang sama dalam akuntansi (IAI,2008).

Transaksi keuangan syariah terbentur oleh permasalahan basis akrual dan kas yang syariah. Menurut Zainulbahar Noor (IAI, 2008) sistem akuntansi konvensional yang berbasis akrual terbukti mengalami banyak kegagalan, terutama mendorong para akuntan lebih jujur dan adil, sehingga dianggap melanggar syariah. Sistem berbasis akrual itu telah mengakui adanya pendapatan yang terjadi di masa yang akan datang, padahal syariah Islam melarang untuk mengakui suatu pendapatan yang sifatnya belum pasti.

Pro dan kontra transaksi keuangan tersebut nampaknya menimbulkan dilema bagi para pembuat standar bukan hanya di Indonesia tapi juga di negara ASEAN yang lain. Menanggapi dilema tersebut *Asean-Oceanic Standard Setter Group* (AOSSG) dalam *Research Paper*-nya tahun 2010 mengatakan bahwa transaksi keuangan Islam banyak menggunakan kontrak, pengaturan, dan dalam bentuk hukum yang sangat berbeda dari banyak transaksi yang biasa, sehingga timbul pertanyaan apakah standar akuntansi yang ada saat ini cukup bisa digunakan untuk transaksi Islam, atau apakah transaksi itu begitu unik sehingga membuat beberapa bentuk lain dari kerangka akuntansi akan diperlukan.

Belum lagi menjawab sebuah pertanyaan apakah standar internasional IFRS ini dapat mengatasi masalah ini atau malah justru semakin membebani teori akuntansi syariah yang diterapkan saat ini. Transaksi keuangan syariah di beberapa negara termasuk Indonesia sendiri diyakini oleh AOSSG (2010, paragraf 14) dapat dipertanggungjawabkan menggunakan IFRS di satu sisi secara umum, namun menurut sisi yang lain ada beberapa orang yang percaya bahwa dibutuhkan standar akuntansi terpisah yang diwajibkan untuk melaporkan transaksi keuangan Islam. Isu-isu penting yang telah dibahas di atas menunjukkan bahwa prinsip akuntansi syariah dan akuntansi konvensional berbeda.

IFRS yang merupakan standar internasional yang mengacu pada akuntansi konvensional nampaknya ada beberapa bagian yang tidak cocok dengan prinsip akuntansi syariah ini. Menurut Muhamad (2005) pada tataran praktis akuntansi syariah adalah

akuntansi yang berorientasi sosial dan pertanggungjawaban, sebab akuntansi syariah dapat menyajikan atau mengungkap dampak sosial perusahaan terhadap masyarakat dan sekaligus menyajikan laporan pertanggungjawaban yang bersifat *humanis, emansipatoris, transcendental* dan *teologikal*. Oleh karena itu, konsep dasar akuntansi syariah adalah bersifat zakat dan amanah. Akuntansi syariah adalah ilmu dan teknologi universal yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan perubahan yang terjadi di dalam lingkungannya, baik sosial, ekonomi, politik, peraturan perundangan, kultur, persepsi dan nilai (masyarakat) tempat akuntansi syariah diterapkan.

Akuntansi syariah adalah akuntansi yang dikembangkan bukan hanya dengan cara tambal sulam terhadap akuntansi konvensional, akan tetapi, merupakan pengembangan filosofis terhadap nilai-nilai Islam yang diturunkan ke dalam pemikiran teoritis dan teknis akuntansi. Berdasarkan hasil tersebut maka bisa dikatakan bahwa konvergensi IFRS terhadap standar akuntansi syariah yang dilakukan di Indonesia tidak akan bisa sempurna seratus persen.

AAOIF dalam hal ini telah memformulasikan alternatif standar akuntansi syariah ini berkaitan dengan konvergensi IFRS ini. AAOIFI dalam formulasinya menyatakan bahwa ketika IFRS tidak bisa diadopsi secara keseluruhan oleh IFI, ketika IASB tidak memiliki IFRS untuk menutupi praktek perbankan syariah dan praktek keuangan syariah, dan ketika IFRS tidak dapat diadopsi maka AAOIFI tidak akan mengembangkan standar atau berkembang dan mengadopsi IFRS. Menurut Khairul Nizam, direktur pengembangan teknis di AAOIFI (dalam Ibrahim, 2009) bahwa kesenjangan dan perbedaan ada dan akan terus ada di antara kedua standar, karena kesenjangan dan perbedaan adalah hasil alami dari struktural tujuan yang berbeda dari IASB dan AAOIFI.

IAI sendiri dalam hal ini juga mengacu pada AAOIFI dalam menanggapi permasalahan konvergensi IFRS ini. IFRS yang ada tidak bisa dipaksakan untuk akuntansi syariah yang memiliki prinsip yang berbeda, seperti yang dikatakan oleh Ibrahim (2009) dalam pendahuluan papernya yaitu "*one size doesn't fit all!*".

E. Pendekatan Nilai-nilai keislaman dalam konvergensi IFRS

Telah ada tanaman penelitian akuntansi Islam sejak tahun 1990 sebagai hasil dari tren Islamisasi di banyak negara Islam selama tahun 1980-an misalnya, di Pakistan, Iran, Sudan dan Malaysia. Menurut Karim (1993), Karim (1995), Harahap (1997), Adnan & Gaffikin (1999), shahul (2000), Triyuwono (1999), dan Baydoun & Willet (2000) akuntansi Islam memperoleh dorongan tambahan ketika perbankan Islam dan keuangan melepas pada awal 1990-an dan menjadi kekuatan dalam milenium baru.

Berbicara tentang Islam, itu adalah agama yang lengkap yang membahas dan memecahkan semua aspek kehidupan manusia dan masalah (termasuk ekonomi, politik, ilmu fisik dan sosial). Padahal, al-Qur'an adalah sebagai pedoman bagi semua orang di dunia, itu dinyatakan dalam (2:2), "ini adalah buku; di dalamnya adalah bimbingan, tentu, tanpa diragukan lagi, kepada mereka yang takut kepada Allah ". Ayat lain yang memiliki arti yang sama dalam (sebagai panduan): 2:97, 120, 185, 3:4, 138, 7:52, 203, 9:33, 12:14, 16:64, 89, 102, 17:9, 22:16, 27:77, 92, 41:44, 45:11, 20. Di sisi lain, Kitab Suci lainnya, misalnya, Taurat diungkapkan kepada Nabi Musa (damai atasnya) juga untuk bimbingan, tetapi untuk sekelompok orang tertentu pada waktu itu (2:53, 5:44, 6:154, 7:154, 28:43, 32 : 23). Hal ini juga untuk buku lain, yang Injiil, yang terungkap kepada nabi Yesus (perdamaian berada di atas dirinya) (5:46).

Dalam korelasi dengan penelitian ini, sebagai seorang Muslim kita harus menggunakan al-Qur'an sebagai pedoman dalam mengembangkan dan menetapkan standar, terutama standar akuntansi. Standar harus berasal dari al-Qur'an karena ini adalah kewajiban kepada seorang Muslim dan itu akan memberikan manfaat bagi semua manusia. Al-Qur'an bisa menjadi tolok ukur berarti bahwa jika sistem telah berubah menjadi sekuler dan bertentangan dengan Islam, itu tidak berarti bahwa kita dapat mengubah tolok ukur. Sistem yang berbeda harus disesuaikan dan didasarkan pada al-Qur'an sebagai tolok ukur.

Al-Qur'an sendiri telah memberikan banyak pendekatan untuk sistem dan kondisi yang berbeda yang sesuai dan didasarkan pada kemampuan manusia. Di sisi lain, sumber lain ensiklopedi (ungkapan Nabi Muhammad saw), ijmak (konsensus

ulama), Qiyas (menemukan peristiwa serupa dari perspektif Islam) dan lain-lain merupakan sumber hukum Islam.

Ada dua pendekatan dalam menetapkan standar akuntansi menurut akuntansi dan audit untuk lembaga keuangan Islam. Pertama, pendekatan langsung yang berarti kita memperoleh konsep dan hakekat standar akuntansi dari sumber Islam. Kedua adalah pendekatan tidak langsung di mana kita mengadopsi konsep yang ada dan hakekat akuntansi kemudian, menguji mereka berdasarkan ajaran Islam. Sebenarnya sebagai Muslim, kita harus mengadopsi pendekatan yang ideal, pendekatan pertama. Entah bagaimana, ada beberapa perspektif yang berbeda mengenai kasus ini. Lebih jauh lagi, akan dibahas kerangka konseptual standar akuntansi Islam dalam konteks Malaysia, ada beberapa argumen Pro dan kontra mengenai pendekatan yang sesuai dengan ajaran Islam. Kemudian, pengembangan standar akuntansi Islam di Malaysia akan dibahas bersama standar pertama yang dikeluarkan terkait dengan tren konvergensi IFRS.

Islam secara harfiah berarti perdamaian, ketaatan kepada Allah di dunia ini dan akhirat. Syari'ah adalah badan hukum Islam yang komprehensif, terutama terkonsentrasi di: al-Qur'an, sunnah (tindakan dan ucapan Nabi Muhammad, yang ditransmisikan melalui tradisi yang dikenal sebagai hadis); dan dua sumber pelengkap *ijtihad/ijma'*: proses shariatik dan konsensus. Aturan ini mewakili pedoman yang diberikan untuk semua aspek kehidupan sehari-hari umat manusia termasuk Bisnis, manajemen dan keuangan.

Mengenai penerapan prinsip Islam untuk akuntansi, ada keyakinan umum dan lama bahwa, menurut al-Qur'an, Allah mengatur bisnis dan akuntansi. Akuntansi Islam dipandang sebagai disiplin terpadu dengan domain sosial, politik, dan ekonomi yang diperintah oleh Allah atau *meta rule*. Akuntansi Islam harus mengatur dan membangun integrasi yang harmonis di antara para pihak dari domain yang beragam ini "(Hayashi, 1989). Hal ini seharusnya untuk memberikan pengungkapan penuh dan akuntabilitas sosial dalam rangka untuk memenuhi permintaan informasi yang wajar sesuai dengan Syariah (Lewis, 2001).

Salah satu lembaga awal untuk mengatur pasar dan mencegah penipuan adalah al-Hisba didirikan pada abad 7 dan 8

untuk "promosi yang baik dan pencegahan kejahatan" (Gambling & Karim, 1991:50). Diantara praktik bisnis Haram dalam Islam, ada riba (bunga kredit), manipulasi, penipuan, transaksi spekulatif, perjudian, ketidakpastian/risiko, gangguan pasar bebas. Bahkan, dua isu yang sangat mempengaruhi perkembangan akuntansi Islam adalah riba dan Zakat (untuk analisa terperinci Lihat Sulaiman, 2003, Iqbal, 2002). Pengaruh riba pada akuntansi Islam terletak pada struktur ekuitas entitas dan pengaruhnya terhadap praktik pengungkapan entitas ini. Di sisi lain, Zakat mempengaruhi metode pengukuran (valuasi).

Sehubungan dengan paralel antara akuntansi konvensional dan Islam, banyak penulis mencoba perbandingan tersebut secara umum atau standar tertentu (Lihat misalnya Baydoun & Willett, 2000; Haniffa & Hudaib, 2001). Menurut mereka, perbedaan utama antara akuntansi konvensional dan Islam harus dilakukan dengan berikut:

- 1) *Conservatism*: menerapkan metode penilaian bijaksana dan menghindari menggunakan dampak yang paling menguntungkan pada pemilik versus paling menguntungkan untuk masyarakat;
- 2) *Ongoing concern*: bisnis berjalan selamanya versus berdasarkan perjanjian kontrak antara pihak;
- 3) *Measuring unit*: nilai moneter versus kuantitas dan berdasarkan moneter (menurut perhitungan Zakat);
- 4) Konsistensi berdasarkan standar/regulasi yang digunakan oleh entitas versus konsistensi dengan hukum Islam;
- 5) *Materiality*: kegunaan pengambilan keputusan versus memenuhi semua tugas di hadapan Allah;
- 6) *Users of financial information*: mengidentifikasi peristiwa dan transaksi ekonomi versus mengidentifikasi peristiwa sosial ekonomi dan keagamaan dan transaksi.

AOSSG (2010) dalam sebuah *research paper* merinci lima belas isu-isu penting akuntansi syariah dalam kaitannya dengan konvergensi IFRS dan mengelompokkan lagi isu-isu penting tersebut menjadi delapan buah berdasarkan tiga lingkup topik yaitu substansi mengungguli bentuk, ukuran probabilitas, dan nilai waktu uang.

- 1) Substansi Mengungguli Bentuk, Kerangka Konseptual IASB menyatakan bahwa substansi mengungguli bentuk merupakan

bagian integral yang mewakili *transaction faithfully*. *Transaction faithfully* berarti bahwa informasi keuangan merupakan substansi sebuah fenomena ekonomi bukan sekedar mewakili bentuk hukumnya. Karim dalam Chariri (2006) mengemukakan sebuah contoh klasik terkait konsep ini, mesin yang disewa oleh perusahaan melalui kontrak *capital lease*. Apabila secara substansi ekonomi memenuhi kriteria sebagai aktiva (seperti diatur dalam standar), maka mesin yang disewa tersebut dapat diakui sebagai harta kekayaan si penyewa dan dilaporkan dalam neraca sebagai harta milik penyewa. Namun demikian dari aspek yuridis mesin tersebut tetap menjadi harta pemilik bukan penyewa. Konsep ini jelas bertentangan dengan konsep pemilikan dalam ajaran Islam. Dalam konsep kepemilikan dalam Islam, Allah adalah pemilik sepenuhnya segala sesuatu (QS Ali Imran: 1). Namun, dalam QS al-Baqarah ayat 29 dijelaskan lebih lanjut bahwa semuanya Allah ciptakan tidak lain untuk manusia. Tidak ada larangan mengakuan harta selama itu sesuai dengan ketentuan Islam. Misalnya melalui *aqad* (transaksi).

- 2) Ukuran Probabilitas, Kerangka Konseptual IASB menyerukan untuk pengakuan aktiva dan kewajiban bila kemungkinan manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke atau dari entitas: Konsep probabilitas digunakan untuk merujuk pada tingkat ketidakpastian bahwa manfaat ekonomi masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke atau dari entitas (Ayat. 4.40). IFRS juga mengakui biaya-biaya tertentu ketika mereka mungkin terjadi. Rosyidi (2012) dalam Tona (2012) berpendapat bahwa akuntansi dalam sudut syariah memiliki prinsip kepastian. Dalam hal akuntansi apa yang terjadi pada saat itu yang diakui bukan setelahnya. Prinsip *ridho* Allah dipegang teguh. Senada dengan itu, Noor dalam Noorlisyati (2007), berpendapat bahwa syariah Islam melarang untuk mengakui suatu pendapatan yang sifatnya belum pasti. Hal ini disebabkan karena masa yang akan datang adalah kekuasaan dan wewenang Allah sepenuhnya untuk mengetahuinya.
- 3) Nilai Waktu Dari Uang, Achsien (2000) dalam Zuhro (2008) berpendapat, konsep *time value of money* atau yang disebut ekonom sebagai *positive time preference* menyebutkan bahwa

nilai komoditi pada saat ini lebih tinggi dibanding nilainya di masa depan. Konsep yang dikembangkan Von Bhom Bawerk dalam *Capital and Interest dan Positive theory of Capital* memang menyebutkan bahwa konsep nilai waktu uang merupakan pola ekonomi yang normal, sistematis, dan rasional. Diskonto dalam teori *time value of money* biasanya didasarkan ataupun tidak berhubungan erat dengan tingkat bunga (interest rate). Banyak Standar IASB menggunakan konsep 'nilai waktu uang'.

Pertanyaan yang kemudian muncul, apakah pantas mencerminkan nilai waktu uang dalam melaporkan transaksi keuangan Islam, bila tidak ada kepentingan yang jelas dibebankan atau dikeluarkan dalam transaksi tersebut. Islam tidak mengenal nilai waktu dari uang karena dalam Islam uang dipandang sebagai alat tukar, bukan komoditi (Zuhro, 2008). Lebih lanjut, Ibnu Taimiyyah dalam Zuhro (2008) mempertimbangan fungsi utama uang sebagai alat tukar, ia menentang perdagangan uang sebab hal itu berarti mengalihkan fungsi uang dari tujuan sebenarnya. Dengan demikian, bunga (riba) pada uang yang dipinjam dan dipinjamkan dilarang. Pernyataan ini juga senada dengan yang dikemukakan oleh Chariri (2006), bunga sama artinya dengan riba, dan riba jelas dilarang dalam Islam. Banyaknya ayat yang menjelaskan tentang bahaya riba mencerminkan betapa pentingnya riba untuk dihindari. Namun, dalam perkembangan sektor syariah di Indonesia banyak pakar ekonomi syariah justru berpendapat bahwa masih terdapat unsur bunga terselubung pada bank syariah. Sebagaimana yang dijelaskan Rahmawaty (2007), dari pengamatan dan penelitian beberapa ilmuwan Islam, bank-bank syaria'ah, dalam penerapan produk-produknya ternyata bukannya meniadakan bunga dan membagi resiko, tetapi tetap mempertahankan praktek pembebanan bunga dengan menggunakan istilah "label Islam".

F. Implementasi di Indonesia dan Negara-Negara Islam Lainnya

Pada database "*web of science*" dalam penelitian sistematis, terkait topik adopsi IFRS dan perhitungan kualitas dari tahun 2007 hingga 2013 hasilnya menunjukkan bahwa kualitas akuntansi tidak dapat di evakuasi hanya dalam hal adopsi IFRS baik secara sukarela maupun wajib, adapun menurut Hussein (2009) adopsi

IFRS inheren dapat memperbaiki tata kelola serta memberikan keuntungan untuk pasar tenaga kerja. Namun meskipun demikian jika karakteristik tersebut ditempatkan di negara yang salah maka akan menimbulkan hal negatif dari investasi asing secara langsung (Herath & Alsulmi, 2017).

Pengadopsian IFRS di seluruh dunia adalah transformasi ekonomi yang signifikan serta memunculkan garis besar penelitian, kebanyakan dari peneliti di beberapa negara untuk mengevaluasi dampak perubahan standar pada kualitas pelaporan keuangan (Lourenço & Branco, 2015). Peningkatan konvergensi IFRS di seluruh negara secara terus menerus diakibatkan oleh keterlibatan pihak asing dan organisasi Internasional yang menyebabkan suatu negara melakukan Konvergensi IFRS (Ramdani, 2017). Untuk mendapatkan legitimasi dari investor asing maka kebanyakan dari negara melakukan sistem *mimetic isomorphsim* dimana suatu negara meniru negara lainnya yang sukses menarik investor dan salah satu upaya tersebut adalah meniru bentuk institusi standar yaitu konvergensi IFRS.

Dengan adanya penerapan standar akuntansi IFRS para investor berharap agar dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan sehingga akan mengurangi asimetri informasi antara perusahaan dan investor (Maulana & Mukhlisin, 2011). Namun pada laporan penerima FDI tertinggi di dunia tahun 2010 negara Cina, Amerika Serikat, dan India yang justru menepati FDI tertinggi padahal negara tersebut tidak sama sekali menggunakan IFRS sebagai standar adopsinya (Dahawy & Conover, 2007).

Termasuk di negara muslim sekalipun IFRS mulai banyak diterapkan karena pengaruh kebutuhan pada negara tersebut, meskipun dengan adopsi IFRS menyebabkan munculnya beberapa masalah dalam transaksi keuangan Islam yang tidak sesuai dengan IFRS, namun tidak menutup kemungkinan bahwa negara islam pun mengikuti konvergensi standar tersebut. Sebagai contoh negara Indonesia memiliki masalah dalam menentukan arah lembaga keuangan Islam karena kurangnya sarjana akuntansi Islam, sehingga Indonesia mengikuti konsep timur tengah agar membuatnya lebih mudah. Disisi lain kasus Malaysia pun karena adanya kekurangan sumber daya intelektual di negara tersebut (Siswantoro, Hameed, & Ibrahim, 2013).

Pengalaman beberapa negara muslim yang beralih ke IFRS, diantaranya negara Malaysia dan Arab Saudi. Dalam penelitian sebelumnya ketika Malaysia beralih penuh ke IFRS mengutarakan adanya kendala yaitu : Adanya peningkatan kompleksitas dalam lingkungan kerja untuk audit karena terdapat kesulitan pada standar akuntansi tertentu, melibatkan biaya yang lebih tinggi dan lebih banyak menghabiskan waktu untuk melatih staff akuntansi dan mempekerjakan para ahli, kualitas laporan keuangan dipertanyakan karena terkait dengan pengetahuan dan keterampilan para penyusun laporan keuangan dan auditornya, pasar modal yang belum berkembang tidak memfasilitasi kepatuhan dengan standar akuntansi nilai wajar karena adanya biaya kepatuhan yang tinggi (Hanefah & Singh, 2012).

Adapun penerapan IFRS di Arab Saudi dianggap sebagai titik balik sebagai upaya untuk menarik Foreign Direct Investment (FDI) ke kerajaan. Hal ini karena konvergensi IFRS Arab Saudi lebih memungkinkan kepada peraturan lingkungan sehingga lebih menarik dengan meningkatkan kualitas pengungkapan, kredibilitas, dan kecukupan, dan perputarannya akan meningkatkan kualitas pasar secara keseluruhan serta meningkatkan kepercayaan investor dan mendorong *Foreign Direct Investment* (FDI) (Herath & Alsulmi, 2017). Oleh karena itu sampai saat ini masih adanya perdebatan terkait Standar IFRS yang diterapkan dalam transaksi syariah terutama di negara muslim. penelitian ini bertujuan untuk membahas literature tentang adopsi IFRS dengan mengeksplorasi pandangan praktisi menggunakan perspektif *Institutional theory* di negara muslim.

Dari pembahasan diatas dapat dilihat beberapa negara muslim yang melakukan konvergensi IFRS karena salah satu tekanan negara untuk menciptakan perubahan yang lebih baik, seperti halnya ada beberapa negara yang melakukan konvergensi karena kesadaran akan kebutuhan standar tersebut (normative), adapula negara yang melakukan konvergensi sebatas meniru negara lain karena telah melakukan konvergensi dan menganggap bahwa negara tersebut berhasil menerapkan standar tersebut sehingga memperbaiki suatu negara (*mimetic*), serta ada beberapa negara muslim yang melakukan konvergensi IFRS dikarenakan adanya paksaan karena tunduk pada peraturan negara lain yang menerapkan standar tersebut (*coersive*).

Islam menyelidiki persyaratan kepatuhan oleh beberapa negara asosiasi selatan untuk kerjasama regional untuk meneliti standarisasi dan praktik akuntansi di negara-negara Bangladesh, India, Pakistan, dan Sri Lanka. Hasil menunjukkan bahwa yang memiliki rata-rata standar kepatuhan tertinggi adalah Sri Lanka (Dahawy & Conover, 2007). IFRS memang menjadi standar Internasional yang diterima hampir di seluruh negara, namun adanya penolakan dari beberapa negara Islam yang percaya bahwa prinsip IFRS tidak bisa disamaratakan dengan interpretasi mereka tentang syariah karena merupakan prinsip pelaporan keuangan yang terpisah dan harus diperhitungkan dengan cara yang berbeda.

Tantangan bagi pengatur standar dan para pemangku kepentingan adalah untuk meningkatkan komparabilitas lintas batas keuangan transaksi Islam, dan tetap memperhatikan kepekaan terhadap agama. Hal ini penting untuk memperhatikan pemahaman yang baik terhadap IFRS, karena meskipun IFRS diterima secara Internasional tetap ada penolakan dari sebagian orang yang percaya bahwa beberapa prinsip IFRS tidak dapat bersanding dengan sistem syariah dan adapun kesamaan ekonomi yang dapat dianalisis dengan transaksi yang menggunakan standar IFRS tetap ada pihak-pihak yang memiliki kepercayaan bahwa transaksi keuangan Islam harus diperhitungkan secara berbeda (Hanefah & Singh, 2012).

Dalam sebuah catatan penelitian, Shafii (2011) menyoroti beberapa masalah *sharia'h* dalam prinsip yang mendasari IFRS seperti yang berkaitan dengan prinsip nilai waktu uang, substansi atas bentuk, probabilitas dan nilai wajar. Makalah penelitian ISRA yang dilakukan oleh Shafii *et al.* (2013) lebih secara komprehensif menilai perspektif syariah mengenai prinsip yang mendasari IFRS. Mereka secara khusus menganalisis sudut pandang shari'ah pada beberapa prinsip akuntansi utama substansi atas bentuk, nilai waktu uang, pengukuran nilai wajar dan konsep probabilitas.

Analisis pandangan fiqih klasik dan resolusi syariah kontemporer, makalah ini menyimpulkan bahwa keempat prinsip akuntansi tersebut dianggap dapat diterima, secara umum, dari sudut pandang syaria'h. Namun akseptabilitas syariah dari konsep ini tidak selalu berarti bahwa penerapan IFRS tertentu tidak akan menyebabkan kemungkinan masalah syariah yang

timbul. Shafii & Zakaria (2013a) memperluas penelitian dengan mempelajari masalah yang timbul dari penerapan IFRS untuk transaksi keuangan Islam *takaful*, *mudharabah* dan sewa.

Studi mereka menunjukkan berbagai masalah yang terkait dengan penerapan IFRS dalam transaksi tersebut. Mereka mendesak upaya kolektif dari para pemain industri, BNM dan MASB untuk secara konsisten menginformasikan dan membujuk IASB untuk mempertimbangkan memberikan panduan tambahan atau pengungkapan tambahan dalam menerapkan IFRS pada transaksi Bank syariah. Dalam sebuah penelitian selanjutnya, Shafii & Zakaria (2013b) mencari pendapat para praktisi di lembaga keuangan Islam (IFIs) mengenai masalah syariah ketika mengadopsi IFRS dan IAS untuk melaporkan transaksi keuangan syariah. Wawancara dilakukan dengan perwakilan pejabat syariah, akuntan dan akademisi untuk mendapatkan wawasan tentang bagaimana praktisi industri berurusan dengan masalah IFRS Umum dan spesifik dalam menerapkan IFRS dan IAS.

Mereka menemukan bahwa praktisi sangat keprihatinan terhadap berbagai isu syariah, seperti penerapan nilai waktu uang, terminologi yang digunakan dalam IFRS dan IAS yang mencerminkan konsep konvensional perbankan dan *Takaful*. Penelitian ini merekomendasikan kerjasama antara akademisi, *setter* standar dan regulator dalam memberikan bimbingan teknis yang berlaku untuk melaporkan transaksi keuangan Islam. Penolakan AAOIFI terhadap beberapa tujuan, konsep, dan standar yang ada pada IFRS didasarkan pada aplikasi penentu standar yang berbeda dengan pendekatan yang sama.

Hal ini mungkin akan terbantahkan dengan fakta penerapan MASB. MASB yang berani menyimpulkan bahwa prinsip-prinsip pelaporan keuangan dalam IFRS tidak bertentangan dengan syariah, dan pelaporan keuangan adalah fungsi pencatatan yang akan tidak menyucikan atau membatalkan keabsahan transaksi syariah. Para MASB juga menyimpulkan bahwa perbedaan utama antara pelaporan keuangan transaksi keuangan Islam dan konvensional komparatif mereka bukan pada pengakuan dan pengukuran, namun sejauh mana informasi yang harus diberikan kepada pengguna. MASB menganggap bahwa pengizinan untuk melaporkan transaksi sesuai syariah berdasarkan IFRS tidak hanya akan membersihkan hati nurani pemangku kepentingan muslim,

tetapi juga akan membawa manfaat praktis juga. Sebuah entitas pelapor akan terhindar dari kesulitan pelaporan di bawah kerangka kerja yang berbeda.

Selain itu, akan menghilangkan peluang *arbitrase* apapun yang mungkin timbul dari perbedaan dalam perawatan akuntansi dan karena banyak yurisdiksi telah mencapai berbagai tonggak konvergensi dengan IFRS, pandangan ini akan memungkinkan mereka untuk terus di jalan itu dengan gangguan minimal (AOSSG, 2010). Namun nampaknya tidak demikian dengan Indonesia. Staf IAI setuju dengan penolakan yang diungkap di dalam FAS 2 AAOIFI mengenai persyaratan paragraf 29-30 dari IAS 18 adalah tidak bisa diterapkan pada transaksi *Murabahah* dalam yurisdiksinya. Mereka menyatakannya dalam Research Paper AOSSG (2010:13): “Menurut syariah fatwa di Indonesia, penjualan *murabahah* barang tidak dapat diperhitungkan sebagai penjualan dan transaksi pembiayaan, karena ini jenis transaksi harus diperlakukan sebagai transaksi penjualan”.

Oleh karena itu, pengakuan (pembiayaan) efek dibentuk suku bunga efektif tidak boleh digunakan. Pandangan lain dari IAI (AOSSG, 2010) adalah dari pandangan bahwa mengakui keuntungan dari penjualan ditangguhkan pembayaran berdasarkan metode bunga efektif tidak akan membuat aliran pendapatan haram. Ini hanya berfungsi untuk melaporkan informasi tentang nilai waktu dari uang untuk meningkatkan komparabilitas dengan transaksi ekonomi sejenis lainnya, dan tidak memiliki bantalan pada keabsahan transaksi itu sendiri.

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh MASB, AAOIFI, dan IAI dapat dilihat bahwa sumber dari pertentangan ini adalah berbagai isu pengakuan dan pelaporan atau isu standarisasi di dalam akuntansi syariah yang sebenarnya bersumber pada penggunaan sistem berbasis akrual yang juga menjadi salah satu hasil dari konvergensi IFRS ini nantinya.

G. Simpulan

Dalam surah al-Baqarah ayat 282, Allah memerintahkan untuk melakukan penulisan secara benar atas segala transaksi yang pernah terjadi selama melakukan muamalah. Dari hasil penulisan tersebut dapat digunakan sebagai informasi untuk menentukan apa yang akan diperbuat oleh seseorang. Transaksi

keuangan syariah terbentur oleh permasalahan basis akrual dan kas yang syariah. Menurut Zainulbahar Noor (IAI, 2008) sistem akuntansi konvensional yang berbasis akrual terbukti mengalami banyak kegagalan, terutama mendorong para akuntan lebih jujur dan adil, sehingga dianggap melanggar syariah. Sistem berbasis akrual itu telah mengakui adanya pendapatan yang terjadi di masa yang akan datang, padahal syariah Islam melarang untuk mengakui suatu pendapatan yang sifatnya belum pasti.

Daftar Pustaka

- Abdullah, M., & Sapiei, N. S. (2013). Pros and Cons of Convergence with International Financial Reporting Standards in A Developing Country : The Practitioner 's View. *Journal of Accounting Perspectives*, 6(December), 37-49.
- Alhashim, D. D., & Garner, S. P. (2000). Postulates for localized uniformity in accounting. *ABACUS*, 9 (1), 62-73.
- Anggadini. Perlunya Akuntansi Syariah Di Lembaga Bisnis (Keuangan) Syariah. *Majalah Ilmiah UNIKOM*, Vol. 8, No. 2. (Edisi 2011), hal. 133-142
- Archer, Simon & Karim, Rifaat Ahmed Abdel. (2011). Presuppositions behind Accounting Standards and the Issue of Economic Reality: The Case of Islamic Financial Instruments. *ELIASM Workshop on Accounting and Regulation Siena*.
- Baydoun dan Willet, 2000. 'Islamic Corporate Report'. *Abacus* Vol. 36. No. 1.
- Dahawy, K., & Conover, T. (2009). Accounting Disclosure in Companies Listed on the Egyptian Stock Exchange. *Middle Eastern Finance and Economics*, 1(1), 6-20.
- Damayanti, A. 2009. Ekonomi Etis: 'Paradigma Baru Ekonomi Islam', *Jurnal Ekonomi Islam La Riba* Vol. 1, No. 2.
- Dewanti, D. K. (2015). Studi Perbandingan Tingkat Kepatuhan Adopsi International Financial Reporting Standard (IFRS) di 12 Negara. *Journal of Accounting*, 4(3), 1-14.
- Fitriasuri, & Terizaghi, T. (2014). Globalisasi Akuntansi : Implementasi Konvergensi IFRS dan Tantangan bagi UMKM. *Sustainable Competitive Advantage*, 4(1), 794-807.
- Hassab Elnaby, H.R., Epps, R.W., & Said, A.A. (2010). The impact of environmental factors on accounting development: an Egyptian longitudinal study. *Critical Perspectives on Accounting*, 14, 273-92.

- Karim, R.A.A. (2010). Standard Setting of the Financial Reporting of Religious Business Organization: the Case of Islamic Banks. *Accounting and Business Research*. Vol. 20, No. 80, pp. 299-305.
- Lourenço, I. M. E. C., & Branco, M. E. M. de A. D. C. (2015). Main Consequences of IFRS Adoption: Analysis of Existing Literature and Suggestions for Further Research. *Revista Contabilidade & Finanças*, 26(68), 126-139.
- Mariyam, S. (2014). Pro Kontra Standarisasi Akuntansi Syariah Terhadap IFRS di Indonesia. *Journal Akuntansi*, 2(2), 1-23.
- Mathkur, N. M. (2015). Worldwide Adoption of International Financial Reporting Standards (IFRSs). *Research Journal of Finance and Accounting*, 6(7), 224-233.
- Mulyany, R. Noraini M. A. 2012. Islamic Finance and the Convergence towards International Financial Reporting Standards (IFRS): The State of Research Development, *Journal of Accounting Research, Organization and Economics* Vol. 1 (1), 2018: 85-97
- Nuriyani, E dan S. Mardian. 2019. Adopsi International Financial Reporting Standards (IFRS) di Negara-Negara Muslim: Perspektif Institutional Theory. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 7(1): 59-80.
- Patralalita, C. W., & Juliarto, A. (2014). Dampak Adopsi IFRS terhadap Panjang Laporan Keuangan pada Perusahaan yang Terdaftar di BEI. *Journal of Accounting*, 3(2), 1-15.
- Pomeranz, F. (2010). The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions: An Important Regulatory Debut. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*. Vol. 6, No. 1, pp. 123-130.
- Ramanna, K., & Sletten, E. (2010). Why do countries adopt International Financial Reporting Standards ? *Journal of Business, Economics and Law*, 09(102), 48.
- Ramdani, R. F. (2017). Analisis Bentuk Adopsi International Financial Reporting Standard (IFRS)

- Dalam Konteks Institusional. *Journal of Accounting and Finance*, 13(2), 108–127.
- Siswantoro, Dodik. (2014). The Need of Accounting Standards for Islamic Banks in Indonesia. *Mini Economica*, Vol. 34, pp. 36-51.
- Suwiknyo, Dwi. 2010, 'Teorisasi Akuntansi Syari'ah', *Jurnal Ekonomi La Riba*, Vol. 1, No. 2.
- Tona, 2011. Akuntansi Akadljarah Muntahiyah Bittamluk: Perspektif Metode Maqashid Al Syariah. *Media Mahardhika*, Vol. 10(2): 16-43
- Warsono, S. 2011. *Adopsi Standar Akuntansi IFRS: Fakta, Dilema, dan Matematika*. Yogyakarta: AB PUBLISHER.

PENGUKURAN KINERJA KEUANGAN BERBASIS MSI

A. Pendahuluan

Bank syariah di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami perkembangan yang pesat. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan sektor syariah di Indonesia mempunyai sektor keuangan syariah yang cukup mumpuni dalam mengelola keuangan/dana masyarakat. Selain itu, bank syariah tunduk pada prinsip syariah yang harus dipatuhi. Prinsip syariah tersebut antara lain larangan transaksi yang melibatkan bunga atau riba, *gharar* (penjualan berisiko) dan *maysir* (perjudian) (Sari dkk., 2019). Bank syariah pada dasarnya adalah sebuah entitas bisnis dan sekaligus merupakan sebuah fasilitas untuk mencapai tujuan syariah (*maqashid al-syari'ah*). Dengan demikian, bank syariah yang berbeda dengan perbankan konvensional baik dari sisi teori maupun praktik, membutuhkan perubahan paradigma dalam pengukuran kinerja. Menurut Suhada dan Pramono (2014) dalam perkembangan bank syariah dimulai dari pemahaman akan kesadaran terhadap riba kepada masyarakat, bank syariah saat ini telah memiliki lembaga yang mapan dan dapat dipercaya di berbagai negara. Hal ini didukung oleh peneliti Hasan (2017) dengan mempertegas bahwa bank syariah harus tampak lebih dari hanya sekedar bebas bunga (*interest-free*). Sedangkan menurut peneliti Cakhyanu (2018) dengan pernyataan bahwa orang-orang Islam yang sholeh yang berusaha menghindari riba dengan meninggalkan transaksi-transaksi utang di bank konvensional tidak dapat berbuat apa-apa karena bank syariah yang ingin memfasilitasi ini tidak dapat menyediakan institusi yang benar-benar patuh dengan syariah.

Evaluasi kinerja bank syariah saat ini cenderung memprioritaskan aspek pencarian laba, dimana terkadang bank syariah melupakan kewajibannya dalam memenuhi fungsi

sosialnya. Bank syariah dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyedia jasa keuangan harus mengevaluasi kembali tujuan dari bank syariah itu sendiri sesuai dengan *maqashid syariah*. Menurut peneliti Evi dan Musfirah (2017) menjelaskan bahwa pengukuran kinerja keuangan bank syariah dengan menggunakan pendekatan *maqashid syariah* menunjukkan persentase yang lebih baik dibandingkan pengukuran kinerja perbankan konvensional. Sedangkan peneliti Rismayani dan Nanda (2018) telah mengembangkan teori *maqasid* syariah menjadi sebuah ukuran kinerja yang dapat digunakan untuk menilai suatu kinerja perbankan syariah yang lebih relevan.

Munculnya pengukuran *Maqasid Syariah Index* (MSI) adalah sebagai alat ukur kinerja keuangan bank syariah dalam mengidentifikasi unsur ke-Islamannya. Unsur tersebut berupa porsi produk yang berbasis Bagi Hasil, porsi zakat, dan rasio lainnya seperti yang terdapat dalam komposisi MSI. Pengukuran jenis ini seharusnya dilakukan karena karakteristik bank syariah yang berbeda dibandingkan dengan bank konvensional. Perbedaan yang mencolok terlihat dari tujuan kedua perbankan ini. Bank konvensional hanya menitik beratkan pada aspek keuntungan saja, namun bank syariah selain mencari keuntungan (*profit orientied*) tapi juga memperhatikan unsur *maslahah*-nya. Dimana Bank Syariah merupakan lembaga perbankan syariah yang memiliki tujuan utama untuk memberikan kontribusi dalam mencapai *maqashid* syariah. *Maqashid* syariah memiliki fungsi dalam melakukan dua hal penting, yaitu *tahsil*, yakni mengamankan manfaat, dan *ibqa* yaitu mencegah kerusakan atau cedera. *Maqashid* syariah ialah tujuan tertinggi yang digariskan oleh Allah swt sebagai tujuan utama dari syariah yaitu sebagai, pelestari kehidupan, pelestari agama, pelestari keluarga, pelestarian karakter dan pikiran manusia, serta pelestarian kekayaan (Wira dkk, 2018).

Menurut peneliti Andriana dan Rini, (2018), *maqasid al-shari'ah* secara bahasa dapat diartikan sebagai maksud dan tujuan dari hukum Islam (syariah). Konsep *maqasid al-shari'ah* mengandung keadilan, rahmat, kemaslahatan dan juga hikmah bagi seluruh umat manusia. *Ma qasid al-shari'ah* pada bank syariah bukan hanya untuk mencegah adanya riba, namun juga termasuk untuk mengedarkan kekayaan dalam masyarakat, melanjutkan

investasi atas kekayaan masyarakat, memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat dengan mencukupi kebutuhan dasar manusia, memberikan transparansi atas aktifitas keuangan untuk menghindari perselisihan dan mengizinkan kepemilikan pribadi dan publik atas kekayaan (Saoqi, 2017). Secara garis besar, *maqasid al-shari'ah* berbicara tentang tata cara hidup yang sesuai dengan syariah Islam dan bagaimana hal tersebut dapat bermanfaat bagi masyarakat secara luas (kemaslahatan). Bab ini akan membahas mengenai pengukuran kinerja keuangan ditinjau dari *maqasid* syariah indeks (MSI).

B. Shariah Enterprise Theory

Akuntansi syariah tidak hanya sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemilik perusahaan, tetapi juga pertanggungjawaban kepada Tuhan. *Sharia enterprise theory* mengandung nilai keadilan, kebenaran, kejujuran, amanah, dan pertanggungjawaban, dan bentuk pertanggungjawaban tersebut adalah pertanggungjawaban kepada Allah swt (Rismayani dan Nanda, 2018). Menurut peneliti Taufik Azis (2018) menjelaskan bahwa aksioma terpenting yang harus mendasari dalam setiap penetapan konsepnya adalah Allah sebagai Pencipta dan Pemilik Tunggal dari seluruh sumber daya yang ada di dunia ini. Sedangkan sumber daya yang dimiliki oleh para *stakeholders* pada prinsipnya adalah amanah dari Allah swt yang didalamnya melekat tanggung jawab untuk digunakan dengan cara dan tujuan yang ditetapkan oleh Sang Pemberi Amanah. Sedangkan menurut peneliti Farida dan Dewi (2017) *Shariah enterprise theory* merupakan *enterprise theory* yang telah diinternalisasi dengan nilai-nilai Islam guna menghasilkan teori yang *transcendental* dan lebih humanis. Artinya teori yang mengakui adanya pertanggungjawaban tidak hanya kepada pemilik perusahaan saja melainkan kepada kelompok *stakeholders* yang lebih luas.

Menurut Rismayani dan Nanda (2018), akuntansi syariah tidak hanya sebagai bentuk akuntabilitas manajemen terhadap pemilik perusahaan, tetapi juga sebagai akuntabilitas kepada *stakeholders* dan Tuhan. Pada dasarnya akuntansi syari'ah merupakan instrumen akuntabilitas yang digunakan oleh manajemen kepada Tuhan (akuntabilitas vertikal), *stakeholders*, dan alam (akuntabilitas horizontal). Tuhan merupakan pihak

paling tinggi dan menjadi satu-satunya tujuan hidup manusia. Dengan menempatkan Tuhan sebagai *stakeholder* tertinggi, maka tali penghubung agar akuntansi syariah tetap bertujuan pada membangkitkan kesadaran ketuhanan para penggunanya tetap terjamin. Konsekuensi menetapkan Tuhan sebagai *stakeholder* tertinggi adalah digunakannya *sunnatullah* sebagai basis bagi konstruksi akuntansi syariah. Sehingga dengan adanya sunatullah ini maka akuntansi syariah di bangun berdasarkan pada aturan atau hukum – hukum Islam.

C. Konsep *Maqashid* Syariah

Konsep *maqâshid al-syarî'ah* sebenarnya telah dimulai dari masa al-Juwaini yang terkenal dengan Imam Haramain dan oleh Imam al-Ghazâli kemudian disusun secara sistematis oleh seorang ahli ushul fikih bermazhab Maliki dari Granada (Spanyol), yaitu Imam al-Syâthibî. Konsep itu ditulis dalam kitabnya yang terkenal, *al-Muwâfaqat fî Ushul al-Ahkâm*, khususnya pada juz II, yang beliau namakan kitab *al-Maqâshid*. Menurut al-Syatibi, pada dasarnya syariat ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan hamba (*mashâlih al-'ibâd*), baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan inilah, dalam pandangan beliau, menjadi *maqâshid al-syarî'ah*. Dengan kata lain, penetapan *syari'at*, baik secara keseluruhan (*jumlatan*) maupun secara rinci (*tafshîlan*), didasarkan pada suatu *'illat* (motif penetapan hukum), yaitu mewujudkan kemaslahatan hamba.

Menurut al-Syatibi, pada dasarnya syariah ditetapkan mewujudkan kemaslahatan hamba (*Mashalih al-'ibad*) baik dunia maupun akhirat. Kemaslahatan inilah yang menjadi *maqasid syariah* (Wira dkk., 2018). Hal ini sejalan dengan peneliti Hasan (2017) menjelaskan bahwa adanya maslahat sesuai dengan *maqasid syariah* (tujuan-tujuan syariah), artinya dengan mengambil maslahat berarti sama dengan merealisasikan *maqasid syariah*. Sebaliknya mengesampingkan maslahat memiliki arti mengesampingkan *maqasid syariah*. Menurut peneliti Sari dkk. (2019) *maqashid syariah* untuk mendorong kesejahteraan/maslahah manusia, terletak pada perlindungan keimanan (*Din*), jiwa (*Nafs*), akal (*Aql*), keturunan (*Nasl*), dan harta (*Maal*) mereka. Jika bank memenuhi hal-hal tersebut maka dapat dikatakan memenuhi kepentingan publik dan jika bank

mencederai kelima perkara tersebut berarti tidak memenuhi kepentingan publik. Hal ini didukung peneliti Ali dan Rama (2018), mendefinisikan *maqasid* syariah adalah tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Secara terminologi, *maqasid* syariah terdiri atas 2 (dua) kata yaitu *maqasid* dan syariah. *Maqasid* berarti tujuan dan syariah adalah ajaran, aturan, dan hukum Allah yang diturunkan kepada hambanya untuk mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat.

Untuk mewujudkan kemashlahatan tersebut Asy-Syatibi mengelompokkan masalah kedalam tiga kelompok yaitu kebutuhan (*daruriyyat*), pelengkap (*hajiyyāt*), dan perhiasan (*tahsiniyyāt*) (Amaroh, 2018). 1) *Dharuriyat*, kebutuhan *dharuriyat* ialah tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Menurut *al-Syatibi* ada lima hal yang termasuk dalam kategori ini, yaitu perlindungan terhadap agama (*al-Dien*), perlindungan terhadap jiwa (*al-Nafs*), perlindungan terhadap akal (*al-Aql*), perlindungan terhadap kehormatan dan keturunan, serta perlindungan terhadap harta (*al-Maal*). Hal-hal untuk memelihara lima pokok inilah maka Syariat Islam diturunkan. Setiap ayat hukum bila diteliti akan ditemukan alasan pembentukannya yang tidak lain adalah untuk memelihara lima pokok diatas. 2) *Hajiyyat*, kebutuhan *hajiyyat* ialah kebutuhan-kebutuhan *sekunder*, jika tidak terwujud tidak sampai mengancam keselamatannya, tetapi akan mengalami kesulitan. Syariat Islam menghilangkan segala kesulitan itu. Adanya hukum *rukhsah* (keringanan) seperti dijelaskan Abd al-Wahhab Khallaf, *Maqashid* syariah adalah tujuan umum ketika Allah menetapkan hukum hukum-Nya untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan terpenuhinya kebutuhan *daruriyah* (pokok), *hajiyyah* (*sekunder*), dan *tahsiniyah* (*tersier*) (Cakhyaneu, 2018). 3) *Tahsiniyat*, kebutuhan *tahsiniyat* ialah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok di atas dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini merupakan kebutuhan pelengkap, seperti yang dikemukakan al-Syatibi, hal-hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat, menghindarkan hal-hal yang tidak enak dipandang mata, dan berhias dengan keindahan yang sesuai dengan tuntutan moral dan

akhlak. Bidang mu'amalat, Islam melarang boros, kikir, menaikkan harga, monopoli, dan lain-lain.

Maqasid al-syari'ah adalah tujuan ditetapkan hukum Islam. Secara umum, semua ahli sependapat bahwa tujuan ditetapkan hukum Islam adalah untuk meraih kebaikan (*promote welfare/jalb al-masalih*) dan menghindari keburukan (*avoid vices/dar al-mafasid*). Hal ini sejalan dengan peneliti Sudrajat dan sodiq (2016) Tujuan penetapan hukum atau yang dikenal dengan istilah *maqashid* syariah adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak mudharat. Istilah yang sepadan dengan inti dari *maqashid* syariah adalah *masalahah*, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada kemaslahatan. Tiga pilar tujuan *maqasid* syariah menjadi acuan untuk membentuk suatu kinerja perbankan syariah yang lebih efektif dan sesuai dengan syariah Islam. Dengan penilaian kinerja perbankan syariah melalui pendekatan *maqasid* indeks, diharapkan bank syariah dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah dapat dilihat sejauh mana pencapaiannya untuk meningkatkan keadilan dan kemaslahatan untuk masyarakat. Penilaian kinerja dengan pendekatan *maqashid* indeks adalah salah satu upaya untuk meningkatkan kepercayaan para *stakeholder* bank syariah yang ada di Indonesia. Indeks *maqasid* syariah dipahami sebagai tujuan akhir dari syariah yang mengarah kepada nilai-nilai kesejahteraan dan manfaaat serta menghilangkan penderitaan. Indeks *maqasid* syariah adalah pengukuran kinerja perbankan syariah yang sesuai dengan tujuan dan karakteristik perbankan syariah. Indeks *maqasid* syariah dikembangkan oleh Abu Zahrah menjadi 3 tujuan syariah, yaitu (Syofyan, 2017): 1) *Tahdhib al-Fard* (Pendidikan Individual), 2) *Iqamah al'Adl* (Perwujudan Keadilan), 3) *alb al-Maslahah* (Kesejahteraan Masyarakat).

Konsep ini menjadi pengukuran untuk mengevaluasi kinerja bank syariah. Hal ini karena sistem perbankan syariah sangat berbeda dengan perbankan konvensional. Perbedaan yang paling mendasar adalah berkaitan dengan nilai referensi (*Islamic Worldview*) untuk masing-masing lembaga keuangan. Perbedaan mendasar ini akan menyebabkan perbedaan pada perumusan atau pembuatan produk untuk kedua model perbankan termasuk masing-masing model evaluasi kinerja (Farida dan Dewi, 2017).

Hal ini sejalan dengan peneliti Suhada dan Pramono (2014) mengatakan bahwa konsep inilah yang ditransformasikan menjadi sebuah pengukuran untuk mengevaluasi kinerja bank syariah. Hal tersebut dikarenakan bahwa sistem bank syariah sangat berbeda dengan perbankan konvensional. Perbedaan yang paling asasi adalah terkait dengan rujukan nilai (*Islamic Worldview*) bagi masing-masing institusi keuangan tersebut. Evaluasi kinerja keuangan bank syariah cenderung memprioritaskan aspek pencarian profit saja sehingga timbul peluang suatu bank melupakan kewajibannya dalam memenuhi fungsi sosialnya. Bank syariah dalam melaksanakan fungsinya sebagai lembaga intermediasi harus mengevaluasi kembali tujuan dari bank syariah itu sendiri sesuai dengan *maqashid syariah*. Hal tersebut untuk memastikan bahwa bank syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan saja, namun memikirkan aspek lainnya sesuai dengan tujuan awal terbentuknya bank syariah tersebut yaitu *maslahah*/kesejahteraan sosial. Menurut peneliti Ramadhan dkk. (2018) pengertian syariah dan fungsinya bagi manusia menurut al-Syatibi tertuang dalam kitabnya al-Muwwafaqat, yang artinya:

“Sesungguhnya syariat itu ditetapkan bertujuan untuk tegaknya (mewujudkan) kemashlahatan manusia di dunia dan Akhirat”

D. Pengukuran Kinerja Keuangan Berbasis *Maqasid al-Shari'ah*

Pengukuran kinerja merupakan seperangkat manajemen untuk menentukan seberapa jauh tujuan perusahaan telah tercapai, untuk mengevaluasi kinerja bisnis, manajer, divisi, dan tiap-tiap individu dalam perusahaan, serta memprediksi ekspektasi perusahaan di masa mendatang. Dalam mengukur kinerja bank syariah akan lebih tepat jika dilihat dari tujuan syariah dikarenakan bank islam memiliki tujuan tidak hanya sekedar memaksimalkan laba, namun juga memiliki tanggung jawab terhadap sosial (Mega, 2019). Dalam pengukuran kinerja terdapat hubungan langsung terhadap tujuannya, sehingga terdapat indikator-indikator atas pencapaian kinerja yang kemudian diturunkan dari tujuan-tujuan tersebut. Metode pengukuran kinerja berbasis *maqasid al-shariah* yang ada saat ini salah satunya dikembangkan oleh peneliti Sudrajat dan sodiq

(2016) yang dinamakan PMMS (*Performance Measurement based on Maqasid al-Shari'ah*). *Maqasid al-shari'ah* dalam PMMS ini dibagi menjadi 3 tujuan utama yaitu tujuan pendidikan individu (*tahdhib al-fardh*), perwujudan keadilan (*iqamah al-'adl*) dan kepentingan umum (*jalb al-maslahah*).

Pendidikan individu (*Tahdhib al-Fardh*) merupakan tujuan yang mengungkapkan kewajiban bank syariah untuk mendidik karyawannya dan untuk berkontribusi terhadap pemajuan pendidikan umat serta untuk memastikan bahwa masyarakat mengetahui dengan baik tentang tujuan dan kegiatan bank syariah tersebut. Perwujudan keadilan (*Iqamah al-'Adl*) merupakan tujuan yang mengungkapkan kewajiban bank syariah untuk memberikan keadilan ekonomi bagi semua *stakeholdernya* termasuk juga di dalamnya masyarakat umum. Kepentingan umum (*Jalb al-Maslahah*) merupakan tujuan yang mengungkapkan kewajiban bank syariah untuk mengutamakan kepentingan atau kesejahteraan umat.

Untuk memberikan penilaian apakah tujuan pendirian bank syariah sudah selaras dengan maqashid syariah, maka diperlukan penilaian kinerja secara khusus berdasarkan *maqashid* syariah. Karena menurut Sudrajat dan sodiq (2016) selama ini pengukuran kinerja bank syariah dilakukan dengan menggunakan rasio keuangan yang mengadopsi dari pengukuran kinerja bank konvensional. Sedangkan Kinerja *maqasid* syariah, merupakan penilaian kinerja yang ditinjau dari aspek keuangan dan non keuangan yang bersumber dari tujuan *maqasid* syariah. Ketiga tujuan tersebut adalah mendidik individu (*tahzib al fard*), menegakkan keadilan (*iqamah al'adl*), dan kepentingan public (*jalb al maslahah*). Hal ini sejalan oleh penelitian Adzhani dan Rini (2017) menyatakan bahwa pengukuran kinerja perbankan syariah dengan menggunakan pendekatan *maqashid* syari'ah indeks (MSI) dengan membaginya tiga tujuan utama, yaitu ; mendidik individu (*tahzib al fard*), menegakkan keadilan (*iqamah al'adl*), dan kepentingan public (*jalb al maslahah*). Tujuan tersebut kemudian dioperasionalkan melalui metode sekarang sehingga menjadi parameter yang bisa diukur. Hal ini bertentangan dengan peneliti Andriana dan Rini (2018) tujuan utama *maqashid* syari'ah membaginya dengan 5 elemen yaitu, pemeliharaan *ad-din* (agama), *nafs* (jiwa), *al-aql* (pikiran/ akal), *nasl* (keturunan), dan *maal* (harta).

Sehubungan dengan hal tersebut, peneliti Farida dan Dewi, (2017) mengembangkan model pengukuran kinerja bank syariah berdasarkan *maqashid* syariah yang diadaptasi dari rumusan *maqasid* syariah milik oleh Abu Zahrah dengan mengklasifikasikan konsep *maqasid* syariah menjadi: 1) Mendidik individu, 2) Menegakkan keadilan, dan 3) Memelihara kemaslahatan. Hal ini dilakukan agar ketiga tujuan syariah dapat secara operasional diukur dan ditentukan nilainya dengan menggunakan metode sekarang, dan penilaian kinerja perbankan syariah berdasarkan konsep *Maqasid al-Shari'ah*. Selanjutnya peneliti Azis (2018) mengatakan bahwa dengan menggunakan metode sekarang untuk membreak down konsep *maqasid* syariah menjadi indikator-indikator yang memiliki elemen-elemen yang kemudian diproses dengan rasio keuangan kinerja bank Islam sehingga mampu menghasilkan *maqasid shariah index* yang dicapai oleh suatu bank syariah. Pengukuran *maqasid* syariah dilakukan melalui beberapa parameter berdasarkan ketiga aspek tersebut (Cakhyaneu, 2018). Evaluasi kinerja bank syariah cenderung memprioritaskan aspek pencarian *profit* saja sehingga timbul peluang suatu bank melupakan kewajibannya dalam memenuhi fungsi sosialnya. Bank syariah dalam melaksanakan fungsinya sebagai lembaga intermediasi harus mengevaluasi kembali tujuan dari bank syariah itu sendiri sesuai dengan *maqashid shariah*. Hal tersebut untuk memastikan bahwa bank syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan saja, namun memikirkan aspek lainnya sesuai dengan tujuan awal terbentuknya bank syariah tersebut yaitu *maslahah*/ kesejahteraan sosial.

Bank syariah di harapkan harus memiliki kompetensi inti yang nantinya akan meningkatkan kinerja dan meningkatkan pangsa pasar atau *marketshare* di Indonesia, oleh karena itu pengukuran yang tepat harus di teliti untuk mendapatkan kompetitif unggulan yang berkelanjutan (Sari dkk, 2019). Hal ini peneliti Ramadhan dkk. (2018) mengatakan bahwa Kinerja keuangan yang baik akan menghasilkan *income* yang tinggi sehingga perbankan akan memenuhi aspek lain selain internal perusahaan, seperti aspek *maqashid syariah* demi menjaga konsep syariah bank syariah dari *riba'* dan hal haram lainnya. Pengukuran kinerja keuangan bank syariah tidak hanya dapat diukur oleh rasio-rasio keuangan saja, melainkan merupakan

suatu konsep baru untuk mengukur kinerja keuangan bank syariah yang dikembangkan oleh para peneliti muslim dari seluruh dunia. Konsep pengukuran yang dirumuskan tersebut menggunakan konsep *maqasid al-Shari'ah* yang mencakup aspek ekonomi, lingkungan, serta indikator sosial (Adzhani dan Rini, 2017). Pengukuran dengan *maqasid index* syariah dapat digunakan untuk mengetahui sampai sejauh mana tingkat pencapaian nilai-nilai syariah yang dijalankan pada bank syariah.

Operasionalisasi konsep *maqasid* syariah ke dalam indikator-indikator terukur dalam konteks bank syariah dapat dilihat pada Tabel 1. Indikator-indikator tersebut dapat dijadikan sebagai alat ukur penilaian kinerja keuangan bank syariah dalam pencapaian tujuan berdasarkan pada konsep *maqasid* syariah. Dengan menggunakan metode sekarang, penilaian kinerja bank syariah berdasarkan konsep *maqasid al-shari'ah* yang dirumuskan oleh para peneliti adalah sebagai berikut:

Tabel 1: Operasional Kerangka Pengukuran Kinerja Keuangan *Maqâshid al-Syarî'ah*

Konsep <i>Maqashid</i> Syariah	Dimensi	Elemen	Rasio Kinerja (<i>performance rations</i>)
Pendidikan Individu (<i>educating individual</i>)	Peningkatan Pengetahuan	Biaya pendidikan	Biaya pendidikan/ total pendapatan
		Riset	Pengeluaran riset/ total pengeluaran
	Pengembangan <i>skill</i> baru dan perbaikan	<i>Training</i>	Pengeluaran <i>training</i> / total pengeluaran
	Menciptakan kesadaran terhadap perbankan syariah	Publikasi	Pengeluaran publikasi/ total pengeluaran
Mewujudkan keadilan (<i>establishing justice</i>)	Keadilan dalam kontrak/ transaksi	Bagi hasil yang adil	Keuntungan/ total pendapatan

	Produk dan layanan yang terjangkau	Harga yang terjangkau	Utang bermasalah/ total investasi
	Penghilangan ketidakadilan	Produk tanpa bunga	Pendapatan bebas bunga/ total pendapatan
Mendorong kesejahteraan (<i>public interest</i>)	Keuntungan	Rasio keuntungan	Keuntungan bersih/ total aset
	Distribusi pendapatan dan kekayaan	Pendapatan personal	Zakat/ pendapatan bersih
	Investasi pada sektor strategis	Rasio investasi pada sektor riil	Deposito investasi/ total deposito

Dengan sistem operasional dan visi yang berbeda tentunya, metode pengukuran kinerja keuangan yang diterapkan pada sistem bank syariah seharusnya dapat mengakomodir tujuan utama tersebut. Di sisi lain, terdapat beberapa metode pengukuran kinerja keuangan bank syariah diajukan didasarkan pada keterpenuhan terhadap syariah. Hal ini peneliti Ali dan Rama (2016) melakukan metode indeks yang diambil dari konsep-konsep syariah sebagai indikator penilaian kinerja bank syariah. Pada model pengukuran kinerja bank syariah dengan menggunakan indeks *maqâshid al-syarî'ah* sebagai cara untuk melihat sejauh mana bank syariah mencapai tujuan-tujuan syariah dalam pengelolaan bisnisnya. Pemahaman lengkap tentang *maqashid syariah* Indeks diambil dari nilai luhur Islam yang dipahami sebagai tujuan akhir dari syariah yang mempromosikan nilai-nilai kesejahteraan dan manfaat (*Jalb al Masalih*) juga menghilangkan penderitaan (*Dar al-Mafasid*) (Syofyan, 2017). *Maqasid al-shari'ah* pada bank syariah bukan hanya untuk mencegah adanya riba, namun juga termasuk untuk mengedarkan kekayaan dalam masyarakat, melanjutkan investasi atas kekayaan masyarakat, memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat dengan mencukupi kebutuhan dasar manusia, memberikan transparansi atas aktifitas keuangan untuk menghindari

perselisihan dan mengizinkan kepemilikan pribadi dan publik atas kekayaan (Andriana dan Rini, 2018). Secara garis besar, *maqasid al-shari'ah* berbicara tentang tata cara hidup yang sesuai dengan syariah Islam dan bagaimana hal tersebut dapat bermanfaat bagi masyarakat secara luas (kemaslahatan).

Adanya elemen *maqasid al-shari'ah* yang harus dipenuhi oleh bank syariah membuatnya berbeda dengan bank konvensional. Pemenuhan *maqasid al-shari'ah* secara tidak langsung menjadi tujuan terbentuknya bank syariah. Tujuan selayaknya dapat diukur, didefinisikan, dioperasionalkan dan spesifik. Oleh karena itu, pengukuran kinerja perbankan syariah dengan pendekatan *maqasid al-shariah* perlu diukur secara berkala agar bank syariah mengetahui sejauh mana kegiatan operasionalnya telah berpengaruh terhadap pencapaian tujuannya. Tujuan syariah telah dijelaskan oleh seorang ulama Islam, Imam Abu Hamid Al-Ghazali, sebagai berikut (Syofyan, 2017): "*Tujuan utama syariah adalah untuk mendorong kesejahteraan manusia, yang terletak pada perlindungan pada keimanan (Din), jiwa (Nafs), akal (Aql), keturunan (Nasl), dan harta (Maal) mereka. Apa saja yang menjamin terlindunginya lima perkara ini adalah memenuhi kepentingan publik dan dianjurkan, dan apa saja yang menciderai lima perkara ini adalah melawan kepentingan publik yang harus dibuang*"

E. Simpulan

Pentingnya konsep pengukuran kinerja keuangan syariah yang sesuai dengan *maqasid syari'ah* tentu sangat di butuhkan untuk aktivitas muamalah, yang tidak lain adalah untuk menjaga akal, agama, keturunan, jiwa dan harta. Sehingga Pelaksanaan *maqasid* syariah merupakan kewajiban bagi setiap individu atau lembaga untuk memberikan kenyamanan bagi umat dengan memahami pencapaian tujuan-tujuan utama syariah, yaitu: mendidik individu (*Tahziful Fardi*), Penegakan keadilan (*Iqamah Al Adli*) dan kemaslahatan masyarakat (*Jal Bal Maslahah*). *Maqasid* syariah dalam sistem keuangan Islam merupakan cita-cita atau tujuan syariah yang berkaitan dengan transaksi dan kegiatan keuangan menurut standar, kriteria, dan nilai-nilai syariat Islam untuk memecahkan masalah umat manusia sehingga tercapai kemaslahatan.

Model pengukuran kinerja keuangan dengan menggunakan indeks *maqâshid al-syarî'ah* sebagai cara untuk melihat sejauh mana bank syariah mencapai tujuan-tujuan syariah dalam pengelolaan bisnisnya. Pemahaman lengkap tentang maqashid syariah indeks diambil dari nilai luhur Islam yang dipahami sebagai tujuan akhir dari syariah yang mempromosikan nilai-nilai kesejahteraan dan manfaat (*Jalb al Masalih*) juga menghilangkan penderitaan (*Dar al-Mafasid*). *Maqashid* Syariah Indeks sebagai ukuran pencapaian pengukuran kinerja keuangan agar memperoleh hasil yang lebih lengkap dan sesuai dengan tujuan dan objektivitas syariah. Untuk Penilaian kinerja dengan pendekatan *maqashid* indeks adalah salah satu upaya untuk meningkatkan kepercayaan para *stakeholder* bank syariah.

Daftar Pustaka

- A. Cakhyaneu. 2018. Pengukuran Kinerja Bank Umum Syariah Di Indonesia Berdasarkan Sharia Maqashid Index (SMI). *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 2(2): 154-57.
- Amaroh, S. 2018. Penilaian Kinerja Sosial Berbasis Maqasid Syariah Pada Bank Umum Syariah Hasil Konversi Di Indonesia. *Journal of Islamic banking and finance*, 2(1): 19-20.
- A. Sudrajat dan A. Sodik. 2016. Analisis penilaian Kinerja Bank Syariah Berdasarkan Indeks Maqasid Shari'ah (Studi Kasus pada 9 Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2015). *Jurnal Bisnis*, 4(1): 178-181.
- A. Syofyan. 2017. Analisis Kinerja Bank Syariah Dengan Metode Indeks Maqasid Syariah Di Indonesia. *Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan*, 2(2): 145-146.
- Andriana, A. V dan Rini. 2018. Analisis Kinerja Perbankan Syariah Dengan Maqasid Based Performance Evaluation Modal (MPEM). *Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi*, 13(1): 1-4.
- Ali, H. dan A. Rama. 2016. Peringkat Kinerja Lembaga Keuangan Syariah Berdasarkan Maqashid Syariah. *Dialog*, 39(2): 140-142.
- Azis, M. T. 2018. Analisis Kinerja Perbankan Syariah Indonesia Ditinjau Dari Maqasyid Syariah. *Al-Amwal*, 10(1): 2-5.
- Ali, H. dan A. Rama. 2018. Indeks Kinerja Perbankan Syariah Di Asia Tenggara Berdasarkan Konsep Maqashid Al-Syari'ah. *Madania*, 22(1): 33-36.
- Farida dan V. S. Dewi. 2017. Analisis Pengaruh Penerapan Kinerja Maqasid Terhadap Manajemen Risiko Pada Perbankan Syariah. *Jurnal studi islam*, 7(2): 171-178.
- G. Rismayani dan U. L. Nanda. 2018. Pengaruh Dewan Komisaris, Dewan Pengawasan Syariah (DPS) Dan Direksi Terhadap Kinerja Maqasid Syariah. *JRKA*, 4(2): 42-43.
- G. Rismayani dan U. L. Nanda. 2018. Analisis Kinerja Maqasid Syariah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi*, 2(1): 37-38.

- Hasan, N. F. 2017. Analisis Kinerja Perbankan Syariah (Implementasi Maqasid al-Syari'ah Index di PT BPRS Jabal Nur). *Anil Islam*, 10(1): 25-28.
- Mutia dan N. Musfirah. 2017. Pendekatan Maqashid Syariah Index Sebagai Pengukuran Kinerja Perbankan Syariah Di Asia Tenggara (*Maqashid Sharia Index Approach as Performance Measurement of Sharia Banking in Southeast Asia*). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 14(2): 181-184.
- Mega. S., A. Isni dan M. Taufiq. 2019. Performance Of Indonesian Islamic Banks Based On Maqasid Shariah Index: Stakeholder Theory Perspective. *Journal economics & business*, 7(25): 18-20.
- R. Adzhani dan Rini. 2017. Komparasi Kinerja Perbankan Syariah Di Asia Dengan Pendekatan Maqasid Syariah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 5(1): 5-6.
- Ramadhan, M. I. B., A. Abdurahim dan H. Sofyani. 2018. Modal Intelektual Dan Kinerja Maqashid Syariah Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal akuntansi dan keuangan islam*, 6(1): 7-9.
- Saoqi, A. A. Y. 2017. Analyzing The Performance Of Islamic Banking In Indonesia And Malaysia: Maqasid Index Approach. *Jurnal ekonomi islam*, 8(1): 29-37.
- Sari. K., M. Ismail dan M. Ekawaty. 2019. Peran Sosial Bank Syariah Berdasarkan Indeks Maqashid Syariah (Studi Kasus Di Jordan). *Jurnal profit*, 13(1): 40-41.
- Suhada dan S. Pramono. 2014. Analisis Kinerja Perbankan Syariah Di Indonesia Dengan Pendekatan Maqashid Syariah Indeks (Periode 2009-2011). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 2(1): 5-6.
- Wira. A., H. Handra dan A. Syukria. 2018. Pengukuran Kinerja Perbankan Syariah Dengan Menggunakan Pendekatan Indeks Maqashid Syariah. *Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 3(2): 145-147.

TAX AMNESTY MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK: PERSPEKTIF SYARIAH

A. Pendahuluan

Tax amnesty (pengampunan pajak) untuk memberikan kesempatan kepada para wajib pajak yang mempunyai permasalahan dalam menunggak hutang pajak. Hutang disini meliputi hutang pajak pada semua harta ataupun aset yang ada baik di dalam negeri maupun di luar negeri (Jamil, 2017). Penerapan kebijakan pajak dapat meningkatkan kemauan masyarakat dalam membayar pajak. *Tax amnesty* dilaksanakan berdasarkan pada asas kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan dan kepentingan nasional (Puspareni *et al.*, 2017). *Tax amnesty* hanya ditujukan pada dana yang disimpan di luar negeri tetapi kebijakan ini juga diberlakukan untuk semua wajib pajak di Indonesia.

Tax amnesty diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak agar perpajakan yang ada di Indonesia tidak menurun. Namun menurut Fatmala dan Ardini (2017) menyatakan bahwa kelemahan bila diterapkan pengampunan pajak adalah tidak serta merta dapat menjamin peningkatan kinerja setoran pajak ke kas negara. Hal ini sebaliknya dapat berpotensi terjadinya penyelewengan, manipulasi serta tindakan lainnya. Para pengusaha yang memperoleh pemutihan pajak melakukan penggelapan terhadap kewajiban pajaknya. Kecuali bila diberlakukan pengampunan pajak yang bersyarat. Hal ini sejalan dengan penelitian Setiawan *et al.* (2017) yang menyatakan bahwa *tax amnesty* dapat mengakibatkan adanya ketidakjujuran wajib pajak untuk melaporkan hartanya. Hal ini juga diungkapkan oleh Santoso dan Setiawan (2009) untuk jangka panjang *tax amnesty* masih jadi perdebatan apakah program ini dapat

menurunkan kepatuhan sukarela, karena wajib pajak akan merasa terganggu dengan adanya program ini yang dianggap sebagai pelanggaran asas keadilan. Dari dimensi moral, *tax amnesty* dapat berakhir dengan adanya tingkat kepatuhan pajak pasca *tax amnesty* menjadi menurun. Penghindaran pajak akan menjadi masalah yang parah bagi suatu negara, karena negara akan kehilangan potensi pendapatannya dari warga negaranya yang menghindari membayar pajak.

Indonesia dapat mempertimbangkan untuk melakukan *tax amnesty* dalam berbagai bentuk agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. *Tax amnesty* ini juga dapat dipandang sebagai suatu rekonsiliasi nasional untuk menghapus masa lalu wajib pajak yang tidak patuh dan perilaku otoritas pajak yang dianggap melanggar aturan. *Tax amnesty* akan berhasil jika terdapat justifikasi yang kuat dengan adanya *tax amnesty* (Ngadiman dan Huslin, 2015). Sampai saat ini Indonesia masih berkuat pada suatu permasalahan mengenai masih rendahnya penerimaan perpajakan (Wirawan dan Noviari, 2017). Kondisi perpajakan Indonesia saat ini masih cukup mengkhawatirkan sebab dari tingkat kepatuhan terhadap perpajakan terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Terakhir pada tahun 2015, tingkat kepatuhan pajak hanya mencapai sebesar 82,0%, pada tahun 2014 kepatuhan pajak mencapai 91,6% dan bahkan pada tahun 2011 pencapaian terhadap kepatuhan pajak mencapai sebesar 97,2% (Rahayu, 2015). Tingginya suatu penerimaan negara dari sektor pajak membuat negara semakin bergantung pada pajak (Suyanto *et al.*, 2016). Pengampunan pajak dilatar belakangi oleh banyaknya wajib pajak yang tidak atau belum membayar pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang telah ditentukan. Dari sisi sesama wajib pajak keadaan ini dapat menimbulkan kecemburuan, ketidakadilan pada sesama pembayar pajak, karena wajib pajak yang lain yang jumlah penghasilan atau kekayaan dianggap relatif sama. Terdapat pula seseorang membayar pajak sementara orang lain yang mempunyai penghasilan yang sama, bahkan tidak membayar pajak (Ulfanur, 2017).

Wajib pajak harus mempunyai pengetahuan tentang perpajakan yang cukup mengenai pengetahuan ketentuan umum dan peraturan perpajakan, pengetahuan mengenai sistem

perpajakan di Indonesia, pengetahuan mengenai fungsi perpajakan, maka wajib pajak akan lebih mudah untuk menjalankan kewajiban perpajakannya (Sari dan Fidiana, 2017). Pengetahuan tentang pajak sangat penting dalam menumbuhkan perilaku patuh terhadap perpajakan. Karena tidak mungkin wajib pajak akan patuh terhadap perpajakan apabila mereka tidak mengetahui ketentuan peraturan tentang perpajakan. Seorang wajib pajak akan taat membayar pajak apabila wajib pajak mempunyai pengetahuan yang baik mengenai perpajakan. Apabila wajib pajak mengetahui peraturan pajak, maka wajib pajak tersebut akan taat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dan dapat pula meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Rahayu, 2017). Sanksi perpajakan juga sangat berpengaruh, semakin tinggi sanksi perpajakan yang diberi maka tingkat kepatuhan juga akan cenderung semakin tinggi (Wirawan dan Noviari, 2017). Caroko (2015) menyatakan bahwa sanksi perpajakan merupakan cara yang dilakukan fiskus agar para wajib pajak tidak curang dalam melakukan pembayaran pajak. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian Andinata (2015) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, maka dirumuskan pokok-pokok permasalahan yang akan di bahas dalam bab ini, yaitu bagaimana perilaku *tax amnesty* pada penerimaan pajak? Dan bagaimana hubungan *tax amnesty* dan penerimaan pajak dalam perspektif syariah?

B. *Shari'ah Enterprise Theory*

Wacana yang sama saat ini dalam akuntansi syariah masih terus berkembang ke arah pengkayaan teori. Dua arus utama pemikiran dalam akuntansi syariah telah sampai pada pemikiran yang dinamis antara *Shari'ah Enterprise Theory* (SET) (Triyuono 2006A, ct. Baydoun & Willet 1994;2000). *Shari'ah Enterprise Theory* merupakan suatu penyempurnaan teori yang dapat mendasari *enterprise theory* sebelumnya. Aksioma penting yang mendasari penetapan dalam konsep *Shari'ah Enterprise Theory* adalah Allah sebagai sumber amanah utama dan sumber daya yang dimiliki para *stakeholders*. Sumber daya tersebut dapat melekat sebagai suatu tanggungjawab pada penggunaan, cara dan tujuan yang

harus ditetapkan oleh sang pemberi amanah. *Shariah Enterprise Theory* mengajarkan bahwa hakekat kepemilikan yang utama berada pada kekuasaan Allah, sementara manusia hanya diberi hak untuk mengelola (*khalifa fil ardhi*). Manusia diharuskan mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas kepada Allah secara vertikal, dan kemudian diuraikan lagi dalam bentuk pertanggungjawaban yang secara horizontal baik kepada umat manusia maupun pada lingkungan alam (Kalbarini, 2010). *Shari'ah Enterprise Theory* dengan menempatkan Allah sebagai *stakeholder* tertinggi, maka tali penghubung dalam akuntansi syari'ah akan bertujuan pada "membangkitkan kesadaran ketuhanan" para penggunanya yang tetap terjamin. Konsekuensi dalam menetapkan Allah sebagai *stakeholder* tertinggi adalah digunakannya sunnatullah sebagai suatu basis bagi konstruksi akuntansi syari'ah. Intinya adalah bahwa dengan adanya sunnatullah ini, maka akuntansi syari'ah hanya dibangun berdasarkan pada tata-aturan atau hukum-hukum Allah (Novarela dan Sari, 2015). Syariah sebagai suatu konsep dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman yang berguna bagi masyarakat baik di dunia maupun di akhirat.

Manusia sebagai *khalifatullah fil ardhi* memiliki misi mulia yaitu dengan menciptakan dan mendistribusikan kesejahteraan (materi dan nonmateri) bagi seluruh manusia dan alam semesta, untuk mempermudah tugas ini manusia dapat menciptakan organisasi (organisasi *profit* atau organisasi *nonprofit*) yang digunakan sebagai instrumen dalam mengembangkan tugas tersebut sehingga organisasi yang diharuskan dapat mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas kepada Allah secara vertikal, dan kemudian diuraikan lagi dalam bentuk pertanggungjawaban yang secara horizontal baik kepada umat manusia maupun pada lingkungan alam (Kalbarini, 2010). *Stakeholder* kedua dari SET adalah manusia, yang dapat dibedakan antara *direct-stakeholders* dan *indirect-stakeholders*. *Direct-stakeholders* adalah pihak-pihak yang secara langsung dapat memberikan kontribusi pada perusahaan, baik dalam bentuk kontribusi keuangan (*financial contribution*) maupun kontribusi non-keuangan (*nonfinancial contribution*). Karena *direct-stakeholders* telah memberikan kontribusi kepada perusahaan, maka *direct-stakeholders* tersebut mempunyai hak untuk mendapatkan

kesejahteraan dari perusahaan. Sedangkan, yang dimaksud dengan *indirect-stakeholders* adalah pihak-pihak yang sama sekali tidak memberikan bentuk kontribusinya kepada perusahaan (baik kontribusi secara keuangan maupun non-keuangan), tetapi secara syari'ah mereka adalah pihak yang mempunyai hak untuk mendapatkan kesejahteraan dari perusahaan (Novarela dan Sari, 2015). Hubungan dengan masalah yaitu terletak pada bagaimana perilaku *tax amnesty* apakah sesuai dengan kemampuan manusia dan sesuai dengan ketentuan Allah sebagai hakekat paling tinggi.

Golongan *stakeholder* terakhir dari *Shari'ah Enterprise Theory* (SET) adalah alam. Alam adalah pihak yang dapat memberikan kontribusi bagi mati-hidupnya suatu perusahaan sebagaimana pihak Allah dan manusia. Perusahaan eksis secara fisik dapat didirikan di atas bumi, menggunakan energi yang banyak tersebar di alam, memproduksi dengan menggunakan bahan baku yang tersedia dari alam, memberikan jasa kepada pihak lain dengan memanfaatkan energi yang tersedia di alam, dan lain-lainnya. Namun demikian, alam tidak menghendaki distribusi kesejahteraan dari berbagai perusahaan dalam bentuk uang seperti yang diinginkan manusia. Wujud distribusi kesejahteraan adalah dengan adanya kepedulian perusahaan terhadap kelestarian alam, pencegahan pencemaran, dan lain-lainnya (Novarela dan Sari, 2015). Golongan *stakeholder* yang terakhir dari *Shari'ah Enterprise Theory* (SET) adalah alam. Alam adalah pihak yang memberikan kontribusi paling besar terhadap kelangsungan hidup suatu perusahaan karena dengan adanya alam perusahaan dapat melakukan aktivitas dengan menggunakan segala sesuatu yang berada di alam (Samsiyah *et al.*, 2013). Artinya dengan konsep ini *tax amnesty* juga memberikan kontribusi terhadap alam sebagai pusat terbesar dalam sebuah kehidupan.

C. Konsep Keadilan dan Kepatuhan

Keadilan merupakan upaya untuk menemukan keseimbangan, persamaan, kebenaran serta memutuskan jika terdapat suatu pelanggaran yang telah diatur secara formalitas. Hal tersebut merupakan keadilan yang bersifat prosedural. Dengan adanya keadilan prosedural diharapkan keadilan substansial terwujud. Karena tanpa adanya keadilan prosedural, maka keadilan substansial tidak terwujud. Dan juga tanpa

keadilan substansial, maka keadilan prosedural tidak akan menyentuh realitas masyarakat (Helmi, 2015). Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan dalam suatu perjalanan filsafat hukum. Tujuan hukum bukan hanya tentang keadilan, tetapi juga untuk kepastian hukum, dan kemanfaatan. Idealnya, hukum memang harus mengakomodasikan mengenai kegiatannya. Putusan hakim, misalnya, sedapat mungkin merupakan suatu *resultante* dari ketiganya. Sekalipun demikian, tetap ada yang berpendapat, diantara ketiga tujuan tersebut yang paling penting, bahkan ada pula yang berpendapat bahwa tujuan hukum adalah satu-satunya (Amin, 2014). Keadilan juga tidak dilihat dari segi hukum saja tetapi bisa juga dilihat dari segi pandangan agama mengenai hukum itu sendiri.

Keadilan hukum dalam Islam bersumber dari Tuhan yang Maha Adil, karena pada hakikatnya Allah-lah yang Maha menegakkan keadilan (*qaiman bil qisth*), maka harus diyakini bahwa Allah tidak akan berlaku aniaya (zalim) kepada hamba-hamba-Nya (QS Yunus: 449). Oleh karena itu, setiap perbuatan manusia akan dipertanggungjawabkan kepada-Nya dihari keadilan (QS an-Nisa: 110). Adil dalam pengertian persamaan (*equality*), yaitu persamaan dalam hak, tanpa membedakan siapa, serta dari mana orang yang akan diberikan sesuatu keputusan oleh orang yang diserahkan untuk menegakkan keadilan, sebagaimana dimaksud dalam firman Allah QS an-Nisa: 58 (Amin, 2014). Keadilan dalam hukum terbagi pada 2 hal yakni hukum menurut perundang-undangan dan keadilan dalam praktik. Keadilan berdasarkan perundang-undangan didasarkan pada hukum yang tertulis dan juga dalam teks perundang-undangan (Dwisvimiari, 2011). Disimpulkan bahwa keadilan tidak harus sama rata tetapi keadilan harus sesuai dengan apa yang di butuhkan atau seberapa besar biaya yang dibutuhkan seseorang.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, istilah kepatuhan berarti sifat patuh atau ketaatan. Kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan (Fajriyan, 2015). Kepatuhan pajak berarti tunduk atau patuh pada ajaran dalam perpajakan dan kita tidak dapat memberikan pengertian bahwa kepatuhan perpajakan merupakan suatu ketaatan, tunduk, dan patuh, serta

melaksanakan ketentuan perpajakan. Jadi wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan mematuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Ngadiman dan Huslin, 2015). Kepatuhan dapat diartikan bagaimana seseorang taat pada peraturan yang telah di berikan oleh suatu lembaga atau organisasi.

Jika kepatuhan wajib pajak tinggi maka penerimaan wajib pajak juga akan tinggi, begitupun dengan sebaliknya (Divianto, 2013). Ada dua macam kepatuhan yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak dapat mematuhi kewajiban perpajakan secara formal dengan ketentuan yang ada di dalam undang-undang perpajakan. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif sudah memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Wajib pajak yang telah memenuhi kepatuhan material adalah wajib pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap, dan benar surat pemberitahuan (SPT) berdasarkan atas ketentuan dan menyampaikan KPP sebelum batas waktu berakhir (Husnurrosyidah dan Nuraini, 2016). Kepatuhan dalam pajak dapat terlaksana dengan baik apabila dipahami pula dengan baik oleh wajib pajak dan apa sebenarnya fungsi dari pajak itu sendiri agar wajib pajak betul-betul mengerti tentang pajak sehingga dapat patuh terhadap pajak, bagaimana seseorang bisa patuh apabila tidak mengerti hal apa yang harus dipatuhi.

D. Teori Perilaku

Perspektif Perilaku (*Behavioral Perspective*) Pendekatan ini pada awalnya diperkenalkan oleh John B. Watson (1941, 1919). Para "*behaviorist*" memasukkan perilaku ke dalam satu unit yang dinamakan "*tanggapan*" (*responses*), dan lingkungan ke dalam unit yang disebut sebagai "*rangsangan*" (*stimuli*). Menurut penganut paham perilaku, satu rangsangan dan tanggapan tertentu bisa berasosiasi terhadap satu sama lainnya, dan menghasilkan satu bentuk hubungan fungsional. Contohnya, sebuah rangsangan "*seorang teman menghampiri*", lalu memunculkan tanggapan misalnya, "*tersenyum*". Jadi seseorang tersenyum, karena ada teman yang menghampirinya. Para *behaviorist* tadi percaya bahwa

rangsangan dan tanggapan dapat dihubungkan tanpa adanya acuan pada pertimbangan mental yang ada dalam diri seseorang. Jadi tidak terlalu mengejutkan jika para *behaviorisme* tersebut dikategorikan sebagai pihak yang menggunakan suatu pendekatan "kotak hitam (*black-box*)". Rangsangan yang masuk ke sebuah kotak (*box*) akan menghasilkan sebuah tanggapan. Mekanisme di dalam kotak hitam tadi merupakan suatu struktur internal atau proses mental yang digunakan untuk mengolah rangsangan dan tanggapan. Karena tidak dapat dilihat secara langsung (*not directly observable*), dan bukanlah suatu bidang kajian bagi para behavioris tradisional (Mustafa, 2012). Menurut Nar (2015) secara teori *tax amnesty* akan berdampak mengubah perilaku pembayar pajak, sederhananya kalau kita diampuni, maka orang akan cenderung tidak patuh.

Menurut Purnomolastu (2017) Perilaku *tax amnesty* berdampak pada ketidakpatuhan seseorang dalam membayar pajak karena merasa telah mendapat pengampunan dan *tax amnesty* dianggap hanya dapat mendongkrak penerimaan negara. Namun, pemberlakuan *tax amnesty* justru hanya akan menimbulkan persepsi negatif pengusaha terhadap pemerintah. Perilaku adalah segenap manifestasi hayati individu yang berinteraksi dengan lingkungan, mulai dari perilaku yang paling nampak sampai yang tidak nampak, dari yang dirasakan sampai yang tidak dirasakan. Untuk mengenali lebih lanjut mengenai perilaku manusia, terdapat lima pendekatan utama, yaitu pendekatan *neurobiologik*, *behavioristik*, *kognitif*, *psikoanalisis*, dan *humanistik*. Pendekatan *neurobiologik* menitikberatkan pada hubungan antara perilaku dengan kejadian yang berlangsung didalam tubuh (otak dan saraf) karena perilaku ini diatur oleh kegiatan otak dan sistem saraf. Pendekatan *behavioristik* menitikberatkan pada perilaku yang terlihat (nampak), perilaku ini dapat dibentuk dengan pembiasaan dan pengukuhan melalui pengkondisian stimulus. Pendekatan *kognitif*, menurut pendekatan ini individu tidak hanya menerima stimulus yang bersifat pasif tetapi juga mengolah stimulus menjadi perilaku individu yang didorong oleh insting bawaan dan sebagian besar perilaku ini tidak di sadari. Pendekatan *humanistik*, perilaku individu yang mampu mengarahkan perilaku dan dapat memberikan suatu warna pada lingkungan (Nurlaela, 2014). Perilaku seseorang

tergantung dimana orang itu berasal, dan dimana orang itu tumbuh. Sebab perilaku seseorang akan timbul dengan apa yang dilihat dan apa yang didengar.

E. Pajak dan *Tax Amnesty*

Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH pajak adalah pemindahan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama pada pembiayaan *public investment*. Menurut Prof. Dr. P.J.A. Adriani pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan sesuai dengan peraturan, tidak mendapatkan suatu prestasi dan langsung dapat ditunjuk untuk membiayai pengeluaran umum. Menurut UU KUP Pasal 1 ayat (1) pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa berdasarkan Undang-Undang yang telah ditetapkan dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk membiayai keperluan negara demi tercapainya kemakmuran rakyat. Disimpulkan pajak adalah iuran rakyat yang digunakan untuk kepentingan negara. Caroko *et al.* (2015) menjelaskan bahwa pajak adalah kontribusi rakyat kepada negara dengan tidak mendapat imbalan bersifat memaksa yang digunakan untuk keperluan negara. Sedangkan menurut Pusporeni *et al.* (2017) pajak merupakan pendapatan negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan berbagai pembangunan nasional agar dapat mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Rahayu (2017), pajak adalah penghasilan negara yang suatu saat akan dikembalikan kepada masyarakat berupa fasilitas-fasilitas umum. Pajak sangatlah penting bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Menurut Ngadiman dan Huslin (2015) pengampunan pajak (*Tax Amnesty*) adalah suatu kesempatan waktu yang terbatas pada kelompok pembayaran pajak tertentu untuk membayar sejumlah pajak dan dalam waktu yang berupa pengampunan kewajiban pajak (termasuk bunga dan denda) yang berkaitan dengan masa pajak sebelumnya atau periode tertentu tanpa takut dengan adanya hukuman pidana. Sedangkan menurut Suyanto *et al.* (2016) pengampunan pajak (*Tax Amnesty*) adalah cara yang digunakan pemerintah untuk menarik modal yang telah disimpan

di luar negeri oleh wajib pajak baik wajib pajak orang pribadi maupun badan di Indonesia. Hal ini dikuatkan oleh Wirawan dan Noviari (2017) bahwa *Tax Amnesty* adalah pengampunan pajak yang diberikan oleh pemerintah kepada orang pribadi ataupun badan yang terindikasi melakukan penghindaran pajak dengan cara menyimpan uangnya di luar negeri dan mengungkapkan hartanya serta membayar uang tebusan dengan tarif yang rendah sehingga mereka akan menarik uangnya untuk dibawa kembali ke Indonesia dan sekaligus untuk pemerintah. Dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak melakukan pendataan kembali kepada wajib pajak yang ada. Sedangkan menurut Rahayu (2017) *tax amnesty* adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan juga sanksi pidana di bidang perpajakan. Selain itu, dengan adanya *tax amnesty* ini diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada komunitas yang tidak patuh untuk menjadi wajib pajak yang taat membayar pajak (Nurkhin *et al.*, 2018). Disimpulkan *tax amnesty* adalah keringanan dari pemerintah yang diberikan kepada wajib pajak dalam membayar pajak yang terutang tanpa membayar denda.

Tujuan dari *tax amnesty*, pertama selain untuk menarik kembali dana yang disimpan di luar negeri, tujuan lainnya adalah untuk meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak yang akan digunakan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Indonesia (Wirawan dan Noviari, 2017). Kedua untuk meningkatkan penerimaan negara dan pertumbuhan perekonomian serta dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan (Suyanto *et al.*, 2016). Ketiga untuk meningkatkan kepatuhan pajak dimasa mendatang. Menurut Diamastuti dan Hardianti (2019) *tax amnesty* bertujuan untuk menghasilkan pendapatan pajak suatu negara yang belum atau kurang dibayar. *Tax amnesty* juga dapat meningkatkan faktor-faktor kepatuhan pajak seperti kesadaran bagi wajib pajak dan sanksi perpajakan (Sari dan Wirakusuma, 2018). Tujuan *tax amnesty* ini sendiri sebenarnya untuk masyarakat agar kemajuan negara ini semakin berkembang dengan menarik dana dari luar negeri ke dalam negeri.

Program *tax amnesty* merupakan salah satu bentuk pemberian keringanan pajak yang ditujukan kepada para wajib pajak termasuk BMT sebagai upaya peningkatan kepada pajak. Maka dengan adanya program *tax amnesty* lembaga keuangan *Baitul Maal Wattamwil* lebih patuh pajak karena mendapatkan keringanan pajak untuk pajak yang belum terbayar (Husnurrosyidah dan Nuraeni, 2016). *Tax amnesty* dipandang sebagai jalan keluar dalam upaya meningkatkan penerimaan di masa yang akan datang karena *tax amnesty* memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk masuk atau kembali ke administrasi perpajakan (Sari dan Fidiana, 2017). *Tax amnesty* juga dianggap berperan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengaruh positif yang ditunjukkan oleh *tax amnesty* mengindikasikan bahwa apabila *tax amnesty* mengalami suatu kenaikan maka angka kepatuhan wajib pajak akan mengalami kenaikan pula, begitupun sebaliknya (Rahayu, 2015).

F. Hubungan Perilaku Tax Amnesty dengan Penerimaan Pajak

Rahayu (2015), menyatakan bahwa *Tax amnesty* juga dapat berperan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengaruh positif yang ditunjukkan oleh *tax amnesty* untuk mengindikasikan bahwa apabila *tax amnesty* mengalami kenaikan maka angka kepatuhan wajib pajak akan mengalami kenaikan pula, begitupun sebaliknya. Fatmala dan Ardini (2017) menyatakan bahwa kelemahan yang bila diterapkan dalam pengampunan pajak adalah tidak serta merta akan menjamin peningkatan kinerja setoran pajak ke kas negara. Hal ini sebaliknya bisa mengakibatkan terjadinya potensi penyelewengan, manipulasi dan tindakan lainnya. Para pengusaha yang memperoleh pemutihan pajak dapat berpotensi untuk melakukan penggelapan kewajiban pajaknya. Kecuali bila diberlakukan pengampunan pajak yang bersyarat. Hal ini sejalan dengan penelitian Setiawan *et al.* (2017) menyatakan bahwa *tax amnesty* dapat mengakibatkan adanya ketidakjujuran wajib pajak dalam melaporkan hartanya. *Tax amnesty* ini juga memiliki keunggulan dan kelemahan tersendiri tergantung bagaimana wajib pajak didalam memahami konteks tersebut. Disinilah paran pemerintah diperlukan untuk memberikan pemahaman lebih

mengenai pengampunan pajak. Dengan adanya *tax amnesty* ini dapat memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak.

Pelaksanaan program *tax amnesty* mampu memberikan tambahan penerimaan pajak yang pada gilirannya dapat mencapai efektifitas penerimaan pajak suatu negara. Namun, dari pelaksanaan *tax amnesty* ini dianggap tidak memberikan dampak sepenuhnya terhadap efektifitas penerimaan pajak (Adam *et al.*, 2017). Keunggulan yang diharapkan dari *tax amnesty* yaitu pengimplementasian yang akan dapat mendorong masuknya dana-dana dari luar negeri dan dapat pula meningkatkan penerimaan pajak (Ngadiman dan Huslin, 2015). Adanya *tax amnesty* ini diharapkan bagi para wajib pajak agar sukarela melaporkan pajaknya dan kemudian akan patuh terhadap kewajiban perpajakannya (Husnurrosyidah dan Nuraeni, 2016). *Tax amnesty* sebenarnya pernah dilakukan di Indonesia pada tahun 1984. Pada hakekatnya implementasi *tax amnesty* maupun *sunset policy* sekalipun secara psikologis sangat tidak memihak pada wajib pajak yang selama ini taat dalam membayar pajak. Kalaupun kebijakan ini diterapkan di suatu negara, harus ada kajian mendalam mengenai karakteristik wajib pajak yang ada di suatu negara tersebut, karena karakteristik wajib pajak tentu saja akan berbeda-beda (Ngadiman dan Huslin, 2015). Tujuan pemerintah Indonesia kembali memberlakukan kebijakan *tax amnesty* ini adalah pertama, reparasi atau untuk menarik dana warga negara Indonesia yang ada di luar negeri. Kedua, untuk meningkatkan basis perpajakan nasional dimana aset yang disampaikan dalam suatu permohonan pengampunan pajak dapat dimanfaatkan untuk pemajakan yang akan datang yang nantinya akan berdampak pada efektifitas penerimaan pajak (Adam *et al.*, 2017).

G. Konsep Kepatuhan dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak

Menurut Rahmawati *et al.* (2014) kepatuhan wajib pajak mengalami peningkatan maka penerimaan pajak penghasilan bagi wajib pajak badan juga akan meningkat, sebaliknya jika kepatuhan wajib pajak menurun maka penerimaan pajak penghasilan bagi wajib pajak badan juga akan menurun. (Wirawan dan Noviari 2017) menyatakan peningkatan penerimaan pajak juga dapat

diperoleh dari kepatuhan wajib pajak. Peningkatan penerimaan suatu negara dari sektor pajak sebagai salah satu sumber yang dimungkinkan dan terbuka luas.

Kepatuhan wajib pajak dapat dikatakan sebagai tulang punggung *self assessment system*, dimana dibutuhkan suatu kerelaan dari wajib pajak itu sendiri didalam melaksanakan kewajibannya sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak (Pusporeni *et al.*, 2017). Peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan dan melunasi kewajiban perpajakannya akan dapat meningkatkan penerimaan pajak. Wajib pajak yang tidak patuh terhadap perpajakan cenderung akan mengurangi jumlah pembayaran pajaknya baik secara legal maupun ilegal, wajib pajak yang patuh tentu saja sudah mempunyai pemahaman bahwa pajak harus dihitung dalam jumlah yang benar dan membayar pajak harus tepat pada waktunya (Fatmala dan Ardini 2017). Sangat diperlukan dalam meningkatkan penerimaan pajak karena dengan konsep kepatuhan itu dapat menumbuhkan hasil yang baik.

Diberlakukannya pengampunan pajak intinya serupa dengan diberlakukannya *jarimah ta'zir* yaitu untuk mencegah wajib pajak agar patuh atau tidak lalai dalam melakukan kewajibannya untuk membayar pajak, membuat jera dengan memberi sanksi yang konkrit kepada wajib pajak yang memiliki kesalahan dibidang perpajakan namun tidak mengikuti program pengampunan pajak, memberikan pelajaran yang membuat mereka memperbaiki kesalahan mereka agar dapat menjadi wajib pajak yang patuh dikemudian hari (Ulfanur, 2017). Pengampunan pajak memang menjadi salah satu cara ampuh yang digunakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT karena memperluas basis data dibidang perpajakan di masa mendatang. Namun perlu dipertimbangkan pula dampak negatifnya, bahwa dengan diterapkannya pengampunan pajak yang tidak memberikan sanksi tegas pasca pemberian pengampunan pajak dapat menimbulkan moral *hazard* dikalangan wajib pajak. Para wajib pajak tidak akan langsung seluruhnya menjadi patuh karena justru akan bertambah lalai dan merasa tidak jera dengan ancaman yang diberikan pemerintah kerana berharap pemerintah pasti akan kembali mengulang program pengampunan pajak di masa yang akan datang. Tinjauan hukum

Islam terhadap penerapan pengampunan pajak dapat dioptimalisasikan dengan pendapatan negara di Indonesia, dana dari uang tebusan otomatis akan masuk ke dalam kas negara untuk menambah sisi penerimaan negara yang diragukan kehalalannya. Karena dalam jarimah *ta'zir* harta boleh dirampas untuk kemaslahatan umat apabila terbukti dana tersebut diperoleh dari jalan yang tidak sah (Ridwan *et al.*, 2017). Wajib pajak yang taat terhadap perpajakan harus diberikan penghargaan sebagai contoh pada wajib pajak lainnya (Santoso dan Setiawan, 2009).

H. Teori Keadilan pada *Tax Amnesty*

Persepsi keadilan pajak bagi para wajib pajak sangat menjadi bahan pertimbangan untuk dapat ikut serta dalam program pengampunan pajak atau tidak. Hal tersebut berarti bahwa persepsi wajib pajak yang positif mengenai keadilan pajak sangatlah penting, sehingga dapat meningkatkan jumlah hasil pajak yang ikut serta dalam program pengampunan pajak (Hadisy, 2017). Meskipun kebijakan *tax amnesty* dianggap mencederai keadilan terhadap wajib pajak patuh, tetapi kebijakan tersebut harus dipandang dari asas manfaat, bahwa tujuan *tax amnesty* dalam jangka waktu yang panjang akan meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak melalui perluasan wajib pajak dan penataan basis administrasi pajak (Sa'adah, 2017). Berbagai persepsi mengenai keadilan itu sendiri terlihat dari pandangan seseorang mengenai hal tersebut dan tergantung bagaimana seseorang menanggapi.

Kesetaraan dalam membayar pajak, menurut wajib pajak aturan yang ditetapkan oleh pemerintah tersebut dianggap belum adil terlebih pada pengenaan pajak badan yang beranggapan bahwa tarif yang dikenakan tidak adil, serta manfaat yang diterima oleh wajib pajak dari pemerintah sebagai imbalan atas pembayaran pajak yang dibayarkan telah sesuai atau adil ini terlihat dari jawaban responden yang menunjukkan jawaban yang positif atau sangat setuju dan setuju (Hadisy, 2017). Jika pemerintah membuat sistem pajak secara lebih adil, maka akan meningkatkan rasa memiliki pembayar pajak (membangun identitas dengan komunitas yang lebih besar), dan menunjukkan bahwa uang pajak akan digunakan untuk hal-hal produktif,

kepatuhan pajak akan meningkat tanpa dilakukannya insentif ekonomi. Demikian, upaya dalam meningkatkan insentif non-ekonomi bahkan mengurangi ukuran hukuman yang dapat meningkatkan kadar kepatuhan pajak (Fatmala dan Ardini, 2017). Ada keadilan bagi wajib pajak yang mungkin menurutnya baik tetapi ada juga yang mengatakan bahwa *tax amnesty* ini adil. Menurut Maryani dan Winarno (2017) menyatakan bahwa program pengampunan pajak tidak melanggar asas keadilan, justru dapat menegakkan asas keadilan sebab menjadi tidak adil kalau negara membiarkan wajib pajak yang patuh harus memikul dana pembangunan.

I. Simpulan

Pengampunan pajak (*tax amnesty*) dapat diimplementasikan di Indonesia, namun harus berdasarkan dengan tujuan yang jelas mengenai pelaksanaan *tax amnesty*. Salah satu kelemahan dari *tax amnesty* adalah dapat mengakibatkan berbagai penyelewengan dan moral hazard karena sarana dan prasarana, keterbukaan akses informasi serta pendukung lainnya yang belum memadai sebagai prasyarat pemberlakuan *tax amnesty* tersebut. Perilaku *tax amnesty* berdampak pada ketidakpatuhan seseorang dalam membayar pajak karena merasa telah mendapat pengampunan dan *tax amnesty* dianggap hanya dapat mendongkrak penerimaan negara. Dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak dapat diterapkan kebijakan-kebijakan inovatif seperti *sunset policy*, *tax holiday* dan lain-lain. Peningkatan penerimaan pajak juga dapat diperoleh dari kepatuhan wajib pajak. Peningkatan penerimaan suatu negara dari sektor pajak sebagai salah satu sumber yang memungkinkan dan terbuka luas. Kepatuhan sangat diperlukan dalam meningkatkan penerimaan pajak karena konsep kepatuhan itu dapat menumbuhkan hasil yang baik.

Tax amnesty dalam pandangan Islam, kaitannya dengan penerimaan pajak yaitu sebagaimana terdapat pada firman Allah: "wahai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil QS an-Nisa: 29." Dari pandangan Islam dilarang menimbun harta karena sesungguhnya menimbunkan harta itu akan mengakibatkan laju perekonomian menjadi macet baik jangka panjang maupun jangka pendek yang mengakibatkan perekonomian dan pendapatan masyarakat akan

berkurang dengan mengarah ke masyarakat yang menjadi miskin. Masuknya dana-dana dari kebijakan *tax amnesty* yang dilakukan oleh pemerintah akan berpeluang besar dikelola dibidang syariah. Sangat memungkinkan dana yang masuk dari *tax amnesty* memiliki nilai tersendiri apabila dikelola dibidang syariah dibandingkan yang lain.

Daftar Pustaka

- Adam, O., H. Tuli, dan S. P. Husain. 2017. Pengaruh Program Pajak terhadap Efektifitas Penerimaan Pajak di Indonesia. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 10(1): 61-70.
- Amin, M. 2014. Konsep Keadilan dalam Persepsi Filsafat Ilmu Hukum Islam. *Al-Daulah*, 4(2): 321-341.
- Andinata, M. C. 2015. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, 4(2): 1-15.
- Caroko, B., H. Susilo, dan Zahroh. 2015. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak. *Jurnal Perpajakan*, 1(1): 1-8.
- Diamastuti, E. dan K. N. Hardianti. 2019. The Investigation Of Taxpayer Compliance In Tax Amnesty. *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, 10(2): 85-104.
- Divianto. 2013. Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan KPP Pramata Baturaja. *Jurnal Ekonomi dan Informasi Akuntansi*, 3(3): 317-333.
- Dwisvimiar, I. 2011. Keadilan dalam Persepsi Filsafat Ilmu Hukum. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(3): 523-531.
- Fajriyan, N. A., M. G. W. Endang, dan A. Prasetya. 2015. Pengaruh Persepsi Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional, Sikpa wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Perpajakan*, 1(1): 2-7.
- Fatmala, N. D. dan L. Ardini. 2017. Persepsi Wajib Pajak pada Program Tax Amnesty untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 6(8): 1-14.
- Hadisy, S., E. Sujana, dan A. Purnawati. 2017. Persepsi Wajib Pajak Mengenai Keadilan Pajak, Pengetahuan Pajak terhadap

- Keberhasilan Tax Amnesty pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja. *Akuntansi Program S1*, 8(2): 122-132.
- Helmi, M. 2015. Konsep Keadilan dalam Filsafat Hukum dan Filsafat Islam. *Mazahib*, 14(2): 134-141.
- Husnurrosyidah dan U. Nuraeni. 2016. Pengaruh Tax Amnesty dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak di Bmt Se-Karesidenan Pati. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(2): 211-226.
- Jamil, N. A. 2017. Efektivitas Penerapan Tax Amnesty di Indonesia. *Jurnal Of Multidisciplinary Studies*, 1(1): 51-63.
- Kalbarini, R. Y. 2014. Implementasi Akuntabilitas dalam Konsep Metafora Amanah di Lembaga Bisnis Syariah (Studi Kasus : Swalayan Pamella Yogyakarta). *JESTT*, 1(2): 156-165.
- Maryani, K. dan D. W. Winarno. 2017. Implementasi Kebijakan Pengampunan Pajak Berdasar UU No. 11 Tahun 2016 sesuai Asas Keadilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta. *Jurnal Repertorium*, 4(2): 127-133.
- Mustafa, H. 2012. Perilaku Manusia dalam Perspektif Psikologi Sosial. *Jurnal Administrasi Bisnis*, (7)2: 143-156.
- Nar, M. 2015. The Effects of Behavioral Economics on Tax Amnesty. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 5(2): 580-589.
- Ngadiman dan D. Huslin. 2015. Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris di Kantor Pelayanan Pajak Pramata Jakarta Kembang). *Jurnal Akuntansi*, XIX(2): 225-241.
- Novarela, D. dan I. M. Sari. 2015. Pelaporan Corporate Social Resoponsibility Pebankan Syariah dalam Perspektif Shari'ah Enterprise Theory. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 2(2): 146-154.
- Nurkhin, A., I. Novanty., M. Muhsin, dan S. Sumiadji. 2018. The Influence of Tax Understanding, Tax Awareness and Tax Amnesty toward Taxpayer Compliance. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 22(2): 240-255.

- Nurlaela, A. 2014. Peranan Lingkungan Sebagai Sumber Pembelajaran Geografi dalam Menumbuhkan Sikap dan Perilaku Keruangan Peserta Didik. *Jurnal Gea*, (14)1: 40-49.
- Purnomolastu, N. 2017. Comparison Of Tax Amnesty Implementation In Developing Countries. *Jurnal Bisnis Terapan*, 1(1): 77-86.
- Puspareni, K. D., I. G. A. Purnamawati, dan M. A. Wahyuni. 2017. Pengaruh Tax Amnesty, Pertumbuhan Ekonomi, Kepatuhan Wajib Pajak, dan Transformasi Kelembagaan Direktorat Jenderal Pajak terhadap Penerimaan Pajak Tahun Pratama 2015 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja. *E-jurnal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 7(1): 140-151.
- Rahayu, N. 2017. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Akuntansi Dewantara*, 1(1): 15-29.
- Rahmawati, F. N., S. Santoso, dan N. Hamidi. 2014. Pengaruh Pemeriksaan dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan di Surakarta. *Jupe UNS* 3(1): 72-82.
- Ridwan, F. F., T. Suprihatin, dan E. M. Bayuni. 2017. Tinjauan Hukum Islam dalam Penerapan Pengampunan Pajak sebagai Usaha Optimalisasi Pendapatan Negara di Indonesia. *Keuangan dan Perbankan Syariah*, 3(2): 553-560.
- Sa'adah, N. 2017. Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) berdasarkan Keadilan yang Mendukung Iklim Investasi Indonesia. *Masalah-masalah Hukum*, 4(2): 182-189.
- Sari, A. P. dan M. G. Wirakusuma. 2018. Persepsi Tax Amnesty sebagai Pemoderasi Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan WPOP. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 21(1): 464-487.
- Sari, V. A. P. dan Fidiana. 2017. Pengaruh Tax Amnesty, Pengetahuan Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah dan Riset Akuntansi*, 6(2): 745-757.

- Samsiyah., Y. Sambharakhresna, dan N. Kompyurini. 2013. Kajian Implementasi Corporate Social Resonsibility Perbankan Syariah ditinjau dari Shari'ah Enterprise TheorypadaPT. Bank Pembiayaan Rakyat Bhakti Sumekar cabang Pamekasan. *Jurnal InFESTASI*, 9(1): 47-60.
- Santoso, U. dan J. M. Setiawan. 2009. Tax Amnesty dan Pelaksanaannya di Beberapa Negara: Perspektif bagi Pebisnis Indonesia. *Sosiohumanihora*, 11(2): 111-125.
- Setiawan, P. A., N. K. Sinarwati, dan G. A. Yuniarti. 2017. Pelaksanaan Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 (Study Kasus Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja). *Akuntansi Program S1*, 7(1): 79- 82.
- Suyanto dan I. S. Putri. 2017. Pengaruh Persepsi Wajib Pajak tentang Kebijakan tax amnesty (Pengampunan Pajak), dan Motivasi Membayar Pajak terhadap Kepatuhan Perpajakan. *Jurnal Akuntansi*, 5(1): 49-55.
- Suyanto., P. P. L. A. Intansari, dan S. Endahjati. 2016. Tax Amnesty. *Jurnal Akuntansi*, 4(2): 9-21.
- Ulfanur, M. 2017. Kebijakan Tax Amnesty dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Al-Muamalat Jurnal Ilmu Hukum dan Ekonomi Syariah*, 2(2): 379-395.
- Wirawan, I. B. N. A. P. dan N. Noviari. 2017. Pengaruh Penerapan Kebijakan Tax Amnesty dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 21(3): 2302-8556.

SISTEM ICG DAN *SHARIA COMPLIANCE* DALAM MENCEGAH *FRAUD*

A. Pendahuluan

Perkembangan ekonomi yang begitu cepat yang menyebabkan persaingan di berbagai perusahaan semakin ketat. Sehingga, perusahaan-perusahaan berupaya mempertahankan dan meningkatkan nilai yang dimilikinya untuk menarik para investor dan kreditor supaya tetap menginvestasikan dan memberikan pinjaman dana untuk kelangsungan hidup perusahaan (Najib dan Rini, 2016). Keadaan ini memungkinkan banyaknya terjadi pelanggaran dan penyimpangan yang pada gilirannya akan menimbulkan konsekuensi besar yang akhirnya dapat merugikan banyak pihak yaitu terjadinya masalah kecurangan (*fraud*) yang sangat kompleks (Suryanto dan Ridwansyah, 2016). Praktik ketidakjujuran dan penyalahgunaan keuangan oleh pengelola (*management*) banyak terjadi pada perusahaan-perusahaan atau lembaga-lembaga, baik di sektor swasta maupun sektor publik (Sutrisno, 2013). Dalam akuntansi, dikenal dua jenis kesalahan yaitu kekeliruan (*error*) dan kecurangan (*fraud*). Perbedaan antara kedua jenis kesalahan ini hanya dibedakan ada atau tidak adanya unsur kesengajaan. Standar pun mengenali bahwa seringkali mendeteksi kecurangan lebih sulit dibandingkan dengan kekeliruan karena pihak manajemen atau karyawan akan berusaha menyembunyikan kecurangan itu. Kekeliruan terjadi pada tahap pengelolaan transaksi, jika kesalahan dilakukan dengan sengaja, maka hal tersebut merupakan kecurangan (Yurmaini, 2017).

Islam sangat melarang tindakan kecurangan karena menyebabkan kemudharatan yang akan merugikan semua pihak, dalam prinsip ekonomi Islam meletakkan dasar perekonomian mereka dalam konteks *homo homini socius*, manusia sebagai mitra

dalam bermuamalah merasa saling membutuhkan dan merasa saling membantu (Rini, 2018). Bahkan Rasulullah saw menyampaikan sebuah hadis “bayarlah upah buruhmu sebelum keringatnya kering”. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memberikan perhatian yang besar bagi perkembangan budaya membangun usaha dan perusahaan. Jadi sikap seorang Muslim haruslah bijaksana dalam semua hal, sikap bijaksana inilah yang akan mengantarkan dia kepada kesuksesan di dunia dan juga di akhirat (Jumansyah dan Syafei, 2013).

Kecurangan akuntansi telah banyak menyita perhatian media serta menjadi isu yang menonjol di dunia bisnis. Kecurangan merupakan bentuk penipuan yang sengaja dilakukan sehingga dapat menimbulkan kerugian tanpa disadari oleh pihak yang dirugikan dan memberikan keuntungan bagi pelaku kecurangan (Rini, 2018). Indikasi adanya kemungkinan kecurangan dari bentuk kebijakan yang disengaja dan tindakan yang bertujuan untuk melakukan penipuan atau manipulasi yang merugikan pihak lain. Kecurangan akuntansi meliputi berbagai bentuk, seperti tendensi untuk melakukan tindak korupsi, tendensi dalam penyalahgunaan aset, serta tendensi untuk melakukan penipuan dalam laporan keuangan (Akbar dkk., 2018). *Fraud* merupakan sebuah kecurangan atau penipuan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan secara material dan non-material. Ada 3 kondisi yang menyebabkan terjadinya *fraud* atau disebut dengan *fraud triangle* yaitu: adanya motif atau tekanan (*incentive/pressure*), kesempatan (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalization/attitude*) dan kecenderungan perilaku untuk membenarkan tindakannya (Rahmayani dan Rahmawaty 2017; Mujib 2017; dan Kurrohman dan Widayanti 2018).

Kecurangan laporan keuangan adalah masalah sosial dan ekonomi. Hal ini mengakibatkan pada menurunnya reputasi masyarakat mengenai perusahaan, sehingga dapat mengarahkan perusahaan pada kebangkrutan (Tunggal, 2016). *Fraud* merupakan ancaman laten bagi semua entitas tanpa terkecuali, termasuk pada entitas bisnis berbasis nilai-nilai Islam (Ngumar dkk., 2019). *Fraud* adalah proses pembuatan, meniru, statistik, atau dokumen-dokumen, dengan maksud untuk menipu (Sukardi, 2012). *Fraud* dapat dilakukan oleh berbagai tingkatan baik dari pihak manajemen sampai pemilik. Kejahatan yang serupa dengan

penipuan yaitu kejahatan memperdaya yang lain, termasuk melalui penggunaan benda yang diperoleh melalui pemalsuan. Akan tetapi menyalin, pengganda dan memproduksi tidak dianggap sebagai pemalsuan, meskipun dapat menjadi pemalsuan selama mengetahui dan berkeinginan untuk tidak dipublikasikan.

Meningkatnya kecurangan keuangan di satu sisi memberikan keuntungan bagi para pelaku, akan tetapi meningkatnya kecurangan merugikan pihak lain. *Fraud* yang tidak terdeteksi dapat berkembang menjadi skandal besar yang merugikan banyak pihak. Setiap entitas pasti menghadapi terjadinya *fraud* baik yang dari eksternal perusahaan maupun dari internal perusahaan itu sendiri. Risiko terjadinya *fraud* dalam sebuah lembaga harus tetap diantisipasi agar operasional tetap dalam keadaan yang sehat sehingga tidak mempengaruhi kinerja operasional (Najib dan Rini, 2016). Risiko *fraud* menjadi masalah yang sangat serius baik yang dari eksternal maupun internal perusahaan. Salah satu contoh dampak terjadinya *fraud* ialah kehilangan kepercayaan dalam masyarakat. Untuk menjaga ketaatan prinsip-prinsip dari syariah maka perlu adanya *Islamic corporate governance* atau yang bisa kita sebut dengan tata kelola dalam Islam untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang ada didalam suatu entitas. Rendahnya kepatuhan terhadap prinsip syariah memberikan peluang untuk terjadinya *fraud* pada suatu lembaga. Karena itu, jaminan mengenai pemenuhan terhadap prinsip syariah (*syariah compliance*) dari seluruh aktivitas merupakan hal yang sangat penting dalam kegiatan perusahaan (El Junusi, 2012).

Salah satu cara untuk meminimalkan konflik antara *agen* dan *principal* adalah dengan pengungkapan *corporate governance* dan kepatuhan syariah (Fadhistri dan Triyanto, 2019). Untuk memenuhi kepatuhan direkomendasikan *Islamic Disclosure Index* (IDI) yang dikembangkan berlandaskan tiga indikator pengungkapan Islami, yaitu *sharia compliance*, *corporate governance* dan *social/environment disclosure*. *Fraud* dari sudut pandang syariah dapat dikendalikan dan dimonitor berdasarkan kepatuhan pada prinsip syariah (*sharia compliance*) sebagai bagian dari upaya mencegah potensi *fraud* (Sula dkk., 2014).

Shariah Compliance (kepatuhan syariah) merupakan bagian penting dalam industri keuangan syariah dalam segi pengelolaan

maupun operasionalnya. Tuntutan untuk meningkatkan kerangka regulasi bagi kepatuhan syariah menjadi sebuah tantangan yuridis yang dihadapi oleh setiap negara yang berkeinginan mengembangkan bisnis berbasis syariah (Nurhisam, 2016). *Shariah Compliance* adalah tulang punggung lembaga syariah dalam memberikan legitimasi moral dan spiritual terhadap praktik lembaga syariah sehingga kepercayaan publik dan *stakeholder* tetap terjaga (Nurhasanah, 2013). *Shariah Compliance* merupakan manifestasi pemenuhan seluruh prinsip syariah dalam lembaga yang memiliki wujud karakteristik, integritas dan kredibilitas lembaga syariah (Alfian, 2016 dan Marheni 2017). Dimana budaya kepatuhan tersebut adalah nilai, perilaku dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan terhadap seluruh ketentuan. Selain kepatuhan syariah, penerapan *corporate governance* termasuk mempertimbangkan semua fungsi dan prinsip tata kelola yang dapat mencegah dan mengurangi *fraud*. Hal itu sejalan dengan Muhammad dkk, (2019) mengemukakan selain kepatuhan syariah, penerapan *corporate governance* terbukti bisa meningkatkan citra/reputasi serta kepercayaan masyarakat.

Islamic Corporate Governance yaitu prinsip tata kelola secara Islam pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan lembaga keuangan konvensional. Namun, terdapat resiko yang unik dan tidak terdapat di lembaga keuangan konvensional, yaitu resiko syariah dimana operasionalnya mengadopsi nilai dan prinsip Islam dan disetujui oleh komite syariah sehingga untuk memperkecil terjadinya resiko maka lembaga harus memiliki tata kelola yang baik dalam praktik syariah (Rini, 2018). *Corporate governance* dalam Islam merupakan sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan untuk memenuhi tujuannya dengan melindungi kepentingan dan hak para *stakeholder* dengan menggunakan konsep dasar pengambilan keputusan berdasarkan *epistemologi* sosial-ilmiah Islam yang didasarkan pada ketauhidan Allah swt (Rahmayani dan Rahmawaty, 2017). Dengan diterapkannya tata kelola yang baik dan berdasarkan prinsip Islami seharusnya dapat meminimalisir kecurangan yang terjadi (Fadhistri dan Triyanto, 2019).

Prinsip *corporate governance* dalam Islam mengacu pada al-Qur'an dan hadis yang menjadikannya berbeda dengan konsep *good corporate governance* dalam pandangan dunia barat. Prinsip

good corporate governance secara umum adalah transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kewajaran dan kesetaraan. Menurut (Prabowo, 2018) prinsip *good corporate governance* dalam Islam meliputi tauhid, taqwa dan ridha, *equilibrium* (keseimbangan dan keadilan), dan kemaslahatan. Prinsip-prinsip *corporate governance* dalam perspektif Islam diwujudkan melalui kerangka syariah dalam pelaksanaan bisnis, keadilan dan kesetaraan demi kemaslahatan serta berorientasi pada Allah swt sebagai pemilik dan otoritas tunggal di dunia. Penerapan tata kelola perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip Islam memberikan indikasi kepada masyarakat bahwa lembaga syariah terhindar dari praktik kecurangan (Rahmayani dan Rahmawati, 2017). Bab ini akan membahas mengenai sistem *Islamic Corporate Governancedan Shariah Compliance* dalam mencegah indikasi terjadinya *fraud*.

B. Syariah Enterprise Theory

Syariah enterprise theory merupakan teori yang diinternalisasi dengan nilai-nilai Islam, karena *syariah enterprise theory* mengandung nilai keadilan, kebenaran, kejujuran, amanah, dan pertanggungjawaban (Yurmaini, 2017). Nilai-nilai tersebut telah sesuai dengan karakteristik dari akuntansi syariah yang telah dirumuskan oleh yaitu: *humanis, emansipatoris, transcendental, dan teologikal* (Triyuwono, 2015). Allah swt sebagai sumber utama amanah yang mutlak, sedangkan sumber daya yang dimiliki oleh para *stakeholders* pada prinsipnya adalah amanah dari Allah yang di dalamnya melekat sebuah tanggung jawab untuk tujuan yang ditetapkan oleh sang pemberi amanah. Oleh karena itu, dalam perusahaan syariah tanggung jawab perusahaan tidak sebatas kepada pemilik perusahaan tetapi tanggung jawab kepada Allah swt (Setiawan dan Handayani, 2018).

Pada prinsipnya *shariah enterprise theory* memberikan bentuk utama pertanggungjawaban kepada Allah swt (vertikal) yang kemudian dijabarkan lagi pada bentuk pertanggungjawaban (horizontal) pada umat manusia dan lingkungan alam. Dengan menempatkan Allah sebagai *stakeholder* tertinggi, maka tali penghubung agar perlakuan syariah tetap bertujuan untuk membangkitkan kesadaran ketuhanan para penggunaanya tetap terjamin. *Stakeholder* kedua dari *Shariah Enterprise Theory* adalah

manusia dibedakan menjadi dua, yaitu *direct stakeholders* dan *indirect stakeholders* (Yurmaini, 2017). Dalam *syariah enterprise theory*, manusia adalah *Khalifatul fil Ardh* yang membawa misi menciptakan dan mendistribusikan kesejahteraan bagi seluruh manusia dan alam (Suryanto dan Ridwansyah, 2016).

Perusahaan merupakan sebuah entitas bisnis yang melibatkan banyak pihak untuk mencapai tujuannya. Untuk itu akuntabilitas perusahaan terhadap pihak yang berkepentingan dalam perusahaan sangat dibutuhkan. *Shariah enterprise theory* merupakan konsep teoritis yang mampu memberikan dasar dalam pembentukan prinsip dan teknik akuntansi yang menghasilkan akuntabilitas dan informasi yang dibutuhkan *stakeholders* pada perusahaan syariah (Rini, 2018). *Shariah enterprise theory* merupakan *enterprise theory* yang telah diinternalisasi dengan nilai-nilai Islam guna menghasilkan teori yang yang transcendental dan lebih humanis (Siswanti dkk, 2017). Artinya mengakui adanya pertanggungjawaban tidak hanya kepada pemilik perusahaan saja melainkan kepada kelompok *stakeholders* yang lebih luas. Akuntansi syariah tidak hanya sebagai bentuk akuntabilitas manajemen terhadap pemilik perusahaan, tetapi juga sebagai akuntabilitas kepada *stakeholders* dan Tuhan.

Konsep *shariah enterprise theory* memberikan landasan penting dalam merumuskan prinsip-prinsip *good corporate governance* dalam perspektif syariah, menurut pertanggungjawaban ada tiga yaitu: Allah sebagai sumber utama amanah, manusia sebagai khalifah dan mengenai harta setia seorang Muslim terdapat hak orang lain seperti fakir miskin, anak-anak yatim, ibnu sabil yang dimanifestasikan dalam bentuk zakat, infak dan shadaqah (Rini, 2018). Dalam *shariah enterprise theory* menjelaskan bahwa aksioma terpenting yang harus mendasari dalam setiap penetapan konsepnya adalah Allah sebagai pencipta dan pemilik tunggal dari seluruh sumber daya yang ada di muka bumi ini. Maka yang berlaku dalam *shariah enterprise theory* adalah Allah sebagai sumber utama, karena dialah pemilik tunggal dan mutlak dari seluruh sumber daya yang ada di dunia ini. Sedangkan sumber daya yang dimiliki para *stakeholders* pada prinsipnya adalah amanah dari Allah yang didalamnya melekat sebuah tanggung jawab untuk menggunakan dengan cara dan tujuan yang ditetapkan oleh sang pemberi amanah (Najib dan

Rini, 2016). Alam memberikan kontribusi yang besar bagi keberlangsungan perusahaan. Karena didirikan di atas bumi, menggunakan energi yang terbesar di alam dan semua disediakan oleh alam. Pada prinsipnya *shariah enterprise theory* memberikan bentuk pertanggungjawaban utamanya kepada Allah (vertikal) yang kemudian dijabarkan lagi pada bentuk pertanggungjawaban (horizontal) pada umat manusia dan lingkungan alam. Bentuk akuntabilitas semacam ini berfungsi sebagai tali pengikat agar akuntansi syariah selalu terhubung dengan nilai-nilai yang dapat membangkitkan kesadaran ketuhanan (Triuwono, 2015).

Shariah enterprise theory tidak mendudukkan manusia sebagai pusat dari segala sesuatu sebagaimana dipahami oleh *Antroposentrisme*. Tapi sebaliknya, *shariah enterprise theory* menempatkan Tuhan sebagai pusat dari segala sesuatu. Tuhan menjadi pusat tempat kembalinya manusia dan alam semesta (Anugerah, 2014). Oleh karena itu, manusia disini hanya sebagai wakilnya (*khalitullah fil ardh*) yang memiliki konsekuensi patuh terhadap semua hukum-hukum tuhan. Kepatuhan manusia dan alam semesta dalam rangka kembali kepada tuhan dengan jiwa yang tenang. Proses kembali ke tuhan memerlukan proses penyatuan diri dengan sesama manusia dan alam sekaligus dengan hukum-hukum yang melekat didalamnya, Triuwono (2015).

C. Kepatuhan Syariah (*Shariah Compliance Theory*)

Menurut Prasojo dan Pahlevi (2019) kepatuhan syariah adalah suatu aspek yang membedakan antara sistem ekonomi syariah dengan sistem ekonomi konvensional atau antara lembaga syariah dengan lembaga konvensional. Kepatuhan syariah (*shariah compliance*) merupakan penerapan prinsip-prinsip Islam dalam kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usahayang dilakukan oleh perusahaan (Rini, 2018 dan Najib dan Rini, 2016). Kepatuhan terhadap prinsip syariah dipayungi oleh AAOIFI dalam *Accounting, Auditing and Governance Standard for Islamic Financial Institution* (AAGSIFI). Menurut El Junusi (2012) *Shariah Compliance* merupakan ketaatan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah yang artinya bank dalam operasinya mengikuti ketentuan syariah Islam, khususnya menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam. Pemenuhan terhadap nilai-nilai

syariah (*shariah compliance*) menjadi salah satu aspek mendasar yang membedakan lembaga Islam dengan konvensional. Prinsip syariah sebagai aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam yang berlaku terhadap kegiatan penyimpanan dana, pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan prinsip syariah (Akbar dkk., 2017).

Kepatuhan syariah merupakan fungsi utama dari integritas dan kredibilitas lembaga syariah. Hukum Islam bersumber pada al-Qur'an dan sunnah. Prinsip-prinsip syariah merupakan segala ketentuan yang berlandaskan pada sumber hukum tersebut (Najib dan Rini, 2016). Dalam menerapkan prinsip kepatuhan syariah, perlu dibentuk aturan teknis yang dirumuskan oleh lembaga berwenang dalam sistem hukum negara yang bersifat amaliah. Prinsip syariah dibuat sebagai acuan bagi dewan syariah untuk membuat regulasi terkait aktifitas keuangan berbasis syariah yang ditujukan bagi industri syariah (Akbar dkk., 2017). Kepatuhan syariah merupakan manifestasi pemenuhan seluruh prinsip syariah dalam lembaga yang memiliki wujud karakteristik, integritas dan kredibilitas. Dimana budaya kepatuhan tersebut nilai, perilaku dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan syariah terhadap seluruh ketentuan (Sukardi, 2012). Kepatuhan syariah adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Kepatuhan syariah adalah pemenuhan seluruh prinsip syariah dalam semua kegiatan yang dilakukan sebagai wujud dari karakteristik suatu lembaga.

D. Konsep Islamic Corporate Governance

Islamic corporate governance merupakan turunan konsep dari *good corporate governance* dan mempunyai tujuan yang sama dengan GCG konvensional. Tetapi yang membedakan adalah bahwa *Islamic corporate governance* dilandasi dengan hukum-hukum Islam. Secara global ICG termasuk ke dalam kategori GCG (Rini, 2018). *Good Corporate Governance* adalah sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan dalam menjalankan bisnisnya dalam rangka meningkatkan keberhasilan dan akuntabilitas berdasarkan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika (Rahmayani dan rahmawaty, 2017).

Islamic Corporate Governance menekankan konsep tauhid, syariah dan akhlak. Ketiga hal tersebut saling berkaitan satu dengan yang lain dalam membentuk *Islamic Corporate Governance*. Pondasi utamanya adalah tauhid, selanjutnya syariah dan akhlak. Pengamalan syariah dan akhlak merupakan refleksi dari tauhid (Alfian, 2016). Tata kelola perusahaan yang baik, yang dalam terminologi modern disebut sebagai *Good Corporate Governance* berkaitan dengan hadis Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a yang artinya “Sesungguhnya Allah menyukai apabila seseorang melakukan sesuatu pekerjaan dilakukan dengan baik” (Prabowo, 2018). Bhatti dan Bhatti dalam Akbar dkk, (2017) mendefinisikan tata kelola perusahaan Islami merupakan tata kelola perusahaan berdasarkan prinsip Islam. Kegiatan bisnis dan operasional yang dijalankan harus berdasar pada moral dan nilai-nilai syariah, tujuannya seperti tata kelola perusahaan konvensional, tetapi dalam kode moral yang berbasis agama Islam. *Islamic corporate governance* merupakan seperangkat peraturan upaya perbaikan sistem dan proses dalam pengelolaan organisasi dengan mengatur, memperjelas hubungan, wewenang, hak, dan kewajiban semua pemangku kepentingan mencakup Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Direksi, dan Dewan Komisaris (Jumansyah dan Syafei, 2013).

Prinsip-prinsip *Corporate Governance* dalam perspektif Islam diwujudkan melalui kerangka syariah dalam pelaksanaan bisnis, keadilan dan kesetaraan demi kemaslahatan serta berorientasi pada Allah swt sebagai pemilik dan otoritas tunggal di dunia (Prabowo, 2018). *Islamic Corporate Governance* berusaha merancang bagaimana agen ekonomi, sistem hukum, dan tata kelola perusahaan dapat diarahkan oleh nilai-nilai moral dan sosial berdasarkan hukum syariah. Pendukungnya percaya bahwa semua kegiatan ekonomi, perusahaan, dan bisnis harus didasarkan pada paradigma *ethareligius*, dengan satu-satunya tujuan untuk menjadi kesejahteraan individu dan masyarakat secara keseluruhan (Bhatti dan Bhatti dalam Rini, 2018). *Corporate governance* yang baik menentukan kemampuan perusahaan untuk melindungi kepentingan para *stakeholder*, tetapi *stakeholder* utama dalam perusahaan Islam adalah dewan syariah yang bertanggungjawab sebagai dewan penasihat dan pengawas kepatuhan syariah yang berkewajiban menjamin kepatuhan

manajemen perusahaan terhadap prinsip syariah (Asrori, 2014). *Corporate governance* dalam syariah bertujuan untuk menegakan kejujuran, keadilan, dan perlindungan terhadap kebutuhan manusia sesuai *maqasid al-syariah* (Hadi, 2012).

Implementasi *Islamic Governance* berfungsi untuk mengantisipasi risiko finansial maupun reputasi. Penerapan *Islamic governance* yang baik mempunyai peran yang penting dalam menjaga kredibilitas serta efektivitas dan efisiensi syariah (Hamza, 2013). *Islamic governance* diperlukan dalam rangka membangun perusahaan syariah yang sehat, efektif, efisien dan tangguh. *Islamic Governance* merupakan salah satu bentuk untuk melindungi kepentingan *stakeholder* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum (Rahmat, 2017).

Keunggulan utama *coporate governance* dalam perspektif Islam yaitu orientasi utama pertanggungjawaban manajemen perusahaan adalah Allah sebagai pemilik alam beserta isinya (Siswanti dkk., 2017). Penerapan etika Islam dalam berbisnis yang menjamin perlakuan jujur, adil terhadap semua pihak juga menjadi acuan utama pengelolaan perusahaan yang baik (Muhammad dkk., 2019). *Good Corporate Governance* dijalankan tidak hanya sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen terhadap pemilik modal, tetapi lebih pada kebutuhan dasar setiap Muslim untuk menjalankan syariat Islam secara utuh dan sempurna. Dengan dasar keyakinan kepada Allah maka *good corporate governance* akan memotivasi transaksi bisnis yang jujur, adil dan akuntabel.

E. *Fraud* (Kecurangan)

Menurut *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) *fraud* merupakan tindakan melawan hukum yang sengaja dilakukan untuk tujuan manipulasi atau memberikan laporan yang salah kepada pihak-pihak yang memerlukan. Tindakan ini dapat dilakukan oleh orang dari dalam atau luar perusahaan, baik untuk menguntungkan dirinya sendiri maupun pihak lain. ACFE membagi *fraud* menjadi tiga, yaitu penyalahgunaan aset, penipuan laporan keuangan dan korupsi (Nur'aeni, 2016 dan Sutrisno, 2013). *Fraud* yang sengaja dilakukan oleh manajemen merupakan

suatu tindakan yang melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh pihak regulator (Septriani dan Handayani, 2018 dan Alfian 2016).

Fraud dapat diartikan sebagai kecurangan, penipuan, penggelapan, pemalsuan, penyalahgunaan kekuasaan, dan kelalaian. *Fraud* merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan kebenaran yang dilakukan dengan sengaja untuk memperoleh suatu yang bukan hak pelakunya sehingga dapat mengakibatkan kerugian pada orang lain (Alfian, 2016). Kecurangan adalah penipuan yang disengaja dalam bentuk kebohongan, penjiplakan dan pencurian untuk memperoleh keuntungan berupa uang dan kekayaan, atau untuk menghindari pembayaran, kerugian jasa, menghindari pajak serta mengamankan kepentingan pribadi atau usaha (Suryanto dan Ridwansyah, 2016).

Menurut Alfian (2016) dalam hukum Islam terdapat berbagai macam maksud dari *fraud* diantaranya (*tadlis atau khilaba*), lesi atau keliru (*Ghabn*), penipuan (*shushsh*), ketidakseimbangan (*gharar*), dan tipu daya (*taghrir*) yang digunakan secara bergantian untuk maksud melakukan *fraud*. Dalam Islam, *fraud* merupakan salah satu sifat yang tercela dan harus di jauhi oleh para pelaku ekonomi dalam aktivitasnya. Ayat yang dapat menjadi landasan dalam larangan melakukan kecurangan adalah QS al-Muthaffifin ayat 1-6 dan al-Baqarah ayat 188 (Yurmaini, 2017; Alfian, 2016). Kandungan ayat tersebut mengingatkan para pelaku dusta, nifak dan menipu bahwa akibat dari menipu akan kembali kepada pelakunya, sebagaimana keburukan tidak akan melahirkan kecuali keburukan (Alfian, 2016). Dalam tradisi Islam etika dijadikan sebagai pola bisnis yang dibangun atas dasar syariah menjadi pedoman untuk berperilaku dalam aspek kehidupan.

F. *Islamic Corporate Governanced dan Shariah Compliance dalam Mencegah Fraud*

Penerapan prinsip-prinsip GCG menjadi suatu keharusan bagi sebuah institusi. Hal ini ditujukan kepada tanggungjawab publik (*public accountability*) berkaitan dengan kegiatan perusahaan yang diharapkan mematuhi ketentuan yang telah digariskan dalam hukum positif atau al-Qur'an, hadis, dan *itjma'* para ulama (Maradita, 2014). *Islamic Corporate governance*

merupakan tata kelola perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Penerapan *Corporate governance* digunakan dalam rangka mencegah potensi terjadinya *fraud* pada perusahaan dengan menerapkan prinsip-prinsip *corporate governance* yaitu transparansi, akuntabilitas, kewajaran, integritas dan partisipasi.

Good corporate governance yang dilakukan manajemen dirancang dalam rangka menekan kemungkinan terjadinya kecurangan (*fraud*). Hal ini sesuai dengan penelitian Setiawan, 2016; Indriastuti dan Ifada, 2011; serta Anugerah, 2014 menyatakan bahwa semakin bagus penerapan *good corporate governance*, maka potensi terjadinya *fraud* semakin rendah. Oleh sebab itu, dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dengan berlandaskan prinsip-prinsip Islam, memberikan indikasi dan kesan kepada masyarakat bahwa lembaga syariah terhindar dari praktik kecurangan, walaupun kecurangan sendiri dapat terjadi dimana saja (Najib dan Rini, 2016). Untuk mewujudkan *good corporate governance* pada perusahaan/organisasi dalam mencegah terjadinya *fraud* diperlukan kombinasi mekanisme tata kelola *internal* dan *eksternal* yang dijalankan secara bersamaan (In'airat, 2015 dan Rahmayani dan Rahmawati, 2017). Pengimplementasian mekanisme internal dan eksternal *corporate governance* dengan memperhatikan dan menjalankan semua prinsip dan fungsi dapat mengurangi terjadinya *fraud* (Anugerah, 2014). Semakin baik penerapan tata kelola perusahaan maka diharapkan semakin sedikit jumlah *fraud* yang terjadi. Baik tidaknya penerapan tata kelola dapat dilihat dari hasil *self assessment* yang dilakukan melalui nilai komposit hasil *self assessment*, yang mana semakin kecil nilai komposit yang dihasilkan maka semakin baik level penerapan tata kelola. Maka dapat disimpulkan bahwa semakin kecil nilai komposit hasil *self assessment* diharapkan *fraud* yang terjadi semakin rendah atau berkurang.

Namun hal ini berbeda dengan penelitian Mardita (2014); In'airat (2015); dan Rahmanti (2013) menyatakan bahwa *Islamic corporate governance* tidak berpengaruh terhadap *fraud*. Dimana Penerapan *Islamic corporate governance* merupakan suatu keharusan bagi entitas, hal ini lebih ditujukan kepada adanya tanggung jawab publik terkait dengan kegiatan operasional yang diharapkan mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, perlu dilakukan perbaikan tata kelola agar sesuai

dengan prinsip-prinsip Islam serta efektif untuk diterapkan. *Islamic corporate governance* yang diproksi dengan dewan direksi tidak sepenuhnya mampu mengendalikan dan mengurangi risiko *fraud*, karena *fraud* dapat terjadi pada setiap level organisasi (Anugerah, 2014; Rahmayani dan Rahmawaty 2017; dan Najib dan Rini 2016).

Shariah compliance atau kepatuhan syariah merupakan implementasi dari prinsip syariah yang diukur dengan tingkat ketaatan terhadap pelaksanaan kegiatan dalam lembaga syariah menggunakan proksi dewan pengawas syariah. *Shariah Compliance* merupakan suatu arahan bagi moral suatu organisasi syariah, sebab itu semakin baik kepatuhan syariah pada suatu organisasi, maka hal ini dapat mengurangi rasionalisasi karyawan organisasi tersebut untuk melakukan kecurangan. Untuk menjamin teraplikasinya prinsip-prinsip syariah perusahaan, maka diperlukan pengawasan syariah yang diperankan oleh Dewan Pengawas Syariah (El Junusi, 2012). *Shariah compliance* yang diproksikan *Profit Sharing Ratio* berpengaruh terhadap *fraud*. Hal tersebut berarti semakin tinggi tingkat kepatuhan syariah maka semakin rendah *fraud* yang terjadi. Ini mengindikasikan bahwa prinsip syariah apabila diterapkan dengan baik dapat mengurangi tingkat terjadinya kecurangan (Najib dan Rini, 2016). Namun hal ini berbeda dengan penelitian Najib (2016) yang diproksikan *Islamic Income Ratio*, *Islamic Investment Ratio* tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Hal ini berarti bahwa pada aktivitas pendapatan dan investasi telah dilakukan atau didominasi oleh aktivitas yang sifatnya syariah dan sesuai prinsip Islam akan tetapi masih terdapat kecurangan yang terjadi sehingga aktivitas pendapatan dan investasi yang telah sesuai dengan prinsip syariah tersebut tidak berpengaruh terhadap kecurangan yang terjadi.

G. Simpulan

Terkait tata kelola perusahaan secara Islam dan kepatuhan pada prinsip-prinsip syariah dapat dikatakan sebagai unsur yang sangat penting di dalam entitas syariah, oleh karena itu tata kelola perusahaan serta rendahnya kepatuhan syariah dapat mempengaruhi kinerja serta memberikan peluang untuk terjadinya kecurangan. Penerapan *Corporate governance* digunakan

dalam rangka mencegah potensi terjadinya *fraud* pada perusahaan dengan menerapkan prinsip-prinsip *corporate governance* yaitu transparansi, akuntabilitas, kewajaran, integritas dan partisipasi. Dengan diterapkannya prinsip-prinsip syariah serta tata kelola perusahaan secara Islam akan mengurangi tindak kecurangan yang terjadi karena ketika sebuah lembaga lebih mematuhi prinsip Islami dalam pengelolaan dananya dan mengurangi pendapatan yang bukan berdasarkan prinsip Islami diharapkan dapat meminimalisir kecurangan. *Shariah Compliance* suatu arahan bagi moral suatu organisasi syariah, sebab itu semakin baik kepatuhan syariah pada suatu organisasi, maka hal ini dapat mengurangi rasionalisasi karyawan organisasi tersebut untuk melakukan kecurangan juga prinsip syariah apabila diterapkan dengan baik dapat mengurangi tingkat terjadinya kecurangan.

Reputasi sebuah entitas di masyarakat ditentukan dari rendahnya *fraud* yang berarti nilai-nilai Islam memang sudah terinternalisasi dan menjadi budaya korporasi seluruh pegawainya. Hal ini menjadi simbol bahwa entitas mampu menegakkan syariat Islam sehingga dapat melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar*. Kepercayaan masyarakat akan semakin meningkat dengan informasi non-*fraud* yang dipublikasi sebuah entitas melalui publikasi nilai komposit GCG yang dilaksanakan secara mandiri. Islam memiliki nilai-nilai tertentu yang mengatur langkah manusia dalam hidupnya. Di dalam Islam tidak diperbolehkan seseorang untuk melakukan penipuan. Sesuai dengan ayat dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 8-10 yang berisi bahwa diantara petunjuk yang terkandung dalam tiga ayat ini adalah untuk mengingatkan para pelaku dusta, nifak dan menipu, karena sesungguhnya akibat dari menipu itu akan kembali kepada pelakunya, sebagaimana keburukan tidak akan melahirkan kecuali keburukan.

Daftar Pustaka

- Akbar, D. A., F. Africano., R. Parlindungan dan S. Khairani. 2017. Relevansi Fraud pada Bank Syariah. *Simposium Nasional Akuntansi XX, Jember*
- Alfian, N. 2016. Nilai-Nilai Islam Dalam Upaya Pencegahan Fraud. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, 1(2): 205-218.
- Anugerah, R. 2014. Peranan Good Corporate Governance dalam Pencegahan Fraud. *Jurnal Akuntansi*, 3(1): 101-113.
- Asrori. 2014. Implementasi Islamic Corporate Governance dan Implikasinya Terhadap Kinerja Bank Syariah. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 6 (1): 90-102.
- El Junusi, R. 2012. Implementasi Syariah Governance serta Implikasinya terhadap Reputasi dan Kepercayaan Bank Syariah. *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, 12(1): 87-111.
- Fadhistri, K. A dan D. N. Triyanto. 2019. Pengaruh Islamic Corporate Governance dan Sharia Compliance terhadap Indikasi Terjadinya Fraud pada Bank Umum Syariah di Indonesia (Studi Empiris pada Bank Umum Syariah Periode 2014-2017). *Jurnal E-Proceeding of Management*, 6(2): 3265-3272.
- Hadi, K. 2012. Implementasi Maqoshid Syariah sebagai Indikator Perusahaan Islami. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, 1(3):140-150.
- Hamza, H. 2013. Sharia governance in Islamic banks: effectiveness and supervision model. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 6(3): 226-237.
- In'airat, M. 2015. The Role of Corporate Governance in Fraud Reduction A Preception in the Saudi Arabia Business Environment. *Journal of Accounting and Finance*, 15(2): 23-45.
- Indriastuti, M. dan L. M. Ifada. 2011. Pengaruh Kualitas Pelaksanaan Corporate Governance dan Kompleksitas

- Bank Terhadap *Fraud* (Studi Kasus pada Bank Umum Tahun 2010). *Jurnal Ekobis*, 12(2): 168-176.
- Jumansyah dan A. W. Syafei. 2013. Analisis Penerapan Good Governance Business Syariah Dan Pencapaian Maqashid Shariah Bank Syariah Di Indonesia. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, 2(1): 25-38.
- Kurrohman, T dan P. Widyayanti. 2018. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kecenderungan Kecurangan (Fraud) di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. *Journal of Applied Managerial Accounting*, 2(2): 245-254.
- Maradita, A. 2014. Karakteristik Good Corporate Governance pada Bank Syariah dan Bank konvensional. *Jurnal Yuridika*, 29(2): 191-204.
- Marheni. 2017. Analisis Kepatuhan Prinsip-Prinsip Syariah terhadap Kesehatan Finansial dan Fraud pada Bank Umum Syariah. *Asy-Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam*, 2(1): 143-170.
- Muhammad, R., R. Kusumadewi dan S. Saleh. 2019. Analisis Pengaruh Syariah Compliance dan Islamic Corporate Governance terhadap Tindakan Fraud (Studi Empirik pada BUS di Indonesia Periode 2013-2017). *Iqtishadia: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 6(1): 66-79.
- Mujib, A. 2017. Syariah Fraud Model: Sebuah Konsep Dasar. *Prosiding Seminar Nasional dan Call for Paper Ekonomi dan Bisnis*, 112-127.
- Najib dan Rini. 2016. Sharia Compliance, Islamic Corporate Governance dan Fraud Pada Bank Syariah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 4(2): 131-146.
- Ngumar, S., Fidiana, dan E. D. Retnani. 2019. Implikasi Tata Kelola pada Fraud bank Islam. *Jurnal Reviu Akuntansi dan keuangan*, 9(2): 226-239.
- Nur'aeni. 2016. Pengaruh Efektivitas Sistem Pengendalian Internal dan Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Fraud pada Bank Syariah Mandiri Cabang Ahmad Yani Bandung. *Jurnal Ekspansi*, 8(2): 237-260.

- Nurhasanah, N. 2013. Pengawasan Islam dalam Operasi Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Mimbar*, 29(1): 11-18.
- Nurhisam, L. 2016. Kepatuhan Syari'ah (Sharia Compliance) dalam Industri Keuangan Syari'ah. *Ar-Raniry: International Journal of Islamic Studies*, 3(1): 23-44.
- Prabowo, M. S. 2018. Good Corporate Governance (GCG) dalam Prespektif Islam. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE*, 11(2): 257-270.
- Prasojo, E dan R. W. Pahlevi. 2019. Implementasi Kepatuhan Syariah Melalui Optimalisasi Dewan Syariah Nasional dan Dewan Pengawas Syariah (Sebuah Pendekatan Kerangka Dasar). *Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, XIV(2): 238-256.
- Rahmanti, V. N. 2013. Mengapa Perbankan Syariah Masih Disamakan dengan Perbankan Konvensional. *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi Islam*, 1(1): 45-67.
- Rahmat, B. Z. 2017. Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Pelaksanaan Good Corporate Governancedi BPRS Harum Hikmah Nugraha. *Jurnal Amwaluna*, 1(2): 276-296.
- Rahmayani dan Rahmawaty. 2017. Pengaruh *Islamic Corporate Governance* Dan *Internal Control* Terhadap Indikasi Terjadinya *Fraud* Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 2(3): 18-38.
- Rini, N. 2018. Implementasi Islamic Corporate Governance (ICG) pada Perbankan Syariah di Indonesia. *The International Journal of Applied Business*, 2(1): 29-38.
- Septriani, Y. dan D. Handayani. 2018. Mendeteksi Kecurangan Laporan Keuangan dengan Analisis Fraud Pentagon. *Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Bisnis*, 11(1): 11-23.
- Setiawan, W. 2016. Fraud: Suatu Tinjauan Teoritis. *KOMPAK. Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Sistem Informasi*, 1(7): 137-154.
- Siswanti, I., U. Salim., E. G. Sukoharsono dan S. Aisjah. 2017. The Impact of Islamic Corporate Governance, Islamic Intellectual Capital and Islamic Financial Performance on

Sustainable Business Islamic Banks. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 7(4): 316-323.

Sukardi, B. 2012. Kepatuhan Syariah (Shariah Compliance) dan Inovasi Produk Bank Syariah di Indonesia. IAIN Surakarta: Surakarta.

Sula, A. E., M. N. Alim dan Prasetyono. 2014. Pengawasan Strategi Anti Fraud Dan Audit Kepatuhan Syariah Sebagai Upaya Fraud Prefentive Pada Lemabaga Keuangan Syariah. *Jurnal Jaffa*, 02(2): 91-100.

Suryanto, T dan R. Ridwansyah. 2016. The Shariah Financial Accounting Standards: How they Prevent Fraud in Islamic Banking. *Journal European Research Studies*, XIX(4): 140-157.

Sutrisno, C. R. 2013. Audit Forensik: Membongkar dan MencegahKejahatan Keuangan. *Prosiding Seminar Nasional Audit Forensik*.

Triyuwono, I. 2015. Perspektif, Metodologi, dan Teori Akuntansi Syariah. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Tunggal, A. W. 2016. Kecurangan dan Pencegahan Kecurangan dalam Akuntansi Fraud dan Fraud Preventions. Jakarta: Harvarindo.

Yurmaini. 2017. Kecurangan Akuntansi (*Fraud Accounting*) dalam Perspektif Islam. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 3(1): 93-104.

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS) DALAM BINGKAI MAQASHID AL-SYARIAH

A. Pendahuluan

Kajian pembangunan telah menjadi perhatian besar bagi para pemimpin negara dalam menyusun agenda pembangunan baik di tingkat nasional maupun global. Berbagai formula dengan fokus dan solusi yang berbeda telah dirancang untuk menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks. Mengingat bahwa pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah saat ini pun masih dianggap belum merata. Hal ini menyiratkan potret kehidupan di belakang perumahan mewah, terdapat lingkungan kumuh yang memprihatinkan. Angka pengangguran semakin meningkat dan penyakit-penyakit kronis menular pun semakin merajalela, lingkungan semakin terdegradasi dan tidak mampu lagi menopang keseimbangan alam (Asri, 2017). Pembangunan yang dilaksanakan selama ini cenderung memanfaatkan sumber daya alam dengan semena-mena, tanpa memperhatikan aspek lingkungan yang ada (Wahyuningsih, 2017). Agenda pembangunan yang didalihkan mampu untuk mengatasi permasalahan kemiskinan dan kesenjangan global, kemudian memunculkan berbagai tanggapan baik itu berupa kritikan maupun dukungan terkait agenda pembangunan global. Kerusakan lingkungan yang marak menjadi sorotan merupakan dampak yang ditimbulkan oleh pembangunan yang bersifat eksploitatif demi mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin dengan tidak mengindahkan lingkungan sebagai faktor penting dalam roda ekonomi. Berbagai kasus kerusakan lingkungan dalam skala nasional dapat dilihat melalui kasus PT Lapindo Brantas, PT Newmont Minahasa Raya, PT Freeport, dan berbagai kasus lainnya, merupakan bukti kongkrit bahwa dunia usaha,

khususnya yang melakukan aktivitas produksi (perusahaan manufaktur dan perusahaan pengolah sumber daya alam), cenderung merusak lingkungan (Burhani, 2013).

Pada tahun 1980-an keresahan dan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan yang merupakan dampak dari pembangunan ekonomi, mulai diperhatikan karena selama ini isu lingkungan merupakan isu yang minor untuk dibahas (Mubarok dan Afrizal, 2018). Hal ini menjadi tantangan dunia dalam mengubah paradigma pembangunan yang memiliki tujuan untuk memakmurkan seluruh masyarakat, tanpa mengorbankan lingkungan. Gagasan *Sustainable Development Goals* (SDGs) kini hadir dan menjadi sorotan dunia dan sebagai sebuah kerangka kerja mengenai prioritas-prioritas pembangunan berkelanjutan di antara 193 negara anggota PBB. SDGs dihadirkan untuk menggantikan *Millennium Development Goals* (MDGs) dengan tujuan yang lebih memenuhi tantangan masa depan dunia (Wahyuningsih, 2017). Konsep Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang ditargetkan sejak 2016-2030 menggantikan MDGs yang berakhir di tahun 2015 menjadi angin segar terhadap pola dan praktik pembangunan (Adriyani, 2017). MDGs atau Tujuan Pembangunan Milenium berakhir pada 2015 dan diganti dengan SDGs atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, dengan maksud memperkuat keterlibatan masyarakat Internasional dalam mengentaskan kemiskinan dan kelaparan (Ridha, 2015).

Bagi Indonesia sendiri, kemiskinan masih merupakan persoalan yang menjadi beban berat dan akan terus menjadi persoalan yang tidak akan pernah hilang di dunia ini. Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan antara lain pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi geografis, gender dan kondisi lingkungan (Ustama, 2009). Seperti kemiskinan yang terjadi di Kota Batu, dengan melihat data yang ada pada Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Batu menunjukkan persentase penduduk miskin di tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar 0.30% menjadi 4.75%. Kenaikan persentase kemiskinan di Kota Batu tahun 2013 ini banyak dipicu oleh faktor eksternal yang relatif sulit dikendalikan (Ludoni *et al.*, 2016). Suatu negara dikatakan berhasil dalam pembangunan jika ia mampu menekan

angka kemiskinan dan mampu memperhatikan masalah-masalah krusial yang terjadi di lingkungan masyarakat.

Selama ini orientasi pembangunan hanya difokuskan pada pencapaian *Product Domestic Bruto* (PDB) atau pertumbuhan ekonomi yang tinggi tanpa memperhatikan aspek keberlanjutan sosial dan lingkungan. Orientasi pembangunan yang sesungguhnya semestinya harus memperhatikan kesejahteraan dan keadilan dalam masyarakat. Hal ini harus sejalan dengan program SDGs yaitu berorientasi untuk meningkatkan kesejahteraan manusia secara menyeluruh, perdamaian dunia dan kelestarian lingkungan. Konsep pembangunan ini didorong tidak hanya mendapatkan keuntungan yang tinggi namun juga berkelanjutan dan ramah lingkungan yang tidak merusak alam serta memperhatikan kesejahteraan sosial (Sari *et al.*, 2018). Berdasarkan konteks inilah, gagasan pembangunan berkelanjutan muncul sebagai pendekatan yang dasarankan (Ngoyo, 2015).

Konsep pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development* merupakan sebuah konsep yang ditawarkan untuk memberi solusi atas kerusakan lingkungan yang terjadi sebagai dampak negatif aktivitas ekonomi dan pembangunan ekonomi yang tidak terencana (Mubarok dan Afrizal, 2018). Melihat deraan tantangan dunia yang menekankan pada pengintegrasian pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan, tantangan berat tertuju kepada para pengambil kebijakan di setiap negara untuk lebih bijak dalam pengelolaan pembangunan. Program pembangunan berkelanjutan, dalam hal ini tiga aspek penting pada SDGs termasuk hal yang membutuhkan perhatian. Arah pembangunan global saat ini merupakan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yang memberikan wacana baru mengenai pentingnya melestarikan lingkungan alam demi masa depan, generasi yang akan datang (Sitorus, 2017).

B. *Maqashid al-Syariah dan Maslahah (Kemaslahatan)*

Maqashid al-syariah secara bahasa terdiri dari dua kata, yaitu *maqashid* dan *al-syariah*. *Maqashid* berarti tujuan, sedangkan *al-Syariah* adalah jalan menuju sumber air. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *maqashid al-syariah* adalah tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia baik di dunia dan di akhirat (Ramadhan *et al.*, 2018). Ruang lingkup ushul fiqh

dijelaskan bahwa *maqashid al-syariah* merupakan maksud dan tujuan diturunkannya syariat Islam. Namun, pada dasarnya *maqashid al-syariah*, selalu mengalami perkembangan dari makna yang sederhana sampai pada makna yang lebih universal. Secara istilah, *Maqashid Syariah* adalah tujuan-tujuan syariat Islam yang terkandung dalam setiap aturannya. Banyaknya yang mendefinisikan bahwa *maqashid al-syariah* itu sendiri adalah untuk menggapai manfaat dan menolak mafsadat, atau dalam artian untuk memperoleh kebaikan dan menghindari keburukan. Definisi yang bervariasi tersebut mengindikasikan kaitan erat *maqashid al-syariah* dengan kemaslahatan. Hal ini berarti bahwa prinsip-prinsip dalam *maqashid al-syariah* yang memuat makna dan hikmah yang dikehendaki oleh *al-syari'* dari pensyariaan hukum dalam rangka mewujudkan kemaslahatan makhluk, baik ketika di dunia maupun di akhirat.

Secara substansial tujuan syariat yang disebut dengan *maqashid al-syariah* mengandung kemaslahatan (Firdaus, 2018). Proses pencapaian kesejahteraan ataupun tujuan ini, memerlukan perhatian terhadap metode pencapaiannya yaitu *maqashid al-ayariah*. Hal ini bermakna bahwa tujuan syariat Islam memberikan *maqashid al-syariah* sebagai jalan untuk mencapai kesejahteraan tersebut. Lebih dari itu, instrumen yang terkandung di dalam *maqashid al-syariah* yakni mengupayakan pengintegrasian kesejahteraan dalam aspek material dan aspek spiritual. Landasan konsep *maqashid al-syariah* dinilai sangat penting untuk diimplementasikan agar dapat menjadi pengawal bagi pembangunan berkelanjutan dan dapat mengikuti perkembangan dunia global yang tidak lepas dari prinsip dasar syariah. Sebagaimana, tujuan akhir yang harus terealisasi adalah diaplikasikannya syariat. Pengaplikasian syariat dalam kehidupan nyata (dunia) adalah untuk menciptakan kemaslahatan atau kebaikan para makhluk di muka bumi, yang kemudian berimbas pada kemaslahatan atau kebaikan di akhirat (Mutakin, 2017).

Maslahah berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata *masalah*, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan. Menurut bahasa, '*maslahah*' berasal dari kata *salaha, yasluhu, salahan, (حلص, احلاص)* artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat (Mujtahidah, 2017). Syariah Islam

diturunkan untuk mewujudkan *mashlahah* dan menjauhkan *mafsadah*. Sebagaimana, *mashlahah* adalah segala bentuk keadaan, baik material maupun nonmaterial, yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia (Bahsoan, 2011). Kemaslahatan itu sendiri kemudian terbagi menjadi tiga kebutuhan, yaitu; *dharuriat* (primer), *haajiyat* (sekunder) dan *tahsiniat* (tersier). Pertama adalah sesuatu yang harus ada demi terwujudnya kehidupan manusia. Seperti beragama, makan, minum, nikah, belajar, dan lain-lainnya, yang terangkum dalam 5 bagian; *hifdzu al-din* (memelihara agama), *hifdzu al-nafs* (memelihara jiwa), *hifdzu an-nasl* (memelihara keturunan), *hifdzu al-mal* (memelihara harta) dan *hifdzu al-aql* (memelihara akal). Sedangkan cara untuk melestarikannya adalah dengan 2 cara yaitu; *hifdzuha min nahiyati al-wujud* (menjaga hal-hal yang dapat melanggengkan keberadaannya) dan *hifdzuha min nahiyati al-adam* (mencegah hal-hal yang dapat menghilangkannya).

Menciptakan kemaslahatan bagi umat manusia dan mencegah adanya kemudharatan menjadi dasar dalam perwujudan kehidupan yang sejahtera. Beberapa ulama menyatakan *maslahah* mestilah berjalan mengikuti landasan syariat dan bertujuan membawa kemanfaatan dan menolak kemudharatan. Perihal manfaat dan mudarat bukanlah dirujuk pada kehendak makhluk, bahkan dirujuk kepada kehendak-kehendak syarak (Chik *et al.*, 2018). Semuanya mengandung arti adanya manfaat baik secara asal maupun melalui proses, seperti menghasilkan kenikmatan dan faedah, ataupun pencegahan dan penjagaan, seperti menjauhi kemudharatan dan penyakit (Sakirman, 2016). *Maslahah* terhimpun pada lima perkara asas yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Secara prinsipnya, tujuan penetapan syariat Islam menegaskan bahwa kemaslahatan wajib diletakkan sebagai tujuan utama dengan memelihara lima perkara asas demi membawa kesejahteraan dan keharmonisan dari berbagai sudut kehidupan di muka bumi. olehnya itu, perlu dipahami secara mendalam ruh atau jiwa kemaslahatan itu sebagai sebuah asas dalam Islam yang dapat diaplikasikan dalam cakupan global. Tanpa mengenali hakikat keberadaannya, maka dengan mudah pula bergesernya eksistensi dari kemaslahatan itu.

C. *Sustainable Development Goals (SDGs)*

Era MDGs yang telah berakhir pada 2015, kini sedang disusun sebuah dokumen pembangunan baru untuk melanjutkan capaian-capaian yang belum sempat terealisasi sembari menyempurnakan yang lebih relevan dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan bagi rakyat (Ngoyo, 2015). Wahyuningsih (2017)_mengutarakan bahwa SDGs dirancang sebagai kelanjutan dari MDGs yang belum tercapai tujuannya sampai dengan akhir tahun 2015. Secara formal, SDGs didiskusikan pertama kali pada *United Nations Conference on Sustainable Development* yang diadakan di Rio de Janeiro bulan Juni 2012. SDGs itu sendiri memiliki sasaran yang lebih universal, dengan tujuan untuk memelihara keseimbangan tiga dimensi pembangunan berkelanjutan: lingkungan, sosial dan ekonomi. Selain itu, perlunya untuk menjaga keseimbangan tiga dimensi pembangunan tersebut, dengan memperhatikan 5 pondasi utama yaitu manusia, planet, kesejahteraan, perdamaian, dan kemitraan yang ingin mencapai tiga tujuan mulia di tahun 2030 berupa mengakhiri kemiskinan, mencapai kesetaraan dan mengatasi perubahan iklim (Ishartono dan Raharjo, 2016). Olehnya diperlukan penanganan program yang berkesinambungan dan konsisten serta membandingkan dengan penerapan agenda pembangunan sebelumnya pada MDGs.

Sustainable Development Goals (SDGs) adalah sebuah program pembangunan berkelanjutan yang mencakup 17 tujuan dengan 169 target yang terukur dengan tenggang waktu yang di tentukan (Umam, 2018). Program ini merupakan agenda pembangunan dunia yang bertujuan untuk kesejahteraan manusia dan planet bumi. SDGs kemudian dijadikan acuan dalam kerangka pembangunan dan perundingan yang dilakukan oleh negara-negara di dunia sebagai pengganti pembangunan global *Millenium Development Goals (MDGs)* yang telah berakhir di tahun 2015. Selain itu, SDGs dianggap sebagai suatu rencana aksi untuk umat manusia, planet, dan kemakmuran yang bertujuan untuk memperkuat perdamaian universal dan memenuhi tantangan masa depan dunia. Tujuan dan target tersebut akan menstimulus aksi dalam 15 tahun kedepan pada area-area yang penting bagi kemanusiaan dan planet yaitu: manusia, planet, kemakmuran, perdamaian, dan kemitraan (Wahyuningsih, 2017). Berbeda

dengan MDGs yang menargetkan untuk mengurangi separuh dari 8 target tujuan global, kini SDGs jauh lebih ambisius untuk menuntaskan seluruh 17 target global pada tahun 2030.

Konsep SDGs itu sendiri lahir pada kegiatan Konferensi mengenai Pembangunan Berkelanjutan yang dilaksanakan oleh PBB di Rio de Janeiro tahun 2012 (Ishartono dan Raharjo, 2016). Tujuan yang ingin dicapai dalam pertemuan tersebut adalah untuk memperoleh tujuan bersama yang universal dengan mampu memelihara keseimbangan tiga dimensi pembangunan berkelanjutan: lingkungan, sosial dan ekonomi. Maknanya adalah SDGs dilaksanakan tidak hanya oleh negara berkembang, namun juga oleh negara maju untuk kemajuan seluruh bangsa di dunia. SDGs merupakan kesatuan antara dimensi pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan yang komprehensif serta saling terkait (Surya, 2018). SDGs dianggap layak untuk mengkolaborasi program dan tujuannya pada skala global atas dasar untuk mengedepankan prinsip-prinsip pembangunan yang universal. Hal ini merupakan model pembangunan yang mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat dan sebagai lingkaran positif yang baik bagi perekonomian maupun bagi masyarakat untuk mampu menangani permasalahan dengan mengimplementasikan kebijakan pembangunan baik di lingkup negara maupun global yang ditargetkan selama 15 tahun mendatang.

Merujuk pada kondisi pembangunan yang telah menjadi perhatian utama dari setiap negara. Hal ini tidak terlepas dari permasalahan lingkungan yang kian krisis, seperti pemanasan global, meluasnya gurun, krisis keragaman hayati, gangguan pada lapisan ozon dan hutan hujan tropis, polusi air dan udara (Segara, 2015). Semakin beragamnya tantangan pembangunan, menjadi penting untuk saling melakukan kerjasama secara global dalam menjalankan pembangunan. Hal ini mendorong negara-negara saling berkomitmen untuk menyusun sebuah agenda pembangunan global yang berisikan formula-formula pembangunan dalam mengatasi kemiskinan dan kesenjangan global yang menjadi tantangan utama bagi setiap negara di dunia.

D. Interkoneksi Tiga Pilar Utama SDGs

Secara umum dipahami bahwa sebuah pembangunan berkelanjutan perlu menyeimbangkan tiga pilar utama antara lingkungan, sosial, dan ekonomi yang dijadikan sebagai tiga perspektif pembangunan dalam peningkatan mutu hidup manusia. Namun, permasalahan paling besar terletak pada ketimpangan ekonomi. Ketimpangan ekonomi itu sendiri tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor semata, melainkan dipengaruhi oleh banyak faktor yang umumnya faktor tersebut saling berkaitan satu sama lainnya. Faktor-faktor tersebut di antaranya dapat berasal dari karakteristik geografis, kondisi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya ekonomi di suatu daerah. Sebuah negara yang masih terdapat kemiskinan dan ketimpangan yang bersifat endemik akan selalu rentan terhadap krisis lingkungan. Pembangunan berkelanjutan pada dasarnya dapat dicapai jika mampu memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengesampingkan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Hal ini bermakna bahwa perlunya mengelola dan memanfaatkan kelestarian lingkungan. Upaya ini dapat mendorong terjadinya perubahan sikap yang mendorong masa depan yang lebih berkelanjutan dalam konteks integritas lingkungan, keberlanjutan pembangunan ekonomi, dan kesejahteraan sosial. Adanya 17 tujuan global yang tertuang dalam SDGs berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi dan mencari jalan untuk memajukan ekonomi dalam jangka panjang. Fokus utama pada lingkungan, ekonomi, dan sosial merupakan ciri pembangunan berkelanjutan dan merupakan konsensus yang luas diantara pihak-pihak yang berwenang (Sachs, 2012).

Berdasarkan pada berbagai macam isu mengenai lingkungan telah melibatkan dimensi sosial serta ekonomi dalam setiap upaya konservasi alam yang dilakukan. Umumnya, permasalahan lingkungan dipicu oleh berbagai macam kegiatan masyarakat, baik dalam bentuk memproduksi, konsumsi, dan distribusi barang dan jasa. Wilayah perkotaan dengan berbagai fasilitas menjadi daya tarik penduduk desa dan sektor industri telah menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi, mejadikan beban alam semakin berat karena terus dieksploitasi. Menyadari hal tersebut, menunjukkan bahwa pada dasarnya alam merupakan

modal dan faktor utama dalam proses pembangunan yang tidak terlepas dari aspek sosial yang bertujuan untuk mengakhiri segala bentuk kemiskinan. Alasannya, karena kemiskinan telah menjadi perhatian yang sangat besar di dunia khususnya Indonesia. Kemiskinan juga tercipta akibat adanya ketimpangan dalam penyediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat dan secara tidak langsung menunjukkan angka pengangguran yang tinggi. Tanggung jawab seluruh pihak memainkan peranan penting untuk mengentaskan kemiskinan yang dianggap dapat mengembangkan strategi pengembangan ekonomi lokal, meningkatkan pendapatan dan membangun ketahanan masyarakat terhadap potensi-potensi bencana. Agar pembangunan berkelanjutan dapat dicapai, maka penting untuk menyelaraskan tiga pilar inti SDGs yakni pertumbuhan ekonomi, inklusi sosial dan perlindungan lingkungan hidup. Pilar-pilar ini saling terkait dan ketiganya amat penting untuk kesejahteraan masyarakat, tentu perlu juga bertindak secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan saat ini namun tidak mengorbankan kemampuan generasi masa mendatang untuk memenuhi kebutuhannya.

Mengingat bahwa potret ketimpangan, kemiskinan, dan ketidakadilan masih menjadi masalah klasik yang mendera bangsa ini. Hal inilah yang menjadi tantangan bagaimana merubah paradigma pembangunan yang memiliki tujuan untuk memakmurkan seluruh masyarakat, tanpa mengorbankan lingkungan hidup yang merupakan tempat kita semua hidup (Mubarok dan Afrizal, 2018). Melalui pengukuran kualitas hidup dan keberlanjutan lingkungan hidup, maka kita akan mendapatkan gambaran utuh mengenai ukuran-ukuran pertumbuhan dan kesejahteraan yang terjadi di masyarakat. Kesejahteraan yang hakiki mustahil akan pernah terealisasi tanpa adanya keadilan (Sakirman, 2016). Oleh karena itu, perlu untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat yang selaras dengan ajaran agama Islam. Hal ini selaras dengan 17 poin *The Global Goals* SDGs yang pada dasarnya mengusung perdamaian dan keadilan sehingga tercipta kesejahteraan umum (Firdaus, 2018).

E. Membangun SDGs dengan Penguatan *Maqashid Al-Syariah*

Program SDGs yang baru muncul dalam beberapa tahun terakhir merupakan agenda baru mengenai konsep pembangunan ekonomi dan keterkaitannya dengan lingkungan dalam konteks pembangunan yang berkelanjutan. Dewasa ini, masalah pembangunan berkelanjutan telah dijadikan sebagai sebuah isu penting yang dicanangkan oleh PBB. Indonesia sebagai negara berkembang menghadapi banyak permasalahan dan tantangan, baik itu dalam aspek sosial, budaya, ketahanan dan keamanan, pendidikan, penegakan hukum, kesehatan, dan lainnya. Tantangan-tantangan yang ada adalah satu bukti bahwa perkembangan internasional semakin cepat dan memberikan dampak yang signifikan bagi perkembangan nasional. Salah satu tantangannya juga adalah bagaimana mewujudkan tujuan di era pembangunan berkelanjutan atau SDGs, yang mencakup segala aspek berbangsa dan bernegara.

Olehnya itu, pendekatan SDGs ini dinilai lebih luas dan global yang didasarkan pada agenda pembangunan berkelanjutan yang memberikan akses keadilan bagi semua dan memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global (Ramdani dan Rahmawati, 2017). Mengingat tingkat kerusakan lingkungan dianggap sebagai masalah yang krusial pun meningkatkan risiko yang besar dan dinilai dapat mengancam kehidupan manusia. Sasaran pembangunan mencakup upaya untuk memperbaiki kehancuran lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial. Salah satu masalah yang sering dihadapi dalam pembangunan ekonomi yang berbasis sumber daya alam pun terkadang mengabaikan bahkan tidak memperhatikan aspek kelestarian lingkungan. Kerusakan ini pada umumnya disebabkan oleh aktivitas manusia yang tidak ramah lingkungan seperti perusakan hutan dan alih fungsi hutan, pertambangan, pencemaran udara, air, dan tanah. Pembangunan berkelanjutan penting untuk diketahui untuk memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan saat ini tidak mengintervensi kesempatan generasi di masa depan dalam menggunakan sumber daya.

Secara keseluruhan setidaknya perlu penyelarasan dan pengintegrasian agenda SDGs yang tertuang dalam 17 *global*

goals dengan 169 target dan menciptakan sinergi dan saling melengkapi agenda internasional serta membangun kerangka kerja yang memungkinkan kemitraan abadi, melalui partisipasi, transparansi dan akuntabilitas. Keadaan seperti ini memang perlu ditunjang dengan tiga pilar penting yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan yang harus dijalankan secara terintegrasi. *syariah* diturunkan untuk dilaksanakan sesuai dengan *maqashid*-nya agar kehidupan yang adil dapat ditegakkan dan kesejahteraan sosial dapat diwujudkan. Lebih lanjut, pemahaman tentang pembangunan berkelanjutan tidak diartikan secara sempit sebagai perlindungan lingkungan tetapi lebih kepada pengintegrasian antara ekonomi, sosial dan lingkungan alam. Olehnya itu, melalui *maqashid al-syariah* diharapkan dapat memenuhi tantangan global yang mana semua pihak turut bertanggungjawab demi mencapai kesejahteraan, keadilan dan sustainability dalam agenda pembangunan untuk mencapai nilai-nilai kemaslahatan yang diharapkan secara universal.

F. *Maqashid al-Syariah* sebagai Jembatan Tiga Pilar Utama SDGs

Keberadaan *maqashid al-syariah* perlu menjadi motor penggerak pemenuhan tiga pilar penting yang termaktub dalam program pembangunan berkelanjutan. *Pertama*, terkait aspek ekonomi yang merupakan pilar utama dalam SDGs yang berorientasi pada pemerataan ekonomi berkelanjutan yang bersifat kompleks untuk mencapai keseimbangan distribusi kesejahteraan. Pembangunan berkelanjutan jelas mensyaratkan pertumbuhan ekonomi yang kebutuhan utamanya konsisten dengan peningkatan kualitas ekonomi. Meskipun pemerataan bukanlah hal yang secara langsung dapat dicapai, asalkan isi pertumbuhan mencerminkan prinsip-prinsip keberlanjutan. Akan tetapi, pada kenyataannya aktivitas produksi yang tinggi dapat saja terjadi bersamaan dengan kemelaratan yang tersebar luas. Oleh karena itu, aktivitas ekonomi semestinya tidak diarahkan pada kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan semata yang akhirnya dapat berpengaruh terhadap keberlangsungan hidup. Alasan dari sisi ekonomi memang terjadi perdebatan karena tidak diketahui apakah aktivitas ekonomi selama ini bernilai tambah atau belum memenuhi kriteria

keberlanjutan yang cukup kompleks, sehingga seringkali aspek keberlanjutan dari sisi ekonomi mendapat sorotan yang berimplikasi pada aspek lingkungan dan sosial.

Kedua, pilar lingkungan yang eksistensinya kini juga menjadi perhatian dunia bahkan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) telah dicapai kesepakatan terkait hubungan antara masalah lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Lingkungan dikatakan sebagai masalah dikarenakan dalam pembangunan yang dilakukan seringkali tidak memperhatikan dampak yang ditimbulkan dari pembangunan tersebut. Tak bisa dipungkiri pula hal ini masih sulit untuk diatasi. Semestinya dalam setiap pembangunan yang dilakukan meskipun aktivitas yang dilakukan itu berdampak baik namun tak seharusnya membuat kerusakan lingkungan. *Ketiga*, pilar sosial yang merupakan penunjang untuk pembangunan ekonomi juga bertujuan untuk mengakhiri kemiskinan dalam bentuk apapun itu. Posisi dan peranan aspek sosial dalam pembangunan nasional pada dasarnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menurunkan tingkat kemiskinan. Hal ini dikarenakan pengentasan kemiskinan dalam semua bentuk dan dimensinya adalah sebuah persyaratan yang sangat diperlukan untuk pembangunan berkelanjutan.

Melihat kondisi yang telah dideskripsikan, menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi berdampak kepada sosial dan lingkungan. Sebagaimana Ngoyo (2015) mengutarakan bahwa sumbangan ketimpangan ekonomi dan cara pandang pembangunan yang sangat dominan terhadap lingkungan alam menyumbangkan kerugian bagi degradasi kualitas lingkungan. Agama Islam menganjurkan untuk menjunjung tinggi kepedulian sosial, disamping itu tidak mengabaikan aspek lingkungan yang ada. Sebagaimana dijelaskan dalam surah al-A'raf ayat 56 yang artinya *"Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah Allah memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan harapan, sesungguhnya Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik"*. Program SDGs pun dirancang pada dasarnya memiliki tujuan bagaimana memasalahkan secara universal. Hal ini mengindikasikan bahwa penempatan masalah sebagai prinsip utama, dikarenakan *masalah* merupakan konsep yang sangat penting dalam syariah (Sakirman, 2016). Melihat apa

yang telah terjadi, *maqashid al-syariah* yang merupakan landasan kuat untuk mencapai kemaslahatan yang merupakan esensi dari kebijakan-kebijakan syariah (*siyasah syar'iiyyah*) dalam merespon dinamika sosial, lingkungan, dan ekonomi dalam pengembangan program pembangunan berkelanjutan.

G. Simpulan

Inti dari *maqashid al-syariah* sebenarnya adalah untuk mencapai kemaslahatan umat manusia di muka bumi. Konsep *maqashid al-syariah* sangat relevan digunakan untuk meninjau kemaslahatan yang mengacu kepada pemeliharaan terhadap lima hal: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kelima elemen tersebut harus ditegakkan untuk menjamin terciptanya kehidupan yang layak. Begitupun dengan agenda SDGs yang mengharapkan terciptanya kemaslahatan global. Pencapaian kemaslahatan bagi umat manusia dan menghindari kemudharatan adalah salah satu tujuan disyariatkan hukum di muka bumi. *Maqashid al-syariah* dijadikan sebagai pijakan untuk mencapai kemaslahatan tersebut. Penekanan pada *maqashid al-syariah* menunjukkan bahwa hukum-hukum Allah mengandung kemaslahatan. Menciptakan kemaslahatan bagi umat manusia dan mencegah adanya kemudharatan menjadi dasar dalam perwujudan kehidupan yang sejahtera. Ketidaktercapaian kemaslahatan akan menimbulkan kerusakan pada lingkungan yang berimbas pada kelangsungan hidup masyarakat.

Pengintegrasian tiga pilar utama dalam SDGs mencapai kemaslahatan global harus didukung dengan konsep *maqashid al-syariah* untuk menjamin terealisasinya program pembangunan berkelanjutan skala global. Pembahasan *maqashid al-syariah* menempati posisi yang signifikan dalam menghadapi tantangan global yang harus diatasi. *Maqashid al-syariah* diharapkan dapat memenuhi tantangan global yang mana semua pihak turut bertanggungjawab demi mencapai kesejahteraan, keadilan dan sustainability dalam agenda pembangunan untuk mencapai nilai-nilai kemaslahatan yang diharapkan secara universal. Sudah saatnya eksistensi *maqashid al-syariah* dikembangkan dan diperluas dengan mempertimbangkan lingkup global untuk pemenuhan aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial serta mengakomodir dan menyesuaikan dengan SDGs yang telah dirumuskan oleh 192 negara di dunia.

Daftar Pustaka

- Adriyani, A. 2017. Studi Ecodevelopment: Kontekstualisasi Pembangunan Berkelanjutan dalam “Pasang” oleh Komunitas Adat Ammatoa. *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis*, 2(1): 9-15.
- Asri, S. 2017. Etika dalam Pembangunan Internasional. *Andalas Journal of International Studies*, 6(1):40-54.
- Bahsoan, A. 2011. Mashlahah sebagai Maqashid Al-Syariah. *Inovasi*, 8(1): 113-120.
- Burhani, D. I. 2013. Akuntansi Manajemen Lingkungan, Alat Bantu untuk Meningkatkan Kinerja Lingkungan dalam Pembangunan Berkelanjutan. *Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 17(3): 279-298.
- Chik, W. M. Y. W., E. M. T. E. Ali., S. M. A. S. A. Rahman, dan A. A. M. Zabudin. Filatropi: Satu Sorotan dari Sudut Hukum Taklifi. *Asian People Journal*, 1(1): 12-27.
- Firdaus, M. A. 2018. Maqashid Al-Syari’ah: Kajian Mashlahah Pendidikan dalam Konteks UN Sustainable Development Goals. *JRTIE: Journal of Research and Thought of Islamic Education*, 1(1):73-95.
- Ishartono. dan S. T. Raharjo. 2016. Sustainable Development Goals (SDGs) dan Pengentasan Kemiskinan. *SHARE: Social Work Jurnal*, 6(2): 154-272.
- Ludoni, S., I. Noor, dan L. Hakim. 2016. Perencanaan Program-Program Pengentasan Kemiskinan dalam Pencapaian Target MDGs Tahun 2015 di Kota Batu. *Reformasi*, 6(1): 1-14.
- Mubarok, S. dan M. Afrizal. 2018. Islam dan Sustainable Development: Studi Kasus Menjaga Lingkungan dan Ekonomi Berkeadilan. *Dauliyah*, 3(1): 129-146.
- Mujtahidah, H. 2017. Analisis Manfaat (*Maslahat*) BMT Ditinjau dari Persepsi Pengusaha Mikro (Studi Kasus BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik). *IQTISHODIA*, 2(1): 37-50.

- Mutakin, A. 2017. Teori Maqashid Al-Syari'ah dan Hubungannya dengan Metode Istimbath Hukum. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 19(3): 547-570.
- Ngoyo, M. F. 2015. Mengawal Sustainable Development Goals (SDGs); Meluruskan Orientasi Pembangunan yang Berkeadilan. *Sosioreligius*, 1(1): 77-87.
- Purbasari, I. 2015. Pengelolaan Zakat oleh Badan dan Lembaga Amil Zakat di Surabaya dan Gresik. *Mimbar Hukum*, 27(1): 68-81.
- Ramadhan, M. I. B., A. Abdurahim, dan H. Sofyani. 2018. Modal Intelektual dan Kinerja Maqashid Syariah Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 6(1): 5-18.
- Ramdani. dan S. N. Rahmawati. 2017. Implementasi Manajemen Pertahanan Menggunakan Skema SDGs (Sustainability Development Goals). *Management Analysis Journal*, 6(3): 1-4.
- Ridha, A. 2015. Analisa Implementasi Kebijakan Pemerintah (Kementerian Perdagangan) dalam Mensukseskan Agenda Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia. *Jurnal Pusdiklat Perdagangan*, 1(1): 67-78.
- Sachs, J. D. 2012. From Millennium Development Goals to Sustainable Development Goals. *Lancet*, 379(1): 2026-2211.
- Sakirman. 2016. Urgensi Masalah dalam Konsep Ekonomi Syariah, *PALITA: Journal of Social-Religi Research*, 1(1): 17-28.
- Sari, D. A., S. Susanti, A. Mutaallimah, dan C. Rohmah. 2018. SDG's dan Peranan Perguruan Tinggi Menciptakan Sosial Entrepreneur pada Mahasiswa. *Buletin Bisnis & Manajemen*, 4(1): 41-47.
- Segara, N. B. 2015. Education for Sustainable Development (ESD) Sebuah Upaya Mewujudkan Kelestarian Lingkungan. *Journal Sosio-Didaktika Social Science Education*, 2(1): 22-30.

- Sitorus, M. A. 2017. Integrasi Pendidikan Kependudukan kedalam Kurikulum dalam Rangka Pencapaian Target Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Tahunan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan*, 1(1): 20-24.
- Surya, R. Z. 2018. Pemetaan Keselarasan Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) pada Rencana Pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir. *Jurnal BAPPEDA*, 4(1): 1-11.
- Umam, K. G. L. 2018. Smart Kandang Ayam Petelur Berbasis Internet of Things untuk mendukung SDGs 2030 (Sustainable Development Goals). *Jurnal TEKNOINFO*, 12(2): 43-48.
- Ustama, D.D. 2009. Peranan Pendidikan dalam Pengentasan Kemiskinan. *Dialogue Jurnal Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik*, 6(1): 1-12.
- Wahyuningsih. 2017. Millenium Development Goals (MDGs) dan Sustainable Development Goals (SDGs) dalam Kesejahteraan Sosial. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 11(3): 390-399.

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Muhammad Wahyuddin Abdullah, lahir di Pangkajene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, 25 Mei 1973. Pendidikan S.D. sampai SMA ditempuh di kota Pangkajene dan Kepulauan Sulawesi Selatan dan lulus SMA tahun 1991, lulus studi S1 di Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta tahun 1996, Studi S2 di Program Magister Sains Akuntansi Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang tahun 2003, Program Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk) di Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Brawijaya (UNIBRAW) Malang tahun 2004, dan Program Doktor Ilmu Akuntansi di Pascasarjana Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya (UNIBRAW) Malang tahun 2009. Menyandang penghargaan Lulusan Terbaik dan Cumlaude pada Pascasarjana UNDIP Semarang tahun 2003, lulusan Cumlaude pada Fakultas Ekonomi Pendidikan Profesi Akuntansi UNIBRAW Malang tahun 2004, dan lulusan Cumlaude Pascasarjana Fakultas Ekonomi UNIBRAW Malang tahun 2009. Chartered Accountant (CA) diperoleh dari IAI tahun 2014. Tugas pokok sebagai Tenaga Pengajar pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Alauddin Makassar. Tahun 2017–2019 menjabat sebagai Ketua Program Studi Magister Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN Alauddin. Tahun 2019–Sekarang menjabat sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin. Aktif publikasi karya ilmiah bidang akuntansi dan ekonomi syariah. Buku yang sudah ditulis diantaranya: 1) Akuntansi Pengantar 1; 2) Persistensi Laba dan Arus Kas Mendatang; 3) Sensitivitas Etika Praktik Manajemen Laba; 4) Akuntansi Keuangan Adaptasi IFRS Jilid 1.



Penerbit
Pusaka Almada

ISBN 978-623-226-157-0



9 786232 261570